



PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

BUKU I

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

*Handwritten signature/initials*

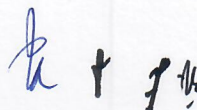


12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);





20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);





27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023.

## Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.

## Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

## Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  1. BAB I : PENDAHULUAN;
  2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  3. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
  7. BAB VII : PENUTUP.
- b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Daftar Usulan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023; dan





- c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

#### Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI KUDUS,  
  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 27

 4 1 18



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-9

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1.1. Geografi .....	II-1
2.1.1.2. Demografi .....	II-6
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-7
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	II-7
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB .....	II-7
2.2.1.2. Laju Inflasi .....	II-13
2.2.1.3. PDRB Perkapita.....	II-14
2.2.1.4. Indeks Gini.....	II-15
2.2.1.5. Kemiskinan .....	II-17
2.2.1.6. Kriminalitas .....	II-19
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-23
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia .....	II-23
2.2.2.2. Harapan Lama Sekolah .....	II-24
2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah .....	II-25
2.2.2.4. Usia Harapan Hidup Saat Lahir .....	II-26
2.2.2.5. Pengeluaran Per Kapita .....	II-26
2.2.2.6. Kesempatan Kerja .....	II-28
2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga .....	II-30
2.2.4. Sakip dan Reformasi Birokrasi.....	II-31
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-33
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-33
2.3.1.1. Pendidikan .....	II-33
2.3.1.2. Kesehatan .....	II-40
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-45
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-49
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-51
2.3.1.6. Bidang Sosial .....	II-58
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	II-61
2.3.2.1. Bidang Tenaga Kerja.....	II-61
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-68
2.3.2.3. Pangan.....	II-73
2.3.2.4. Pertanahan.....	II-77



2.3.2.5. Lingkungan Hidup.....	II-77
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan .....	II-78
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-85
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-89
2.3.2.9. Perhubungan .....	II-90
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika .....	II-91
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .....	II-95
2.3.2.12. Penanaman Modal.....	II-99
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga .....	II-110
2.3.2.14. Statistik .....	II-111
2.3.2.15. Persandian .....	II-113
2.3.2.16. Kebudayaan .....	II-114
2.3.2.17. Perpustakaan .....	II-116
2.3.2.18. Kearsipan.....	II-117
2.3.3. Urusan Pilihan .....	II-118
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan .....	II-118
2.3.3.2. Pariwisata .....	II-120
2.3.3.3. Pertanian .....	II-124
2.3.3.4. Kehutanan .....	II-128
2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral .....	II-129
2.3.3.6. Perdagangan .....	II-131
2.3.3.7. Perindustrian .....	II-133
2.3.3.8. Transmigrasi .....	II-136
2.3.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-137
2.3.4.1. Sekretariat Daerah .....	II-137
2.3.4.2. Sekretariat DPRD .....	II-139
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-140
2.3.5.1. Perencanaan .....	II-140
2.3.5.2. Keuangan.....	II-141
2.3.5.3. Kepegawaian .....	II-152
2.3.5.4. Pendidikan dan Pelatihan.....	II-154
2.3.5.5. Penelitian dan Pengembangan .....	II-154
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	II-157
2.3.6.1. Inspektorat.....	II-157
2.3.7. Unsur Kewilayahan .....	II-159
2.3.7.1. Kecamatan .....	II-159
2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum .....	II-161
2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-161
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-163
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-163
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-164
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-166
2.4.3.1. Angka Kriminalitas .....	II-166
2.4.3.2. Unjuk Rasa .....	II-168
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-168
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD .....	II-169
2.5.1. Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II-169
2.5.1.1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	II-169



2.5.1.2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	II-169
2.5.1.3. Teknik Analisis .....	II-169
2.5.2. Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama .....	II-171
2.5.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-174
2.5.4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing.....	II-175
2.5.5. Rangkuman Evaluasi Kinerja Pembangunan .....	II-217
2.5.5.1. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2021 .....	II-217
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-218
2.6.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-218
2.6.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	II-220
2.6.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II-227
2.6.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-227
2.6.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-228
2.6.6. Unsur Kewilayahan .....	II-228
2.6.7. Unsur Pemerintahan Umum .....	II-229
2.7. Isu Strategis.....	II-229
2.7.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah .....	II-229
2.7.2 Isu Pemulihan Dampak Covid-19.....	II-234

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional .....	III-1
3.1.2. Kondisi Ekonomi Jawa Tengah .....	III-3
3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus .....	III-5
3.1.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2023.....	III-8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-13
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-20
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-28

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah .....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	IV-9
4.3. Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus .....	IV-15
4.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	IV-21
4.5. Arah Pengembangan Kebijakan Bidang Urusan.....	IV-23
4.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan.....	IV-53

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023 .....	V-1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 .....	V-2
5.2.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	V-2
5.2.1.1 Pendidikan .....	V-2
5.2.1.2 Kesehatan .....	V-10



5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	V-20
5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	V-27
5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	V-30
5.2.1.6 Sosial .....	V-35
5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	V-39
5.2.2.1 Tenaga Kerja .....	V-39
5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	V-43
5.2.2.3 Pangan.....	V-47
5.2.2.4 Pertanahan .....	V-50
5.2.2.5 Lingkungan Hidup .....	V-52
5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	V-58
5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	V-61
5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	V-66
5.2.2.9 Perhubungan .....	V-69
5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika .....	V-72
5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	V-75
5.2.2.12 Penanaman Modal.....	V-78
5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga .....	V-82
5.2.2.14 Statistik .....	V-86
5.2.2.15 Persandian .....	V-88
5.2.2.16 Kebudayaan .....	V-90
5.2.2.17 Perpustakaan .....	V-93
5.2.2.18 Kearsipan.....	V-95
5.2.3 Urusan Pilihan .....	V-97
5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan .....	V-97
5.2.3.2 Pariwisata .....	V-99
5.2.3.3 Pertanian .....	V-102
5.2.3.4 Kehutanan .....	V-106
5.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral.....	V-108
5.2.3.6 Perdagangan .....	V-110
5.2.3.7 Perindustrian .....	V-115
5.2.3.8 Transmigrasi .....	V-118
5.2.4 Unsur Pendukung .....	V-120
5.2.4.1 Sekretariat Daerah .....	V-120
5.2.4.2 Sekretariat DPRD .....	V-127
5.2.5 Unsur Penunjang .....	V-131
5.2.5.1 Perencanaan .....	V-131
5.2.5.2 Keuangan.....	V-134
5.2.5.3 Kepegawaian .....	V-140
5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan.....	V-143
5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan .....	V-146
5.2.6 Unsur Pengawasan.....	V-148
5.2.6.1 Inspektorat.....	V-148
5.2.7 Unsur Kewilayahan .....	V-151
5.2.7.1 Kecamatan .....	V-151
5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum .....	V-155
5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik.....	V-155



5.3 RENCANA KERJA PEMULIHAN COVID-19 TAHUN 2023 ..... V-164

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah ..... VI-1

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... VI-3

**BAB VII PENUTUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Curah Hujan Tahun 2020 dan 2021 (dalam mm) .....	II-4
Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2021 .....	II-5
Tabel 2.3 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021.....	II-6
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2021.....	II-6
Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah).....	II-7
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah).....	II-8
Tabel 2.7 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 .....	II-9
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah) ...	II-10
Tabel 2.9 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota disekitar Kabupaten Kudus.....	II-12
Tabel 2.10 PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2020.....	II-14
Tabel 2.11 Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021.....	II-17
Tabel 2.12 Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2017 – 2021.....	II-18
Tabel 2.13 Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan 2021 .....	II-19
Tabel 2.14 Jumlah Tindak Kriminal di Kabupaten Kudus Tahun 2021.....	II-21
Tabel 2.15 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2021 .....	II-24
Tabel 2.16 Pengeluaran Perkapita Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar .....	II-27
Tabel 2.17 Tingkat Pengangguran Kabupaten Kudus Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	II-30
Tabel 2.18 Indikator Kinerja Kunci Seni Budaya dan Olahraga .....	II-31
Tabel 2.19 Nilai SAKIP Kabupaten Kudus.....	II-31
Tabel 2.20 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2021.....	II-32
Tabel 2.21 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2017 – 2021.....	II-33
Tabel 2.22 Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Tahun 2021 .....	II-34
Tabel 2.23 Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Output Tahun 2021 .....	II-34
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .....	II-37
Tabel 2.25 Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan .....	II-40
Tabel 2.26 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2021....	II-40
Tabel 2.27 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan Posyandu Tahun 2021 .....	II-41
Tabel 2.28 Prevelensi Stunting Tahun 2021 .....	II-41
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan.....	II-42
Tabel 2.30 Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 .....	II-44
Tabel 2.31 Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021 .....	II-45
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-46
Tabel 2.33 Status Cakupan Air Minum dan Sanitasi .....	II-47
Tabel 2.34 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Bangunan.....	II-48



Tabel 2.35 Target Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 .....	II-49
Tabel 2.36 Jumlah dan Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2021 .....	II-49
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-50
Tabel 2.38 Target dan Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 .....	II-51
Tabel 2.39 Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2021 .....	II-51
Tabel 2.40 Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Output Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2021 .....	II-53
Tabel 2.41 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 .....	II-55
Tabel 2.42 Hasil Kajian Kapasitas Daerah di Kabupaten Kudus .....	II-55
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-56
Tabel 2.44 Target dan Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	II-57
Tabel 2.45 Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020 - 2021 .....	II-58
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Sosial .....	II-59
Tabel 2.47 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial.....	II-61
Tabel 2.48 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2017 - 2021 .....	II-61
Tabel 2.49 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2020 .....	II-62
Tabel 2.50 Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021 .....	II-63
Tabel 2.51 Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Output Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021.....	II-64
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	II-67
Tabel 2.53 Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD, Persentase Partisipasi Perempuan dan Jumlah Perempuan Bekerja Tahun 2017 - 2021.....	II-68
Tabel 2.54 Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2017-2021 .....	II-68
Tabel 2.55 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Tahun 2017 - 2021 .....	II-69
Tabel 2.56 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2017 - 2021.....	II-70
Tabel 2.57 Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2017 - 2021 .....	II-70
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-72
Tabel 2.59 Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama (Ton) Tahun 2017 - 2021 .....	II-73
Tabel 2.60 Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2017 - 2021.....	II-73
Tabel 2.61 Lumbung Pangan di Kabupaten Kudus Tahun 2021 .....	II-74
Tabel 2.62 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017 - 2021 .....	II-75
Tabel 2.63 Hasil Uji Laboratorium Produk Pangan Segar di Kabupaten Kudus Tahun 2021.....	II-75
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Pangan .....	II-76
Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan.....	II-77
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	II-77
Tabel 2.67 Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Cakupan Kepemilikan KTP) Tahun 2019 - 2021.....	II-79
Tabel 2.68 Jumlah Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021.....	II-79
Tabel 2.69 Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021.....	II-80

Tabel 2.70 Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021 .....	II-80
Tabel 2.71 Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran dan Akta Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021 .....	II-81
Tabel 2.72 Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus tahun 2019 - 2021 .....	II-82
Tabel 2.73 Kinerja Pelayanan Penanganan Pengaduan Administrasi Kependudukan Tahun 2019 - 2021 .....	II-82
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-83
Tabel 2.75 Kelembagaan Desa Tahun 2017 - 2021 .....	II-85
Tabel 2.76 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2017 - 2021 .....	II-85
Tabel 2.77 Jumlah Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pasar Desa tahun 2017 - 2021 .....	II-85
Tabel 2.78 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus tahun 2020 - 2021 .....	II-86
Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	II-87
Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB dan TFR tahun 2017 - 2021 .....	II-89
Tabel 2.81 Metode Kontrasepsi KB tahun 2019 - 2021 .....	II-89
Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-90
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan.....	II-90
Tabel 2.84 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan .....	II-92
Tabel 2.85 Persentase PD Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki Website dan meng-update Data di Website tahun 2017 - 2021 .....	II-92
Tabel 2.86 Persentase Pemohon Memperoleh Informasi Publik tahun 2017 - 2021 .....	II-92
Tabel 2.87 Implementasi e-Government tahun 2017 - 2021 .....	II-93
Tabel 2.88 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....	II-94
Tabel 2.89 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-95
Tabel 2.90 Jumlah Koperasi tahun 2017 – 2021 Kabupaten Kudus.....	II-95
Tabel 2.91 Usaha Mikro, Kecil, Menengah tahun 2017 - 2021 .....	II-96
Tabel 2.92 Jumlah UMKM Menurut Kecamatan tahun 2017 - 2021 .....	II-97
Tabel 2.93 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM tahun 2017 - 2021 .....	II-98
Tabel 2.94 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM .....	II-98
Tabel 2.95 Perkembangan Investasi tahun 2017 – 2021 (dalam juta rupiah) .....	II-99
Tabel 2.96 Jumlah PMA dan PMDN berskala Nasional tahun 2017 - 2021 .	II-100
Tabel 2.97 Target dan Realisasi Investasi tahun 2017 - 2021 .....	II-100
Tabel 2.98 Investor PMA tahun 2017 - 2021 .....	II-101
Tabel 2.99 Jumlah Permohonan dan Penerbitan Izin tahun 2017 - 2021....	II-101
Tabel 2.100 Jumlah Izin Terbit tahun 2020 dan 2021 .....	II-104
Tabel 2.101 Indikator Kinerja Program, Target dan Realisasi tahun 2021 ...	II-108
Tabel 2.102 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal .....	II-109
Tabel 2.103 Elemen data dan Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 .....	II-110
Tabel 2.104 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-111
Tabel 2.105 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik tahun 2017 - 2021 .....	II-112
Tabel 2.106 Dokumentasi Statistik Sektoral.....	II-112
Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	II-112



Tabel 2.108 Indikator Kinerja Persandian tahun 2017 - 2021.....	II-113
Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Persandian .....	II-114
Tabel 2.110 Elemen Data dan Capaian Kinerja Output .....	II-114
Tabel 2.111 Elemen dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .....	II-116
Tabel 2.112 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	II-116
Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	II-117
Tabel 2.114 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan .....	II-117
Tabel 2.115 Produksi Perikanan Tahun 2017-2021 .....	II-118
Tabel 2.116 Angka Konsumsi Makan Ikan Kabupaten Kudus Tahun 2017- 2021 .....	II-119
Tabel 2.117 Kontribusi Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 .....	II-119
Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan .....	II-119
Tabel 2.119 Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2017-2021 .....	II-120
Tabel 2.120 Perkembangan Kunjungan Wisata Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 .....	II-121
Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata.....	II-123
Tabel 2.122 Desa Wisata Di Kabupaten Kudus.....	II-123
Tabel 2.123 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton) tahun 2017 – 2021 .....	II-125
Tabel 2.124 Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tebu tahun 2017 – 2021 .....	II-125
Tabel 2.125 Jumlah Ternak tahun 2017 – 2021 .....	II-126
Tabel 2.126 Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Kudus tahun 2017 – 2021 .....	II-126
Tabel 2.127 Peranan Subkategori terhadap Nilai tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Kabupaten Kudus (persen) tahun 2017 – 2021 .....	II-126
Tabel 2.128 Data Penyuluh Pertanian tahun 2020 – 2021 .....	II-127
Tabel 2.129 Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	II-128
Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan.....	II-129
Tabel 2.131 Target Kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral tahun 2021.....	II-130
Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan ESDM.....	II-130
Tabel 2.133 Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL tahun 2017 – 2021 .....	II-131
Tabel 2.134 Data Toko Swalayan tahun 2021 Kabupaten Kudus.....	II-131
Tabel 2.135 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	II-132
Tabel 2.136 Jumlah Perusahaan Industri tahun 2017 – 2021 .....	II-133
Tabel 2.137 Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan Industri tahun 2017 – 2021 .....	II-134
Tabel 2.138 Jumlah Nilai Produksi pada Perusahaan Industri tahun 2017 – 2021 .....	II-135
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	II-136
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi.....	II-136
Tabel 2.141 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah.....	II-137
Tabel 2.142 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD .....	II-140
Tabel 2.143 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan.....	II-141
Tabel 2.144 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus 2017 – 2021 .....	II-142
Tabel 2.145 Kontribusi Masing-masing Sumber Pendapatan Daerah .....	II-143
Tabel 2.146 Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2017 – 2021 (dalam ribuan rupiah) .....	II-146
Tabel 2.147 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 – 2021 .....	II-147
Tabel 2.148 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Kudus 2017 - 2022.....	II-148

Tabel 2.149 Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset tetap).....	II-150
Tabel 2.150 Data Aset Tetap Tanah tahun 2017 – 2021 .....	II-150
Tabel 2.151 Indikator Keuangan Tahun 2017 – 2021 .....	II-151
Tabel 2.152 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kudus tahun 2017 – 2021 .....	II-151
Tabel 2.153 Indikator Kinerja Kunci Output Manajemen Keuangan tahun 2020 – 2021 .....	II-151
Tabel 2.154 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan.....	II-152
Tabel 2.155 Indikator Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian .....	II-153
Tabel 2.156 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian .....	II-153
Tabel 2.157 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan..	II-154
Tabel 2.158 Produk Penelitian dan Pengembangan tahun 2021.....	II-155
Tabel 2.159 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan.....	II-156
Tabel 2.160 Capaian Kinerja Daya Saing Daerah dan Inovasi Daerah.....	II-156
Tabel 2.161 Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kudus.....	II-157
Tabel 2.162 Tabel Pembangunan Zona Integritas .....	II-157
Tabel 2.163 Elemen Quality Assurance.....	II-158
Tabel 2.164 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah.....	II-159
Tabel 2.165 Kecamatan pada Kabupaten Kudus Menurut Kewilayahan.....	II-159
Tabel 2.166 Kecamatan Menurut Luas Wilayah.....	II-160
Tabel 2.167 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan.....	II-160
Tabel 2.168 Potensi Konflik Sosial, Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal dan Potensi Konflik SARA.....	II-161
Tabel 2.169 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-161
Tabel 2.170 Struktur Pengeluaran Konsumsi akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus 2017 – 2021 (ADHB) (Persen).....	II-163
Tabel 2.171 Distribusi Persentase Prosum Domestik Regional Bruto ADHB 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Kudus, 2017 – 2021 (Persen).....	II-164
Tabel 2.172 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHB 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Kudus, 2017 – 2021 (Persen).....	II-164
Tabel 2.173 Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal yang diselesaikan dan Angka Kriminalitas tahun 2017 – 2021 .....	II-167
Tabel 2.174 Jumlah Unjuk Rasa Tahun 2017 – 2021 .....	II-168
Tabel 2.175 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2017 – 2021 .....	II-169
Tabel 2.176 Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah .....	II-170
Tabel 2.177 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 .....	II-172
Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-174
Tabel 2.179 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing .....	II-175
Tabel 2.180 Rekapitulasi Status Capaian Kinerja Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2021.....	II-176
Tabel 2.181 Rekapitulasi Predikat Kinerja terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2021 .....	II-179
Tabel 2.182 Rekapitulasi Capaian Indikator sampai dengan tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD tahun 2018 – 2023 .....	II-182
Tabel 2.183 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018 – 2023 .....	II-217



Tabel 2.184	Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional.....	II-230
Tabel 2.185	Perbandingan Kasus Covid-19 s.d 21 Maret 2022 .....	II-235
Tabel 2.186	Capaian Vaksinasi s.d 21 Maret 2022 .....	II-235
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 .....	III-4
Tabel 3.2	Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2023 .....	III-6
Tabel 3.3	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 – 2021 .....	III-10
Tabel 3.4	Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 – 2021 .....	III-16
Tabel 3.5	Perbandingan Pengelola PAD Berdasarkan Jenis Kelamin TA 2022 .....	III-17
Tabel 3.6	Perbandingan Pendapatan Daerah Dalam RKPD 2022 dan Proyeksi 2023 .....	III-18
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Tahun 2019 – 2021 .....	III-24
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Mengikat Wajib Tahun 2019 s/d 2021 .....	III-26
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Mengikat dan Wajib Tahun 2023 .....	III-27
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 .....	III-27
Tabel 3.11	Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2019 – 2021 .....	III-29
Tabel 3.12	Pembiayaan Daerah TA 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2023 .....	III-30
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023.....	III-30
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	IV-2
Tabel 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus .....	IV-6
Tabel 4.3	Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	IV-7
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	IV-12
Tabel 4.5	Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	IV-13
Tabel 4.6	Inovasi Kebijakan Pembangunan sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	IV-54
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Tahun 2023 .....	V-1
Tabel 5.2	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-4
Tabel 5.3	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-13
Tabel 5.4	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-22
Tabel 5.5	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-28
Tabel 5.6	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-31
Tabel 5.7	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Sosial pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-36
Tabel 5.8	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-40
Tabel 5.9	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-45

Tabel 5.10	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-48
Tabel 5.11	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-51
Tabel 5.12	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	V-54
Tabel 5.13	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-59
Tabel 5.14	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-63
Tabel 5.15	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-67
Tabel 5.16	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-70
Tabel 5.17	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-73
Tabel 5.18	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-76
Tabel 5.19	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	V-79
Tabel 5.20	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-84
Tabel 5.21	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Statistik pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-87
Tabel 5.22	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Persandian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-89
Tabel 5.23	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-91
Tabel 5.24	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-94
Tabel 5.25	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-96
Tabel 5.26	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-98
Tabel 5.27	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-100
Tabel 5.28	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pertanian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-103
Tabel 5.29	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-107
Tabel 5.30	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-109
Tabel 5.31	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-112
Tabel 5.32	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-116
Tabel 5.33	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-119
Tabel 5.34	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-121



Tabel 5.35	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-128
Tabel 5.36	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-132
Tabel 5.37	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Keuangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-135
Tabel 5.38	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-141
Tabel 5.39	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-144
Tabel 5.40	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	V-147
Tabel 5.41	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-149
Tabel 5.42	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Kewilayahan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-152
Tabel 5.43	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	V-156
Tabel 5.44	Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Penunjang pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-159
Tabel 5.45	Implementasi Program Unggulan Bupati Tahun 2023.....	V-162
Tabel 5.46	Identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI ( <i>Gender, Equality and Social Inclusion</i> ) atau Isu Strategis Kabupaten Kudus .....	V-163
Tabel 5.47	Prioritas Dukungan Urusan, Fokus Program dan Kegiatan Pembangunan Pasca Covid-19, Alokasi Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	V-167
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....	VI-4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	I-3
Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya .....	I-8
Gambar 2.1 Peta Kawasan Rencana Pola Ruang Wilayah .....	II-2
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 .....	II-11
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dengan Jateng dan Nasional .....	II-12
Gambar 2.4 Laju Inflasi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional ....	II-13
Gambar 2.5 Indeks Gini Tahun 2021 .....	II-16
Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2015-2021 (September) ....	II-16
Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan Nasional .....	II-18
Gambar 2.8 Angka Kriminalitas Tahun 2017 - 2021 .....	II-19
Gambar 2.9 IPM Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kudus.....	II-23
Gambar 2.10 Komponen IPM – Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 .....	II-24
Gambar 2.11 Komponen IPM – Rata-rata Lama Sekolah.....	II-25
Gambar 2.12 Komponen IPM – Usia Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2020 .....	II-26
Gambar 2.13 Komponen IPM - Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kudus .	II-27
Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja Nasional & Jateng Tahun 2015 - 2020 .....	II-29
Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 .....	II-29
Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sekitar Tahun 2017 - 2021 .....	II-30
Gambar 2.17 Persentase Stunting Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2021 .....	II-42
Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus, Jateng dan Nasional.....	II-71
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar .....	II-71
Gambar 2.20 Peta Lokasi Wisata Kabupaten Kudus .....	II-122
Gambar 2.21 Nilai IKM Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 .....	II-137
Gambar 2.22 Program Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 .....	II-140
Gambar 2.23 Peta Rencana Kawasan Strategis .....	II-165
Gambar 4.1 Arah Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Kudus .....	IV-16
Gambar 4.2 Arah Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Kudus .....	IV-21
Gambar 6.1 Struktur Penilaian SPBE .....	VI-3



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Sebagai bentuk penjabaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 disusun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD tahun 2023 Kabupaten Kudus didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, Proyek Strategis Nasional dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika lingkungan yang terjadi di antaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023 masih akan fokus pada upaya pertolongan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan target pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023, yaitu **‘Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas’**.

RKPD Tahun 2023 juga telah diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang

terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri 100 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut :

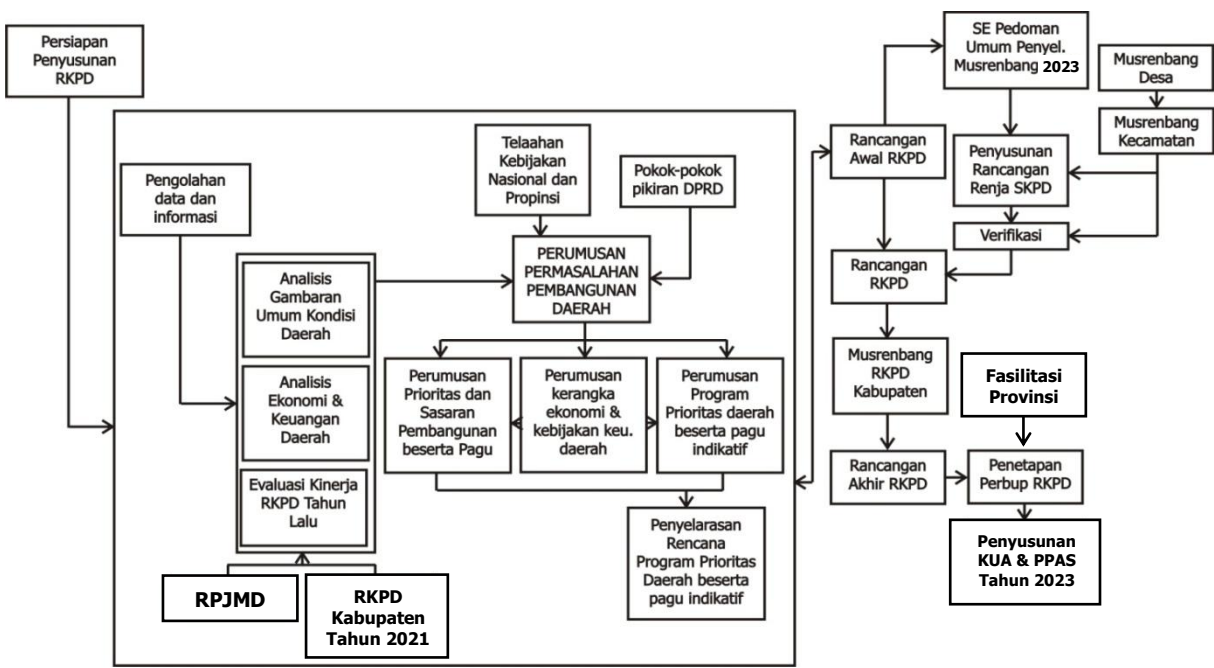
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun, dimana bertujuan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan

penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 22 November 2021 Nomor 050/2883/27.00/2021 perihal Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 menjadi dasar dalam perumusan Renja PD Tahun 2023, dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023. Rancangan tersebut selanjutnya dibahas dengan DPRD untuk disepakati bersama menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

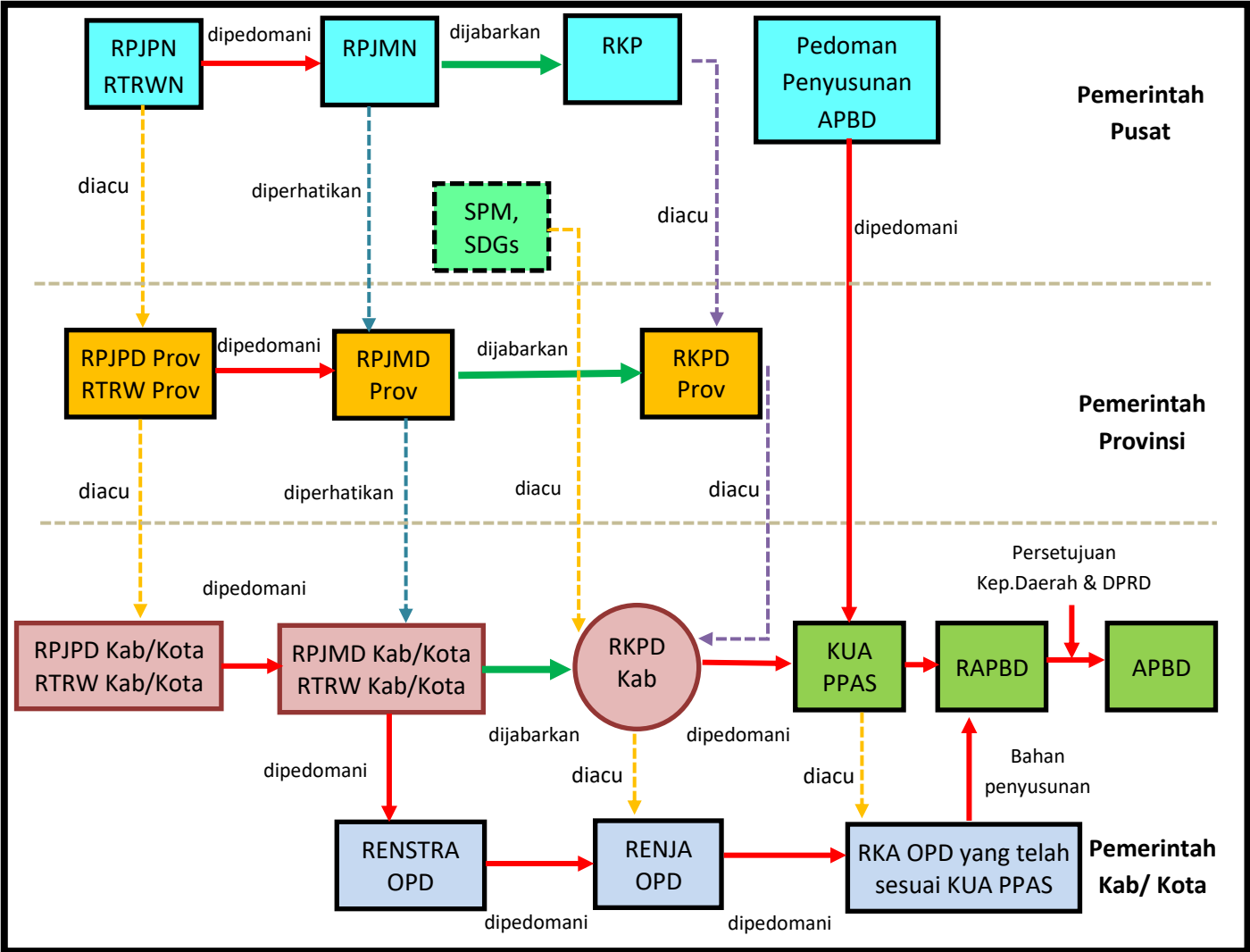
Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk sinkronisasi dan keselarasan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi.

RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2023.

Pada tingkat Perangkat Daerah, simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman

dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

#### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

###### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJP, RKP/program strategis nasional dan RKPD Provinsi.

###### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.



### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

## Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah dari kondisi geografi, demografi.

### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, Sakip dan Reformasi Birokrasi

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kinerja pengelolaan pemerintahan yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pelayanan pemerintahan umum.

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

### 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 Dan Realisasi RPJMD Kabupaten Kudus Sampai Dengan Tahun 2021

Mencakup telaahan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan evaluasi RPJMD.

### 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### 2.7 Isu Strategis

Mencakup identifikasi isu di tingkat Kabupaten terhadap Isu Regional dan Nasional serta permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis Kabupaten Kudus tahun 2023.

## Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2020, Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2023.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Mengemukakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah.

### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan fokus program penyesuaian arah kebijakan yang selaras dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2023.

### 4.3 Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Mengemukakan arah pengembangan Kabupaten Kudus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Andalan Wanarakuti di Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional.

### 4.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Mengemukakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2023.

### 4.5 Arah Pengembangan Kebijakan Bidang Urusan

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, sehingga selaras dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

### 4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Memuat inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikembangkan untuk mengakselerasikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kudus.

## Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

### 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Memuat kerangka pendanaan untuk tahun 2023 yang merupakan hasil analisis keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana pada RKPD Tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Implementasi Program Unggulan Bupati Tahun 2023 dan Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*).

## 5.3 Rencana Kerja Pemulihan Covid-19 Tahun 2023

Memuat rencana kerja, prioritas dukungan urusan, fokus program dan kegiatan pembangunan pasca Covid-19 beserta alokasi anggarannya.

# Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Memuat target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

## 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus.

# Bab VII Penutup

Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. KONDISI UMUM DAERAH**

##### **2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

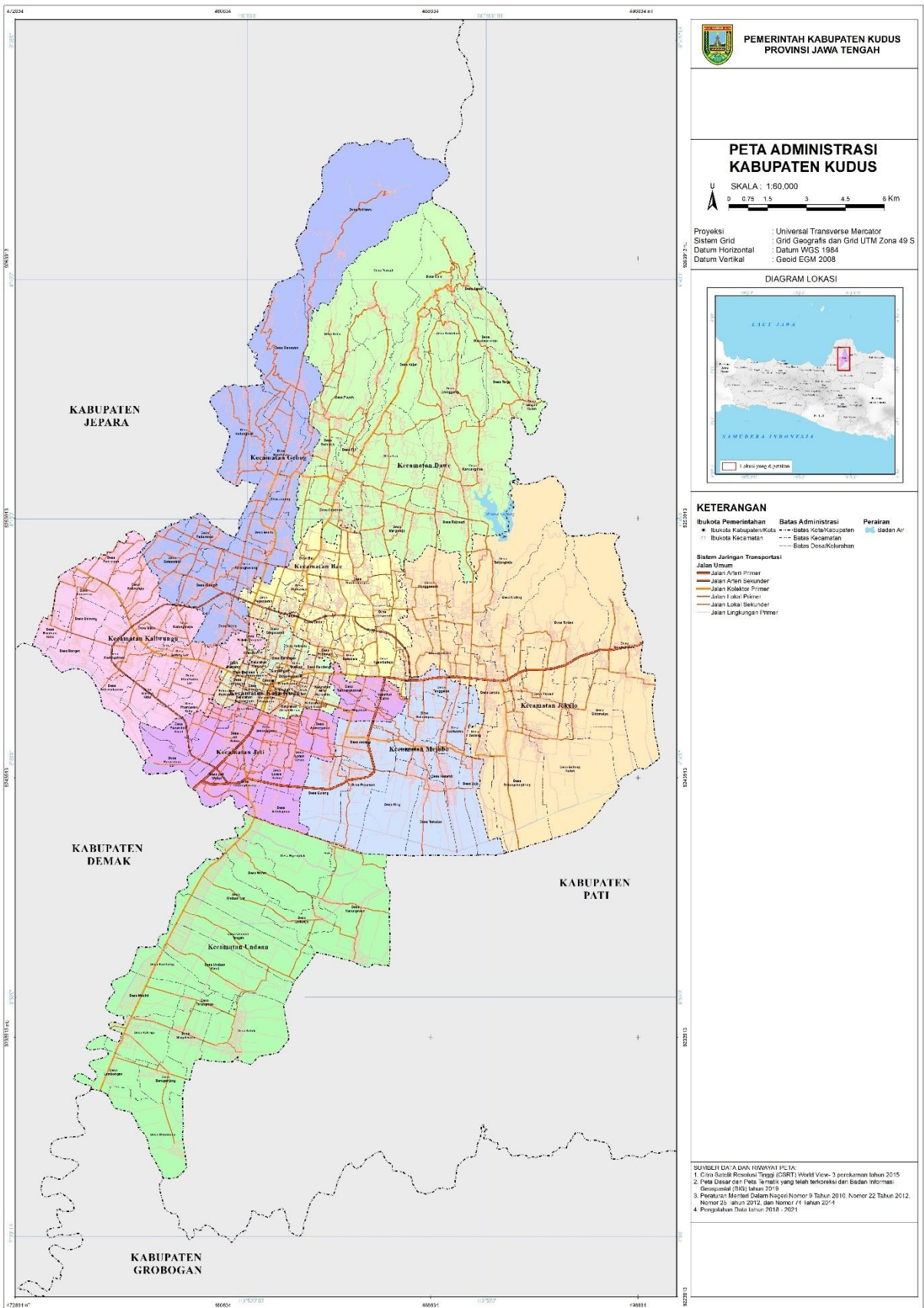
###### **2.1.1.1. GEOGRAFI**

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022, Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah sebesar 44.744 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan posisi astronomis, Kabupaten Kudus berada antara 7<sup>0</sup>1'13" sampai dengan 7<sup>0</sup>22'57" Lintang Selatan, dan antara 110<sup>0</sup>45'30" sampai dengan 110<sup>0</sup>58'37" Bujur Timur. Adapun secara posisi geostatis Kabupaten Kudus masuk dalam kawasan pesisir dan pegunungan, namun tidak terletak di tepi pantai dengan kondisi tanah datar 0° di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus, sampai dengan sangat curam ±40° untuk wilayah utara Kabupaten Kudus/ kawasan pegunungan Muria.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus menurut kecamatan yaitu 1) Kecamatan Kaliwungu dengan luas 3.419 Ha (7,64%); 2) Kecamatan Kota, luas 1.141 Ha (2,55%); 3) Kecamatan Jati, luas 2.732 Ha (6,11%); 4) Kecamatan Undaan, luas 7.457 (16,66%); 5) Mejobo, luas 3.737 Ha (8,35%); 6) Kecamatan Jekulo, luas 8.711 Ha (19,47%); 7) Kecamatan Bae, luas 2.406 Ha (5,38%); 8) Kecamatan Gebog, luas 6.038 Ha (13,49%) dan 9) Kecamatan Dawe, luas 9.103 Ha (20,34%) yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kudus. Berdasarkan letak, Kabupaten Kudus mempunyai posisi yang strategis dan sangat menguntungkan karena merupakan titik simpul yaitu dilalui Jalur Pantura dan merupakan jalur utama pergerakan distribusi barang /jasa dan manusia di sisi utara Pulau Jawa.

Adapun wilayah administrasinya berbatasan :

- Sebelah Utara Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati,
- Sebelah Timur Kabupaten Pati,
- Sebelah Selatan Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, dan
- Sebelah Barat Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042

Gambar 2.1 Peta Kawasan Rencana Pola Ruang Wilayah

## **Topografi**

Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari bentuk lahan asal vulkanik yaitu Gunungapi Muria. Ketinggian wilayah yang berkisar antara 5 - 1.600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut (KLHS Revisi Perda RTRW).

Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng, Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari lereng yang datar. Pembagian kelas berdasarkan kemiringan lereng yaitu sebagai berikut:

- (1) Kelerengan 0-8%. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae.
- (2) Kelerengan 8-15%. Berupa dataran koluvial dengan relief landai terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.
- (3) Kelerengan 15-25%. Memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian Timur.
- (4) Kelerengan 25-45%. Memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo.
- (5) Kelerengan >45%. Memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

## **Geologi**

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai daerah pantai, perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah struktur dan karakteristik jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :

- (1) Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe.
- (2) Jenis tanah grumosol mediteran. Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe.
- (3) Jenis tanah latosol merah tersebar di meliputi Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe.
- (4) Jenis tanah planosol coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Undaan, Kaliwungu dan Jekulo.
- (5) Jenis tanah latosol coklat, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Dawe.
- (6) Jenis tanah litosol grumosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Dawe.

- (7) Jenis tanah Mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, Dawe, Bae, Kota, Mejobo, Jati dan Kaliwungu.
- (8) Jenis tanah alluvial coklat, jenis tanah ini paling banyak dijumpai di Kecamatan jati, Undaan, Jekulo dan Kaliwungu.

**Hidrologi**

Air tanah merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi (*hidrologic cycle*), yakni siklus peredaran air di bumi, sehingga keberadaannya akan ditentukan oleh unsur – unsur lain yang terlibat dalam daur tersebut. Komponen yang berperan utama dalam daur hidrologi adalah curah hujan. Curah hujan ini akan menentukan besarnya air permukaan dan air bawah tanah.

Tabel 2.1  
Curah Hujan Tahun 2020 dan 2021 (dalam mm)

BULAN	Jumlah Curah Hujan (mm)		Jumlah Hari Hujan (hari)	
	2020	2021	2020	2021
Januari	1 103	778	26	21
Februari	1 065	834	22	25
Maret	273	263	14	14
April	284	180	16	10
Mei	181	239	9	9
Juni	85	170	6	8
Juli	80	12	3	2
Agustus	21	129	4	9
September	65	93	3	8
Oktober	181	170	9	10
November	281	398	10	17
Desember	820	365	20	13

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, BPS - Kudus Dalam Angka, 2022

Ketersediaan air merupakan salah satu hal yang sangat menentukan kelembaban udara di suatu tempat. Bagaimanapun juga bahwa kelembaban udara ini diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Maka dari itulah, daerah yang memiliki ketersediaan air yang banyak akan memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi. Sementara tempat yang memiliki ketersediaan air yang rendah maka tingkat kelembabannya juga rendah. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, intensitas curah hujan tinggi terjadi di bulan Januari – Februari dan Desember. Intensitas hujan sangat berpengaruh pada kenaikan debit air sungai. Pada bulan dengan intensitas hujan tinggi, perlu diwaspadai adanya potensi bencana banjir di daerah – daerah genangan dan langganan banjir.

**Klimatologi**

Dahulu di Indonesia musim hujan dapat diprediksi yakni berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Namun akibat dari adanya Global Warming atau Pemanasan Global, membuat musim-musim yang ada di Indonesia mengalami perubahan. Hasil pengamatan unsur iklim di Kabupaten Kudus :



Tabel 2.2  
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2021

Bulan	Suhu (° C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	19,82	23,49	27,40	63,00	77,17	90,00
Februari	19,36	23,30	27,16	66,00	79,00	90,00
Maret	20,48	24,16	27,86	63,00	76,50	90,00
April	20,46	24,23	28,14	60,00	75,83	90,00
Mei	20,54	24,26	28,00	59,00	75,33	90,00
Juni	20,28	24,10	28,34	59,00	76,33	90,00
Juli	19,69	23,89	28,05	60,00	75,83	90,00
Agustus	19,96	24,14	28,32	59,00	74,83	90,00
September	20,22	24,37	28,68	58,00	74,67	90,00
Oktober	20,32	24,56	29,32	56,00	73,83	90,00
November	20,28	23,82	27,36	63,00	77,17	90,00
Desember	20,14	24,12	28,58	57,00	75,83	90,00

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus - BPS Kudus 2022

Suhu / temperatur udara menyatakan panas atau dinginnya suatu wilayah. Sepanjang tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus berkisar 24,04 derajat celsius, adapun kelembaban udara rata-rata berkisar 76,03%. Kelembaban udara berbanding terbalik dengan suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka kelembaban udaranya semakin kecil. Hal ini dikarenakan dengan tingginya suhu udara akan terjadi presipitasi yaitu proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair (hujan) maupun padat (salju) atau pengembunan molekul.

### Zonasi Pola Ruang

#### 1) Kawasan Lindung

Program perwujudan kawasan lindung meliputi Badan Air berupa sungai dan Bendungan Logung seluas 598 hektar, Kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung ditetapkan di kawasan hutan Gunung Muria dengan luas ± 1.088 hektar; Kawasan Perlindungan Setempat seluas ± 1.309 hektar meliputi 9 Kecamatan. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Desa Rahtawu, Desa Menawan, Desa Terban, Desa Ternadi, Desa Soco, Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan, dan kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan; Kawasan Lindung Geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe, dan Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

#### 2) Kawasan Budidaya

Program perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap; meliputi Kecamatan Gebog,

Dawe, Undaan dan Jekulo; Kawasan Pertanian berupa kawasan tanaman pangan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri di seluruh Kabupaten kecuali Kecamatan Undaan; Kawasan Permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan; dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pemanfaatan ruang untuk Kodim di Kecamatan Kota, Koramil di seluruh kecamatan, Polres di Kecamatan Jekulo dan Polsek di seluruh kecamatan.

### 2.1.1.2. DEMOGRAFI

Pada kondisi umum daerah, pemanfaatan informasi jumlah penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk perhitungan perekonomian dan sumber daya manusia secara makro, sedangkan pemanfaatan informasi jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Konsolidasi Bersih oleh Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan guna perumusan perencanaan pembangunan pada masing – masing urusan pemerintahan daerah. Penduduk Kabupaten Kudus dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2017	415.830	49.78	419.488	50,22	835.318
2018	419.212	49.23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205

Sumber : Dinas Dukcapil, 2022 (DKB Semester II Th 2021), LPPD Tahun 2022

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebanyak 432.754 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 433.215 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 867.205 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 433.374 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 433.831 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki untuk tiap tahunnya.

Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2021

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-10	75.742	71.198	146.940
11-20	69.066	65.308	134.374
21-30	68.408	65.528	133.936
31-40	70.251	69.212	139.463
41-50	62.755	65.138	127.893
51-60	48.937	53.067	102.004

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
61-70	28.243	28.784	57.027
> 70	9.972	15.596	25.568
JUMLAH	433.374	433.831	867.205

Sumber : Dinas Dukcapil, 2022(DKB Semester II Th 2021), LPPD Tahun 2022

Komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

#### 2.2.1.1. PERTUMBUHAN PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian yang didukung oleh industri pengolahan yang mendominasi sekitar 80 persen lapangan usaha. Perkembangan perekonomian di Kabupaten Kudus dalam beberapa tahun terakhir menunjukan perkembangan yang positif. Nilai PDRB Kabupaten Kudus dari tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami fluktuasi peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada awal periode mengalami peningkatan yang stabil pada 2017, 2018, dan 2019, namun mengalami penurunan yang cukup drastis pada dua tahu terakhir (2020 dan 2021 sebagai dampak atas pandemi Covid19. Gambaran PDRB Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.199.262,81	2.336.639,48	2.479.697,92	2.541.261,55	2.584.116,14
B	Pertambangan dan Penggalian	136.222,63	147.605,51	156.477,91	167.572,08	177.407,96
C	<b>Industri Pengolahan</b>	78.559.958,65	83.897.608,13	88.916.629,35	88.792.036,86	86.187.090,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	42.148,32	45.120,82	47.652,23	48.868,56	52.245,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.202,06	19.224,47	20.422,88	22.700,46	23.535,75
F	Konstruksi	3.267.558,78	3.620.313,83	3.914.283,53	3.542.804,95	3.911.670,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.249.366,52	5.650.957,80	6.057.000,78	5.653.771,72	6.023.619,66
H	Transportasi dan Pergudangan	1.001.538,58	1.081.182,00	1.188.880,90	945.752,51	1.029.751,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.106.614,02	1.212.026,19	1.326.620,45	1.222.267,70	1.332.528,00
J	Informasi dan Komunikasi	585.197,20	663.344,46	738.039,01	864.231,00	951.067,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.744.499,84	1.848.528,79	1.912.304,99	1.983.616,62	2.127.473,75
L	Real Estate	527.020,33	568.874,32	606.717,63	594.861,83	620.447,17
M,N	Jasa Perusahaan	102.420,49	114.761,39	128.676,80	126.775,15	131.887,77

No	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	759.550,79	795.285,16	835.644,41	838.109,80	844.532,84
P	Jasa Pendidikan	1.038.874,66	1.144.719,06	1.260.026,68	1.241.383,00	1.253.227,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	303.214,98	334.341,72	362.952,35	384.515,23	388.664,49
R,S, T,U	Jasa Lainnya	522.203,54	575.843,09	628.400,65	562.175,09	575.633,37
	<b>PDRB</b>	97.163.854,20	104.056.376,22		109.532.704,12	108.214.899,14
	<b>PDRB TANPA IHT</b>	25.418.029,67	27.450.990,64	29.489.737,27	28.285.449,10	30.216.479,14

Sumber : SIPD – BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

Nilai PDRB Kabupaten Kudus dihitung dari hasil akumulasi nilai produksi bruto dari 17 sektor lapangan usaha. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus secara umum pada tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, nilai tertinggi tercapai pada tahun 2019 sebesar 110.580.428,47 juta rupiah sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid19. Dilihat dari nilai output per sektor lapangan usaha, nilai tertinggi penyumbang PDRB Kabupaten Kudus ditempati oleh sektor Industri pengolahan dengan nilai 88.916.629,35 juta rupiah pada tahun 2019, namun kemudian turun menjadi 86.187.090,33 juta rupiah pada tahun 2021. Nilai sektor lapangan usaha tersebut didominasi oleh industri pengolahan hasil tembakau. Sehingga untuk melihat nilai sektor usahanya lainnya, perlu dilakukan penghitungan PDRB Kabupaten Kudus tanpa industri hasil tembakau (tanpa IHT) . Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tanpa hasil tembakau secara konsisten mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena terdampak Covid19. Pada tahun 2021, PRDB Kabupaten Kudus tanpa IHT mengalami peningkatan tertinggi sebesar 30.216.479,14 juta rupiah, yang mengindikasikan bahwa selain sektor industri IHT, perekonomian Kabupaten Kudus telah kembali bangkit dari dampak Covid19.

Untuk melihat nilai riil atas pertumbuhan ekonomi daerah perlu mengacu pada PRDB atas harga konstan. Dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan, total PDRB Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2017 – 2019, kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 (juta Rupiah)

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.566.633,01	1.611.363,00	1.676.134,20	1.679.775,45	1.692.251,42
B	Pertambangan dan Penggalian	76.831,38	79.744,32	83.280,27	84.877,41	89.384,40
C	Industri Pengolahan	54.575.827,58	55.963.198,01	57.325.057,61	55.896.574,97	53.813.643,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36.197,52	38.146,31	40.218,38	41.734,82	42.970,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.953,03	16.754,40	17.496,95	19.059,38	19.752,74



	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
F	Konstruksi	2.488.118,11	2.640.622,92	2.771.382,34	2.502.405,25	2.696.306,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.135.702,42	4.366.550,82	4.593.610,30	4.250.453,12	4.459.332,77
H	Transportasi dan Pergudangan	854.345,60	913.671,10	986.656,37	757.771,07	791.213,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	865.734,83	939.674,05	1.015.058,10	928.008,02	978.727,53
J	Informasi dan Komunikasi	584.509,10	662.657,24	729.748,32	857.954,41	958.720,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.214.327,69	1.245.161,66	1.268.499,44	1.298.726,90	1.342.079,50
L	Real Estate	447.587,35	472.385,66	497.957,44	487.491,60	500.480,59
M,N	Jasa Perusahaan	76.269,73	83.260,58	90.771,97	88.335,14	90.481,68
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	544.739,24	564.247,46	584.842,58	575.377,28	578.080,05
P	Jasa Pendidikan	694.750,65	748.835,31	803.916,64	790.657,52	794.916,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.084,05	248.429,37	264.760,39	267.448,04	267.701,23
R, S, T,U	Jasa Lainnya	415.550,90	454.271,10	492.386,15	435.098,12	440.884,92
	PDRB TOTAL	68.821.162,19	71.048.973,31	73.241.777,45	70.961.748,50	69.556.927,81
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	19.446.456,69	20.510.975,66	21.663.453,90	20.524.595,36	21.473.922,65

Sumber : SIPD–BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, sektor Industri pengolahan masih menjadi kontributor utama, sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2021. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB tahun 2021 atas dasar harga berlaku sebesar 79,64%.Industri Pengolahan sangat berperan dalam penurunan PDRB. Tahun 2017 berkontribusi 80,85% di tahun 2021 menjadi 79,64% atau turun -1,21%. Sedangkan lapangan usaha selain Industri Pengolahan relative mengalami peningkatan, namun demikian mengingat peranannya yang tidak dominan, peningkatan ini tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Selain itu, apabila dilihat dari kontribusi PDRB tanpa IHT, maka sektor lapangan usaha selain IHT menyumbang PDRB sebesar 27, 92 persen pada tahun 2021 meingkat sebesar 1,76 persen dari kontribusi sektor lapangan usaha selain IHT tahun 2017 sebesar 26,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha selain IHT secara perlahan semakin memberikan andil dalam pembentukan nilai perekonomian Kabupaten Kudus. Di lain pihak, sektor industri pengolahan IHT meskipun tetap menjadi basis ekonomi Kabupaten Kudus, namun kontribusinya perlahan sudah mulai berkurang.

Adapun Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7  
 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021

No.	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,26	2,25	2,24	2,32	2,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16
C	Industri Pengolahan	80,85	80,63	80,41	81,06	79,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05

No.	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>F</b>	Konstruksi	3,36	3,48	3,54	3,23	3,61
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,40	5,43	5,48	5,16	5,57
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,04	1,08	0,86	0,95
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,16	1,20	1,12	1,23
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,64	0,67	0,79	0,88
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80	1,78	1,73	1,81	1,97
<b>L</b>	Real Estate	0,54	0,55	0,55	0,54	0,57
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
<b>O</b>	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	0,76	0,76	0,77	0,78
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	1,07	1,10	1,14	1,13	1,16
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36
<b>R,S,T, U</b>	Jasa Lainnya	0,54	0,55	0,57	0,51	0,53
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU</b>	<b>26,16</b>	<b>26,38</b>	<b>26,67</b>	<b>25,82</b>	<b>27,92</b>

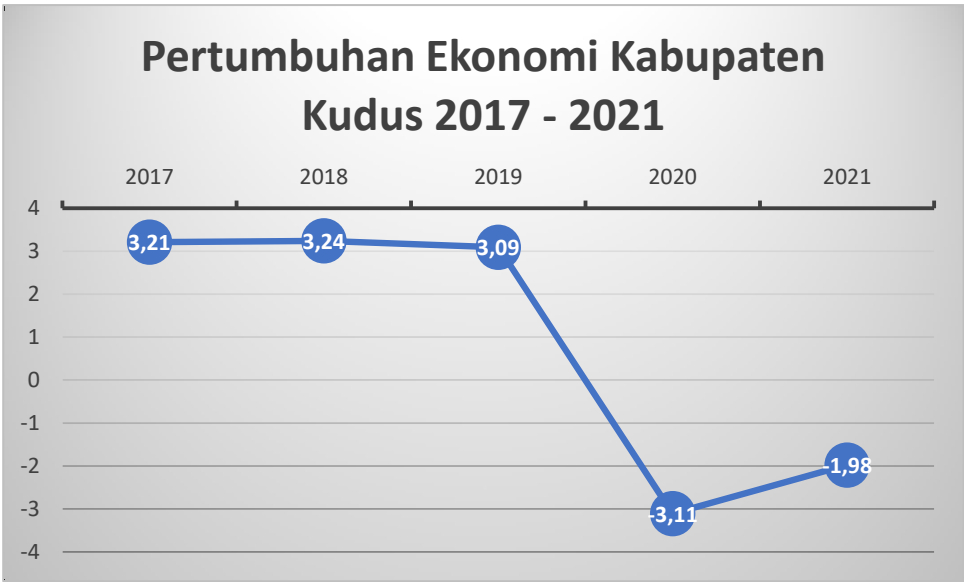
Sumber : SIPD – BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.8  
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun 2010	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.84	2.86	4.02	0.22	0.74
B. Pertambangan dan Penggalian	4.26	3.79	4.43	1.92	5.31
C. Industri Pengolahan	2.48	2.54	2.43	-2.49	-3.73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.16	5.38	5.43	3.77	2.96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.13	5.02	4.43	8.93	3.64
F. Konstruksi	7.43	6.13	4.95	-9.71	7.75
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.08	5.58	5.20	-7.47	4.91
H. Transportasi dan Pergudangan	6.19	6.94	7.99	-23.20	4.41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.47	8.54	8.02	-8.58	5.47
J. Informasi dan Komunikasi	14.81	13.37	10.12	17.57	11.74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.62	2.54	1.87	2.38	3.34
L. Real Estate	6.29	5.54	5.41	-2.10	2.66
M,N. Jasa Perusahaan	8.77	9.17	9.02	-2.68	2.43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.55	3.58	3.65	-1.62	0.47
P. Jasa Pendidikan	7.18	7.78	7.36	-1.65	0.54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.75	8.92	6.57	1.02	0.09
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.13	9.32	8.39	-11.63	1.33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.21	3.24	3.09	-3.11	-1.98
PERTUMBUHAN TANPA IHT	5,48	5,47	5,62	-5,26	4,63

Sumber : SIPD–BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut :



**Gambar 2.2** Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar -1,98 persen masih mengikuti trend penurunan pertumbuhan tahun 2020 yang turun sebesar -3,11. Dilihat dari data pertumbuhan sektoral per lapangan usaha, kondisi laju pertumbuhan negatif PDRB Kabupaten kudus pada tahun 2021 berbeda kondisi tahun 2020, dimana pada tahun 2020 penurunan terjadi hampir di semua sektor lapangan usaha sedangkan pada tahun 2021 penurunan PRDB didominasi sektor industri pengolahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa, sektor – sektor usaha di Kabupaten Kudus telah mampu bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, dimana Sebagian besar sektor usaha di Kabupaten Kudus mengalami laju pertumbuhan negative akibat Covid 19.

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT masih tumbuh sebesar 4,63 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -5,26 pada 2020 sebagai dampak Covid 19. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri yang mengalami penurunan di Kabupaten Kudus hanya sektor industri IHT. Namun karena dominasi sektor usaha IHT masih mendominasi sumbangan PDRB Kudus sekitar 72 persen dari total PDRB, sehingga

peningkatan pertumbuhan sektor usaha tanpa IHT masih belum cukup mengimbangi penurunan sektor usaha IHT.

Tabel 2.9  
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Distribusi PRDB Menurut Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Kudus

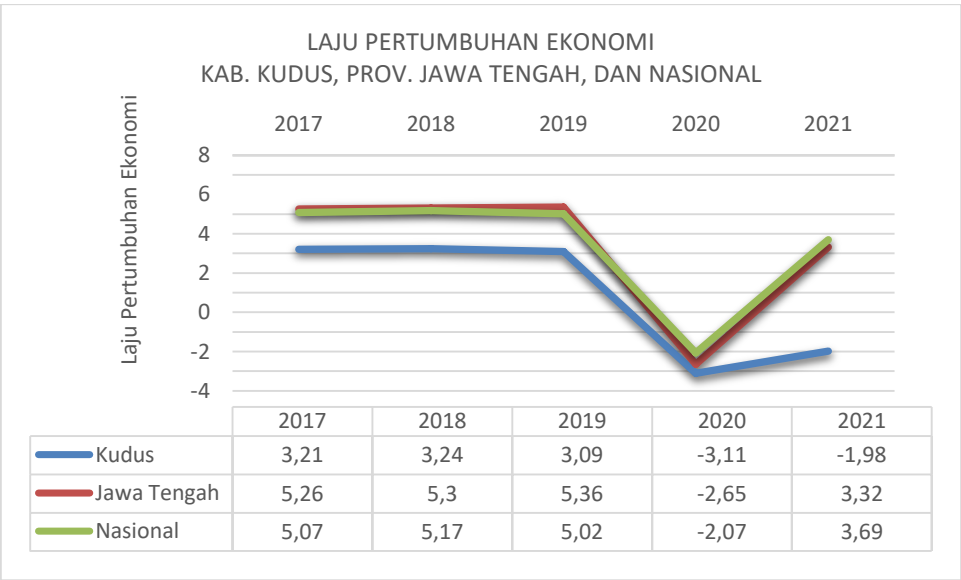
Kabupaten Sekitar / Provinsi Jawa Tengah	2019		2020		2021	
	PDRB (Trilyun Rp)	Kontribusi Provinsi (%)	PDRB (Trilyun Rp)	Kontribusi Provinsi (%)	PDRB (Trilyun Rp)	Kontribusi Provinsi (%)
Kabupaten Blora	25,97	1.91	24,01	1.78	26,96	1.90
Kabupaten Rembang	18,94	1.39	18,94	1.41	20,07	1.41
Kabupaten Pati	43,04	3.16	43,29	3.21	45,57	3.21
Kabupaten Kudus	110,58	8.13	109,53	8.13	108,21	7.61
Kabupaten Jepara	30,23	2.22	30,18	2.24	32,05	2.25

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Ket \* : angka sementara; \*\* : angka sangat sementara

Memperhatikan tabel di atas, berdasarkan nilai PDRB tahun 2019 sampai dengan 2020 nilai kontribusi Kabupaten Kudus terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah berada pada kisaran 8,13 persen dimana dibanding dengan kabupaten sekitarnya, Kabupaten Kudus menempati nilai kontribusi PDRB Provinsi paling tinggi. Pada tahun 2021, nilai kontribusi PDRB Kabupaten Kudus terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 7, 61 persen karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus masih mengalami kontraksi sebesar -1,98, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah naik sebesar 3,32 persen. Dibanding dengan Kabupaten 5 Kabupaten lainnya disekitar Kudus, kontribusi PDRB Kabupaten Kudus masih jauh lebih tinggi, dimana rata – rata kontribusi Kabupaten sekitar Kudus sekitar 1,40 sampai 3,21 persen. Hal ini merupakan salah satu keunggulan Kabupaten Kudus sebagai daerah yang PDRBnya ditopang oleh sektor Industri Pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan Daerah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



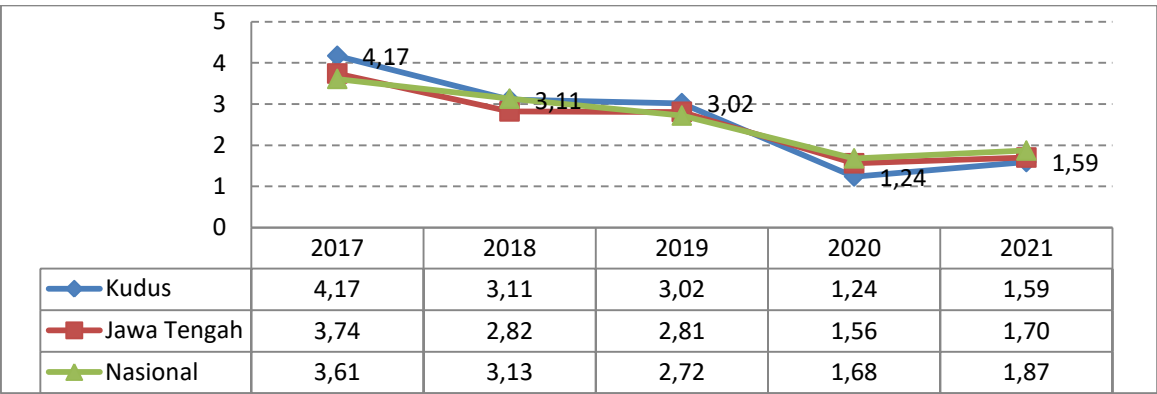
Sumber :SIPD – BPS 2021, Bappeda (data diolah) Tahun 2022

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dengan Jateng dan Nasional

Laju pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 baik di tingkat Kabupaten Kudus masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,98 persen karena masih lesunya sektor industri pengolahan hasil tembakau akibat pandemic Covid19 secara global. Untuk laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional telah mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi secara umum telah bangkit kembali, meskipun kondisi pandemi masih terjadi sampai akhir tahun 2021. Diharapkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan 2023 akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

### 2.2.1.2. LAJU INFLASI

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 6 (enam) Kabupaten/Kota yang menjadi sampling SBH (Survey Biaya Hidup) di Jawa Tengah. Laju Inflasi di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 6 (enam) tahun berada dikisaran 3±1 sebagaimana target perencanaan. Laju inflasi tahunan di tahun 2021 masih terpengaruh atas kelesuan ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid-19, namun demikian, pada tahun 2021 geliat ekonomi mulai beranjak naik. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi dari tahun ke tahun/ YoY (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,59, bergerak naik lebih tinggi dibanding inflasi YoY tahun 2020 yang sebesar 1,24. Laju inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir tersaji sebagaimana gambar berikut ini:



Sumber :SIPD – BPS 2021, Bappeda (data diolah) Tahun 2022

**Gambar 2.4** Laju Inflasi Kabupaten Kudus dengan Jawa Tengah dan Nasional

Inflasi Kudus tahun kalender dan *year on year* (YoY) 2021 sebesar 1,59 lebih rendah dibanding Nasional (1,87) dan Jawa Tengah (1,70). Pada Desember 2021 Kudus mengalami inflasi yang utamanya disebabkan kenaikan harga telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Sedangkan beberapa komoditas yang menahan inflasi di Kota Kudus antara lain ikan bandeng/ ikan bolu, ikan nila, mie kering instan, pepaya, dan salak.

Pada Desember 2021, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,3. Penyebab



utama inflasi di Jawa Tengah Desember 2021 adalah kenaikan harga cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, dan minyak goreng. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga pepaya, biaya administrasi transfer uang, emas perhiasan, salak, dan nangka muda. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 0,82 persen dengan IHK sebesar 106,21 diikuti oleh Kota Purwokerto sebesar 0,74 persen dengan IHK sebesar 107,15; Kota Surakarta sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 107,31; Kota Tegal sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 107,89; Kota Semarang sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 107,49; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,50 persen dengan IHK sebesar 106,32.

Pada level nasional, bulan Desember 2021, semua ibukota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang sebesar 0,73 persen dengan IHK sebesar 109,82 diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 108,53; Kota Surabaya sebesar 0,65 persen dengan IHK sebesar 107,60; Kota Semarang sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 107,49; DKI Jakarta sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 107,58; dan inflasi terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 107,43.

### 2.2.1.3. PDRB PERKAPITA

PDRB perkapita berkorelasi positif dengan tingkat kemakmuran suatu daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran Kudus relatif besar dan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah di Jawa Tengah lainnya, meskipun pada realitanya kemakmuran ini dinikmati oleh segelintir pemilik modal yang berdomisili di wilayah perkotaan. PDRB perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10  
PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku</b>					
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Juta Rupiah	97.163.854,20	104.056.376,22	110.595.456,65	109.159.661,24	108.214.899,14
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	851.478	861.430	871.311	865.969	866.548
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	114,11	120,79	127,52	129,13	126,95
4	PDRB Perkapita per Bulan (Juta Rupiah/ Jiwa)	9,51	10,07	10,58	10,71	10,58
	<b>PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan</b>					
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Juta Rupiah	68.821.162,19	71.048.973,31	73.249.694,10	70.662.043,36	70.662.043,36
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	851.478	861.430	871.311	865.969	866.548
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	80,83	82,48	84,46	83,36	81,60

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
4	PDRB Perkapita per Bulan (Juta Rupiah/ Jiwa)	6,74	6,87	7,01	6,93	6,8

Sumber: BPS - PDRB Tahun 2022 (data diolah)

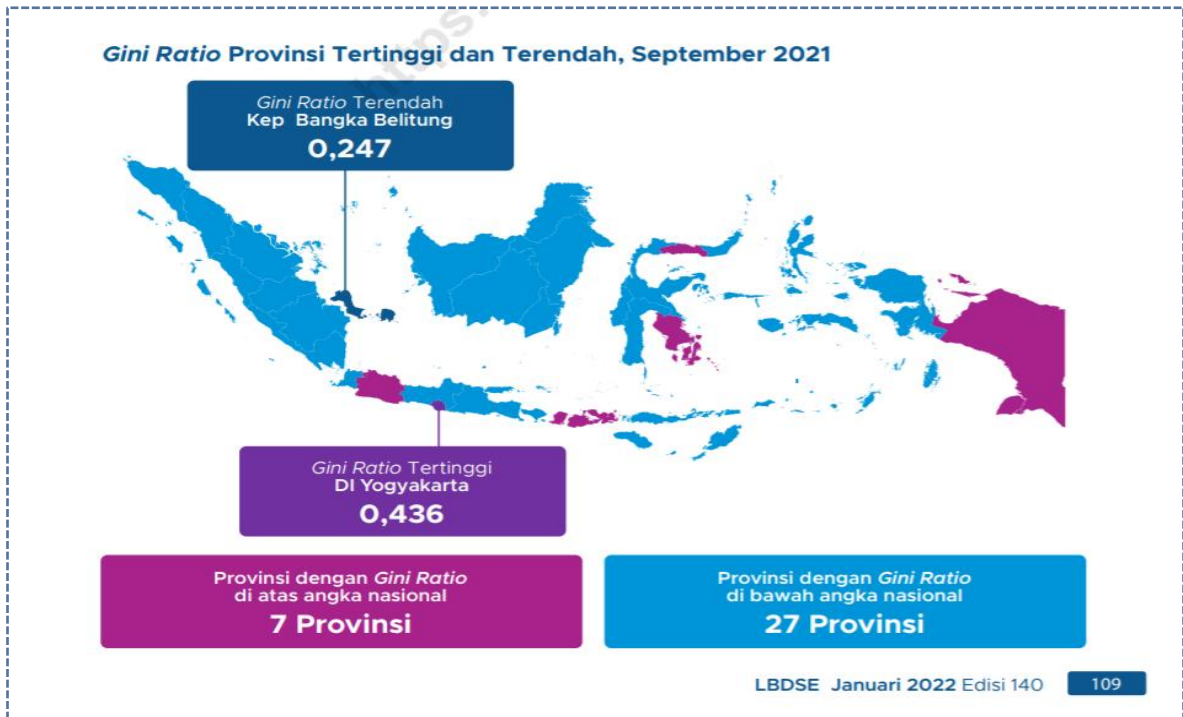
PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 126,95 juta rupiah mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 129,13 juta rupiah seiring dengan penurunan nilai PDRB atas harga berlaku pada tahun 2021. Meski demikian secara umum nilai PDRB perkapita Kabupaten Kudus masih tergolong tinggi di bandingkan dengan tingkat PRDB perkapita provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 38,67 juta rupiah/jiwa. Tingginya tingkat PDRB per kapita Kabupaten Kudus dibanding dengan PDRB per kapita kabupaten sekitar maupun PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kudus lebih produktif daripada daerah lainnya di Jawa Tengah.

#### 2.2.1.4. INDEKS GINI

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Kudus digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ( $0 < \text{Koefisien Gini} < 1$ ). Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

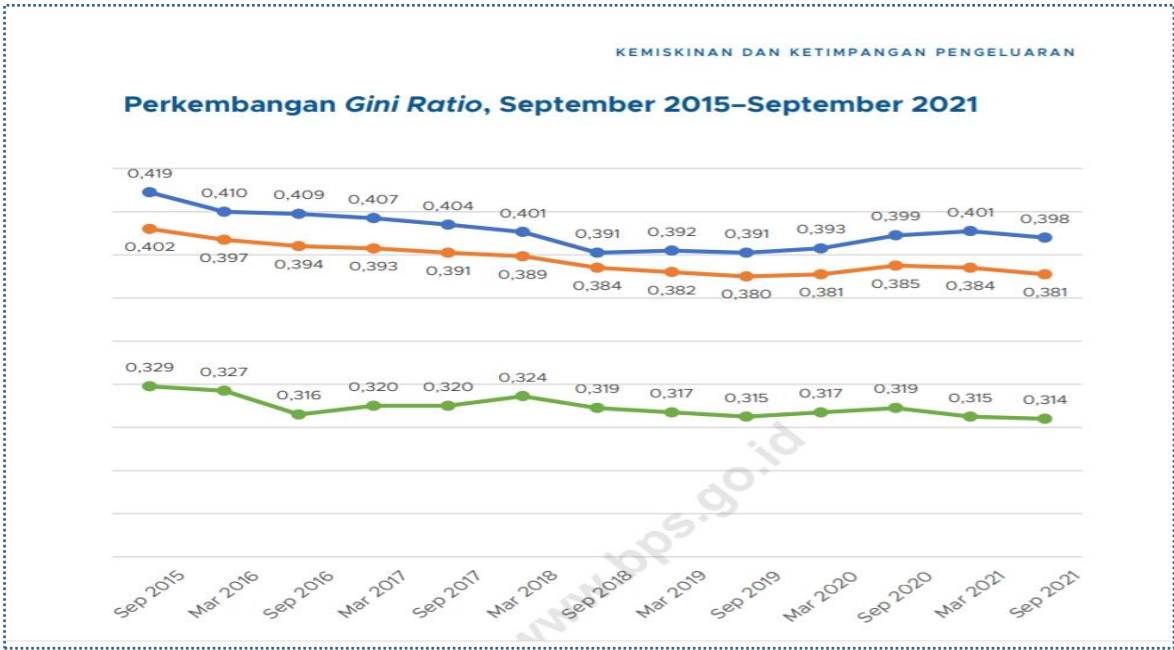
- $0,00 < G < 0,35$  → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$  → pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50$  → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Kudus tidak tersedia secara lengkap, hal ini dikarenakan sumber data sample (menurut BPS) tidak dapat mencerminkan gambaran Kabupaten/kota. Ketersediaan data Indeks Gini di Kabupaten Kudus tersedia sampai tahun 2014 sebesar 0,37. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kudus terpotret pada peta Gini Rasio di Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : SIPD – Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari 2022  
(<https://www.bps.go.id/publication/2022/01/25/9192696d88bedaa0f11836d9/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-januari-2022.html>)

**Gambar 2.5** Indeks Gini Tahun 2021



Sumber : SIPD – Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari 2022  
(<https://www.bps.go.id/publication/2022/01/25/9192696d88bedaa0f11836d9/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-januari-2022.html>)

**Gambar 2.6** Perkembangan Indeks Gini Tahun 2015 - 2021 (September)

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,393 menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,398 dan naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,386. Begitu pula, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,324 menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,359 dan naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,318.

Secara global, kisaran indeks gini di Jawa Tengah berada dikisaran 0,359 (September 2020) – 0,372 (Maret 2021). Hal ini kami maknai bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki tingkat pemerataan pembangunan / ketimpangan sedang. Artinya, indeks gini Kabupaten Kudus yang sebesar 0,37 masuk pada kelompok ketimpangan sedang.

**2.2.1.5. KEMISKINAN**

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 67,06 ribu orang (7,60 persen), bertambah sebanyak 2,82 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2020 yang berjumlah 64,24 ribu orang (7,31 persen). Garis Kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan dari Rp. 429.666 pada tahun 2020 menjadi Rp.450.992 pada tahun 2021.

Pada periode tahun 2020 - 2021, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan.

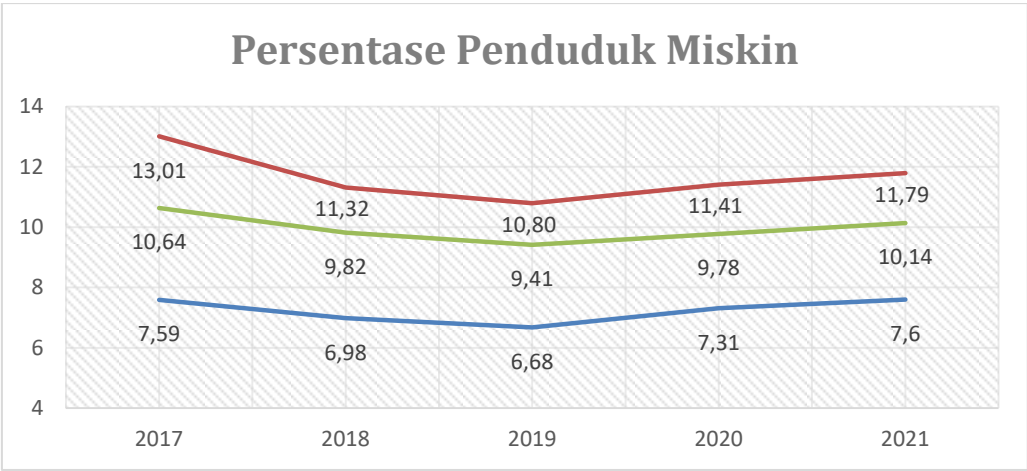
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus kurun waktu 2017-2019 menurun, namun pada tahun 2020 dan 2021 jumlahnya meningkat. Hal ini dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

Tabel 2.11  
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64.400	59.990	58.000	64.240	67.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,59	6,98	6,68	7,31	7,6
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	373.224	393.078	406.470	429 666	450.992
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,00	0,88	0,83	1,01	1,23
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,19	0,17	0,18	0,27

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2022

Di antara Kabupaten Eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Kudus menjadi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus (7,6) berada di bawah Jawa Tengah (10,14) dan Nasional (11,79). Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar berikut :



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2022

**Gambar 2.7** Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus,Jawa Tengah dan Nasional

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus periode 2017 – 2019 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sebagai efek dari terjadinya wabah Covid-19.

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun merupakan salah satu isu SDG’s goal 1, diantaranya dilaksanakan melalui upaya perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagaimana tujuan pembangunan kesehatan, maka pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2014 telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyatnya secara bertahap. Jaminan kesehatan ini merupakan pola pembiayaan yang bersifat wajib, artinya pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh masyarakat Indonesia (tanpa terkecuali) harus telah menjadi peserta. Melalui penerapan Jaminan Kesehatan Nasional ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang tidak berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan di kala sakit karena tidak memiliki biaya.

Upaya perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.12  
Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2017 -2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penerima Jamkesmas	240.144	235.448	211.910	227.885	207.099
2.	Penerima Jamkesda	28.104	27.477	196.172	55.414	55.913
3.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64.400	59.990	58.000	64.240	312.435
4.	Cakupan JKN per 1000 penduduk	76,81	82,59	95,6	80,37	70,50

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa penerima Jamkesmas dan cakupan pelayanan jaminan kesehatan ada penurunan pada tahun 2021, hal ini disebabkan adanya penonaktifan status kepesertaan dari Kementerian Sosial terhadap peserta PBI APBN yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Upaya perlindungan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan berdasar indikator SDG's "Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan". Berikut peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2021 :

Tabel 2.13  
Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus  
Tahun 2020 dan 2021

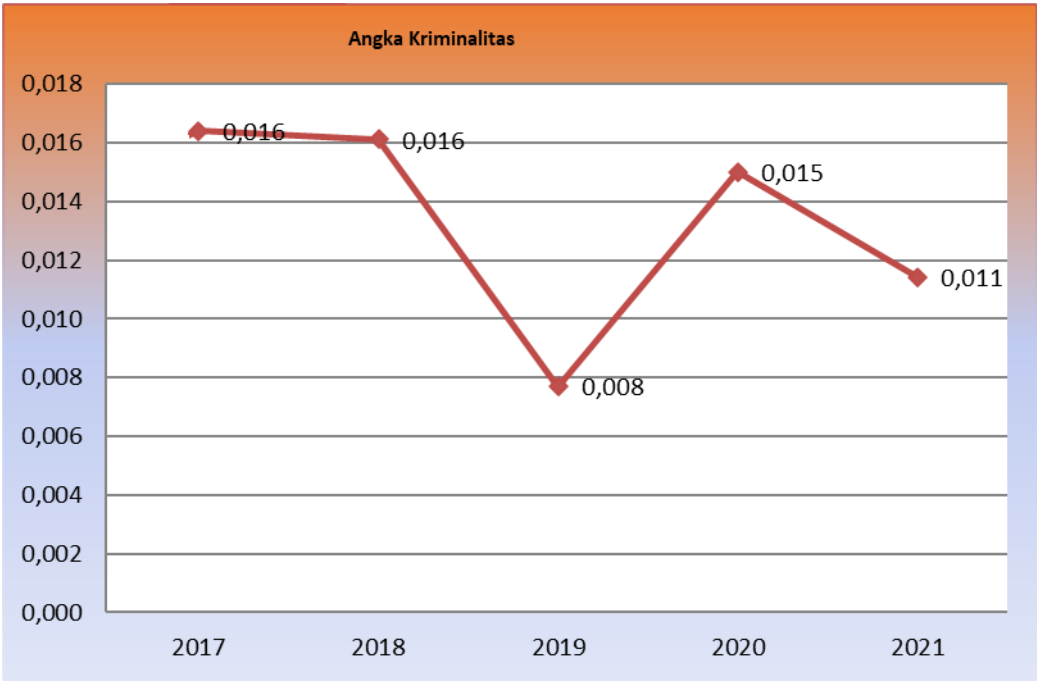
No.	PARAMETER	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Pekerja Migran	Jasa Konstruksi	Total
	2020					
1	Tenaga Kerja Aktif	200.330	2.110	-	5.600	208.040
2	Badan Usaha/Proyek	4.652	-	-	279	4.931
	2021					
1	Tenaga Kerja Aktif	212.910	11.421		6.207	230.538
2	Badan Usaha/Proyek	4.889			233	5.122

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kudus, Swasta dan masyarakat terhadap upaya perlindungan pekerja.

2.2.1.6 KRIMINALITAS

Angka kriminal di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan stabilitas keamanan di Kabupaten Kudus relatif kondusif.



Sumber : SIPD – Polres Kudus Tahun 2022

Gambar 2.8 Angka Kriminalitas Tahun 2017 – 2021

Hal yang menyebabkan kenaikan angka kriminal di tahun 2020 ke 2021 adalah adanya perubahan base data di Polres Kudus. Jumlah Tindak Kriminal di Kabupaten Kudus Tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14  
Jumlah Tindak Kriminal di Kabupaten Kudus Tahun 2021

JENIS PIDANA	RSKR		KUDUS		JATI		UND		KLW		GBG		DAWE		BAE		JKULO		MJB		JML	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
BUNUH	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ANIRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRAS	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5
CURRAT	9	5	1	2	2	1	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	1	0	1	0	18	9
CURRANMOR	8	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	17	8
KEBAKARAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PEMBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURWAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U P A L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERKOSAAN		1	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENIPUAN	9	3	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	14	7
PERZINAHAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PENGHELAPAN	5	5	1	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5
PENCURIAN BIASA	5	2	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
ANIAYA RINGAN	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
PEMALSUAN SURAT	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
PERJUDIAN	3	3	2	3	-	-	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	3	4	16	9
PEMERASAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
LAPORAN PALSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEROYOK	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2
RUSAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGHINAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TADAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERB. TDK SNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BW LR PEREMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERB. CABUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETBH THD ANAK	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8
CABUL THD ANAK	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
ANIAYA THD ANK	6	4	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7
PENCULIKAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JENIS PIDANA	RSKR		KUDUS		JATI		UND		KLW		GBG		DAWE		BAE		JKULO		MJB		JML	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
NIAGA BBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIDUSIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KDRT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
TEMPATI RMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SROBOT TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORNOGRAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELAWAN PETUGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.T.E.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SUMPAH PALSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIRAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CEMAR NAMA BAIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GELAP DLM JAB	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
PUPUK SUBSIDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLEGAL LOGGING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KORUPSI	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BAWA SAJAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
LAPORAN PALSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KRN LALAI SBB MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
CUR DLM KELUARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETUBUH DEWASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PETASAN	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
PENCURIAN RINGAN	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3
ASAL USUL KAWIN	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
PERTAMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASUKI RMH TNP IJIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>99</b>
<b>PROSEN SAIKARA</b>	<b>63%</b>		<b>100%</b>		<b>63%</b>		<b>100%</b>		<b>117%</b>		<b>47%</b>		<b>125%</b>		<b>33%</b>		<b>50%</b>		<b>78%</b>		<b>69%</b>	

Sumber : SIPD – Satuan Polisi Pamong Praja – Polres Kudus, 2022

L = Jumlah Laporan

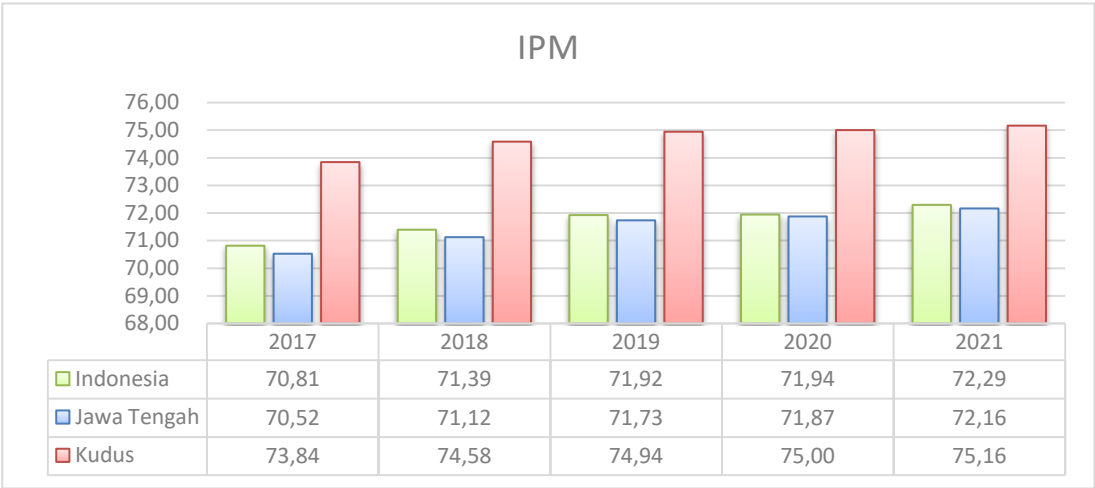
S = Penyelesaian

Pada tahun 2021, jumlah penyelesaian perkara sejumlah 99 kasus, dibagi jumlah penduduk tahun 2021 (Dukcapil Semester II sebesar 867.205 jiwa) maka diperoleh angka kriminalitas sebesar 0,011. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka terdapat penurunan 0,05 persen. Angka kriminal tahun 2021 tertinggi pada kasus pencurian dengan pemberatan (CURRAT)18 kasus dan pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR) sejumlah 17 kasus.

**2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**2.2.2.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen penyusunannya. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan indeks masing-masing komponen telah membuat IPM Kabupaten Kudus terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan IPM Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Tahun 2022 (data diolah)

**Gambar 2.9** IPM Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kudus



Tabel 2.15  
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

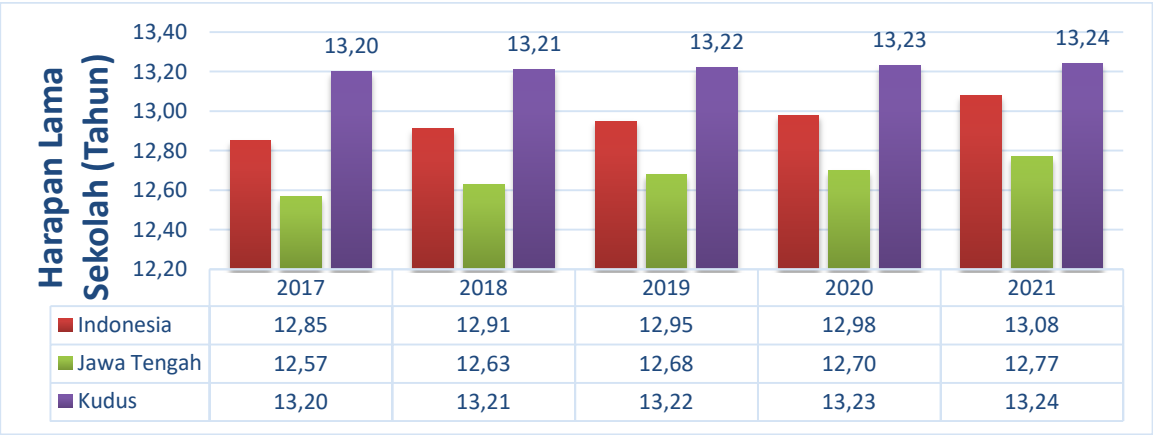
Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	76.44	76.47	76.50	76.60	76.68
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8.31	8.62	8.63	8.75	8.76
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	10,639	10,979	11,318	11,160	11,272
<b>IPM</b>		<b>73.84</b>	<b>74.58</b>	<b>74.94</b>	<b>75.00</b>	<b>75.16</b>
<b>Selisih Absolut IPM</b>	<b>poin</b>	<b>0.90</b>	<b>0.74</b>	<b>0.36</b>	<b>0.06</b>	<b>0.16</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>	<b>%</b>	<b>1.23</b>	<b>1.00</b>	<b>0.48</b>	<b>0.08</b>	<b>0.21</b>

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 13 / 12 / IX , Desember 2022

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Kudus terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Kudus meningkat dari 73,84 pada tahun 2017 menjadi 75,16 pada tahun 2021. Di tengah masih terjadinya pandemi Covid-19, pembangunan manusia Kabupaten Kudus tahun 2021 tetap mampu tumbuh. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 75,16 atau naik sebesar 0,16 poin (tumbuh 0,21 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, dan termasuk ke dalam kategori “tinggi” karena nilai IPM yang lebih dari 70.

2.2.2.2. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah.



Sumber: BPS, Bappeda 2022 (data diolah)

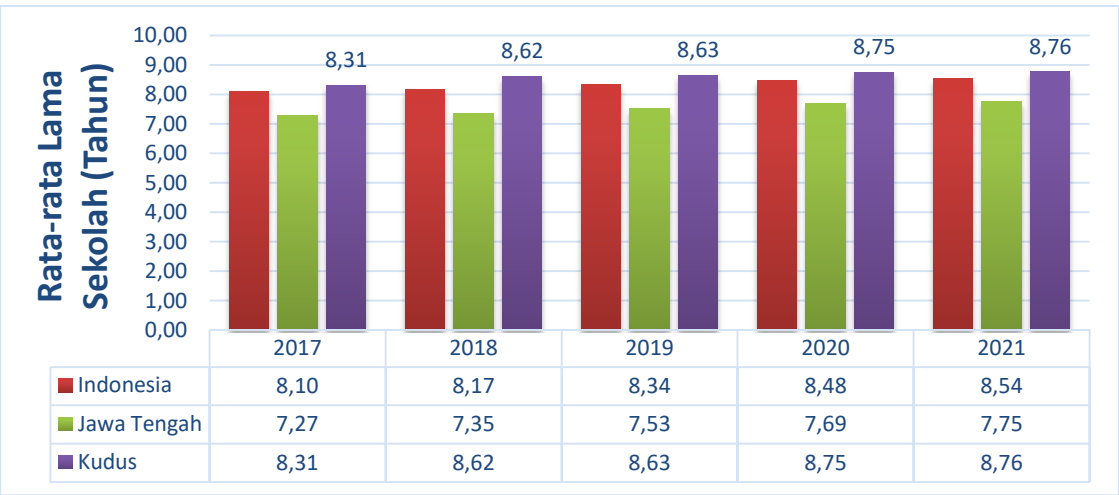
Gambar 2.10 Komponen IPM – Harapan Lama Sekolah Tahun 2017 - 2021

Selama periode 2017 hingga 2021, HLS Kabupaten Kudus telah meningkat, dari 13,20 menjadi 13,24 atau meningkat 0,04 tahun, namun demikian HLS Kabupaten Kudus pada kurun waktu tersebut memiliki pertumbuhan yang stagnan, yaitu sebesar 0,08 persen. Nilai IPM dari Harapan Lama Sekolah tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 13,24 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (12,77) dan Nasional (13,08).

**2.2.2.3. RATA – RATA LAMA SEKOLAH**

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan, namun cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data.

Pada komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada kurun waktu 2017 - 2021 mengalami peningkatan dari 8,31 di tahun 2017 menjadi 8,76 di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,45 tahun. Untuk RLS Kabupaten Kudus pada tahun 2021 tumbuh 0,11 persen, menurun jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2020 yang sebesar 1,39 persen.



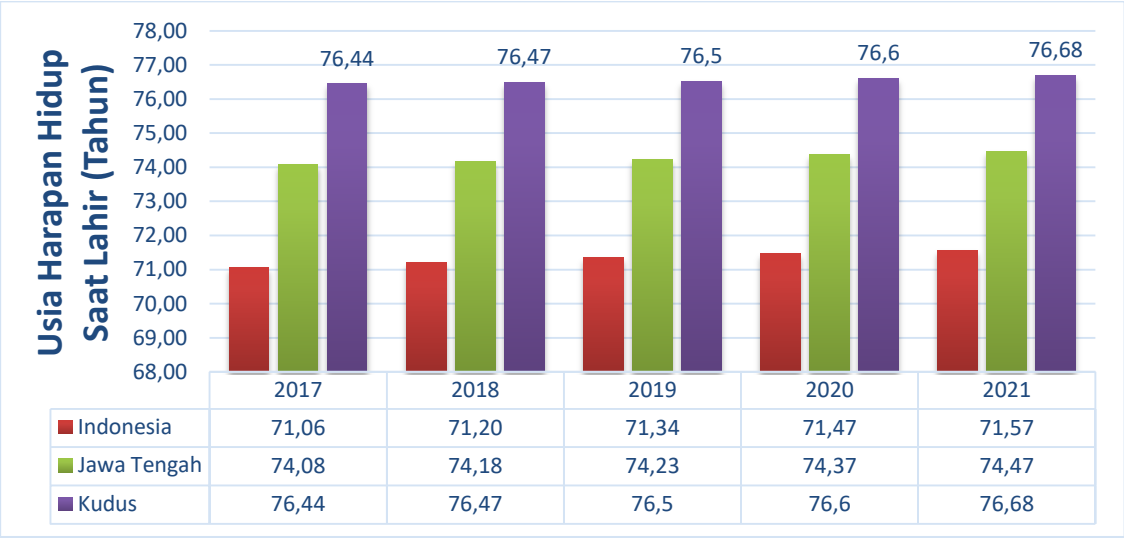
Sumber: BPS, Bappeda 2022 (data diolah)

**Gambar 2.11** Komponen IPM – Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017 - 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa di capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Hingga tahun 2021, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Kudus usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas 2).

2.2.2.4. USIA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Definisi usia harapan hidup saat lahir adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai sekelompok penduduk. Indikator angka usia harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.



Sumber : BPS, Tahun 2022

Gambar 2.12 Komponen IPM – Usia Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2017 - 2021

Pada gambar di atas, nilai usia harapan hidup saat lahir di Kabupaten Kudus 76,68 tahun meningkat dibanding tahun 2017 (76,44tahun). Selama periode 2017 hingga 2021, UHH di Kabupaten Kudus meningkat sebesar 0,24 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,08 persen per tahun. Pada tahun 2017, UHH tercatat sebesar 76,44 tahun dan empat tahun kemudian (2021) mencapai 76,78 tahun. Maknanya, hal tersebut menggambarkan bahwa bayi di Kabupaten Kudus yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan hidup hingga 76,78

tahun, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

2.2.2.5. PENGELUARAN PER KAPITA

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012). Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan

paritas daya beli yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

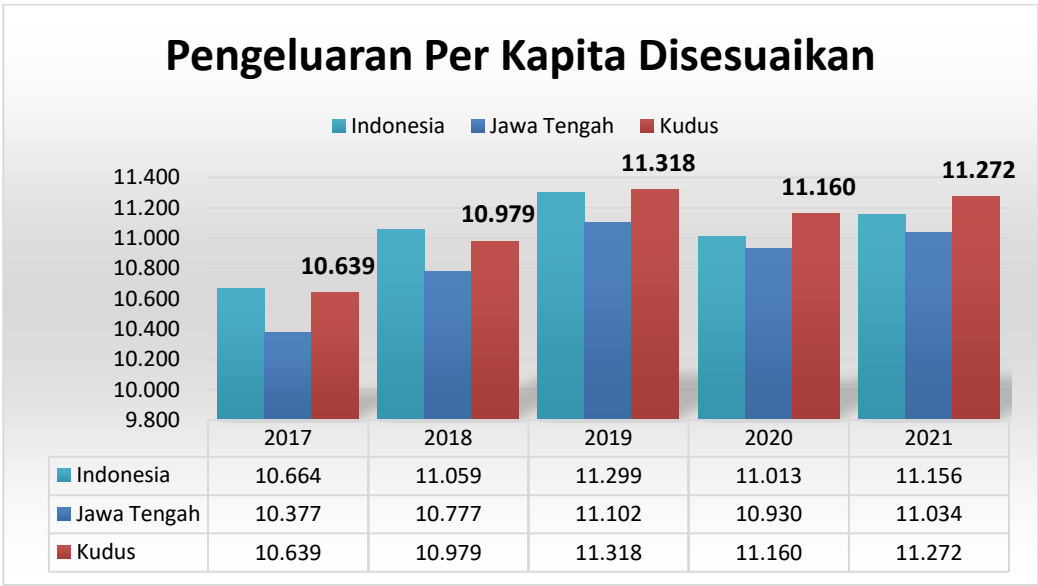
Pengeluaran per kapita yang dipakai dalam metode baru adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Tabel 2.16  
Pengeluaran Perkapita Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar

NO	URAIAN	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jawa Tengah	10.377	10.777	11.102	10.930	11.156
2	Pati	9.813	10.190	10.660	10.390	11.034
3	<b>Kudus</b>	<b>10.639</b>	<b>10.979</b>	<b>11.318</b>	<b>11.160</b>	<b>11.272</b>
4	Jepara	9.745	10.169	10.609	10.343	10.506
5	Demak	9.544	10.001	10.344	10.128	10.536

Sumber : IPM Metode Baru - BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Bappeda (data diolah)

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kudus mencapai Rp.11,272 juta per tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2021 ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 11,160 juta per tahun. Setelah mengalami penurunan pendapatan yang terjadi pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Kudus telah beradaptasi dan tetap berusaha survive dari wabah Covid-19 sepanjang tahun 2021. Hal ini tercermin dari angka pengeluaran per kapita yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Bappeda (data diolah) 2022

Gambar 2.13 Komponen IPM - Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kudus

Pengeluaran perkapita di Kabupaten sebesar 11,272 juta rupiah, angka ini menunjukkan besarnya pengeluaran per kapita penduduk Kudus, lebih besar dari penduduk Jawa Tengah (11,034 juta rupiah) dan Nasional (11,156 juta rupiah). Dari sisi standar hidup layak, untuk rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 11,160 juta rupiah menjadi 11,272 juta rupiah pada tahun 2021.

#### **2.2.2.6. KESEMPATAN KERJA**

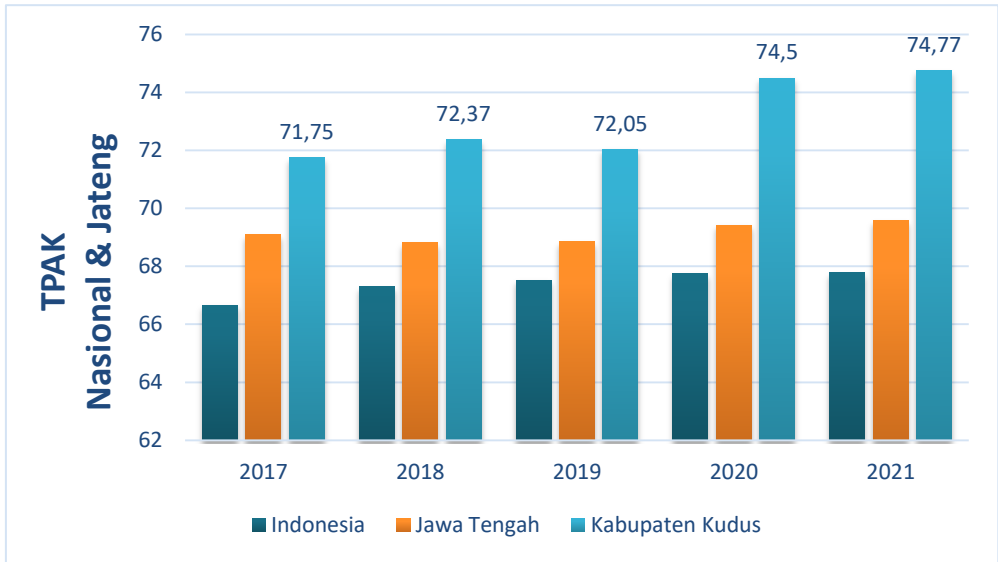
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebanyak 521 ribu orang, bertambah 8,7 ribu orang dibanding Tahun 2020. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,77 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77 persen turun 1,76 persen poin dibandingkan tahun 2020. Penduduk bekerja tercatat sebanyak 501 ribu orang, naik sebanyak 17 ribu orang dari tahun 2020 . Jika dilihat dari kegiatan bekerja sekitar 61 persen penduduk Kudus bekerja di sektor formal. Dan 50 persen penduduk bekerja di lapangan usaha manufaktur. Tercatat sebanyak 80 ribu orang yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka terdiri atas pengangguran karena Covid-19 (4 ribu orang), bukan angkatan kerja karena Covid-19 (2 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (7 ribu orang), dan pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 66 ribu orang.

Penduduk dari sisi ketenagakerjaan dikelompokkan menjadi dua yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengelompokan pada konsep ini didasarkan pada periode rujukan (time reference), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu yang berakhir sehari sebelum pencacahan.

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebanyak 696 ribu bertambah 9 ribu dibandingkan Tahun 2020. Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebanyak 521 ribu orang, bertambah sebanyak 8,7 ribu orang dibanding Tahun 2020.

Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 501 ribu orang, bertambah sebanyak 17 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 19 ribu orang, mengalami penurunan sekitar 8 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Sejalan dengan naiknya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan.



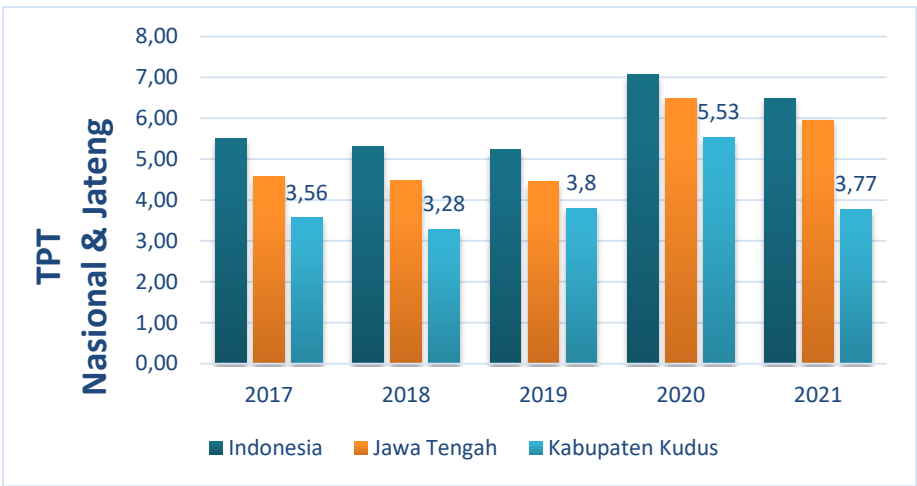


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Bappeda (data diolah), 2022

**Gambar 2.14** Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja Nasional & Jateng Tahun 2015 - 2020

TPAK pada tahun 2021 tercatat sebesar 74,77 persen, naik 0,27 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2021, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,01 persen sementara TPAK perempuan hanya mencapai 67,86 persen.

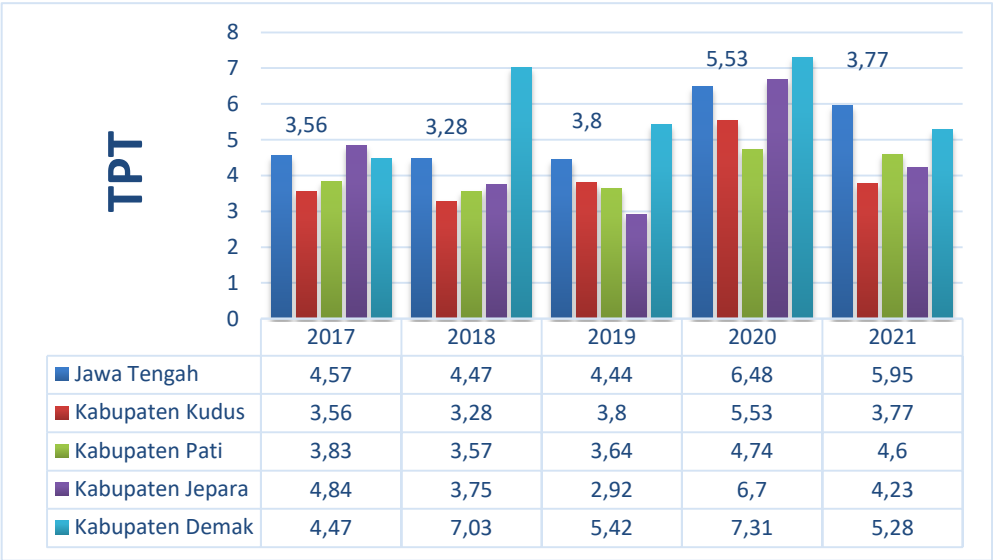
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran,



Sumber : Website BPS, Bappeda (data diolah) , 2022

**Gambar 2.15** Tingkat Pengangguran TerbukaKudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021

TPT Kabupaten Kudus dari 5,53 persen pada Tahun 2020 turun 1,76 persen menjadi 3,77 persen pada Tahun 2021.



Sumber : Website BPS, Bappeda (data diolah) , 2022

Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sekitar Tahun 2017 - 2021

TPT Kabupaten Kudus, dalam periode 2017 - 2021 cenderung fluktuatif, khususnya di tahun 2020, dimana dampak pandemi sangat nyata berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, namun pada tahun 2021, angka pengangguran dapat ditekan pada angka 3,77 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Kudus tahun 2021 terdapat sekitar 3 orang yang termasuk dalam kategori pengangguran.

Tabel 2.17  
Tingkat Pengangguran Kabupaten Kudus Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]
	persen	persen	persen
TPT Total	3,80	5,53	3,77
Laki-laki	4,07	6,34	5,49
Perempuan	3,44	4,57	1,78

Sumber : Data diolah dari Sakernas 2019-2021

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik No. 12 / 11 / IX , November 2021

Dilihat dari jenis kelamin, TPT laki-laki pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perempuan (TPT Laki-laki sebesar 5,49 persen sedangkan TPT Perempuan 1,78 persen). Sedangkan menurut pendidikan yang ditamatkan sebanyak 27,14 persen pengangguran merupakan lulusan SMP.

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan dalam upaya meningkatkan dan melestarikan seni budaya dan olahraga, dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Kunci ( IKK) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.18  
Indikator Kinerja Kunci Seni Budaya dan Olahraga

No	URAIAN	Satuan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
			2020	2021
1.	Seni Budaya			
1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	104	114
2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	32	43
3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	85	92
4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	17	9
2.	Olahraga			
1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Orang	51	121
2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	1	10

Sumber : LPPD Tahun 2021, 2022

#### 2.2.4. SAKIP DAN REFORMASI BIROKRASI

Kinerja pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Kudus pada aspek pelayanan umum dapat diketahui melalui penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah selama periode 2020 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19  
Nilai SAKIP Kabupaten Kudus

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1	Perencanaan kinerja	30	22,68	22,55
2	Pengukuran kinerja	25	17,28	17,51
3	Pelaporan kinerja	15	9,77	10,19
4	Evaluasi kinerja	10	7,29	7,44
5	Capaian kinerja	20	11,92	11,76
	<b>Nilai hasil evaluasi</b>	100	68,93	69,45
	<b>Tingkat akuntabilitas kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber : Kementerian PANRB, B/467/AA.05/2022 – 7 Maret 2022

Pada komponen penilaian, perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja dan nilai hasil evaluasi mengalami peningkatan yang membawa Kabupaten Kudus ke kategori B. Kabupaten Kudus sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih diperlukan perbaikan.

Selain melalui evaluasi SAKIP, kinerja pemerintah daerah juga dilakukan penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kudus yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20  
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,34	12,86
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,75	5,99
	III. Reform	30,00	16,50	16,75
	Total Komponen Pengungkit	60,00	32,59	35,60
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,65	7,83
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10	8,66
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,35	8,04
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,58	7,39
	Total Komponen Hasil	40,00	34,67	31,92
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,26	67,52

Sumber : Kementerian PANRB, Surat Nomor B/441/RB.06/2022 - 7 Maret 2022

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai area pemenuhan dan reform.

Namun perlu kami sampaikan bahwa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus (AKIP) belum mampu mencapai target tahun 2021 dalam RPJMD yaitu 79 nilai IRB dan 75 nilai AKIP hal ini disebabkan karena masih kurangnya penerapan disebagian Perangkat Daerah untuk berkinerja dengan transparan dan akuntabel.

Untuk target pencapaian tahun 2023 yaitu 90 untuk Indeks Reformasi Birokrasi dan 83 untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja, perlu upaya keras untuk dapat mencapainya. Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai target adalah :

1. Mengajak pimpinan untuk menjaga komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi dan SAKIP
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi, Pokja RB serta stakeholders terkait untuk sinergitas pelaksanaan SAKIP dan RB.
3. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi 2021-2025 agar pembangunan Reformasi Birokrasi dapat terarah.
4. Menyusun Renaksi/ Rencana Kerja pelaksanaan RB pada masing-masing Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan PMPRB di seluruh Perangkat Daerah baik pada kriteria utama, pendamping, pengikut sesuai Permenpan 88/2021
6. Pelaksanaan pendampingan Tindak Lanjut hasil evaluasi SAKIP dan RB dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
7. Memantau efektifitas pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi RB dan SAKIP

8. Penyempurnaan pada dokumen perencanaan meliputi perubahan renstra, indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Individu pada setiap Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah
9. Monitoring dan Evaluasi berkala atas pencapaian kinerja sebagai kontrol untuk pencapaian kinerja yang optimal
10. Bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah

**2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

**2.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

**2.3.1.1 PENDIDIKAN**

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, berkenaan dengan hal ini berbagai upaya dilaksanakan guna mendukung kebijakan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelaksanakan urusan pendidikan dimaksudkan guna memenuhi terhadap dukungan prioritas nasional melalui pemenuhan target SPM, SDGs dan berbagai target lain termasuk prioritas daerah guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Gambaran dari berbagai indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21  
 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK PAUD	76,55	89,46	76,01	102,86	118,59
2	APK SD/MI/Paket A	107,78	107,29	107,08	105,90	110,17
3	APK SMP/MTs/Paket B	107,23	83,12	86,49	88,32	105,37
4	APM SD/MI/Paket A	99,83	88,44	88,61	86,17	99,29
5	APM SMP/MTs/Paket B	97,97	84,27	86,21	76,67	82,08
6	APS usia 7 – 12 Th	103,79	118,42	100,78	104,78	103,34
7	APS usia 13 – 15 Th	102,27	118,42	86,94	78,06	117,77

Sumber : SIPD- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2022

Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat data tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat peningkatan nilai APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B. Maknanya Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya mengendalikan penurunan angka partisipasi yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Terhadap capaian indicator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22  
Elemen data dan capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Tahun 2021

NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
				Elemen data	Capaian Kinerja
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	.....%	22.977	83,89
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		27.391	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	.....%	84.273	99,29
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		84.873	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	.....%	33.495	82,08
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		40.810	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	.....%	1.467	10,83
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		13.544	

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, LPPD Tahun 2022

Tabel 2.23  
Elemen data dan capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci Output Tahun 2021

NO IKK	IKK Output	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
<b>PENDIDIKAN PAUD</b>				
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Unit	321	321
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	300	300
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	0	0
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	1.825	1.825
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	2.792	2.792



NO IKK	IKK Output	SATUA N	Elemen data	Capaian Kinerja
6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	2115	2115
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	511	511
<b>PENDIDIKAN DASAR</b>				
1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Unit	471	421
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	53.960	53.960
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang		
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	53.960	53.960
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	3.566	3.566
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	4.121	4.121
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	844	844
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	707	707
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	1.820	1.820
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang		
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	285	285





NO IKK	IKK Output	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang		
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	422	422
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang		
<b>PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA</b>				
1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Unit	50	50
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang		
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	20.727	20.727
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	20.727	20.727
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	1.502	1.502
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang		
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	1.636	1.636
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	236	236
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	302	302
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang		
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	802	802
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang		












NO IKK	IKK Output	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	38	38
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang		
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	214	214
<b>PENDIDIKAN KESETARAAN</b>				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Orang	9	9
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	1467	1467
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	0	0
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	340	227
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	351	351
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	322	322
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	0	0
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	14	14

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, LPPD Tahun 2022

Adapun kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.24  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENAN GGUNG JAWAB
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	101,80%	99,15%	98,67%	101,80%	110,17%	101,87%	108,90		Disdikpora
2.	APK SMP/MTs	114,75%	115,51%	116,08%	114,75%	105,37%	115,49%	91,24		Disdikpora
3.	APM SD/MI/Paket A	99,83%	88,61%	86,17%	99,83%	99,29%	99,83%	99,46		Disdikpora
4.	APM SMP/MTs /Paket B	97,97%	86,21%	76,67%	97,97%	82,08%	97,97%	83,78		Disdikpora

5.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19%	100,78%	104,05%	103,19%	103,34%	103,19%	100,15		Disdikpora
6.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27%	120,81%	78,06%	102,27%	117,77%	102,27%	115,16		Disdikpora
7.	Persentase sekolah terakreditasi A	73,36%	74,69%	80,42%	73,96%	73,32%	74,36%	98,60		Disdikpora
8.	APK PAUD	89,46%	76,01%	102,86%	89,78%	118,59%	90,00%	131,77		Disdikpora
9.	APK pendidikan kesetaraan	1,37%	2,14%	2,20%	1,40%	1,56%	1,42%	109,86		Disdikpora
10.	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	94,01%	95,93%	94,52%	94,77%	96,24%	95,28%	101,01		Disdikpora
11.	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	91,99%	95,40%	92,03%	92,05%	89,74%	92,09%	97,45		Disdikpora
12.	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	65,06%	62,14%	57,67%	68,06%	75%	70,06%	107,05		Disdikpora
13.	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	35,60%	36,14%	24,56%	37,04%	24,16%	38,00%	63,58		Disdikpora
14.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	Na	65,89%	100%	91,06%	87,89%	95,52%	92,012		Disdikpora
15.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	Na	90,96%	99,88%	88,45%	91,74%	95,10%	96,47		Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)								99,77		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan tahun 2021 yang terdiri dari 15 indikator, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai dan 8 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI karena usia siswa dibawah 7 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI sebanyak 93.504 siswa dari jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 84.873 orang, sehingga APK SD/MI meningkat terutama untuk sekolah swasta yang batasan umur masuk sekolah lebih fleksibel. Dan Indikator Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun karena adanya siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kudus terutama yang terintegrasi dengan Ponpes, yaitu untuk usia 7 -12 sebanyak 87.709 siswa dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 84.873 orang, dan untuk usia 13-15 tahun sebanyak 48.060 siswa dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 40.810 orang. Sedangkan Indikator APK PAUD karena jumlah siswa PAUD sebanyak 32.483 siswa dari jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 27.301 orang, hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran orang tua mengenai Pendidikan usia dini sehingga rentang usia siswa PAUD semakin lebar dan jumlah siswa PAUD semakin meningkat. Indikator APK Kesetaraan juga meningkat karena adanya peningkatan akses pendidikan kesetaraan, yaitu sebanyak 2.565 siswa telah mengikuti Pendidikan kesetaraan dari jumlah penduduk usia 7-18 tahun sebanyak 164.423 orang. Untuk indikator persentase sarpras Pendidikan dasar dalam kondisi baik karena dari jumlah sekolah sebanyak 475 unit, sebanyak 457 sekolah dalam keadaan baik. Pada Indikator pendidik Pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik, sebanyak 2.350 guru telah bersertifikasi dari jumlah guru sebanyak 3.133 orang, hal ini disebabkan banyaknya pendidik yang menempuh jalur pengambilan sertifikasi secara mandiri guna peningkatan kompetensi dan kesejahteraannya.

Tabel 2.25  
Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (84.533)	1 Tahun	104,06 % (87.966)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 % (2.200)	1 Tahun	66,7 % (1.467)
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang bepartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 % (4442)	1 Tahun	67,8 % (300)

Sumber : *spm.bangda.kemendagri.go.id*, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dokumen LPPD Kabupaten Kudus, 2022

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2021 yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar pendidikan yaitu Pendidikan Dasar terdiri dari 3.904 personil; Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 715 personil; dan Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 322 personil.

**2.3.1.2 KESEHATAN**

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021, telah merubah berbagai tatanan kebijakan yang berdampak ke semua sektor pembangunan, terutama pada bidang Kesehatan. Berbagai langkah strategispun diambil dalam rangka mencegah penyebaran/ penularan infeksi. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, kiranya perlu meningkatkan kewaspadaan dan dapat mempelopori kehidupan *new normal*. Gambaran tahun 2021 di bidang kesehatan dapat diketahui dari berbagai data dan indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2.26  
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefar- masian	Tenaga Kesh Masy.	Tenaga Kesh Lingk.	Tenaga Gizi	Ahli Tekn Lab. Medik
1. Kaliwungu	117	6	359	132	65	5	6	11	23
2. Kota	86	11	196	120	43	13	6	10	19
3. Jati	162	12	865	153	94	12	7	16	31
4. Undaam	9	2	27	43	4	5	0	3	1
5. Mejobo	8	2	33	48	5	5	2	4	3
6. Jekulo	35	5	71	67	8	7	3	3	6
7. Bae	5	2	15	25	5	6	2	2	1
8. Gebog	15	2	28	41	4	5	3	3	3
9. Dawe	9	2	40	63	5	8	2	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>446</b>	<b>44</b>	<b>1634</b>	<b>692</b>	<b>233</b>	<b>66</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>90</b>

Sumber : Dinas Kesehatan – BPS, Kudus Dalam Angka, 2022



Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan menjadi bagian yang sangat penting, apalagi dengan adanya Covid-19 yang saat ini telah bergeser dari pandemi ke endemi, dan apabila terdapat suatu hal serupa yang memerlukan penanganan, maka dengan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung hal tersebut dapat diminimalisir. Adapun ketersediaan layanan kesehatan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27  
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan Posyandu Tahun 2021

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Pusk Rawat Inap	Pusk Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
1. Kaliwungu	2	0	2	-	3	89
2. Kota	5	0	-	3	7	118
3. Jati	2	-	-	2	7	90
4. Undaan	-	-	1	1	4	75
5. Mejobo	-	-	2	-	2	66
6. Jekulo	1	-	2	-	4	169
7. Bae	-	-	-	2	4	52
8. Gebog	-	-	1	1	1	66
9. Dawe	-	-	2	-	1	110
Jumlah	10	3	10	9	33	835

Sumber : Dinas Kesehatan, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

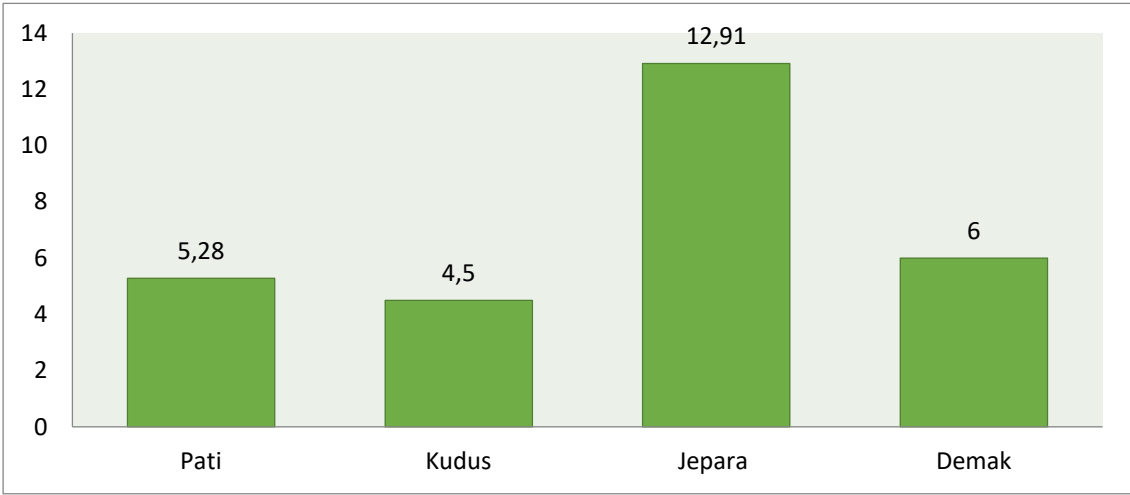
Dukungan Kabupaten Kudus dalam menggali informasi adanya kasus stunting, telah diupayakan melalui pendataan terhadap indikator prevalensi stunting tahun 2021, adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28  
Prevalensi Stunting Tahun 2021

No	KECAMATAN	Jumlah Balita Ditimbang	Stunting TB/U			
			Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	KALIWUNGU	7.248	122	307	6.766	53
2	KOTA KUDUS	6.666	65	139	6.408	54
3	JATI	7.999	25	89	7.861	24
4	UNDAAN	5.710	61	298	5.342	9
5	MEJOB0	5.939	78	144	5.655	62
6	JEKULO	6.371	68	155	6.100	48
7	BAE	4.354	47	152	4.109	46
8	GEBOG	9.401	84	218	9.067	32
9	DAWE	7.262	153	549	6.526	34
	JUMLAH	60.950	703	2.051	57.834	362

Sumber data : Dinas Kesehatan (EPPBGM), 2022

Data di atas menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Kudus total (dari kategori sangat pendek dan pendek) sebanyak 2.754 kasus (4,5%).






**Gambar 2.17** Persentase Stunting Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2021

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa angka stunting Kabupaten Kudus paling rendah dibandingkan dengan kabupaten sekitar (Pati, Jepara dan Demak). Meskipun demikian masih diperlukan penanganan penurunan angka stunting Balita di Kabupaten Kudus di tahun mendatang.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.29  
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJ AWAB
1.	Angka Kematian Ibu	65,97	72,90	101,57	59,27	150,95	52,78	-86	▼	Dinas Kesehatan
2.	Angka Kematian Bayi	8	8,15	8,26	7,3	6,75	6,9	102,17	●	Dinas Kesehatan
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	8,09 %	4,71%	18,87%	4,5%	18,60 %	175,81	●	Dinas Kesehatan
4.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	96,8 %	89,70	100%	94,60%	100%	94,60	▶	Dinas Kesehatan
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	69,6 %	93,05	100%	91,54%	100%	91,54	▶	Dinas Kesehatan
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	99%	99,00	100%	96,25%	100%	96,25	▶	Dinas Kesehatan
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,0%	97,65%	94,58	91,3%	96,10%	92,7%	103,67	●	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJ AWAB
8.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	67,08%	100,00%	-	-3%	-	73,66 %	135,76		RSUD dr. Loekmonoha di
9.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	95,7 %	100%	100%	96,15	100%	96,15		RSUD dr. Loekmonoha di
10.	Cakupan pelayanan BLUD	100%	98,5 %	93,33 %	100%	96,72	100%	96,72		RSUD dr. Loekmonoha di
Rata-rata capaian kinerja (%)								90,67		
Predikat kinerja								Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Kesehatan tahun 2021 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 4 indikator telah tercapai dimana 1 indikator telah selesai pada tahun 2019, sebanyak 5 indikator akan tercapai tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Angka Kematian Ibu karena dari target Angka Kematian Ibu pada RPJMD sebesar 52,78/100.000 KH (Kelahiran Hidup), terealisasi sebesar 150,95/100.000 KH atau sebanyak 21 kasus. Seluruh kematian ibu telah dilakukan audit maternal perinatal untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan Riwayat dan kondisi ibu sejak masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta konologis kasus sampai terjadinya kematian. Dari hasil audit tersebut penyebab kematian karena Covid-19 (17 kasus), pendarahan (2 kasus) dan penyakit penyerta hipertensi dalam kehamilan (2 kasus). Upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan angka kematian ibu melalui pencegahan dan pengobatan secara dini terhadap hipertensi pada ibu hamil, perawatan kesehatan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan, peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin, serta menjaga protokol kesehatan dan pengoptimalan vaksinasi.

Indikator yang telah melampaui target yaitu indikator Angka Kematian Bayi tahun 2021 sebesar 6,75/1.000 KH atau sebanyak 94 kasus, karena telah dilaksanakan upaya percepatan penurunan AKI dengan mengatasi masalah komplikasi pada saat kehamilan, persalinan nifas serta penanganan bayi neonatus. Sedangkan Indikator cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan yang terdiri dari cakupan pelayanan dasar masyarakat telah tercapai 100%, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tercapai 88,30% serta cakupan pelayanan perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDMK tercapai 100%, sehingga didapatkan capaian untuk indikator cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan sebesar 96,10%.

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target indikator cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 5 indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (94,86%), persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (100%), persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (98,63%), persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (82,90%) dan

persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (79,52%), melalui optimalisasi penjangkauan kesehatan anak kelas 1 SD dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator cakupan pelayanan pengendalian masyarakat dan cakupan desa/kelurahan UCI dan IDL melalui peningkatan pelayanan kesehatan kepada usia lanjut, penderita DM, ODGJ, TB dan HIV serta mengoptimalkan pelayanan imunisasi bagi bayi dan baduta sesuai petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemic Covid-19.

Indikator Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan rujukan dan Cakupan pelayanan BLUD belum dapat mencapai target akhir dari RPJMD disebabkan belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya pemulihan layanan kesehatan akibat pandemi covid-19 dan belum optimalnya akses serta kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang kesehatan, diukur melalui pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.30  
Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu	Realisasi 2021
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	1 Tahun	94,86%
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	1 Tahun	100%
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	1 Tahun	98,63%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	1 Tahun	82,90%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	79,52%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	100%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	100%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	1 Tahun	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu	Realisasi 2021
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	1 Tahun	40,81%
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100%	1 tahun	100%

Sumber : *spm.bangda.kemendagri.go.id*, Dinas Kesehatan, Dokumen LPPD Kabupaten Kudus, 2022

Capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 sebesar 90,27%, artinya masih terdapat 9,73% masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun capaian tahun 2021 sebesar 91,39%, peningkatan capaian dari tahun 2020 ini merupakan prestasi di urusan Kesehatan, dimana pada masa pandemi covid-19 segala sumber daya dikerahkan untuk penanganan sekaligus perbaikan pelayanan pada masyarakat. Realisasi paling rendah pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis karena adanya pembatasan kegiatan dalam rangka penemuan dan pelayanan penderita TB selama pandemi covid-19 dari metode penemuan kasus secara aktif (mendatangi masyarakat terduga TB) menjadi pasif (menunggu masyarakat terduga TB datang ke fasilitas kesehatan).

**2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendukung Indikator kinerja daerah yaitu : Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap, adapun perkembangan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31  
Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Kudus tahun 2017 - 2021









No	Kondisi Infrastruktur	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
I	Jembatan						
1	Baik	Unit	293	295	314	312	312
		%	87,46	88,06	88,20	87,64	87,64
2	Sedang	Unit	0	3	0	9	9
		%	0,00	0,90	0	2,53	2,53
3	Mantap	%	87,46	88,06	88,20	90,17	90,17
4	Rusak Ringan	Unit	42,00	40,00	41,00	33,00	33,00
		%	12,54	11,94	11,52	9,27	9,27
5	Rusak Berat	Unit	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
		%	0,30	0,30	0,28	0,56	0,56
II	Jalan, Irigasi, Sanitasi dan Air Minum						
1	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007
2	Persentase panjang jalan kondisi baik	%	83,9	85,54	90,45	91,94	92,34

No	Kondisi Infrastruktur	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	96,88	97,08	100	100	100
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	86	60,21	62,03	63,03	64,00
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	79,42	80,63	86,28	87,64	87,97
6	Persentase penduduk berakses air minum	%	91	95,02	95,75	97,03	98,00
7	Infrastruktur mantap	%	84,21	78,61	81,29	83,20	83,60

Sumber : SIPD – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.32  
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	83	84,0	85	86	95	88	107,95		PUPR
2.	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63	86,3	87,64	83,00	87,90	85,00	103,41		PUPR
3.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	86,2	91,94	90,03	92,34	92,83	99,47		PUPR
4.	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88,06	90,5	90,17	89,84	90,17	91,07	99,01		PUPR
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21	62,0	63,03	64	64	66	96,97		PUPR
6.	Persentase penduduk berakses air minum	95,02	95,8	95,37	98	98	100	98		PUPR
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,08	100	100	100	100	100	100		PUPR
8.	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	100		PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)								100,60		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 8 indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai dan 4 indikator lainnya berstatus akan tercapai, dengan Predikat kinerja sangat tinggi. Dari tabel capaian kinerja diatas, indikator Persentase penduduk berakses air minum dan rumah tinggal bersanitasi dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:



Tabel 2.33  
Status Cakupan Air Minum Dan Sanitasi

ASPEK CAKUPAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Air Minum Layak	97,03%	98%
Air Minum Aman	33,29%	35,84%
Akses Sanitasi Dasar	100%	100%
Sanitasi Layak	86,20%	88,63%
Sanitasi Aman	14,77%	27,39%

*(sumber data: Dinas PUPR Kab. Kudus)*

Akses air minum layak penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 penduduk mencapai 97,03% dengan tingkat akses air minum aman sebesar 33,29%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak mengalami peningkatan menjadi 98% dan akses aman naik menjadi 35,84%.

Pada tahun 2020, akses sanitasi dasar penduduk Kabupaten Kudus telah mencapai 100%, dengan cakupan akses sanitasi layak sebesar 86,20% dan akses sanitasi aman sebesar 14,77%. Kemudian pada tahun 2021 realisasi capaian penduduk yang memiliki akses sanitasi layak meningkat sebesar 88,63% dengan akses sanitasi aman meningkat menjadi sebesar 27,39%.

Capaian indikator yang melampaui target yaitu Indikator persentase alat-alat berat dalam kondisi baik karena dari 22 unit alat berat sebanyak 21 unit dalam keadaan baik, sedangkan indikator persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik karena telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap DI yang dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat sehingga dapat meningkatkan ketersediaan air irigasi. Jumlah Jaringan Irigasi Kabupaten Kudus seluas 10.295 ha, dengan kondisi baik seluas 9.049,40 ha (87,90 %), kondisi rusak ringan seluas 513 ha (4,98 %), kondisi rusak sedang seluas 733 ha ( 7,12 %), dan rusak berat seluas 0%.

Upaya peningkatan persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan cara penanganan kondisi jalan rusak ringan dan berat melalui peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Panjang SK jalan Kabupaten Kudus panjang 639,262 Km, kondisi mantap sepanjang 590,295 km (92,34%) dan kondisi tidak mantap panjang sepanjang 48,967 km (7,66%).

Untuk mencapai indikator persentase jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap melalui penanganan kondisi jembatan rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan jembatan. Jumlah Jembatan Kabupaten Kudus sebanyak 356 unit, dengan kondisi baik sebanyak 312 unit (87,64%), kondisi sedang sebanyak 9 Unit ( 2,53%), dan kondisi rusak 35 unit (9,83%). Sedangkan dalam pencapaian target Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat melalui upaya menjaga kondisi drainase dalam kondisi baik antara lain pembangunan/rehabilitasi saluran drainase tuntas sampai dengan saluran pembuang, pemeliharaan saluran drainase (memperbesar *inlet* tempat masuknya air dari badan jalan, normalisasi saluran drainase, dan babat rumput di sepanjang bahu jalan). Panjang drainase Kabupaten Kudus sepanjang 591.623,25 m, dengan kondisi

baik sepanjang 259.171,25 m (43,81%), kondisi sedang sepanjang 119.493,00 m ( 20,20%), dan kondisi rusak sepanjang 212.959,00 m (36,00%). Dan dalam upaya pencapaian indikator Persentase penduduk berakses air minum, maka telah dilaksanakan peningkatan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Kondisi pelaksanaan pengelolaan penataan ruang di Kabupaten Kudus setelah ditetapkannya Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus tahun 2022-2042 yang merupakan revisi atas Perda RTRW sebelumnya dalam rangka mengakomodasi rencana dan dinamika pembangunan daerah serta sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka perwujudan rencana tata ruang maka diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

Tabel 2.34  
Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan gedung  
dan penataan lingkungan bangunan

No	Aspek Kegiatan	Kinerja	
		2020	2021
1	2	4	5
A	Penyelenggaraan Penataan Bangunan		
1	SLF yang terbit	10	13
2	Advice Plan yang dikeluarkan	84	87
3	Bangunan Publik		
	- Kejaksaan	407 m2	458m2
	- Polres		
	- Pengadilan	-	162 m2

(sumber data: Dinas PUPR Kab. Kudus)

Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan gedung diarahkan sebagai upaya mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pada tahun 2020 telah menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebanyak 10 sertifikat, dengan rekomendasi Advice Plan yang telah dikeluarkan sebanyak 84 rekomendasi serta pelaksanaan kegiatan penataan bangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Selanjutnya pada tahun 2021 telah diterbitkan SLF sebanyak 13 sertifikat, 87 buah Advice Plan, penataan bangunan gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan gedung Kantor Pengadilan Negeri Kudus

Adapun pencapaian target SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.35  
Target Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu capaian	Realisasi capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100%	Setiap tahun	100%
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/ kota	100%	Setiap Tahun	100%

Sumber : [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dokumen LPPD Kabupaten Kudus, 2022

#### 2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Kebijakan pembangunan perumahan diarahkan untuk: memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2.36  
Jumlah dan Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH		
				LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	JUMLAH
1	Kaliwungu	105.767	33.565	27.815	890	28.705
2	Kota Kudus	92.095	30.507	23.816	570	24.386
3	Jati	109.850	35.647	30.196	788	30.984
4	Undaan	78.817	26.663	21.912	1.101	23.013
5	Mejobo	79.053	25.480	21.366	825	22.191
6	Jekulo	110.806	36.812	34.678	635	35.313
7	Bae	74.233	23.735	20.114	505	20.619
8	Gebog	106.900	33.477	30.354	526	30.880




NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH		
				LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	JUMLAH
9	Dawe	109.684	35.393	28.983	1.371	30.354
<b>JUMLAH</b>		<b>867.205</b>	<b>281.279</b>	<b>239.234</b>	<b>7.211</b>	<b>246.445</b>
<b>Persentase (%)</b>				<b>97,07</b>	<b>2,93</b>	

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

Jumlah rumah di Kabupaten Kudus berjumlah 246,445 unit, rumah layak huni berjumlah 239,234 unit (97,07%), sedangkan rumah tidak layak huni berjumlah 7.211 unit (2,93%). Pada tahun 2021 upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam mencapai target tersebut yaitu memfasilitasi peningkatan rumah tidak layak huni sebanyak 318 unit dengan rincian yang bersumber dari BSPS sebesar 40 unit, DAK sebesar 58 unit, APBD Kabupaten 55 unit, Bankeupemdes Provinsi Jawa Tengah 103 unit dan dari Dana Desa sebesar 62 unit.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.37  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	98,79 %	98,97 %	99,98 %	99,03 %	98,53 %	99,14 %	99,38		PKPLH
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,82 %	98,05 %	96,77 %	98,11 %	97,07 %	98,30 %	98,49		PKPLH
3.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,23%	0,12 %	0,02 %	0,05 %	0,02 %	0,02 %	100		PKPLH
Rata-rata capaian kinerja (%)								99,29		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 3 indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dalam meningkatkan capaian indikator persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak, diupayakan untuk memberikan sosialisasi dalam menjaga lingkungan agar tertata dan tetap menjadi Kawasan non kumuh. Sedangkan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni belum dapat mencapai target karena adanya unit rumah yang layak ditingkatkan kualitasnya tetapi terkendala penanganannya karena belum terdaftar pada

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai indikator tersebut melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Dinas terkait untuk pemutakhiran DTKS. Pada urusan ini dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada urusan ini yaitu “Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun (*Goal* 1) yaitu 1) Indikator 10 : Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (100%) dan 2) Indikator 11: Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (98,53%).

Kondisi pelaksanaan pengelolaan penataan ruang di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Perda No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus tahun 2022-2042 yang merupakan revisi atas Perda RTRW sebelumnya dalam rangka mengakomodasi rencana dan dinamika pembangunan daerah serta sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah.Selanjutnya dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka perwujudan rencana tata ruang maka diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang khususnya di Kawasan perkotaan Kabupaten Kudus.

Penyelenggaraan SPM pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar : (1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam, (2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tabel 2.38  
Target dan Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 %	Batas waktu capaian	Realisasi capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 % (42)	Setiap Tahun	100% (42)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % (1)	Setiap Tahun	100% (1)

Sumber : [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id)- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**2.3.1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Berdasarkan fungsi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan untuk meminimalisir timbulnya gangguan keamanan dan kebencanaan dalam

masyarakat. Perkembangan dua tahun terakhir pelayanan bidang ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39  
Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2021

NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
				Elemen data	Capaian Kinerja
32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	%	894	89,94
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		994	
33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	2595	100,00
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		2595	
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	136.828	136.828
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	137.828	137.828
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	36.048	36.048
37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	%	46	100,00
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		46	
38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	13,304	13,304



Tabel 2.40  
Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Output Bidang Ketentraman dan  
Ketertiban Tahun 2021

NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
	<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	849	849
2	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan		Orang	1.357	1.357
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda & Perkada	2596	2596
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	3	3
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Orang	10	10
6	Tersedianya sarana prasarana minimal		SOP	1	1
	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0
		Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan			
2	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	120.384	100,00
		Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		120.384	
	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0
		Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan			
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0
		Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah			
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan	%	0	
		Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan			
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	75	0,06
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		120.384	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	36.048	29,94
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		120.384	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan	%	120.384	100,00
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		120.384	
	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>				

NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%		NA
		Jumlah seluruh penetapan status KLB			
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%		NA
		Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana			
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	110	100,00
		Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat		110	
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	36.048	100,00
		Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		36.048	
	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota		Layanan	1	46
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	Nihil	Nihil
3	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	Nihil	Nihil
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	Nihil	Nihil
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	3	3
6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	32	32
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	103	103
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran		Kegiatan	2	2

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dokumen LPPD Tahun 2022

Besarnya berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana diperkuat dengan adanya catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Kudus. terdapat sekitar 7 (tujuh) bencana yang berpotensi terjadi pada Kabupaten Kudus yaitu Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kegagalan Teknologi. Bencana-bencana tersebut tergolong bencana besar yang berpotensi memakan korban jiwa dan materi. Selain itu, jumlahnya juga tergolong banyak dan membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana. Indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana merupakan komponen penyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Berdasarkan IRBI tahun 2021, Kabupaten Kudus memiliki indeks risiko 119.71 (sedang), seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.41  
Tabel Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

Tahun	Nilai IRB	Kelas Risiko 2021
2017	131,60	Sedang
2018	131,60	Sedang
2019	131,60	Sedang
2020	130,59	Sedang
2021	119,71	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia – BNPB Tahun 2022

Dengan semua jenis ancaman dimiliki, dapat diukur dengan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Pencapaian level untuk Kabupaten Kudus memiliki Indeks Kapasitas Daerah 0,57 (sedang), seperti terlihat pada tabel berikut.







Tabel 2.42  
Hasil Kajian Kapasitas Daerah di Kabupaten Kudus

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,90	0,57	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,60		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,70		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,51		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,40		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,51		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,40		

Sumber : Kajian Risiko Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026 – BPBD Kab. Kudus Tahun 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.43  
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
1.	Cakupan penegakan perda dan perkada	75%	87%	100%	80%	100	85%	117,65		Satpol PP
2.	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	Na	98%	85%	70%	89,94	80%	112,43		Satpol PP
3.	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,36	1,36	1,34	1,36	1,34	101,49		Satpol PP
4.	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	82%	100%	100%	84%	100%	86%	116,28		Satpol PP
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 - 30 menit	15 menit	10 menit	8 menit	13,304 menit	7 menit	14,29		Satpol PP
6.	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100		Satpol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)								94,19		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 6 indikator urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu cakupan penegakan perda dan perkada karena telah dilaksanakan kegiatan penegakan terhadap perda/perkada sebanyak 2595 kali dari target sebanyak 2595 kali dalam penegakan 55 perda/perkada. Sedangkan indikator persentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas karena telah dilaksanakan penanganan sebanyak 747 kasus dari 849 kasus, yang terdiri dari penanganan terhadap PKL sebanyak 81 kasus dari 117 kasus, penanganan reklame sebanyak 275 kasus dari 275 kasus, penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) sebanyak 274 kasus dari 283 kasus, minuman keras sebanyak 22 kasus dari 30 kasus, penanganan K3 sebanyak 25 kasus daei 39 kasus dan penanganan lain-lain sebanyak 70 kasus dari 105 kasus.

Dan indikator rasio Linmas per jumlah RT karena jumlah Satlinmas mengalami penambahan anggota pada tahun 2020 meskipun tidak signifikan, dan berdasarkan hasil pemutakhiran data, jumlah anggota Satlinmas tahun

2020 dan 2021 adalah sebanyak 5.119 anggota. Hal ini disebabkan adanya rotasi dan pergantian anggota Satlinmas di beberapa Desa dikarenakan ada yang meninggal dunia dan atau memasuki usia pensiun, sehingga dilakukan penambahan anggota baru. Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa rasio jumlah kelompok penduduk (Rukun Tetangga/RT) per anggota Satlinmas adalah 1,36 dari total RT se Kabupaten Kudus 3.771. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Satlinmas hadir di setiap RT di Kabupaten Kudus. Sedangkan Cakupan Petugas Satlinmas di bandingkan dengan luas wilayah kerja dalam hektar adalah sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan area kerja setiap anggota Satlinmas adalah sebesar ± 12 hektar, dengan rasio tersebut beban setiap anggota Satlinmas relatif masuk dalam kategori cukup ideal.

Capaian kinerja indikator cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten dari jumlah kasus kebakaran yang dilaporkan sebanyak 46 kasus dan yang tertangani sebanyak 46 kasus.

Untuk indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*) selama 13,304 menit diperlukan upaya dalam meningkatnya menjadi 7 menit melalui peningkatan SDM anggota pemadam, pembentukan relawan kebakaran serta peningkatan sarpras pemadaman. Meskipun belum dapat mencapai target, namun telah dapat memenuhi standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 selama 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.44  
Target dan Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021	Batas waktu capaian	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu	100%	Setiap Tahun	100%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	100%	Setiap Tahun	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%

Sumber : [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id)- Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD, Dokumen LPPD Tahun 2022

2.3.1.6 BIDANG SOSIAL

Pada urusan ini, berbagai peraturan perundang-undangan mengamanatkan penanganan permasalahan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial). Berikut ini gambaran indikator kinerja kunci urusan sosial Kabupaten Kudus tahun 2020 – 2022.

Tabel 2.45  
Indikator Kinerja Kunci urusan Sosial Tahun 2020 - 2021

No	URAIAN	SATUAN	2020	2021
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	456	1744
2	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Orang	456	2.009
3	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Orang	39.346	31.351
4	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	Layanan	4	4
5	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM	Orang	456	2009
6	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	Tim	1	1
7	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Dijangkau	Orang	286	1744
8	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Unit	1	1
9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	Orang	286	413
10	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar	Unit	1	1
11	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	Orang	25	20
12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	50	37
13	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter	Unit	1	1 kursi roda 2 kruk
14	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	Paket	30	-
15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	Orang	30	-
16	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah		-	-
17	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Orang	-	1
18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	286	1744
19	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat		1 bl 1 kali	1 bl 1 kali
20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	40	39









21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	5	44
22	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	3	9
23	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga	Orang	2	9
24	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk	Orang	63	49

Sumber : Dokumen LPPD Tahun 2021, 2022.

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.46  
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Rasio PMKS	7,87%	7,87%	7,84 %	7,67%	9,42 %	7,50%	79,62		Dinsos P3AP2KB
2.	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	35%	37%	77%	42%	79,74%	47%	169,65		Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,6%	5,6%	15,68%	5,6%	24,54%	5,6%	438,21		Dinsos P3AP2KB
4.	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standard	60%	65%	83%	65%	71%	65%	109,23		Dinsos P3AP2KB
5.	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	Na	68%	82%	72%	82,98%	75%	110,64		Dinsos P3AP2KB
6.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100		BPBD
	Rata-rata capaian kinerja (%)							167,89		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 6 indikator urusan Sosial, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar karena sebanyak 65.168 orang PMKS telah mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 81.723 orang, dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT APBN) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST APBN) meningkat. Berbagai kebijakan pemerintah Daerah maupun Pusat berusaha

menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai stimulan bantuan sosial, sehingga realisasi capaian kinerja jauh melebihi target. Sedangkan indikator Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial karena jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang terlayani di tahun 2020 sebesar 15,68% dan tahun 2021 naik sebesar 8,86%, penghitungan ini disesuaikan dengan regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal tentang SPM Sosial dan penyelarasan target Renstra dengan target Nasional. Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif menangani PMKS sesuai standar tahun 2021 sebesar 71%, turun 18,7% dari tahun sebelumnya, namun telah mencapai target akhir periode RPJMD. Penurunan tersebut dikarenakan kekosongan tenaga Penyuluh Sosial dan bertambahnya jenis PSKS yaitu Family Care Unit. Sebanyak 10 sub PSKS dari 14 sub telah aktif melaksanakan penanganan terhadap PPKS. 10 PSKS aktif terdiri dari sub Dunia Usaha, Karang Taruna, Keluarga Pioner, LK3, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pendamping PKH, sedangkan PSKS yang tidak aktif menangani PPKS adalah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial dan Family Care Unit. Indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial tahun 2021 sebesar 82,98% diperoleh dari Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai 64.811 ruta dibagi jumlah keluarga miskin yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 78.108 ruta. capaian kinerja dibanding target akhir RPJMD sebesar 110,64%.

Indikator Cakupan pelayanan penanggulangan bencana terealisasi 100%. Bantuan logistik berupa pangan, nutrisi bayi, makanan siap saji, selimut, kasur, matras, velbed, pelampung, tenda gulung, dan perlengkapan lainnya, yang bersumber dari Dinsos Prop Jateng tersalurkan kepada korban bencana banjir di Desa Tanjungkarang, Jati Wetan, Karangrowo, Gulang, Payaman, Golantepus, Setro kalangan sebanyak 14.554 jiwa terlayani 100%.

Indikator Rasio PMKS tahun 2021 sebesar 9,4% menurun 1,76% dari capaian tahun yang lalu 7,67% karena kinerja ini bersifat *Top down*. Penurunan ini dikarenakan akibat pandemi Covid-19 sehingga menambah jumlah keluarga miskin.

Implementasi SPM urusan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dengan ruang lingkup bidang pengendalian masalah sosial meliputi: pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, Penyediaan sarana dan prasarana sosial, Penanggulangan korban bencana, Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Sosial tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.47  
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2021 %	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun	17,86 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 %	Setiap Tahun	63,3 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun	57,4 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun	100 %

Sumber : [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id)- Dinas Sosial P3AP2KB dan BPBD, Dokumen LPPD Tahun 2022

## 2.3.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 2.3.2.1 BIDANG TENAGA KERJA

Upaya pembangunan daerah melalui urusan ketenagakerjaan, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi pencari kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas SDM masyarakat merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah guna mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.48  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan  
Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2017 - 2021

KEGIATAN UTAMA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	469.843	478.592	484.530	512.319	521.094
Bekerja	453.121	462.646	465.810	483.983	501.443

KEGIATAN UTAMA		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Pengangguran Terbuka	16.722	15.946	18.720	28.336	19.651
	Bukan Angkatan Kerja	185.032	186.289	190.055	175.388	175.796
	Sekolah	54.685	64.564	51.149	43.255	42.090
	Mengurus Rumah Tangga	114.561	100.484	108.092	94.203	100.411
	Lainnya	15.786	21.241	30.814	37.930	33.295
	JUMLAH	654.875	664.881	674.585	687.707	696.890
	Persentase Pengangguran Terbuka	3,56	3,33	3,86	5,53	3,77

Sumber : BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama yang masuk pada kelompok menganggur (persentase pengangguran terbuka) mengalami penurunan, dari 5,53 persen di tahun 2020 menjadi 3,77 persen di tahun 2021 atau turun sebesar 1,76 persen. Penurunan angka TPT pada tahun 2021, karena dampak pandemi Covid19 berangsur membaik perekonomian mulai pulih dan aktivitas dunia usaha baik sektor formal, informal dan jasa memberikan peluang kesempatan bekerja dan berusaha yang luas, mengakibatkan penyerapan tenaga kerja meningkat dan adanya dukungan dari pemerintah berupa kebijakan kemudahan memberikan izin usaha.

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 tercatat 521.094 dari penduduk angkatan kerja terdapat 501.443 orang atau sekitar 96 % yang bekerja. Sehingga penduduk usia kerja yang menganggur sebesar 3,77 %, penduduk usia kerja bukan angkatan kerja sebanyak 175.796 orang terdiri dari penduduk usia sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 2.49  
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,75	71,98	71.83	74,50	74,77
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,33	3.86	5,53	3,77
3	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	10.680	8.191	10.948	7.086	7.460
4	Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan	4.338	4.219	5.174	3.226	3.957
5	Pencari kerja yang terfasilitasi pelatihan	3.736	3.112	1.568	480	1.040
6	Jumlah perselisihan ketenagakerjaan	6	17	14	16	9
7	Persentase Jumlah perselisihan ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber BPS Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Tahun 2022

Menurunnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi mulai pulih setelah pandemi covid19, aktivitas dunia usaha mulai bangkit yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat (ditunjukkan dengan tingginya angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti pelatihan ketrampilan, belum dapat terserap secara optimal).

Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang terdaftar 7.460 mengalami kenaikan 374 orang dari 7.086 di tahun 2020. Pencari kerja yang ditempatkan hanya sebesar 3.957 orang (53,04%) ditempatkan di perusahaan melalui pelayanan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja, bursa kerja / job fair dan bursa kerja online.

Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja di Kabupaten Kudus yang terfasilitasi pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus sebanyak 1.040 mengalami kenaikan 560 dibanding tahun 2020 yang hanya memfasilitasi sebanyak 480 orang dikarenakan adanya penambahan anggaran dari DBHCHT untuk penggunaan bidang kesejahteraan masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja (PMK 206 / PMK.07 / 2020).

Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun dalam kondisi yang kondusif dan aman, fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan kepada perusahaan seperti pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus pada tahun 2021 berupa penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 9 kasus dan jumlah kasus yang dapat terselesaikan dengan baik sebanyak 9 kasus atau sebesar 100% (status target tercapai).

Pandemi Covid-19 telah sangat memberikan tekanan pada pertumbuhan perekonomian yang pada akhirnya berimbas pula pada kondisi pengangguran. Hal ini terjadi karena pertumbuhan perekonomian selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga apabila pertumbuhan perekonomian melemah, maka penyerapan tenaga kerja tidak dapat berjalan dengan maksimal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran.

Tabel 2.50  
Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Bidang Tenaga Kerja Tahun Tahun 2021

NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
				Elemen data	Capaian Kinerja
41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	.....%	24	2,61
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		919	
42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	.....%	34	70,83
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan		48	
43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		NA	NA
		Jumlah tenaga kerja		NA	

44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	.....%	495	73,12
		Jumlah Perusahaan		677	
45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan	.....%	3957	53,04
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar		7460	

Sumber : Dinas Naker Inkop UKM, Dokumen LPPD Tahun 2022

Tabel 2.51  
Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Output Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021

NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>					
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kota		Ada/Tidak	tidak ada	tidak ada
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	99,96	99,96
3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Perusahaan	0	0
<b>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b>					
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2020	%	3	15,00
		keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020		20	
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	umlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2020	%	20	55,56
		jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2020		36	
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2020	%	36	3,46
		jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020		1040	
4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020	%	0	0,00
		jumlah seluruh LPK pada tahun 2020		62	
5	Persentase LPK yang	Jumlah LPK yang	%	32	51,61

NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
	memiliki perizinan	memiliki perizinan pada tahun 2020			
		jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020		62	
6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	828	
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	1040	100,00
		Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020		1040	
8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2020	%	541	52,02
		jumlah lulusan pada tahun 2020		1040	
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	34	3,27
		Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2020		1040	
10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	ΣCPMI dilatih	%	0	0,00
		ΣCPMI terdaftar		115	
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	pelatihan	0	
<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>					
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020	%	0	#DIV/0!
		jumlah perusahaan pada tahun 2020		0	
2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		0	
<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>					
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020	%	142	57,49
		Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		247	





NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	%	74	102,78
		Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		72	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	Konfederasi SP/SB : 1 Federasi SP/SB : 12 Anggora SP/SB diluar perusahaan : 109 org Anggota SP/SB di perusahaan : 92.415 org	
4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	196	91,59
		Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		214	
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	677	224,92
		Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		301	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	7	1,03
		Jumlah perusahaan pada tahun 2020		677	
7	Jumlah Mogok Kerja		Mogok	0	
8	Jumlah Penutupa Perusahaan		Perusahaan	0	
9	Jumlah Perselisihan Kepentingan		Perselisihan	0	
10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan		Perselisihan	0	
11	Jumlah Perselisihan PHK		Perselisihan	9	
12	Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK		Perselisihan	11	
13	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite		Perselisihan	2	
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan		LKS	1	
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui	Jumlah Perjanjian Bersama	%	4	40,00
		Jumlah kasus		10	

NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
	Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	perselisihan			
<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kota</b>					
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab		Lowongan Kerja	4.425	4.425
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	7.460	7.460
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab		BKK	22	22
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota		Orang	0	0
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	4	4
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab		Lembaga	0	0
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab		Perjanjian	4	4
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	3957	3957
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	0	0
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	115	115

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.52  
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
1.	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	41%	42%	45,53%	46%	53,04%	50%	106,08		Disnaker Inkop,UKM
2.	Persentase kasus yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		Disnaker Inkop,UKM
Rata-rata capaian kinerja (%)								103,04		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Sumber : Dinas Naker Inkop UKM, Dokumen LPPD Tahun 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 2 indikator urusan Tenaga Kerja seluruhnya berstatus tercapai. Capaian indikator yang melampaui target yaitu indikator persentase pencari kerja yang sudah bekerja karena adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik disektor formal maupun informal yang dapat menyerap tenaga kerja pencari kerja.

2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan khususnya dalam hal menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk kesetaraan gender, sehingga diharapkan tidak ada dikotomi antara perempuan dan laki-laki. Beberapa organisasi perempuan yang jumlah anggota terbesar di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.53  
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD, Persentase Partisipasi Perempuan dan Jumlah Perempuan Bekerja Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah DPRD Perempuan	3	3	4	4	4
2.	Jumlah Anggota DPRD	44	44	41	45	45
3.	Rasio keanggotaan DPRD perempuan	6,82%	6,82%	9,7%	8,89%	8.89%
4.	Jumlah perempuan yang bekerja	198,607	200,856	175.571	176.973	176.524
5.	Jumlah perempuan usia kerja	286,153	287,297	327.335	316.003	310.590
6.	Jumlah KK perempuan (Dukcapil)	41,855	44,486	46.506	53.987	54.257

Sumber : Sekretariat DPRD dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022.

Tabel 2.54  
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2017- 2021

No	Nama Organisasi Perempuan	Jumlah Anggota (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Muslimat NU	9.500	9.500	12.700	37.380	37.380
2.	DPD II Pengajian Al Hidayah	3.200	3.200	3.200	3.250	3.250
3.	Dharma Wanita Persatuan	6.394	6.394	6.394	5.282	5.282
4.	Aisyiyah	3.452	3.527	3.592	3.623	3.623
5.	Bhayangkari	630	660	660	615	615
6.	Persit	224	244	244	223	223
	Jumlah	23.400	23.525	26.790	50.373	50.373

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2022

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD. Jumlah anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021 sebanyak 4 orang dari jumlah anggota DPRD (semua jenis kelamin) sebanyak 45 orang, sehingga rasio keterlibatan perempuan dalam DPRD adalah 8.89%.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berorientasi pada

peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan prinsip pemberdayaan dan kesetaraan gender. Jumlah penduduk perempuan yang relatif lebih banyak dibanding laki-laki merupakan aset bagi daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah. Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan diperlukan pembekalan pada perempuan antara lain dengan memajukan industri rumahan yang relatif banyak ditangani oleh perempuan. Jumlah perempuan yang bekerja dari tahun 2019 sebanyak 175.571 orang naik menjadi 176.973 orang di tahun 2020 dan menurun menjadi 176.524 orang di tahun 2021, dikarenakan pandemi covid-19. Meskipun demikian, tetap menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kudus turut menyumbang dalam peningkatan pendapatan di keluarga dan peningkatan perekonomian daerah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 sebesar 64,92%, menurun di tahun 2020 menjadi 63,98% dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 64,05%. Hal ini menunjukan partisipasi angkatan kerja perempuan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.55  
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak  
dari Tindakan Kekerasan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KDRT	29	14	24	23	9
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	29	14	24	23	9
3.	Persentase penyelesaian KDRT	100	100	100	100	100
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	28	31	22	30	17
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	28	31	22	30	17
6.	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
8	Rasio KDRT	0,013	0,006	0,011	0,024	0.009

Sumber : Dinas Sosial - JPPA Kudus, 2022

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT relatif fluktuatif dari tahun 2017 sebanyak 29, berkurang menjadi 14 kasus di tahun 2018, naik kembali menjadi 24 kasus di tahun 2019 namun turun kembali menjadi 23 di tahun 2020 dan turun lagi di tahun 2021 menjadi 9 kasus.. Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada Dinsos, P3AP2KB Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 30 kasus menurun menjadi 17 kasus pada Tahun 2021. Dari total 26 kasus tersebut berhasil mencapai persentase penyelesaian kasus sebesar 100%.

Tabel 2.56  
Cakupan layanan rehabilitasi sosial Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban	100	100	100	100	100

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu					
2.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
4.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Kudus sangat serius dalam melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100%.Berikut data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan sampai dengan layanan reintegrasi sosial tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Kudus, sebagaimana tabel di atas.

Berkaitan dengan angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

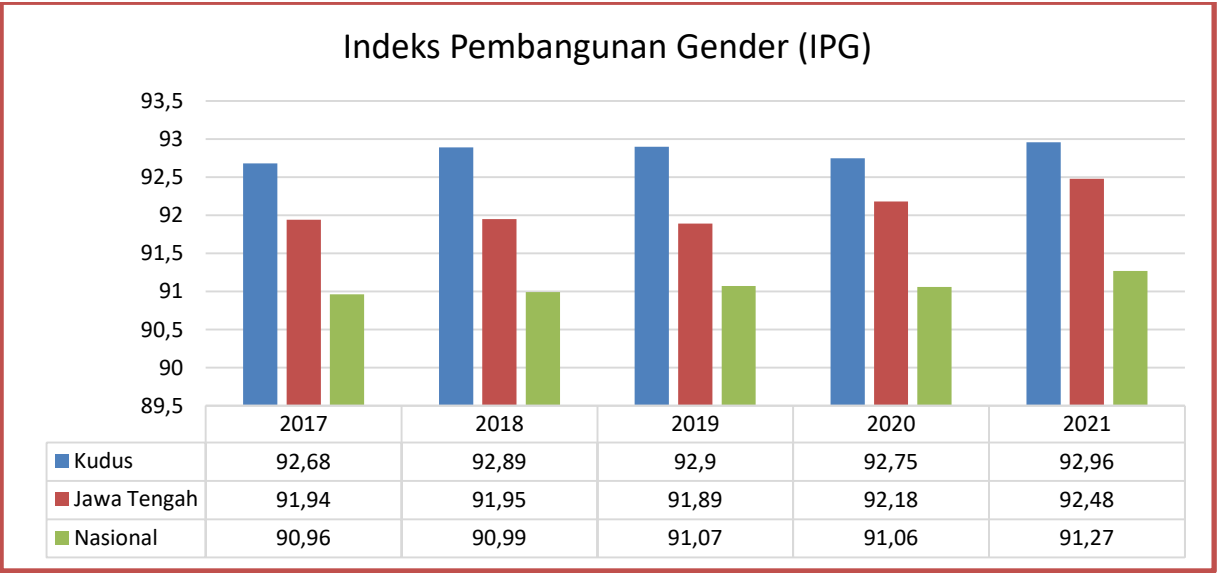
Tabel 2.57  
Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
I	Angkatan Kerja		208.443	212.494	202.183	198.945
1	Bekerja		172.584	175.571	176.973	176.524
	Persentase Yang Bekerja		82,80%	82,62%	87,53%	88,73%
2	Menganggur		35.859	36.923	25.210	22.421
	Persentase Yang Menganggur		17,20%	17,38%	12,47%	11,27%
II	Bukan Angkatan Kerja		114.713	114.841	113.820	111.645
1	Sekolah		48.854	56.543	55.197	53.239
2	Mengurus Rumah Tangga		65.760	56.813	57.283	57.088
3	Lainnya		99	1.485	1.340	1.318
III	Penduduk Usia Kerja Perempuan		323.156	327.335	316.003	310.590
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		64,50%	64,92%	63,98%	64,05%

Sumber : BPS 2022, (Kudus Dalam Angka 2021)

Berdasar tabel diatas, jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, baik dari yang bekerja dan yang menganggur.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Rasio IPM perempuan dengan laki-laki, dengan interpretasi semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

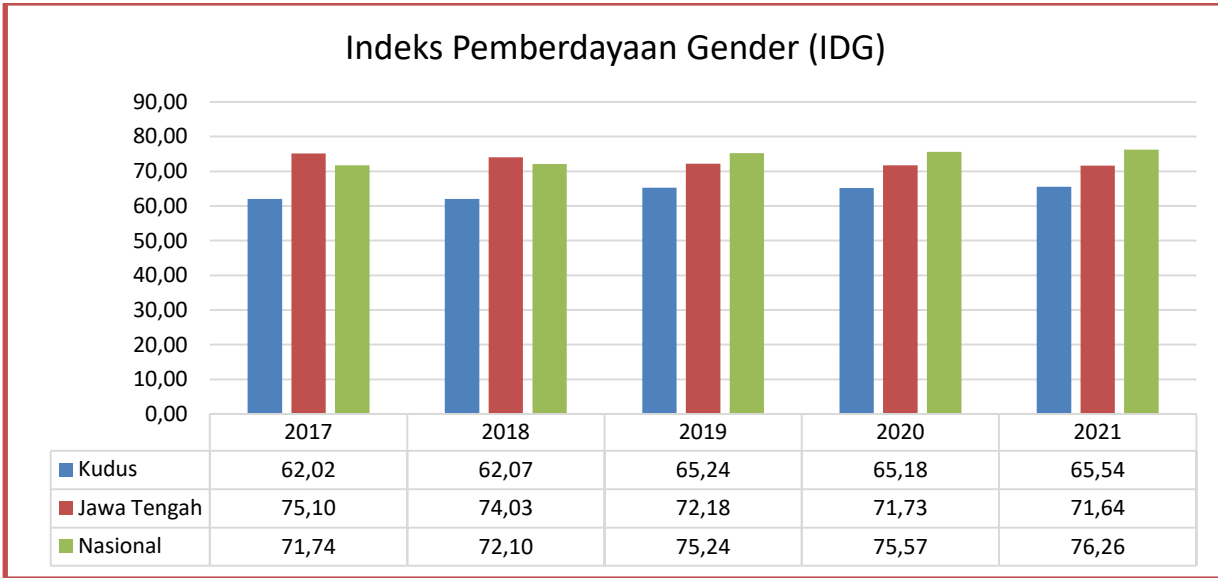


Sumber : BPS Tahun 2022, Bappeda (Data Diolah 2022)

**Gambar 2.18** Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus, Jateng dan Nasional

Berdasarkan tabel di atas, IPG Kabupaten Kudus setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan IPG Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitar. Meski begitu IPG Kabupaten Kudus tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020.

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. Adapun IDG Kabupaten Kudus tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, (Bappeda data diolah 2022)





**Gambar 2.19** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kudus dan Sekitar

Berdasarkan gambar di atas, IDG Kabupaten Kudus tahun 2021 mengalami peningkatan. IDG Kabupaten Kudus berada lebih rendah dibanding Jateng dan Nasional.

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target

indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.58  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,02	62,07	63	65,18	63,02	103,43		Dinsos P3AP2KB
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,50 %	71.57%	71,64 %	71,71 %	64,05 %	71,85%	89,14		Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase pekerja perempuan	60,07 %	60,25%	82,62 %	60,61 %	88,73 %	60,97%	145,53		Dinsos P3AP2KB
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		Dinsos P3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)								109,53		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 4 indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang melampaui target yaitu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan indikator persentase pekerja perempuan karena dari jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 176.524 orang dari angkatan kerja perempuan sebanyak 198.945 orang, serta dukungan minat bekerja perempuan di sektor formal dan informal.

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan telah tercapai 100%. Dari laporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak terdapat 26 kasus dan dapat diselesaikan di unit layanan terpadu perempuan dan anak.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merupakan perbandingan antara angkatan kerja perempuan sebanyak 198.945 orang dengan penduduk usia kerja perempuan sebanyak 310.590 orang. Tingkat capaiannya belum dapat mencapai target karena banyak penduduk perempuan yang memasuki usia kerja 15 – 64 tahun memilih menjadi Ibu Rumah Tangga (bukan angkatan kerja) bukan bekerja (angkatan kerja).



2.3.2.3 PANGAN

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kudus tergolong baik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59  
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama (ton) Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Padi	156.414	160.096	166.494	167.878	161.791
2.	Jagung	26.010	30.057	26.128	18.584	17.516
3.	Ketela pohon	23.195	31.396	31.441	2.063	17.509
4.	Ubi jalar	1.189	1.569	1.158	105	767
5.	Kacang tanah	479	687	274	363	203
6.	Kedelai	164	427	190	47	65
7.	Kacang hijau	4.496	4.519	5.729	4.213	4.784

Sumber : SIPD - Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Pada tahun 2021 produksi padi sebanyak 161.791 ton padi atau ekuivalen 101.507 ton beras. Bila konsumsi sebanyak 70.533 ton, maka terdapat surplus beras sebanyak 30.974 ton. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produk dalam negeri, pasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan. Sebagai acuan konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012, untuk tingkat konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram, sedangkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 63 gram. Pada tahun 2021 rata – rata konsumsi energi masyarakat kabupaten Kudus telah mencapai 3.063 kkal/kapita/hari, jika dilihat dari tingkat konsumsi angka konsumsi energi masyarakat kabupaten kudus tahun 2021 sudah melebihi angka konsumsi energi nasional. Tingkat ketersediaan energi di Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah sebesar 2.798 kkal/kapita/hari yang berarti telah melampaui angka nasional sebesar 2.400 kkal/kapita/hari Tingkat keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Pola Pangan Harapan (PPH), dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kudus, dapat diperoleh gambaran kuantitas konsumsi masyarakat berdasarkan konsumsi energi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60  
Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2017 – 2021

No	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi/Standar Nasional (Kkal/kap/hr) 2017	Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	1.075	887,1	907	98,7	1.223	1032
2	Umbi-umbian	129	31	48,2	9,9	35	127
3	Pangan Hewani	258,0	288	238,7	41,4	253	200

4	Minyak & Lemak	215,0	230	268,8	0	197	618
5	Buah/Biji berminyak	64,5	20,1	16,4	0,9	17	80
6	Kacang-kacangan	107,5	175,6	189,7	10,5	68	80
7	Gula	107,5	70,4	86,1	9,4	116	451
8	Sayur dan buah	129,0	133,4	145,5	77,1	106	209
9	Lain-lain	64,5	8,3	22,4	43,2	48	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2.150,0</b>	<b>1.844,9</b>	<b>1.922,8</b>	<b>2.010</b>	<b>2.062</b>	<b>2.798</b>

Lanjutan

No	Kelompok Pangan	Skor PPH maks (%)	Skor PPH Kabupaten Kudus (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	25.0	20,6	21,1	25	25	21.51
2	Umbi-umbian	2.5	0,7	1,1	0,7	0.8	2.5
3	Pangan Hewani	24.0	24	22,2	24	23.6	16.67
4	Minyak & Lemak	5.0	5	5	5	4.6	5.00
5	Buah/Biji berminyak	1.0	0,5	0,4	0,2	0.4	1.00
6	Kacang-kacangan	10.0	10	10	6	6.3	6.67
7	Gula	2.5	1,6	2	2	2,5	2.50
8	Sayur dan buah	30.0	30	30	27	24.8	30.00
9	Lain-lain	-	0	0	0	0,0	-
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>92,5</b>	<b>91,8</b>	<b>90</b>	<b>87.9</b>	<b>85.84</b>

Sumber : SIPD - Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Dari tabel tersebut, didapat bahwa pada tahun 2021 Standar Nasional Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.150 Kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dari AKE masyarakat Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah 2.798 Kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari sisi energi, konsumsi energi masyarakat di Kabupaten Kudus sudah melebihi standar nasional. Tingkat ketersediaan energi di kabupaten kudus sebesar 2,798 kkal/kapita/hari telah melebihi angka standart tingkat ketersediaan energi nasional yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Dari angka angka tersebut berarti sebenarnya energi yang dibutuhkan masyarakat di kabupaten Kudus telah tersedia, hanya masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan. Ini terlihat pula dari kualitas konsumsi, yaitu dari skor Pola Pangan Harapan (PPH)konsumsi, maka skor PPH konsumsi Kabupaten Kudus tahun 2021 mencapai 85,84% yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2020, sehingga masih perlu senantiasa digalakkan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Data desa binaan penyuplai logistik beserta lumbung pangan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61  
Lumbung Pangan di Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Status	
			Aktif	Tdk aktif
1	Jekulo	Jekulo		V
		Hadipolo	V	
		Terban	V	
		Bulungkulon		V
		Gondoharum	V	
2	Mejobo	Golantepus		V
		Temulus		V
		Mejobo	V	
		Hadiwarno	V	

No	Kecamatan	Desa	Status	
			Aktif	Tdk aktif
		Kirig	V	
3	Jati	Megawon	V	
		Pasuruan Kidul	V	
		Tanjung Karang	V	
4	Undaan	Wates		V
		Sambung	V	
		Medini	V	
		Kalirejo	V	
5	Kaliwungu	Papringan	V	
6	Gebog	Getassrabi		V

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Dilihat dari keberadaan lumbung pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus memang belum semuanya aktif, hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas yang ada di lumbung dimana bangunan lumbung sebagian besar belum dilengkapi dengan fasilitas untuk pengeringan baik berupa lantai jemur maupun mesin pengering, selain itu akses jalan masuk ke lumbung juga belum memadai sehingga masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan lumbung sendiri juga perlu untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga pemanfaatan lumbung akan lebih optimal.

Dari sisi kelembagaan kelompok lumbung masih perlu terus dibina sehingga kelembagaan lumbung akan terus berkembang, mampu melaksanakan manajemen kelompok dengan baik dan diharapkan menjadi kelompok lumbung modern yang bisa menjadi pendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.62  
Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketersediaan pangan utama	110,3	117	123,93	176,59	161,24
2	Persentase keamanan pangan	77	84	83,33	90	93
3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	89	70	88,89	94,44	100

Sumber : SIPD - Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Persentase ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dari 110,3 di tahun 2017 menjadi 161,23 persen di tahun 2021, demikian halnya dengan persentase penanganan daerah rawan bencana dari 89 di tahun 2017 meningkat menjadi 100 di tahun 2021, dan indikator persentase keamanan pangan juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang semula sebesar 77 menjadi 93. Adapun hal – hal yang dapat menjelaskan perhitungan keamanan pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63  
Hasil Uji Laboratorium Produk Pangan Segar Di Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Produk	Jumlah Sampel (buah)	Jumlah Sampel Aman (buah)	Sampel Aman (%)	Ket.
1	Sayuran	8	6	75	Sawi, Bawang merah, timun, tomat, cabai, kacang panjang




No	Produk	Jumlah Sampel (buah)	Jumlah Sampel Aman (buah)	Sampel Aman (%)	Ket.
2	Serelia	3	3	100	Beras Q, Beras poktan Tani Makmur, Kopi robusta
3	Buah2an	4	4	100	Jambu poktan Kramat makmur, Jeruk pamel, Mangga dan Pepaya
	JUMLAH	15	13	86	

Sumber: Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kementerian Pertanian, 2022

Kondisi keamanan pangan khususnya keamanan pangan produk segar masih cukup memprihatinkan, hal ini terlihat dari masih dijumpainya kandungan residu pestisida pada tanaman sayuran. Pestisida yang seharusnya digunakan untuk membasmi serangga dan hama tanaman, ternyata banyak pula yang meracuni manusia. Korban keracunan di lapangan sudah tentu adalah para petani atau keluarganya, sedangkan korban keracunan di dalam rumah, siapa lagi kalau bukan mereka yang dengan gegabah menggunakan pembasmi serangga serta mereka yang tidak sadar bahwa beberapa jenis bahan pangan yang mereka beli dari pasar, khususnya buah dan sayuran, mungkin saja mengandung residu pestisida yang membahayakan.

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.64  
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENAN GGUNG JAWAB
1.	Persentase ketersediaan pangan utama	117%	100%	176,59 %	100%	161,12 %	100%	161,12		Dispersi dan pangan
2.	Persentase keamanan pangan	84%	86%	90%	88%	93%	90%	103,33		Dispersi dan pangan
3.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	70%	80%	94,44%	90%	100%	100%	100		Dispersi dan pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)								121,48		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		


Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 3 indikator urusan Pangan seluruhnya berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target antara lain indikator persentase ketersediaan pangan utama karena dipengaruhi tingginya produksi pangan utama dan pasokan pangan dari luar daerah, yaitu dengan jumlah cadangan pangan sebanyak 139.722.598 kg dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 867.205 jiwa, maka persentase penyediaan pangan mencapai 161,12%.

2.3.2.4 PERTANAHAN

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.65  
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan





No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase luas tanah bersertifikat	67,54 %	74,75 %	74,80 %	71,54 %	79,93 %	74,84 %	106,80		PUPR
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja							Sangat tinggi		




Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021 pada indikator urusan pertanahan, capaian kinerjanya berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja tersebut telah melampaui target karena dari tanah seluas 425.160.000 ha di Kabupaten Kudus, telah bersertifikat seluas 339.682.289 Ha.

2.3.2.5 LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.66  
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks kualitas air	46,00	46,00	47,22	48,42	47	50,85	92,43		PKPLH
2.	Indeks kualitas udara	89,07	89,07	90,34	91,49	79,47	93,92	84,61		PKPLH
3.	Indeks tutupan lahan	50,00	56,00	58,51	58,42	58,90	60,85	96,79		PKPLH
4.	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	17%	20%	27,90 %	34%	47,06 %	50%	94,12		PKPLH

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUJAWAB
	lingkungan hidup									
5.	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5%	9%	14,28%	5%	17,78%	5%	355,6		PKPLH
6.	Persentase penanganan volume sampah	73%	88%	42,88%	74%	77%	72%	106,94		PKPLH
7.	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,14%	8,15%	8,10%	8,17%	8,16%	8,20%	99,51		PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)							132,86		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 5 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup karena penambahan bank sampah di desa-desa yang mulai peduli untuk mengelola sampah di tingkat desa sebanyak 8 buah dari tahun 2020 sebanyak 37 buah, sehingga sampai dengan tahun 2021 komunitas pecinta lingkungan hidup sebanyak 45 buah. Sedangkan indikator persentase penanganan volume sampah karena volume sampah yang ditangani sebanyak 121.865,69 ton dari total timbunan sampah sebanyak 158.264,91 ton.

### 2.3.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki identitas resmi tunggal yang berlaku secara nasional yaitu berbasis NIK. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur melalui kinerja pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kinerja pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara garis besar ditunjukkan melalui 3 (tiga) bidang pelayanan yaitu:

1. Pelayanan pendaftaran penduduk (cakupan kepemilikan KTP);
2. Pelayanan pencatatan sipil (cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun); dan
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan (cakupan pengelolaan database kependudukan).

Tabel 2.67  
Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Cakupan Kepemilikan KTP) Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1.	Cakupan kepemilikan KTP (%)	99,74%	99,18%	98,54%
2	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	629.304	638.703	635.896
3	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	630.950	643.955	645.297

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Cakupan kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 99,74% tahun 2020 sebesar 99,18% dan 2021 sebesar 98,54%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah wajib KTP yang tidak diimbangi dengan jumlah perekaman yang ada. Cakupan kepemilikan KTP pada tahun 2021 sebesar 98,54% (635.896 jiwa) yang berarti masih terdapat 1,46% penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP (9.461 jiwa) yang disebabkan belum melakukan perekaman KTP-el. Jumlah penduduk yang memiliki KTP dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kudus telah peduli dan menjadikan KTP sebagai kartu yang wajib dimiliki, namun demikian masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP.

Tabel 2.68  
Jumlah Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

No	Kecamatan	Penduduk Wajib KTP			Memiliki KTP			Belum Memiliki KTP		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	75.190	79.749	77.017	75.001	74.946	75.410	189	4.803	1.607
2	Kota	69.155	71.213	68.908	68.959	67.994	67.698	196	3.219	1.210
3	Jati	79.840	81.335	80.783	79.651	79.050	79.386	189	2.285	1.397
4	Undaan	58.258	57.781	58.832	58.104	57.050	57.917	154	731	915
5	Mejobo	57.191	57.088	57.996	57.025	56.368	57.033	166	720	963
6	Jekulo	81.107	80.957	82.113	80.918	79.922	81.222	189	1.035	891
7	Bae	53.462	53.659	54.359	53.334	52.992	53.593	128	667	766
8	Gebog	76.612	76.530	78.046	76.413	75.329	76.503	199	1.201	1.543
9	Dawe	80.135	80.281	81.555	79.899	79.117	80.651	236	1.164	904
Jumlah Total		630.950	638.593	639.609	629.304	622.768	629.413	1.646	15.825	10.196

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Penduduk yang belum memiliki KTP pada tahun 2020 tercatat sejumlah 15.825 naik dibandingkan tahun 2019 tercatat sejumlah 1.646 jiwa namun tahun 2021 berangsur mulai turun menjadi 10.196 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mengalami peningkatan perekaman KTP sehingga penduduk yang memiliki KTP menjadi meningkat dan menurunkan angka jumlah penduduk yang belum memiliki KTP.

Kepemilikan KTP secara persentase dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.69  
Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

No	Kecamatan	Penduduk Wajib KTP			Penduduk Memiliki KTP			Penduduk Belum Memiliki KTP		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	72,33	73,45	72,82	99,75	93,98	97,91	0,25	6,02	0,02
2	Kota	74,42	75,21	74,82	99,72	95,48	98,24	0,28	4,52	0,02
3	Jati	73,12	73,56	73,54	99,76	97,19	98,27	0,24	2,81	0,02
4	Undaan	74,33	74,43	74,64	99,74	98,73	98,44	0,26	1,27	0,02
5	Mejobo	72,87	73,08	73,36	99,71	98,74	98,34	0,29	1,26	0,02
6	Jekulo	73,72	73,84	74,11	99,77	98,72	98,91	0,23	1,28	0,01
7	Bae	72,74	73,05	73,23	99,76	98,76	98,59	0,24	1,24	0,01
8	Gebog	72,69	72,81	73,01	99,74	98,43	98,02	0,26	1,57	0,02
9	Dawe	74,05	74,21	74,35	99,71	98,55	98,89	0,29	1,45	0,01
<b>Jumlah Total</b>		<b>73,36</b>	<b>73,74</b>	<b>73,76</b>	<b>99,74</b>	<b>97,52</b>	<b>98,41</b>	<b>2,34</b>	<b>21,42</b>	<b>0,14</b>

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat 73,76% persen penduduk wajib KTP (639.609 jiwa) yang belum memiliki KTP (10.196 jiwa), disebabkan karena belum melakukan perekaman atau karena masih dalam proses penunggalan data. Adapun target nasional cakupan kepemilikan KTP pada tahun 2021 adalah 100% .

Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi adminduk kepada masyarakat baik secara langsung di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun melalui media cetak, elektronik, media sosial dan barang cetakan sosialisasi (leaflet, brosur, booklet, spanduk, banner, baliho); pelayanan rekam dan cetak KTP baik di dinas maupun kecamatan; pelayanan jemput bola untuk masyarakat berkebutuhan khusus, jompo, lansia, pelayanan tingkat desa dan program perekaman KTP usia pemula bagi SMA/SMK.

Tabel 2.70  
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan  
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2021

No	Kecamatan	Kartu Keluarga			Akta Perkawinan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	32.013	35.127	33.565	14.024	17.005	22.206
2	Kota	30.136	32.022	30.507	14.039	15.665	19.560
3	Jati	34.521	36.065	35.647	14.883	17.966	23.112
4	Undaan	25.882	26.185	26.663	12.359	14.624	18.103
5	Mejobo	24.630	25.071	25.480	9.384	12.249	16.325
6	Jekulo	35.573	36.230	36.812	12.910	16.212	21.798
7	Bae	22.906	23.311	23.735	12.074	14.291	17.429
8	Gebog	32.048	32.843	33.477	14.096	17.728	23.004

No	Kecamatan	Kartu Keluarga			Akta Perkawinan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
9	Dawe	33.905	34.779	35.393	13.607	16.910	22.491
<b>Jumlah Total</b>		<b>271.614</b>	<b>281.633</b>	<b>281.279</b>	<b>117.376</b>	<b>142.650</b>	<b>184.028</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Tabel 2.71  
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran dan Akta Kematian Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

No	Kecamatan	Akta Kelahiran			Akta Kematian		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	54.724	31.036	31.592	894	798	1.226
2	Kota	41.584	24.838	25.401	940	880	1.452
3	Jati	50.649	31.048	31.874	903	928	1.520
4	Undaan	37.366	21.498	21.942	450	458	702
5	Mejobo	39.276	22.629	23.252	688	601	1.055
6	Jekulo	52.232	30.630	31.446	821	809	1.343
7	Bae	35.925	21.124	21.861	641	580	1.009
8	Gebog	50.936	30.651	31.655	852	711	1.135
9	Dawe	51.982	30.015	30.893	1.042	855	1.359
<b>Jumlah Total</b>		<b>414.674</b>	<b>243.469</b>	<b>249.916</b>	<b>7.231</b>	<b>6.620</b>	<b>10.801</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Negara memberikan jaminan kepastian hukum atas identitas dan asal-usul seseorang. Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menargetkan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada tahun 2021 adalah 95%, sedangkan pada tahun 2020 adalah 91%. Usia 0-18 tahun menjadi target nasional disebabkan karena usia tersebut adalah generasi emas untuk melanjutkan pembangunan nasional kedepan. Maka Pemerintah Kabupaten Kudus mensinkronkan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional bahwa prioritas penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kudus adalah untuk usia 0-18 tahun. Di Kabupaten Kudus, target nasional cakupan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 91% pada tahun 2020 telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2019 yaitu 92,18% dan bahkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 95,60% bahkan melebihi dari target nasional tahun 2021 sebesar 95%. Capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2021 meningkat terus daripada tahun 2019 dan 2020, yaitu 98,14%. Hal ini berarti bahwa capaian kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2021 telah melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu 95%.

Untuk mempercepat capaian kepemilikan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terus menerus melakukan inovasi pelayanan dan melakukan pemutakhiran data terkait melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran dilakukan melalui berbagai upaya inovasi seperti pelayanan reguler penerbitan akta kelahiran di Dinas; pelayanan keliling jemput bola di desa, kecamatan, bekerja sama dengan pihak sekolah, pelayanan melalui *WhatsApp Group* Kades/Lurah, pelayanan Si Bolang Mahir dengan rumah sakit dan puskesmas (Si Buah Hati Lahir, Pulang Membawa

Akta Kelahiran dan KK); membuka program Rumah Paman Capil (Rumah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di desa/kelurahan dengan bekerjasama dengan PKK Desa, Karang Taruna Desa, dan Bidan Desa.

Tabel 2.72  
Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1.	Rasio Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta Kelahiran	99,33	99,53	99,46%
	Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta Kelahiran	70.814	68.269	69.347
	Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun)	71.289	68.590	69.725
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	92,18	95,60	98,14%
	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	226.399	232.530	243.609
	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	245.607	243.220	248.214
3.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	48,21	51,40	56,17%
	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	414.674	443.808	486.731
	Jumlah penduduk	860.055	863.495	866.548
4.	Capaian pengelolaan database kependudukan	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022

Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional. Dari database kependudukan, dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah (perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dll) setelah dilakukan pengolahan. Proses pengolahan/konsolidasi database kependudukan dari daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan database kependudukan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus telah menyusun berbagai macam buku kependudukan yang bersumber dari database skala kabupaten (Buku Agregat Semester dan Buku Profil Kependudukan) ataupun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah mulai tahun 2016. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak akuratnya data kependudukan disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, baik terkait perubahan data kependudukan maupun dalam melaporkan peristiwa penting, diantaranya peristiwa kematian, pernikahan, golongan darah, perubahan jenjang pendidikan maupun perubahan data lainnya yaitu pindah penduduk dan perubahan status pernikahan.

Tabel 2.73  
Kinerja Pelayanan Penanganan Pengaduan Administrasi Kependudukan Tahun 2019 – 2021

No	Media Pengaduan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangan/ Diklarifikasi	Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangan/ Diklarifikasi	Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangan/ Diklarifikasi
1	Fanspage Dukcapil	618	27	27	3760	4108	4106	3445	3765	3765
2	Twitter	35	3	3	1326	747	747	1288	839	839




No	Media Pengaduan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangan/ Diklarifikasi	Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangan/ Diklarifikasi	Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangan/ Diklarifikasi
3	Instagram	130	10	10	3047	4084	4121	2997	3821	3821
4	Facebook	656	25	25	4175	3777	3778	3802	3498	3498

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan perbaikan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan, dimana terdiri dari aspek kepentingan penyelenggara dan aspek penerima layanan. Regulasi yang memayungi pengelolaan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat melalui secara langsung secara lisan; secara tidak langsung kotak pengaduan, teknologi informasi (telepon, faksimile, website, email, SMS, media sosial/ Facebook / Instagram/ Twitter/ WhatsApp). Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus nomor 470/12/14.00/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus bahwa waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja untuk pengaduan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, sedangkan penyelesaian pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal 5 hari kerja.

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.74  
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	99,74 %	99,18 %	100 %	98,54 %	100 %	98,54%		Dinas Dukcapil
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	88 %	92,18 %	95,60 %	100 %	98,14 %	100 %	98,14%		Dinas Dukcapil
3.	Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan	10 0%	10 0%	100 %	100 %	100%	100 %	100%		Dinas Dukcapil
Rata-rata capaian kinerja (%)								98,89%		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusa kependudukan dan catatan sipil di atas, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, dari 3 indikator sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Cakupan kepemilikan KTP pada tahun 2021 sebesar 98,54% (635.896 jiwa), yang berarti masih terdapat 1,46% (9.461 jiwa) penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP dari jumlah penduduk wajib KTP 645.297 jiwa, yang disebabkan karena belum melakukan perekaman KTP. Selain itu dimungkinkan masih terdapat penduduk wajib KTP yang memiliki NIK lebih dari 1, sedangkan NIK yang dipergunakan untuk perekaman KTP hanya 1 NIK saja, sehingga NIK yang tidak dipergunakan untuk perekaman masih masuk dalam perhitungan dan masih terdata serta aktif di database kependudukan. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepemilikan KTP yaitu melalui sosialisasi adminduk kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, media sosial, pelayanan rekam dan cetak KTP secara jemput bola kepada masyarakat berkebutuhan khusus, jompo, lansia dan program perekaman KTP usia pemula bagi SMA/SMK serta pelayanan tambahan di luar jam kerja regular.

Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun sebesar 98,14% yaitu dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 243.609 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 248.214 jiwa. Capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebesar 95%. Belum tercapainya target capaian pada indikator ini karena pandemi Covid-19, sehingga pelayanan sebagian besar melalui daring/aplikasi. Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun melalui digitalisasi dokumen kependudukan yaitu dengan registrasi kelahiran yang telah diterbitkan ke dalam database kependudukan, melakukan inovasi dengan program Si Bolang Mahir (Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta) bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah/Swasta/Bersalin, program Rumah Paman Capil (Rumah Pelayanan Administrasi Kependudukan) di desa bekerjasama dengan PKK, Bidan dan Karang Taruna Desa, Paket 2 in 1 (Akta Kelahiran dan KK), Paket 2 in 1 (Akta Kelahiran, KK dan KIA) dalam tatap muka maupun online (<https://paksemok.kuduskab.go.id/>), program Jempol Dukcapil (Pelayanan Jemput Bola Dukcapil), pelayanan online (aplikasi HP android dan WhatsApp Group Kepala Desa), program *One Day Service* (1x24 jam dokumen jadi) didukung program *Delivery Order* (dokumen kependudukan diantar ke rumah pemohon oleh petugas dinas), selain itu melaksanakan pelayanan terpadu Isbat Nikah bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum, serta meningkatkan sosialisasi melalui media elektronik, media cetak, media sosial maupun program Menyapa Warga melalui live straming/zoom dan melaksanakan pelayanan tambahan di luar jam kerja regular.

2.3.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan lingkungan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan, kelembagaan Desa dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Tabel 2.75  
Kelembagaan Desa Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah RT	3771	3771	3771	3771	3566
2.	Jumlah RW	716	716	716	716	670
3.	Jumlah Karang Taruna	132	132	132	132	132
4.	Jumlah PKK Aktif	132	132	132	132	132
5.	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa	123	123	123	123	123
6.	Posyandu	842	842	842	842	842
7.	Jumlah Lembaga Adat/Satgas Adat Desa	2	5	11	16	25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Guna memperkuat kerangka pembangunan nasional diperlukan selain dukungan dari masyarakat diperlukan pula dukungan dari pemerintah desa sebagai pelayanan masyarakat sehingga keduanya harus saling mendukung dalam setiap kegiatan pembangunan di desa. Untuk mendukung kinerja pemerintah desa diperlukan SDM yang berkualitas, yang dalam hal ini tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa menjadi faktor utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel 2.76  
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tamat SD Atau Sederajat	50	50	21	18	15
2.	Jumlah Tamat SMP Dan Sederajat	231	231	147	123	123
3.	Jumlah Tamat SMA Dan Sederajat	635	635	898	808	807
4.	Jumlah Lulusan Akademi (DI, DII Dan DIII)	29	29	35	29	29
5.	Jumlah Lulusan Sarjana (S1)	114	114	167	155	155

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas kita dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan pelatihan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dimana sebagian besar tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa masih dominan lulusan SMP/SMA.

Tabel 2.77  
Jumlah Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pasar Desa Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ADD	106.017.994.000	109.184.286.000	91.538.000.000	91.538.982.000	83.806.464.000
2	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah	9.246.862.000	9.692.833.000	10.838.400.000	13.342.576.000	13.951.259.000

3	Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.019.726.000	2.703.412.000	3.148.412.000	3.749.772.000	2.305.845.000
4	Jumlah Bagi Hasil Pasar Desa	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	117.284.582.000	121.580.231.000	105.524.812.000	108.631.330.000	100.063.568.000

Sumber : BPPKAD Tahun 2022

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan Permendes PDTT Nomor 5 tahun 2016 adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam pencapaiannya sampai dengan saat ini, Kabupaten Kudus telah menetapkan 3 kawasan Pedesaan melalui Keputusan Bupati Kudus, diantaranya:

1. Kawasan Perdesaan Industri Gula Tumbu di Kabupaten Kudus Nomor : 148.4/144.1/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Gula Tumbu di Kabupaten Kudus, dengan lokasi beberapa desa di Kecamatan Dawe sebagai berikut :
  - a. Desa Kandangmas sebagai pusat kawasan
  - b. Desa Cranggang
  - c. Desa Rejosari
  - d. Desa Margorejo
2. Kawasan Wisata Muria dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 410/255/2020 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Wisata Muria di Kabupaten Kudus dengan lokasi :
  - a. Desa Kajar
  - b. Desa Colo sebagai pusat kawasan
  - c. Desa Ternadi
  - d. Desa Japan
  - e. Desa Dukuh Waringin
3. Kawasan Pati Ayam dengan Keputusan Bupati Nomor 410/428/2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Pati Ayam di Kabupaten Kudus dengan lokasi :
  - a. Desa Terban Kecamatan Jekulo, sebagai pusat kawasan
  - b. Desa Klaling Kecamatan Jekulo
  - c. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo
  - d. Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
  - e. Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo
  - f. Desa Rejosari Kecamatan Dawe
  - g. Desa Kandangmas Kecamatan Dawe

Tabel 2.78

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021

NO	Klasifikasi Desa	2020		2021	
1.	Mandiri	12	13	17	13,82
2.	Maju	54	43.9	69	56,09



NO	Klasifikasi Desa	2020		2021	
3.	Berkembang	57	46.3	37	30,08
4.	Tertinggal	-	-	-	-
5.	Sangat Tertinggal	-	-	-	-
	JUMLAH	123	20.7	123	19.99



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022


Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsep bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja Pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan Implementasi Undang Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan Partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.79  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
1.	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	10%	10%	15%	20%	30,08 %	30%	100,26		Dinas PMD
2.	Persentase desa yang	Na	50%	12%	30%	11%	10%	90,91		Dinas PMD

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
	bermasalah									
3.	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	0%	25%	80%	50%	100%	100%	100		Dinas PMD
	Rata-rata capaian kinerja (%)							97,06%		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021 dari 3 indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa yang melampaui target karena terdapat peningkatan jumlah Lembaga kemasyarakatan dari Tahun 2020 yaitu sebanyak 3.778 RT dari 3.771 RT, PKK sebanyak 132 dari 123, Posyandu sebanyak 843 dari 814, BUMDes sebanyak 57 dari 29 dan Karang Taruna sebanyak 132 dari 123. Untuk indikator yang akan tercapai yaitu indikator persentase desa yang bermasalah optimis tercapai pada tahun 2023 karena dari 12 desa yang bermasalah telah terselesaikan 11 desa.

Bumdes dan Bumdesma yang menjadi bagian dari penguatan perekonomian desa yang mempunyai aspek perekonomian desa mulai dari permodalan, pengelolaan usaha, distribusi, dan pemasaran yang meningkatkan perekonomian Desa. Pengelolaan aset desa didukung oleh produktifitas dari BUMDes yang berusaha untuk dapat melakukan suatu produksi, distribusi, dan pemasaran yang baik dan didukung oleh kualitas masyarakat desa dengan tujuan sebagai mata pencarian dan pengaktifan perekonomian masyarakat sekitar. Tahun 2022 di Kabupaten Kudus terdapat 58 Bumdes Klasifikasi Dasar = 24 BUMDesa (41 %), Klasifikasi Tumbuh = 29 BUMDesa (50 %), Klasifikasi Berkembang = 3 BUMDesa (5%), Klasifikasi Maju = 2 BUMDesa (4 %). Selain Bumdes yang dimiliki tiap Desa, juga dibentuk Bumdesma. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa. Beberapa Desa membentuk usaha bersama. Selain inisiatif para kepala desa, pembentukan Bumdesma juga dibentuk untuk mewadahi pasca program pemerintah. Di Kabupaten Kudus, ada 3 Bumdesma, Yaitu Bumdesma Kudus Sejahtera yang merupakan pembentukan Bumdesma eks Badan Kredit Desa, Bumdesma Mitra Sekawan yang terbentuk dari Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Bumdesma Rukun Lestari yang berada di Kecamatan Gebog yang bergerak dibidang Peternakan yang diresmikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 13 Februari 2022.

2.3.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain: penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program Keluarga Berencana, penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan pembiayaan.

Tabel 2.80  
Rasio Akseptor KB dan TFR Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah akseptor KB	124.583	93.369	99.196	101.485	105.350
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	151.351	137.473	139.951	142.797	145.064
3.	Rasio akseptor KB	82,31	67,92	70,88	71,07	72,62%
4.	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,05	2,01	1,89	2,10%

Sumber : SIPD – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, dari 67,92 di tahun 2018 naik menjadi 70,88% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan menjadi 71,07% kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi 72,62%. Hal yang menjadi penyebab naik turunnya jumlah akseptor KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu keluarga PUS belum terlayani KB atau unmeet need sebanyak 20.150 PUS atau 13,89%, dimana perempuan yang telah menikah dalam usia subur tidak menginginkan kehadiran anak atau menunda kehadiran anak namun tidak menggunakan alat kontrasepsi. Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya. Penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana. Angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2021 sebesar 2,10 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk seimbang, hal tersebut berarti bahwa jumlah penduduk yang lahir dan meninggal sama.

Tabel 2.81  
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2019 – 2021

No	Metode KB	2019	2020	2021
1.	Suntik	74.317	74.907	76.453
2.	Pil	10.607	10.783	11.305
3.	Kondom	1.004	1.234	1.365
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)	4.734	5.076	5.479
5.	Implan/Susuk	6.294	7.024	8.040
6.	MOW (Medis Operasi Wanita)	2.031	2.252	2.499
7.	MOP (Medis Operasi Pria)	209	209	209
8.	Jumlah PUS	139.951	142.797	145.064
9.	Jumlah PUS ber KB	99.196	101.485	105.350
10.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	13,38	14,35	15,40




Sumber : Dinas SosialPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2022

Pada tabel di atas terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh peserta KB Baru adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non

MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.82  
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGG UNGJAWA B
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,01	1,89	2,02	2,10	2,01	104,48		Dinsos P3AP2KB
2.	Cakupan peserta KB aktif	67,92 %	70,88 %	71,07%	70%	72,62%	72,00 %	100,86		Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	12,14 %	13,38 %	14,35%	14%	15,40%	14,00 %	110		Dinsos P3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)								105,11		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		


Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 indikator yang seluruhnya berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.



Capaian indikator TFR yang telah melampaui target karena dari perhitungan jumlah wanita usia subur (233.390 orang) dan yang melahirkan (13.911 orang) perkelompok usia (ASFR/*Age Specific Fertility Rate*) diperoleh angka 2,10%. Sedangkan indikator Cakupan peserta KB aktif karena dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 145.064 PUS, yang aktif ber KB sebanyak 105.350 PUS. Dan untuk indikator persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang karena dari 105.350 PUS yang aktif ber KB, sebanyak 16.227 PUS aktif ber KB MKJP.

2.3.2.9 PERHUBUNGAN

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.83  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGG UNGJAW AB
1.	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan	33	34	36%	37	37 km/jam	40 km/jam	92,5		Dinas Perhubungan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGG UNGJAW AB
	perkotaan									
2.	Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	75,58%	79,84%	83,49%	83,49%	86%	90%	85,54		Dinas Perhubungan
3.	Kontribusi retribusi parkir dan terminal terhadap PAD	0,005	0,019	-	-	-	0,019	100		Dinas Perhubungan
	Rata-rata capaian kinerja (%)							92,68		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021 dari 3 indikator urusan Perhubungan, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. Indikator yang tercapai yaitu Kontribusi retribusi parkir dan terminal terhadap PAD merupakan indikator yang telah selesai pada Tahun 2019. Untuk indikator yang akan tercapai yaitu Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan optimis tercapai pada akhir periode RPJMD karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi di jalan perkotaan 50 km/jam, dan pada Tahun 2021 Rata-rata kecepatan 22 ruas jalan perkotaan Kabupaten Kudus sebesar 37 km/jam. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada Tahun 2023 adalah mengambil tindakan melengkapi jalan dengan marka jalan, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman dan rekayasa lalu lintas lainnya, serta pengendalian kecepatan oleh pengemudi dengan memperhatikan kecepatan desain ruas jalan. Sedangkan Indikator Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan telah meningkat dari Tahun 2020 sebesar 83,49% menjadi 85,54% pada Tahun 2021. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada akhir periode RPJMD yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan, menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin para pengguna jalan dengan pemasangan fasilitas lalu lintas, memfungsikan *Warning Light* dan *Traffic Light* serta meningkatkan peran dan kerjasama dengan pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas.

**2.3.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan komunikasi dan informatika tingkat Kabupaten memiliki kewenangan mengelola informasi dan komunikasi lingkup Kabupaten, mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah serta mengelola *e government* Pemerintah Daerah. Dalam upaya menjalankan kewenangan tersebut, kinerja yang telah dilakukan berdasarkan indikator yang telah disepakati terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.84  
Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KIM	36	36	36	36	36
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten/kota	9	9	9	9	9
3	Cakupan pengembangan dan pengembangan KIM	400	400	400	400	400

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022*

Tabel di atas menginformasikan dalam kurun waktu 5 tahun tidak ada penambahan jumlah KIM di setiap kecamatan di Kabupaten Kudus, hal ini bukan menjadi masalah, karena yang diamanatkan dalam Permenkominfo nomor 8 tahun 2019 adalah melaksanakan kemitraan dengan perangkat kepentingan diantaranya KIM. Sehingga optimalisasi peran KIM dalam memperkuat transparansi informasi publik, dan sebagai mitra dialog untuk desiminasi informasi Pemerintah Daerah menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.

Tabel 2.85  
Persentase PD Pemerintah Kabupaten Kudus Memiliki Website dan meng-update Data di Website Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total Jumlah PD Kabupaten	PD Kabupaten yang Memiliki Website		PD Kabupaten yang Meng-update Website	
			Jumlah		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2017	34	27	79,41	10	37,04
2	2018	34	27	79,41	10	37,04
3	2019	34	34	100	14	41,18
4	2020	34	34	100	22	64,70
5	2021	34	34	100	24	70,58

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022*

Perangkat Daerah yang meng-update website merupakan salah satu tolak ukur untuk mendukung meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Data pada tabel di atas, menginformasikan bahwa belum semua PD meng-update websitenya. Penyebab belum terupdatenya website Perangkat Daerah antara lain : tidak adanya penunjukan pengelola yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan informasi yang ada di website masing-masing perangkat daerah. Pemutakhiran informasi publik juga merupakan salah satu tolak ukur berkualitasnya pengelolaan informasi dan komunikasi suatu Badan Publik. Menjadi tugas Dinas Kominfo untuk melakukan pengelolaan manajemen data informasi yang baik dalam rangka perwujudan e-government. Perlu efektifitas pendampingan dan pengawasan terhadap Badan Publik dalam hal ini Perangkat Daerah agar dapat menyajikan data dan informasi yang baik dan benar utamanya data informasi yang ditayangkan di website Badan Publik.

Tabel 2.86  
Persentase Pemohon Memperoleh Informasi Publik Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemohon Informasi Dalam 1 Tahun	16	12	14	33	24

2	Jumlah Pemohon Yang Memperoleh Informasi Publik Secara Memadai	16	12	13	33	24
3	Persentase	100	100	93	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Keterbukaan Informasi Publik sudah menjadi amanat yang harus dilakukan oleh Badan Publik sejak tahun 2008 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, yang dimiliki Badan Publik. Namun ada beberapa informasi yang dikecualikan, yang tidak dapat diakses oleh setiap orang jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan untuk dikecualikan. Data pada table di atas menginformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini Dinas Kominfo melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya telah memberi pelayanan maksimal dibuktikan dengan terlayannya semua pemohon informasi publik. Namun demikian, dalam upaya mempertahankan kinerja ini, perlu dilakukan pemeliharaan kinerja agar capaian kinerja tidak mengalami penurunan.

Implementasi *e-government* yang terdiri dari 4 faktor pendukung antara lain: Regulasi Aplikasi, SDM yang mengikuti pelatihan IT, Infrastruktur jaringan komunikasi data Perangkat Daerah yang menggunakan *fiber optic*, dan aplikasi yang terintegrasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.87  
Implementasi e-Government Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Regulasi Aplikasi</b>					
1	Jumlah Regulasi Aplikasi	7	8	9	9	25
2	Jumlah Aplikasi	96	101	104	162	153
3	Persentase ( )	7	8	8	5,5	16,33
	<b>SDM yang mengikuti pelatihan IT</b>					
1	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pelatihan IT	900	500	506	-	-
2	Jumlah SDM aparatur	7.597	7400	7140	6933	-
3	Persentase ( )	12	7	7	-	-
	<b>Persentase PD yang menggunakan infrastruktur jaringan fiber optic</b>					
1	Jumlah PD yang menggunakan fiber optic	8	8	8	8	8
2	Jumlah PD	34	34	34	34	34
3	Persentase ( )	14	24	24	24	24
	<b>Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi</b>					
1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4	5	13	16	52
2	Jumlah aplikasi	71	96	104	162	153
3	Persentase ( )	6	5	12,5	9,9	33,98

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022



Dengan adanya Pepres terkait penyelenggaraan SPBE, tata kelola SPBE tidak hanya pada penyediaan layanan saja tetapi juga perlu disusun kebijakan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Oleh karena itu, intensifikasi pendampingan

Dalam rangka mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian PAN RB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pada tahun 2021, pelaksanaan evaluasi SPBE dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator. Dengan diterapkannya instrument baru ini tentu berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE.

Dalam rangka penguatan jaringan intra pemerintah daerah, Dinas Kominfo berupaya untuk mengalihkan penggunaan teknologi wireless ke penggunaan jaringan fiber optik. Sampai tahun 2021, perangkat daerah yang telah terhubung dengan jaringan fiber optik baru 8 dikarenakan pembangunan infrastruktur fiber optik memerlukan biaya yang besar, maka akan dilakukan secara bertahap terkait pengadaan peralatan penunjang fiber optic.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus. Target capaian indeks SPBE di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.88  
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)





No	Tahun Penilaian	Indeks SPBE		
		Target	Realisasi	
1	2019	2,13	2,73	128,17
2	2020	2,35	3,08	131,06
3	2021	2,56	2,53	98,83

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 (dapat dilihat di <https://spbe.go.id/moneval>)

Penerapan SPBE membutuhkan penyedia jaringan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagai bagian dari perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, yang diimplementasikan melalui program Pengembangan Teknologi dan Informasi. Peningkatan indeks SPBE diharapkan dapat membuka transparansi publik secara luas dan dapat meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif.

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.89  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%		Dinas Kominfo
2.	Kebijakan internal SPBE	1,24	1,94	3,12	2,59	2,30	3,06	75,16		Dinas Kominfo
3.	Tata kelola SPBE	1,29	1,43	2,43	2,29	1,90	2,43	78,19		Dinas Kominfo
4.	Layanan SPBE	2,45	2,55	3,39	2,7	3,49	3,03	115, 18		Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)								92,13		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari 4 indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika, sebanyak 2 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator Layanan SPBE karena rata-rata aplikasi yang baik aplikasi yang digunakan untuk layanan publik maupun administrasi telah mencapai level kolaborasi yaitu terintegrasi dengan aplikasi lain.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator kebijakan internal SPBE melalui pencantuman indikator baru pada evaluasi SPBE tahun 2021 berupa kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan instansi dan audit TIK dalam Peraturan Bupati Kudus tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus. Sedangkan peningkatan capaian indikator tata Kelola SPBE melalui penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE sesuai konsep arsitektur nasional sebagai dasar penyusunan arsitektur SPBE di daerah.

#### 2.3.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.90  
Jumlah Koperasi Tahun 2017-2021 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koperasi Aktif	474	474	472	467	465
2.	Koperasi tidak aktif	65	65	66	67	77
3.	Jumlah Koperasi	539	541	538	534	534

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Persentase koperasi aktif	87,94	87,62	87.73	87,45	86,33
5.	Anggota Koperasi	287.870	230.266	221.890	161.035	161.035

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan perkoperasian di Kabupaten Kudus, jumlah koperasi dari tahun 2017 – 2021 terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021 karena terjadi pandemi covid19 yang berdampak melemahnya perekonomian secara global juga berpengaruh terhadap dunia perkoperasian.

Pada tahun 2021 jumlah koperasi sebanyak 534 tidak mengalami perubahan dengan kondisi tahun 2020 sejumlah 534 unit. Sedangkan koperasi aktif pada tahun 2021 sebanyak 461 unit atau (86,33%) mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebanyak 467 unit (87,45%).

Dilihat dari target kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus selaku OPD yang mempunyai tugas dalam pembinaan koperasi, untuk realisasi perkembangan koperasi aktif masih di bawah target pada tahun 2021 dengan target koperasi aktif sebesar 88,50% terealisasi 86,33% dibanding tahun 2020 dengan target 87,73% terealisasi sebesar 86,33%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap kapasitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Kudus dan perlu adanya peningkatan kompetensi para pelaku koperasi. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian, pembinaan dan pengawasan koperasi serta fasilitasi dalam hal permodalan dan peningkatan teknologi telah menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Kudus.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga / badan usaha menjadi bagian yang penting dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Kudus. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor informal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2017–2021

No	Kategori Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usaha Mikro*	13.845	14.010	14.204	15.004	16.290
2	Usaha Kecil	565	688	788	877	789
3.	Usaha Menengah	101	102	103	103	103
4.	Jumlah seluruh UMKM	14.511	14.800	15.095	15.984	17.182
5.	Persentase Usaha Mikro	95,4	94,7	94,1	93,8	95
6.	Persentase Usaha Kecil	3,9	4,6	5,2	5,5	4,59
7.	Persentase Usaha Menengah	0,7	0,7	0,7	0,7	0,59

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

Dalam kurun waktu 2017-2021 terjadi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah kearah peningkatan, kapasitas kelembagaan usaha mikro di Kabupaten Kudus menjadi prioritas pembinaan terhadap keberadaan UMKM, jumlah Usaha Mikro pada tahun 2017 sebesar 13.845 mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 16.290 pada tahun 2021. Jumlah Usaha kecil mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 88 unit usaha dari 877 di tahun 2020 menjadi 789 di tahun 2021 hal ini karena banyaknya usaha kecil yang menurun omsetnya karena dampak pandemi daya beli masyarakat menurun sehingga banyak usaha kecil yang mengurangi produksinya. Jumlah usaha menengah cenderung stagnan menurun karena daya saing industri besar, namun secara keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 15.984 unit di tahun 2020 menjadi 17.182 unit di tahun 2021.

Tabel 2.92

Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	1.790	1.814	1.843	1.957	2.062
2	Kota Kudus	2.503	2.573	2.626	2.714	2.869
3	Jati	1.541	1.576	1.629	1.707	1.086
4	Undaan	1.582	1.609	1.619	1.711	1.727
5	Mejobo	525	551	576	656	668
6	Jekulo	1.665	1.691	1.725	1.854	1.922
7	Bae	1.465	1.489	1.525	1.605	1.648
8	Gebog	1.482	1.514	1.546	1.615	1.911
9	Dawe	1.958	1.983	2.006	2.075	2.569
	Jumlah	14.511	14.800	15.095	15.984	17.182

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 17.182 unit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 15.984 unit di tahun 2020. Dari jumlah UMKM pada tahun 2021 sebanyak 17.182 unit terdiri dari usaha mikro sebanyak 16.290 unit, usaha kecil sebanyak 789 unit dan usaha menengah sebanyak 103 unit. Peningkatan jumlah UMKM menjadi indikator keberhasilan atas program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mencetak wirausaha baru melalui pelaksanaan pelatihan kewirausahaan serta program hibah bantuan modal usaha kepada wirausaha baru yang didukung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus. Peningkatan jumlah UMKM secara langsung telah meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM pada tahun 2017 - 2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93  
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Tahun 2017-2021



No	Kategori Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usaha Mikro*	41.535	41.545	42.612	43.080	45.612
2.	Usaha Kecil*	129.158	129.168	13.396	13.716	12.624
3.	Usaha Menengah	5.388	5.388	7.058	7.058	7.128
4.	Usaha Besar	79.997	79.997	194.702	194.134	194.830
	Jumlah	256.078	256.098	257.768	258.338	260.124

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2017-2021, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dari tahun ketahun, sedangkan pada usaha kecil rata-rata terjadi penurunan. Penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor usaha kecil yang sangat signifikan yang disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja di sektor usaha mikro dan kecil lebih memilih bekerja disektor industri / usaha menengah dan besar. Adapun penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha besar meningkat dari tahun 2017 sampai 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terjadi pandemi covid, namun kondisi perekonomian berangsur membaik sektor usaha besar banyak menyerap tenaga kerja sehingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.94  
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase koperasi aktif	87,94 %	87,73 %	86,33 %	88,50 %	85,79 %	89%	96,39		Disnaker, Inkop, UKM
2.	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	4,6%	4,80%	4,85%	5,25%	5,70 %	6%	95,00		Disnaker, Inkop, UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)							95,70		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Koperasi dan UKM terdiri dari 2 indikator yang seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian indikator persentase koperasi aktif melalui program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah

kabupaten, sedangkan untuk pencapaian target indikator persentase perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bantuan modal usaha kepada wirausaha, dukungan stimulan bantuan modal modal usaha terdampak pandemi Covid-19 dan pelatihan serta fasilitasi kemitraan pemasaran dengan pasar modern dan berbasis IT dan fasilitasi kemitraan permodalan antara UMKM dengan perbankan.

### A.3.2.12.PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi oleh regulasi tentang pelayanan perizinan yang mengalami perubahan dan penyempurnaan dari awal terjadi pada pertengahan Tahun 2018 sampai tahun 2021 masih dilakukan evaluasi sistem dan regulasi oleh pemerintah pusat. Perkembangan investasi di kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.95  
Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2017 – 2021 (dalam juta rupiah)

TAHUN	TARGET	Perkembangan Nilai Investasi			%
		PMA	PMDN	TOTAL	
2017	10.997.710,33		11.463.103,50	11.463.103,50	104,20
2018	7.339.742,86		7.028.822,93	7.028.822,93	95,70
2019	7.593.315,98	91.500,00	5.774.843,11	5.866.343,11	77,20
2020	7.737.592,28	59.054,41	3.199.922,88	3.258.977,29	42,10
2021	8.340.000,00	25.025,40	11.943.302,96	11.968.328,36	143,50
Jumlah		175.579,81	39.409.995,38	39.585.575,19	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Perkembangan nilai investasi dihitung dari jumlah pengajuan ijin investasi yang diajukan oleh investor melalui aplikasi OSS (online single submission). Struktur Investasi Kabupaten Kudus terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perkembangan nilai investasi yang bersumber dari PMA hanya terdapat pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan jumlah 175.579,81 juta rupiah. Sedangkan jumlah investasi yang bersumber dari PMDN selama 2017 sampai dengan 2018 sebesar 39.585.575,19 juta rupiah.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan total nilai investasi mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Capaian kinerja target nilai investasi pada tahun 2021 sebesar 11.968.328,36 juta rupiah telah melampaui target nilai investasi tahun 2021 sebesar 8.340.000,00 juta rupiah, atau sebesar 143,5 persen dari target nilai investasi yang ditetapkan. Sedangkan pada tiga tahun sebelumnya capaian nilai investasi Kabupaten Kudus mengalami hasil yang kurang memuaskan dimana pada tahun 2018 capaian target investasi baru tercapai sebesar 95,70 persen, tahun 2019 menurun menjadi 77,20 dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 42,10 persen. Hal ini disebabkan karena terjadi kendala pelaporan pada saat transisi dari sistem aplikasi SIPTO ke aplikasi OSS. Selain itu masalah ketersediaan lahan untuk pengembangan investasi khususnya

industri di Kabupaten Kudus mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena ruang peruntukan untuk industri kurang terakomodir dalam RTRW Kabupaten Kudus. Langkah yang telah dilakukan yaitu merevisi RTRW agar lahan peruntukan untuk pengembangan industri dapat lebih terakomodir.

Perkembangan nilai investasi sangat dipengaruhi oleh jumlah investor PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Kudus. Perkembangan jumlah PMA dan PMDN berskala nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96  
Jumlah PMA dan PMDN berskala Nasional Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PMDN	500	1.104	1.451	6.108	4.411
2.	PMA	0	0	3	1	1
	<b>Total</b>	<b>500</b>	1.104	1.454	6.109	4.412

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah investor di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data investor tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 diambil dari OSS, kenaikan tersebut dimungkinkan adanya pengaruh dari kewajiban *update* data perusahaan bagi para investor berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik yang mengamanatkan bahwa setiap usaha harus melakukan *update* data perusahaan melalui sistem nasional yaitu *online Single Submission (OSS)*. Sedangkan di tahun 2021 jumlah investor mengalami penurunan. Meskipun di tahun 2021 jumlah investor mengalami penurunan akan tetapi nilai investasinya justru meningkat pesat. Hal ini dimungkinkan nilai investasi sebelum tahun 2017 ikut tercatat di tahun 2021 karena adanya migrasi data dari OSS versi 1.1 ke OSS versi RBA, sedangkan data investor tidak tercatat di tahun 2021 melainkan tetap tercatat sesuai tahun pendirian perusahaannya.

Untuk melihat capaian nilai investasi yang sudah dilaksanakan oleh investor diukur melalui indikator realisasi nilai investasi yang dilaporkan. Isian angka realisasi nilai investasi yang dilaporkan didapatkan dari hasil laporan investor yang melaporkan melalui aplikasi online yang dikembangkan oleh LPKM untuk pelaporan investasi usaha perusahaan kecil, menengah dan besar serta rekap nilai pengajuan ijin investasi pada aplikasi OSS untuk usaha mikro. Adapun perbandingan antara target dengan realisasi nilai investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97  
Target dan Realisasi Nilai Investasi 2017– 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI		TOTAL REALISASI	(%)
		MIKRO (offline)	LKPM (online)		
2017			1.070.000.000.000	1.070.000.000.000	
2018	688.710.000.000		688.720.000.000	688.720.000.000	100,00
2019	2.877.000.000.000	9.440.253.073	2.054.410.000.000	2.335.673.223.090	81,18



TAHUN	TARGET	REALISASI		TOTAL REALISASI	(%)
		MIKRO (offline)	LKPM (online)		
2020	3.020.000.000.000	52.997.394.783	1.947.000.000.000	2.046.690.994.783	67,77
2021	3.171.000.000.000	227.787.276.873	732.210.000.000	959.997.276.873	30,27

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Dari tahun 2017 hingga 2020 perkembangan nilai investasi sejalan dengan realisasi nilai investasinya. Sedangkan di tahun 2021 dengan nilai investasi yang tinggi yaitu sebesar 11,968 trilyun (tabel 2.97) justru realisasi investasinya hanya sebesar 0,959 trilyun. Realisasi investasi memiliki nilai yang fluktuatif, hal ini disebabkan :

- Realisasi investasi di tahun 2017 terekam melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi Secara Elektronik).
- Tahun 2018 hanya bisa merekam realisasi investasi di pertengahan tahun hingga akhir tahun 2018 melalui OSS.
- Tahun 2019 realisasi investasi sudah terekam seluruhnya melalui OSS sehingga terlihat peningkatan realisasi investasinya.
- Tahun 2020 masih menggunakan OSS tetapi realisasinya sedikit menurun dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan investasi sulit berkembang.
- Pada tahun 2021 dipertengahan tahun tepatnya bulan Agustus ada migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS versi RBA, sehingga proses pelaporan LKPM mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi investasi menurun.

Investor selain dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ada juga Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun data investor PMA yang tercatat di tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.98  
Investor PMA Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Nama Perusahaan
1	2017	0
2	2018	0
3	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Sarimelati Kencana</li> <li>PT. Prodia Widyahusada Tbk</li> </ul>
4	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Koin Nusantara Jaya</li> <li>Jl. Lingkar Utara, UMK Wijaya Royal Residence</li> </ul>
5	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Sinkwang Ventures Indonesia</li> </ul>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Secara umum, pelaku investasi yang masuk di Kabupaten Kudus masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Keterlibatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kudus yang terealisasi pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tercatat sebanyak 4 (empat) PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus, hanya ada penambahan 1 (satu) PMA di tahun 2021.

Tabel 2.99  
Jumlah Permohonan dan Penerbitan Izin Tahun 2019-2021

NO	JENIS IZIN	2019		2020		2021	
		Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit
A	Pendelegasian kewenangan						
1	Izin RS Tipe C & D	3	3	0	0	0	0
2	Izin RS Khusus Tipe C	0	0	0	0	0	0
3	Izin Klinik Pratama & Utama	21	21	0	0	1	1

NO	JENIS IZIN	2019		2020		2021	
		Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit
4	Izin Usaha Lab Klinik Swasta/Pemerintah	2	2	0	0	0	0
5	Izin Apotek	33	33	0	0	63	62
6	Izin Toko Obat	1	1	0	0	0	0
7	Izin Optik	4	4	0	0	0	0
8	I U I	0	0	0	0	0	0
9	I P I	0	0	0	0	0	0
10	LOKASI / IPPT	100	100	0	0	171	171
11	I M B	702	536	0	0	599	506
12	Pendaftaran Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
13	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
14	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
15	Izin Usaha Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
16	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
17	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
18	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
19	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM	0	0	0	0	0	0
20	H O	0	0	0	0	0	0
21	Rekom Izin Pengeboran & Pemanfaatan Air Tanah	0	0	0	0	0	0
22	SIUJK	0	0	79	79	0	0
<b>B</b>	<b>Pelimpahan Kewenangan</b>						
23	T D I	0	0	0	0	0	0
24	SIUP Bid.Usaha Perdagangan Umum	0	0	0	0	0	0
25	SIUP Bid.Usaha Toko Swalayan	0	0	0	0	0	0
26	SIUP Bid.Usaha Usaha Perbelanjaan	0	0	0	0	0	0
27	NIB sebagai pengganti Tanda Daftar Dambar perusahaan (TDP)	0	0	0	0	5300	5300
28	Surat Tanda pendaftaran waralaba STPW	0	0	0	0	0	0
29	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	0	0	0	0
30	T D P	0	0	0	0	0	0
31	Tanda Pendaftaran Waralaba	0	0	0	0	0	0
32	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	0	0	0	0
33	IUTM	0	0	0	0	0	0
34	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	0	0	0	0	0	0
35	Izin Reklame	94	66	0	0	101	90
36	Izin Penggunaan & Pemanfaatan Bagian Jalan	11	5	24	24	40	24
37	Izin Pemakaman	7	7	0	0	16	12
38	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0	0	0	0	0
39	Izin Usaha Pemonudukan	0	0	0	0	0	0
40	Izin Usaha Peternakan	0	0	0	0	0	0

NO	JENIS IZIN	2019		2020		2021	
		Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit
41	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	0	0	0	0
42	Izin Usaha Jasa Medik Veteriner	0	0	0	0	0	0
43	Izin Kios Daging	0	0	0	0	0	0
44	SPP-IRT	0	0	0	0	0	0
45	Dokter Hewan	0	0	0	0	0	0
46	SIVET	0	0	0	0	0	0
47	Pest Control	0	0	0	0	0	0
48	IUI (Izin Usaha Industri : Tahu, Kecap, Bengkel dll)	0	0	0	0	0	0
49	Pertanian	0	0	0	0	0	0
50	Izin RPU	0	0	0	0	0	0
51	Izin RPH	0	0	0	0	0	0
52	Izin Usaha Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0
53	Izin Usaha Penggilingan Padi	0	0	0	0	0	0
54	Izin Trayek	85	85	0	0	139	137
55	Izin Usaha Jasa Angkutan	0	0	0	0	0	0
56	Izin Usaha Sekolah Mengemudi	0	0	0	0	0	0
57	Izin Usaha Bengkel Umum	0	0	0	0	0	0
58	Izin Warnet	0	0	0	0	0	0
59	Izin Usaha Travel	0	0	0	0	0	0
60	Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir	0	0	0	0	0	0
61	Pendidikan	0	0	0	0	0	0
63	Puskesmas	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.063</b>	<b>863</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>6430</b>	<b>6303</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Tabel tersebut di atas mengalami perubahan sejak adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

Proses perizinan mengalami perubahan format dengan adanya beberapa sektor yang terdiri dari 13 sektor yaitu :

- Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Sektor Kesehatan
- Sektor Pariwisata
- Sektor Perdagangan
- Sektor Perindustrian
- Sektor Perhubungan
- Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- Sektor Pertanian
- Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Sektor Ketenaga Kerjaan
- l. Sektor Komunikasi dan Informatika
- m. Sektor Kelautan dan Perikanan

Berikut ini adalah jumlah izin terbit tahun 2021.

Tabel 2.100  
Jumlah Izin Terbit Tahun 2020 dan 2021

NO .	NAMA PERIZINAN/NONPERIZINAN	TAHUN		NAIK/ TURUN	WAKTU KECEPATAN PERIZINAN (HARI)
		2020	2021		
	<b>A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>				
1	Izin Mendirikan Bangunan;	724	506	Turun	7 hari
2	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;	79	0	Turun	7 hari
3	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) Jasa Konstruksi;	0	0	-	6 hari
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) / Izin Layak Huni; dan	0	0	-	4 hari
5	Surat Izin Peil Banjir.	0	0	-	4 hari
6	Izin Pemakaman	15	12	Turun	9 hari
7	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan	24	24	-	7 hari
8	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	253	171	Turun	20 hari
9	Izin Reklame	37	90	Naik	4 hari
10	Kajian Teknis Tata Ruang;	0	465	Naik	4 hari
11	Rekomendasi <i>Site Plan</i> ; dan	0	0	-	4 hari
12	Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung ( <i>Advice Planning</i> ).	0	0	-	4 hari
	<b>B. Sektor Kesehatan</b>				
13	Izin Mendirikan Rumah Sakit;	3	0	Turun	31 hari
14	Izin Operasional Rumah Sakit;	3	1	Turun	31 hari
15	Izin Operasional Klinik;	13	0	Turun	31 hari
16	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;	0	0	-	16 hari
17	Izin Toko Obat;	1	0	Turun	3 hari
18	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	0	0	-	4 hari
19	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);	0	0	-	4 hari
20	Izin Toko Alat Kesehatan;	0	0	-	15 hari
21	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;	0	1	Naik	4 hari
22	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga; dan	0	64	Naik	4 hari
23	Izin Apotek.	0	62	Naik	11 hari

NO .	NAMA PERIZINAN/NONPERIZINAN	TAHUN		NAIK/ TURUN	WAKTU KECEPATAN PERIZINAN (HARI)
		2020	2021		
24	Izin Optik	4	0	-	4 hari
25	Izin Operasional Puskesmas	3	0	Turun	4 hari
26	Izin Unit Donor Darah (UDD)	0	0	-	4 hari
27	Izin Praktik Dokter Spesialis	0	0	-	4 hari
28	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	0	0	-	4 hari
29	Izin Praktik Dokter Umum	0	0	-	4 hari
30	Izin Praktik Dokter Gigi	0	0	-	4 hari
31	Izin Praktik Bidan	0	0	-	4 hari
32	Izin Praktik Perawat	0	0	-	4 hari
33	Izin Praktik Fisioterapi	0	0	-	4 hari
34	Izin Praktik Akupunturis	0	0	-	4 hari
35	Izin Praktik Apoteker	0	0	-	4 hari
36	Izin Praktik Asisten Apoteker	0	0	-	4 hari
37	Izin Praktik Refraksionis Optisien	0	0	-	4 hari
38	Izin Praktik Radiografer	0	0	-	4 hari
40	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	0	0	-	4 hari
41	Izin Praktik Tenaga Gizi	0	0	-	4 hari
42	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	0	0	-	4 hari
43	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	0	-	4 hari
44	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	-	4 hari
	<b>C. Sektor Pariwisata</b>				
45	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	-	11 hari
	<b>D. Sektor Perdagangan</b>				
46	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum	0	0	-	11 hari
47	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan	0	0	-	11 hari
48	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	-	11 hari
49	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0	5693	Naik	1 hari
50	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	0	0	-	2 hari
51	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	-	2 hari
	<b>E. Sektor Perindustrian</b>				

NO .	NAMA PERIZINAN/NONPERIZINAN	TAHUN		NAIK/ TURUN	WAKTU KECEPATAN PERIZINAN (HARI)
		2020	2021		
52	Izin Usaha Industri	6	340	Naik	16 hari
53	Izin Perluasan Industri	0	0	-	16 hari
	<b>F. Sektor Perhubungan</b>				
54	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;	0	0	-	16 hari
55	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	0	0	-	16 hari
56	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	0	0	-	16 hari
57	Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir.	0	0	-	4 hari
58	izin trayek	57	137	Naik	16 hari
59	Rekomendasi Pesetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan	0	0	-	4 hari
60	Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	0	0	-	4 hari
	<b>G. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, kecil, Menengah</b>				
61	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	0	0	-	1 hari
62	Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)	0	0	-	3 hari
63	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (USPPS)	0	0	-	3 hari
64	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	0	0	-	3 hari
65	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	0	0	-	3 hari
66	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0	0	-	3 hari
	<b>H. Sektor Pertanian</b>				
67	Pendaftaran Usaha Perkebunan	0	6	Naik	16 hari
68	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	0	13	Naik	16 hari
69	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura	0	5	Naik	16 hari
70	Pendaftaran Usaha Peternakan	0	27	Naik	16 hari
71	Surat Tanda Daftar Peternakan	0	0	-	16 hari
72	Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha budi daya hortikultura	0	0	-	16 hari
73	Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha produksi benih hortikultura	0	0	-	16 hari
74	Izin Usaha Peternakan	0	0	-	16 hari
75	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	-	16 hari
76	Izin Usaha Perkebunan	0	0	-	16 hari

NO .	NAMA PERIZINAN/NONPERIZINAN	TAHUN		NAIK/ TURUN	WAKTU KECEPATAN PERIZINAN (HARI)
		2020	2021		
77	Izin Usaha Tanaman Pangan	0	0	-	16 hari
78	Izin Usaha Veteriner (SIVET)	1	0	Turun	16 hari
79	Izin Usaha Rumah Potong Hewan	0	0	-	16 hari
80	Izin Pemotongan Unggas	0	0	-	16 hari
81	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	5	0	Turun	4 hari
82	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan (SIPP Keswan)	0	0	-	4 hari
83	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	0	0	-	4 hari
84	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)	0	0	-	4 hari
85	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	0	0	-	4 hari
86	Izin Kios Daging	0	0	-	4 hari
87	Tanda Bukti Pendataan (TBP)	0	0	-	
88	Sertifikat Kompetensi Produsen, untuk usaha perbenihan holtikultura;	0	0	-	4 hari
89	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan; dan	5	0	Turun	4 hari
90	Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner	0	0	-	4 hari
91	Tanda Bukti Pendataan (TBP)	0	0	-	
	<b>I. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>				
92	Izin Lingkungan	0	0	-	16 hari
93	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	0	0	-	7 hari
94	Izin Emisi	0	0	-	7 hari
95	Izin Pembuangan Air Limbah	0	0	-	7 hari
96	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL);	0	0	-	4 hari
97	Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL	0	0	-	4 hari
98	Penetapan Penolakan Rekomendasi UKL/UPL	0	0	-	4 hari
99	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan	0	0	-	4 hari
100	Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup	0	0	-	4 hari
101	Izin Lingkungan	0	0	-	
102	Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;	0	0	-	4 hari



NO .	NAMA PERIZINAN/NONPERIZINAN	TAHUN		NAIK/ TURUN	WAKTU KECEPATAN PERIZINAN (HARI)
		2020	2021		
103	Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah	0	0	-	4 hari
104	Rekomendasi Izin Emisi	0	0	-	4 hari
	<b>J. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
105	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	6	0	Turun	16 hari
106	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	-	16 hari
	<b>K. Sektor Ketenagakerjaan</b>				
107	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	0	0	-	16 hari
108	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	0	0	-	16 hari
	<b>L. Sektor Komunikasi &amp; Informatika</b>				
109	Izin Warnet	0	0	-	4 hari
	<b>M. Sektor Kelautan &amp; Perikanan</b>				
110	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	0	0	-	16 hari
111	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	0	0	-	16 hari
112	Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan	0	0	-	16 hari
	<b>Jumlah</b>	<b>1.327</b>	<b>7.617</b>		

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Tabel 2.101  
Indikator Kinerja Program, Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 indeks	82,3 indeks
2	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal	100 %	100 %
3	Persentase peningkatan jumlah investor	6 %	-27,78%
4	Realisasi Investasi yang dilaporkan	3,171T	0,96T
5	Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan	79%	85%
6	Cakupan data dan informasi penanaman modal yang dirilis	84%	70,65%
7	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	20%





Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota : Target Nilai IKM sebesar 83 , realisasi sebesar 82,3. , nilai IKM dibawah target hal ini disebabkan tenaga yang terbatas terkait dengan pelayanan dalam memberikan pendampingan tentang pengisian form survey kepuasan masyarakat.

- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal : target 100% realisasi 100%;
- 3) Program Promosi Penanaman Modal : Target 6% realisasi capaian kinerja (-27,78%), hal ini dikarenakan jumlah investor tahun 2021 mengalami penurunan dari jumlah tahun 2020 baik PMDN maupun PMA , Jumlah tahun 2020 sebanyak 6.109 investor, tahun 2021 sebanyak 4.412 investor. Formulasinya adalah Realisasi investor tahun N dikurangi (-) Realisasi investor tahun N-1 dibagi (:) Realisasi Investor tahun N-1 kali (x) 100%;
- 4) Program Pelayanan Penanaman Modal : Target tahun 2021 adalah 79% dengan capaian kinerja 85 %, jadi melebihi target;
- 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Target Tahun 2021 adalah 3,171 Trilyun. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tercapai 0,73 Trilyun. Nilai investasi yang dilaporkan meliputi perusahaan berskala mikro, menengah dan besar. Untuk perusahaan berskala mikro nilai investasinya sudah tercatat di OSS sedangkan untuk skala menengah dan besar wajib melakukan pelaporan LKPM. Peraturan tentang kewajiban pelaporan LKPM mengalami perubahan, yang semula diwajibkan kepada Pelaku usaha berbadan hukum dan pelaku usaha yang nilai 500 juta ke atas, sekarang yang wajib lapor LKPM pelaku usaha yang modal 1 milyar ke atas.
- 6) Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : Target Tahun 2021 sebesar 84%, realisasi capaian belum bisa tahun 2021 sampai dengan TW IV adalah 70,65%. Hal ini karena izin yang dirilis mengalami penurunan karena mengalami perubahan sistem;
- 7) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan : Target 100% realisasi capaian masih 20 %. Koordinasi perizinan yang terkait dengan panas bumi, koordinasi ke tingkat Provinsi belum bisa dilaksanakan karena belum ada inventor yang mengajukan perizinan panas bumi.

Tabel 2.102  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase peningkatan jumlah investor	1%	31,70 %	320%	6%	- 27,7 6%	10%	-277,6		DPMPTSP
2.	Realisasi investasi yang dilaporkan	688, 71 M	2,053 T	1,95T	3,17 1 T	0,73 T	3,497 T	20,88		DPMPTSP
3.	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	15%	32,44 %	24,36 %	50%	75%	60%	125		DPMPTSP
4.	Persentase pelayanan perizinan	75%	78%	98%	79%	614 %	80%	767,5		DPMPTSP

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
	perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan									
	Rata-rata capaian kinerja (%)							158,95		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari 4 indikator urusan Penanaman Modal, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator lainnya berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan sesuai standar pelayanan dan indikator Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha sesuai standar pelayanan karena jumlah realisasi perizinan yang terbit sesuai standar meningkat dibandingkan dengan permohonan perizinan dan pada Tahun 2021 terjadi kenaikan dikarenakan ada perubahan sistem OSS versi 1.1 ke OSS versi RBA sehingga pelaku usaha yang mengajukan izin lebih meningkat, sehingga jumlah ijin skala mikro dengan resiko rendah secara otomatis terbit termasuk NIB.

Sedangkan indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor karena berdasarkan formulasi indikator tersebut yaitu realisasi jumlah investor tahun (N) dikurangi realisasi jumlah investor tahun (N-1) dibagi realisasi jumlah investor tahun (N-1) dikalikan 100% , jumlah investor pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020 yaitu sebanyak 4.412 dari tahun 2020 sebanyak 6.109 investor . Dan indikator Realisasi Investasi yang dilaporkan karena peraturan tentang kewajiban lapor LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) mengalami perubahan, semula kewajiban laporan LKPM kepada Pelaku Usaha Berbadan Hukum dan Pelaku usaha perorangan dengan nilai 500 juta ke atas, pada Tahun 2021 berlaku bagi pelaku usaha kecil ke atas dengan modal lebih dari 1 Milyard, sehingga pelaku usaha yang modalnya dibawah 1 Milyard tidak terekam ke sistem/tidak melaporkan realisasi investasinya. Upaya yang dilaksanakan melalui optimalisasi perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

#### 2.3.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Gambaran bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.103  
Elemen data dan Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021



NO IKK	IKK Output	SATUAN	Elemen data	Capaian Kinerja
	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>			
1	Jumlah pemuda yang mendapat	Orang	50	50

NO	IKK Output	SATUAN	Elemen data	Capaian
	pelatihan kewirausahaan			
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	0	0
	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasiesatuansi sosial kemasyarakatan</b>			
1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Orang	200	200
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	0	0
	<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>			
1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Orang	121	121
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	10	10

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, LPPD Tahun 2022

Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.104  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93 %	96,4 3%	81,00 %	95,9 5%	100 %	96,96 %	103,14		Disdikpora
2.	Cakupan pembinaan olahraga	88,00 %	92,0 0%	91,77 %	92,0 0%	92%	92,00 %	100		Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)								101,57		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, pada indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator persentase organisasi pemuda yang aktif karena dari 27 organisasi kepemudaan tingkat kabupaten seluruhnya rutin melaksanakan reorganisasi.

### 2.3.2.14 STATISTIK

Urusan statistik yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten. Statistik sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam hal ini adalah Pemerintah

Daerah Kabupaten Kudus. Kegiatan statistik sangat berhubungan erat dengan data. Keluaran kinerja Pemerintah Daerah adalah Kebijakan Publik. Data yang valid dan reliabel serta kekinian sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 2.105  
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku Kabupaten Dalam Angka (Kudus Dalam Angka)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Kudus Tahun 2022

Kegiatan statistik sektoral tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106  
Dokumentasi Statistik Sektoral

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1	Dokumen statistik sektoral	1	1	1
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	5	5	7
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	5	5	9
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5	5	7
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5	5	9
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik (%)	NA	NA	44,12
7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik (%)	NA	NA	29,84


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Dokumen LPPD Tahun 2022

Konsep Evidence Based Policy menyebutkan bahwa ketersediaan data valid (*hardfact*) adalah yang utama sebagai input dalam proses penyusunan kebijakan publik. Kegiatan statistik yang dilakukan baik itu oleh BPS ataupun oleh kementerian/lembaga muaranya adalah untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efesien. Perangkat Daerah sebagai produsen data, harus mampu menyediakan data yang andal, guna mendukung kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan.

Data statistik sektoral, dihasilkan oleh Perangkat daerah pengampu urusan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data mendokumentasikannya dalam portal Satu Data.

Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada table berikut :

Tabel 2.107  
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
1.	Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		Dinas

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
	pelayanan data statistik sektoral									Kominfo
	Rata-rata capaian kinerja (%)							100		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, pada indikator urusan Statistik sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

### 2.3.2.15 PERSANDIAN

Kinerja urusan persandian yang diamanatkan Undang-undang adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Sejak tahun 2018 dalam rangka menjamin keamanan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersepakat melakukan perjanjian kerjasama yang bertujuan mewujudkan penerapan sistem elektronik yang aman. Dalam upaya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengkoordinasikan penggunaan sanapati atau email go.id. Semua perangkat daerah menggunakannya. Dalam upaya keamanan informasi, diterapkan penandatanganan elektronik bagi pimpinan. Perkembangan penerapannya sebagai berikut Kepala DPMPSTSP tahun 2018, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019, Kepala Bagian Hukum (tahun 2020), Kepala BPPKAD (tahun 2020), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (tahun 2020), Sekretaris Daerah (tahun 2020), Camat Kaliwungu (tahun 2021), Kepala BKPP (tahun 2022) dan Kepala Dinas PKPLH (tahun 2022).

Tabel 2.108  
Indikator Kinerja Persandian Tahun 2017- 2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	3	6	9	44	64

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian meningkat dikarenakan beberapa aplikasi perangkat daerah telah diamankan menggunakan SSL (pengamanan tingkat pertama), tetapi penggunaan SSL ini belum menjamin sepenuhnya keamanan akan aplikasi dimaksud. Masih perlu adanya pengamanan berlapis sesuai dengan standar teknis keamanan informasi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.109  
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	6%	9%	44 %	15 %	12%	24%	50	▼	Dinas Kominfo
	Rata-rata capaian kinerja (%)							50		
	Predikat kinerja							Sangat Rendah		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, pada indikator urusan Persandian sebanyak 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Capaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian yang sangat rendah karena belum terlindunginya semua aplikasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga perlu adanya pengadaan *software pentest* dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di perangkat daerah. Selain itu masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik. Upaya yang akan dilakukan adalah penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan melaksanakan audit keamanan informasi.

### 2.3.2.16 KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan di Kabupaten Kudus, diupayakan melalui pengelolaan kebudayaan dengan gambaran indicator kinerja kegiatan output dan outcome sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.110  
Elemen Data dan Capaian Kinerja Output

NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD	
			Elemen data	Capaian Kinerja
Terlestarikannya Cagar Budaya				
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	114	114
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	Obyek	43	43



NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD	
			Elemen data	Capaian Kinerja
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	92	92
	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	9	9
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	295	333
6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	138	138
7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Cagar Budaya	Tidak ada	Tidak ada
8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Cagar Budaya	2	2
9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	2	2
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi	213	56
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Orang	40288	
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	1	1
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	Tim	1	1
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tim	1	0
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	43	40
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	2	0
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit	5	5
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	9	



Tabel 2.111  
Elemen dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATU AN	Data LPPD		Data LPPD		Data LPPD		Data LPPD		Data LPPD	
				Elem en data	Capai an Kiner ja	Elem en data	Capai an Kiner ja	Elem en data	Capai an Kiner ja	Elem en data	Capai an Kiner ja	Elem en data	Capai an Kiner ja
				2021		2020		2019		2018		2017	
82	Terlestari kannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestari kan	.....%	138	35,57	71	22,12	45	26,95	40	23,95	40	26,67
		Jumlah cagar budaya yang terdata		388		321		167		167		150	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, LPPD 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.112  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realis asi 2019	Realisa si 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJ AWAB
1.	Persentase seni / budaya yang diaktualisasi kan	33%	48,0%	47%	59%	53%	71%	75		Dinas Budpar
2.	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	27%	16,00 %	22%	18%	37,27 %	20%	186,35		Dinas Budpar
Rata-rata capaian kinerja (%)								130,68		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari indikator urusan Kebudayaan sebanyak 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Capaian indikator Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu telah melampaui target karena dari 389 buah cagar budaya yang diregistrasikan sebanyak 145 buah cagar budaya telah dikelola secara terpadu.

### 2.3.2.17 PERPUSTAKAAN

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.113  
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6,2 %	8,31 %	2,35 %	8,0 %	1,14 %	9,4%	12,13%	▼	Dinas Arpus
2.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	68%	70,8 7%	70,7 8%	72, 65%	71,0 2%	73,58%	96,52%	▲	Dinas Arpus
Rata-rata capaian kinerja (%)								54,32%		
Predikat kinerja								Rendah		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari indikator urusan Perpustakaan sebanyak 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja Rendah. Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Persentase pengunjung perpustakaan per tahun karena jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan disebabkan pelayanan perpustakaan dilakukan pembatasan sehubungan masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja melalui promosi layanan dan publikasi kegiatan perpustakaan diberbagai media baik media sosial, *online* maupun cetak, penambahan jenis layanan perpustakaan dengan melibatkan masyarakat, komunitas berupa pelatihan dan pemberalajaran gratis, serta penambahan koleksi buku.

#### 2.3.2.18 KEARSIPAN

Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.114  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	na	8,31 %	6,68 %	11,63 %	25,58 %	23%	111,21%	●	Dinas Arpus
Rata-rata capaian kinerja (%)								111,21%		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021 pada indikator urusan Kearsipan sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip disebabkan Perangkat Daerah yaitu Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang

melaksanakan JRA dari target sebanyak 5 perangkat daerah pada Tahun 2021 tercapai 11 perangkat daerah.

2.3.3 URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Wilayah Kabupaten Kudus meskipun secara geografis tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat yang cukup besar. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Kudus masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan baik pada budidaya air tawar, perairan umum maupun di pengolahannya. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka Pembangunan Perikanan Budidaya dan Pengolahan di Kabupaten Kudus selama ini menunjukkan hasil yang positif, baik dilihat dari luas areal maupun produksi budidaya dan pengolahannya serta berkembangnya sarana dan prasarana penunjangnya. Secara keseluruhan, dalam periode tahun 2017-2021, produksi usaha perikanan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115  
Produksi Perikanan Tahun 2017–2021

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)					Rerata (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Budidaya air tawar	2.122,31	2.143,64	1.901,8	2.165,16	2.182,2	0,006
2.	Perairan Umum	582,97	508,99	479,98	515,160	520,504	-0,02
3.	Pengolahan Ikan	1.666,00	1.743,67	1.745	1.826,75	1.845	2,1

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, produksi perikanan budidaya air tawar mencapai 2.182,2 ton pada tahun 2021, yang berarti mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 sebanyak 2.122,31 ton. Sedangkan di perairan umum mengalami penurunan menjadi 520,504 ton di tahun 2021 dari 582,97 ton di tahun 2017, namun sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020. Pada jenis pengolahan ikan juga mengalami peningkatan dari 1.666,00 ton di tahun 2017 menjadi 1.845 ton di tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan pemberdayaan petani ikan melalui pendampingan dan penyuluhan dengan harapan akan muncul para kelompok pembudidaya ikan yang bukan hanya kuat dari aspek teknis maupun kelembagaan namun tangguh dalam hal manajemen usaha. Untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang bersumber dari ikan maka Pemerintah Kabupaten Kudus telah mensosialisasikan dan mengimplementasikan program Gerakan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan (Gemarikan) dengan sasaran utamanya generasi usia sekolah. Program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi produk ikan bagi kesehatan dan meningkatnya angka konsumsi ikan pada tahun 2021 yaitu 31,78 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.116  
Angka Konsumsi Makan Ikan Kabupaten Kudus Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Makan Ikan	25,41 kg/kap/ th	26,64 kg/kap/ th	28,2 kg/kap/ th	29,3 kg/kap/ th	31,78 kg/kap/ th

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022; BPS Tahun 2022

Prioritas produk perikanan sebagai alternatif sumber protein bagi masyarakat menggantikan sumber protein hewani yang lain merupakan potensi dan tantangan untuk dikembangkan dan harus menjadi perhatian sejak dini. Disamping itu melalui diversifikasi dan inovasi produk olahan hasil perikanan yang dipadukan dengan implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan diharapkan makin mendongkrak pangsa pasar dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Tabel 2.117  
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017–2021

LAPANGAN USAHA	Persentase terhadap PDRB ADHB					Rata-rata Kontribusi
	2017	2018	2019	2020	2021	
Perikanan	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,195


Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022; BPS Tahun 2022

Kontribusi sektor usaha perikanan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020. Hal ini disebabkan tidak terjadinya kenaikan produksi perikanan dan menurunnya produksi sector perkebunan.

Indikator program dalam RPJMD tahun 2018-2023 berkaitan dengan sektor perikanan adalah prosentase peningkatan produksi perikanan. Formula penghitungan indikator ini adalah : jumlah produksi Perikanan/target produksi perikanan akhir renstra x 100, Target tahun 2021 sebesar 98 tercapai 98,01.

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.118  
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANG GUNGJA WAB
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan	95	88,99	97,14 %	98	98,01	100	98,01		Distan dan Pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)							98,01		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase peningkatan produksi perikanan melalui pembinaan dan pendampingan secara rutin pada pembudidaya ikan dan pengolahan ikan serta melaksanakan inovasi untuk peningkatan produksi pertanian.

2.3.3.2 PARIWISATA

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Guna memajukan sector ini, Kabupaten Kudus berupaya mengembangkan potensi wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam Gunung Muria, hutan pinus Kajar, Wisata alam Ternadi. Disamping itu terdapat pula beberapa objek tujuan wisata buatan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, Situs Patiayam, Taman Balai Jagong GOR, Taman Sardi, Waterboom Wisata Lau, Vaganza Hills, dan beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu (atraksi wisata) seperti tradisi Tebakan di desa Kaliputu, Ampyang Maulid di desa Loram Kulon, Rebo Wekasan di desa Jepang dan lain-lain.

Indikator Kinerja pelayanan pariwisata dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119  
Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian			2020	2021
			2017	2018	2019		
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	1.845.872	1.716.773	1.924.436	887.409	960.880
2	Kenaikan PAD sektor pariwisata ( )	Persen	28,42	19,43	8,01	-57	-47
3	Kontribusi pariwisata terhadap PAD	Persen	0,75	0,97	0,67	0,36	0,33
	Jumlah Objek Wisata	Objek	34	34	35	35	36
4	Rata-rata lama kunjungan wisata	hari	1	1	1	1	1
5	Jumlah Hotel	unit	30	30	31	31	32
6	Jumlah Restoran	unit	61	64	65	67	68
7	Jumlah pekerja industri pariwisata	orang	1.091	1.354	756	3.233	3.146
8	Jumlah kerjasama antar daerah di kawasan di PAKUDJEMBARA	Dok	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Indikator kinerja pelayanan pariwisata di kabupaten kudus menunjukkan penurunan yang signifikan. Penutupan sektor pariwisata dimaksudkan untuk menghindari kerumunan, guna mengantisipasi lonjakan

kasus virus Corona. Tidak diperbolehkannya kunjungan lokasi wisata membawa dampak penurunan terhadap penerimaan PAD dari retribusi sektor pariwisata sebesar 1.492.605.230,00 pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 1.683.891.770,00, artinya kinerja sektor pariwisata perlu mendapat perhatian. Perlu dicari terobosan guna mengatasi permasalahan sektor pariwisata. Potensi wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kudus sebanyak 12 lokasi, dengan perkembangan kunjungan wisata pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.120  
Perkembangan Kunjungan Wisata Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

NO	OBYEK WISATA	Pengunjung (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus	688.291	802.230	718.680	466.394	483.955
2	Colo dan Makam Sunan Muria	902.301	1.072.653	1.087.748	356.724	384.602
3	Taman Ria Colo	4.857	5.607	6.775	853	1.474
4	Tugu Identitas	1.035	1.090	1.455	382	275
5	Taman Krida Wisata	106.751	57.271	50.689	16.429	23.291
6	Water Pool	6.948	9.575	10.011	5.295	6.918
7	Situs/Museum Patiayam	62.895	18.883	19.127	9.026	5.474
8	Museum Kretek dan Rumah Adat	145.938	136.471	145.999	38.454	34.814
9	Replika Rumah Khas Kecamatan	-	5.550	18.965	-	-
10	Ember tumpah	27.775	27.730	32.734	10.286	9.447
11	Water Park	19.846	26.315	32.290	9.366	10.629
12	Maerokoco	2.215	2.670	2.290	1.080	1.968

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

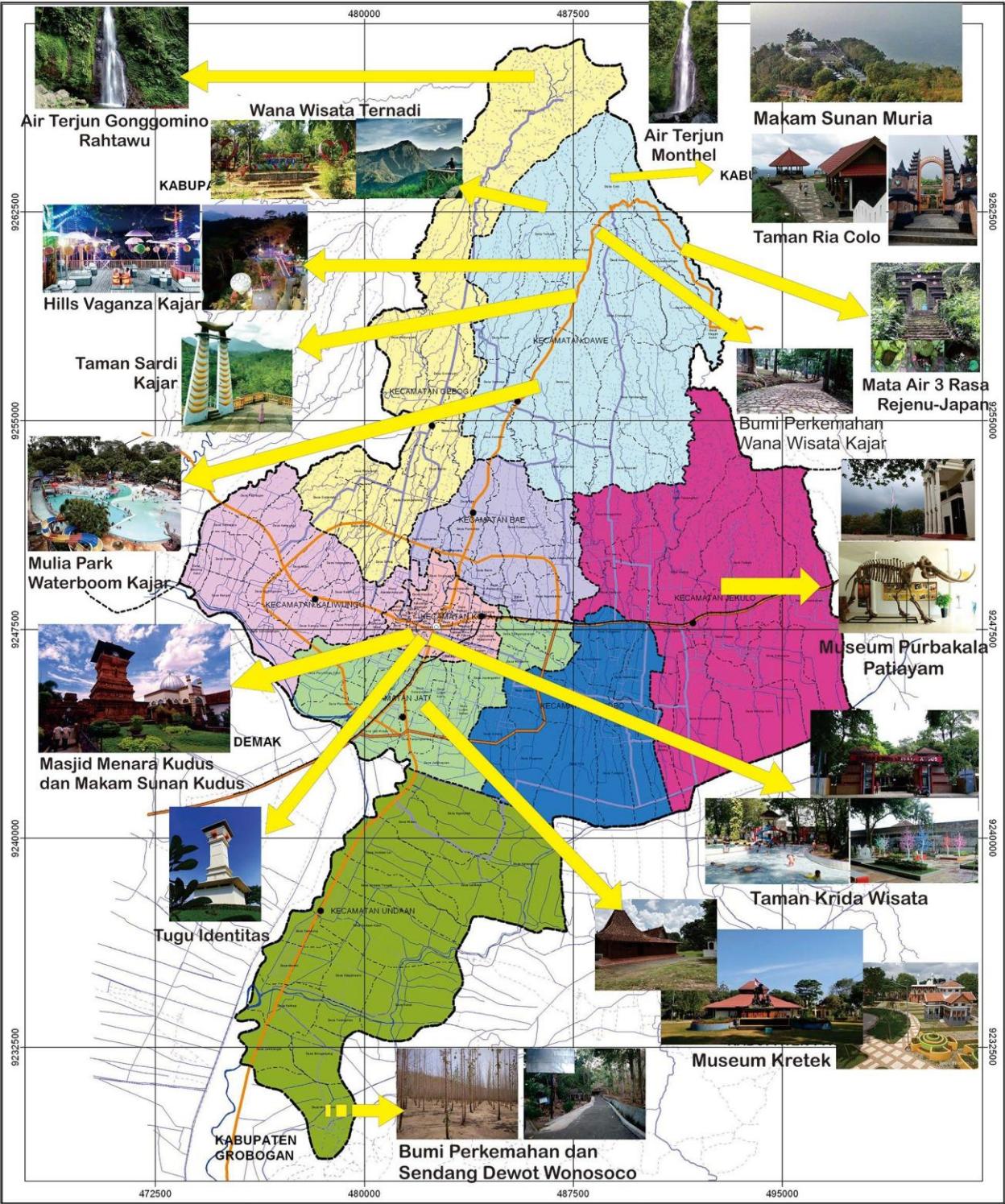
Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa obyek wisata Colo dan Makam Sunan Muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari Tahun 2017 sejumlah 902.301 orang dan pada tahun 2021 sejumlah 384.603 orang, Museum Kretek dan rumah adat mengalami penurunan pengunjung dari tahun 2017 sejumlah 145.938 orang menjadi sejumlah 34.814 orang pada tahun 2021 sebagai akibat adanya dampak pandemi covid-19. Pengunjung dan Situs/Museum Patiayam mengalami penurunan dari tahun 2017 sejumlah 62.895 orang menjadi 5.474 orang pengunjung di tahun 2021. Wisata religi Makam Sunan Muria dan Makam Sunan Kudus masih mendominasi kunjungan wisata di Kabupaten Kudus, menyusul potensi wisata Museum Patiayam yang perlu terus dikembangkan. Diharapkan obyek wisata situs Patiayam terus mengalami peningkatan kunjungan wisata karena bertambahnya sarana dan prasarana pendukung wisata di Museum Fosil Patiayam dengan penambahan temuan fosil, Patung Gajah purba stegodon dan Tugu Identitas.

Adapun Destinasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: Makam sunan Muria, Taman Ria Colo, Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus, Museum Kretek dan Rumah Adat, Replika rumah, Ember tumpah, Water Park, Taman Krida Wisata, Water Pool, Tugu Identitas, Situs Patiayam, dan Anjungan Kudus di Maerokoco



Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata Air Terjun Gompeng Kuwukan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe yang cukup diminati wisatawan domestik. Obyek wisata Situs Patiayam diharapkan ada peningkatan jumlah kunjungan wisata dengan bertambahnya sarana prasarana pendukung wisata di tempat Museum Fossil Patiayam mengingat bertambahnya temuan fosil dan fasilitas Patung Gajah Purba Stegodon.

Pada tahun 2021 urusan Pariwisata merupakan urusan yang masuk kategori terdampak Covid-19. Guna menghentikan penyebaran virus yang mematikan ini seluruh lokasi wisata pada masa pandemi tidak diperbolehkan beroperasi. Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisata pada semua destinasi wisata di Kabupaten Kudus pada tahun 2021.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022  
**Gambar 2.20** Peta Lokasi Wisata Kabupaten Kudus

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.121  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	19,43 %	8%	-57%	12%	-48%	14%	-342,86%	▼	Dinas Budpar
2.	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	1%	0%	4%	6%	0%	10%	0%	▼	Dinas Budpar
3.	Persentase peningkatan promosi pariwisata	10%	13%	60%	13%	80%	15%	533%	●	Dinas Budpar
Rata-rata capaian kinerja (%)								63,38%		
Predikat kinerja								Rendah		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Pariwisata terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja Rendah. Indikator yang melampaui target karena adanya perubahan media promosi yaitu dari target Promosi melalui media cetak sejumlah 6000 lembar, pada tahun 2018,2019, 2020 dimana promosi media cetak pada tahun 2018, 2019, 2020 ini berupa cetak booklet dan leaflet, tetapi tahun 2021 berupa iklan di media cetak (koran) sebanyak 18 kali tayang @ 4300 eks, dan promosi melalui media online/Media Sosial di 4 channel media social Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sebanyak 929 konten.

Sedangkan indikator yang perlu upaya keras yaitu Indikator persentase kenaikan PAD sektor pariwisata pada tahun 2021 belum tercapai dikarenakan masih terjadinya Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PPKM sehingga sering terjadi penutupan tempat wisata yang mengakibatkan target PAD belum tercapai, dari target sebesar Rp. 1.638.891.770,00 atau sekitar 52% dari PAD tahun dasar yakni PAD tahun 2018 sebesar Rp. 3.176.497.000,00. Dan untuk indikator persentase peningkatan sarana prasarana pariwisata yang memadai karena pada tidak adanya penambahan sarana prasarana pariwisata, hanya pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang sudah ada. Meski demikian, sejak tahun tahun 2020, upaya pendampingan dilakukan terhadap desa-desa yang memiliki potensi pariwisata sehingga menghasilkan desa wisata seperti tabel berikut :

Tabel 2.122  
Desa Wisata di Kabupaten Kudus

DESA WISATA TAHUN (SK 2020)			DESA WISATA TAHUN (SK 2021)	
No.	Desa	Kategori	Desa	Kategori
1	WATES	RINTISAN	KARANGAMPEL	RINTISAN

DESA WISATA TAHUN (SK 2020)			DESA WISATA TAHUN (SK 2021)	
No.	Desa	Kategori	Desa	Kategori
2	PADURENAN	RINTISAN	MENAWAN	RINTISAN
3	TANJUNGREJO	RINTISAN	GRIBIG	RINTISAN
4	KANDANGMAS	RINTISAN	KAUMAN	RINTISAN
5	TERNADI	RINTISAN	JAPAN	RINTISAN
6	MARGOREJO	RINTISAN	KLALING	RINTISAN
7	KALIPUTU	RINTISAN	JANGGALAN	RINTISAN
8	RAHTAWU	RINTISAN	KARANGROWO	RINTISAN
9	JURANG	RINTISAN	KAJAR	RINTISAN
10	TEMULUS	RINTISAN	PEDAWANG	RINTISAN
11	JEPANG	BERKEMBANG	NGEMPLAK	RINTISAN
12	TERBAN	BERKEMBANG	KEDUNGOWO	RINTISAN
13	WONOSOCO	BERKEMBANG	GONDOSARI	RINTISAN
14	DUKUHWARINGIN	BERKEMBANG		
15	LORAM KULON	BERKEMBANG		

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Dari desa wisata tersebut, beberapa diantaranya memiliki pasar wisata yang dibuka di setiap tanggal tertentu. Pasar wisata tersebut antara lain Pasar Bunga dan Geldara (Gelaran Dagangan Rakyat) di Desa Janggalan, Sarguge (Pasar Minggu Wage) di Desa Menawan, Pasar Winong di Sendang Buyutan Desa Margorejo, Pasar Ramadhan 1443/2022 di Desa Gondosari, dan Pasar Tiban di Rest Area Desa Rahtawu setiap hari Sabtu-Minggu sore selama bulan Ramadhan.

### 2.3.3.3 PERTANIAN

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Produksi pertanian di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 untuk padi mencapai 161.791 ton, jagung 17.516 ton, ketela pohon 17.509 ton, ubi jalar 767 ton, kacang tanah 203 ton, kedelai 65 ton, kacang hijau 4.784 ton, bawang merah 759,6 ton dan cabe besar 1.010,05 ton. Berdasarkan tabel di bawah, terjadi kenaikan produksi pertanian kecuali padi, jagung dan kacang tanah. Hal tersebut disebabkan karena kemarau panjang dan banyaknya alih fungsi lahan yang berdampak pada menurunnya tingkat produksi pangan karena kebutuhan industri dan perumahan. Data lahan pertanian dalam RTRW tahun 2012 sejumlah 25.334 ha, kondisi saat ini turun menjadi 22.233 ha, sehingga terjadi penurunan lahan pertanian karena alih fungsi ke sektor non pertanian sebanyak 3.101 ha atau 12,24%. Masih adanya lahan tidur berupa rawa juga menjadikan produksi tidak optimal. Peningkatan produksi cabe besar disebabkan karena petani lebih memilih menanam cabe besar dengan harga lebih tinggi dan mudah pembudidayaannya.

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan



pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perkembangan produksi komoditas pertanian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.123  
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton) Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Padi	164.164	160.096	166.494	167.878	161.791
2.	Jagung	26.010	30.057	26.128	18.584	17.516
3.	Ketela pohon	33.195	31.396	31.441	2.063	17.509
4.	Ubi jalar	1.189	1.569	1.158	105	767
5.	Kacang tanah	479	687	274	363	203
6.	Kedelai	164	427	190	47	65
7.	Kacang hijau	4.496	4.519	5.729	4.213	4.784
8.	Bawang merah	531,1	390,8	335,7	396,3	759,6
9.	Cabe besar	890,4	765,6	448,4	992,6	1.010,05

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti tebu dan kopi. Produksi tebu tahun 2021 sebesar n/akw mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2.802.706,2 kw. Perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas tebu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124  
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tebu Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas tanam (Ha)	5.528,99	5.243,88	4.580,79	4.529,64	4.406,45
2.	Produksi (Kw)	2.943.347,3	3.287.071,1	2.937.660,62	2.802.706,2	2.801.400
3.	Produktivitas (kw/Ha)	535,8	628,7	641,3	618,7	660

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 (Kudus Dalam Angka)

Luas tanaman tebu pada tahun 2021 seluas 4.406,45 hektar. Luasan tersebut berkurang dari tahun – tahun sebelumnya. Penurunan luasan tebu mencapai 123,19 hektar. Penurunan lahan tebu di Kabupaten Kudus diantaranya disebabkan oleh alih fungsi lahan perkebunan tebu menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan dan industri pabrik. Penyebab yang lain adalah alih fungsi lahan dari komoditas tebu menjadi komoditas lain, seperti ketela, kencur, juga kacang-kacangan. Penurunan lahan tebu diiringi dengan penurunan minat petani untuk bertanam tebu. Harga gula yang stabil menyebabkan petani beralih komoditas.

Berdasarkan tabel di atas, walaupun berkurangnya luas tanam tebu, namun produktivitas dari tanaman tebu mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 618,7 kuintal per hektar menjadi 660 kuintal per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan produksi tebu namun karena luas tanamnya berkurang drastis maka produksi tebu sedikit mengalami penurunan.

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak besar pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, adapun pada ternak unggas mengalami peningkatan populasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.125  
Jumlah Ternak Tahun 2017 - 2021

No	Jenis ternak	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sapi (ekor)	9.029	8,975	8.905	8.931	9.012
2.	Kerbau (ekor)	1.793	1.642	1.649	1.778	1.760
3.	Kambing (ekor)	25.969	21.977	24.863	25.651	25.717
4.	Ayam buras (ekor)	384.911	381,386	381.933	387.118	387.454
5.	Ayam ras pedaging (ekor)	9.810.500	10.155,200	10.158.800	14.968.200	12.348200

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan populasi untuk semua komoditas ternak, kenaikan yang paling tinggi adalah pada ternak ayam ras pedaging dengan kenaikan berkisar 25,9 %. Pada produksi hasil peternakan produksi daging, susu dan telur mengalami kenaikan.

Tabel 2.126  
Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2021

No	Jenis produksi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Daging	9.811.344	9.975.305	10.343.902	13.586.893	15.175.539
2.	Susu	340.200	945.000	775.465	532.530	547.581
3.	Telur	2.559.708	2.687.074	2.817.962	2.446.241	2.482.267

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Urusan pertanian dalam mendukung PDRB dari sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan dan jasa pertanian dan perkebunan. Adapun besarnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.127  
Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Kudus (Persen), 2017-2021

Sumber : BPS – PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 -2021 (rilis 6 April 2022),

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	91,57	91,21	91,14	91,07	90,47
	a. Tanaman Pangan	35,77	35,31	33,93	33,15	32,56
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	3,21	2,99	2,94	3,06	3,17
	c. Perkebunan Semusim	10,71	10,60	11,10	11,00	10,10
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	21,52	20,99	21,28	21,57	23,82
	e. Perkebunan Tahunan	1,75	1,75	1,73	1,68	1,66
	f. Peternakan	16,57	17,51	18,08	18,53	17,14
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,03	2,06	2,08	2,10	2,01
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
3	Perikanan/Fishery	8,36	8,71	8,78	8,86	9,45
	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Kontribusi sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan turunnya peranan tanaman, perkebunan semusim, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, perlu dilakukan pembinaan tenaga penyuluh. Deskripsi data penyuluh pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128  
Data Penyuluh Pertanian Tahun 2020 - 2021

No	KECAMATAN	JUMLAH PENYULUH			Komoditas
		PNS	THL	Swadaya	
	<b>TAHUN 2020</b>				
1	Kaliwungu	3	-	-	Semua komoditas
2	Kota	2	4	6	Padi
3	Jati	1	1	3	Padi, Bawang merah
4	Undaan	2	3	7	Padi
5	Mejobo	5	1	16	Padi, Melon
6	Jekulo	4	1	4	Padi
7	Bae	3	2	6	Padi, Jagung
8	Gebog	2	2	5	Tebu, Padi
9	Dawe	2	3	6	Tebu, Kopi
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	
	<b>TAHUN 2021</b>				
1	Kaliwungu	1	4	-	Semua komoditas
2	Kota	4	1	6	Padi
3	Jati	2	1	3	Padi, Bawang merah
4	Undaan	4	3	7	Padi
5	Mejobo	1	4	16	Padi, Melon
6	Jekulo	1	4	4	Padi
7	Bae	2	3	6	Padi, Jagung
8	Gebog	5	-	5	Tebu, Padi
9	Dawe	1	4	6	Tebu, Kopi
	<b>Jumlah Tahun 2021</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan telah menyelenggarakan pelatihan di setiap Balai Penyuluh Pertanian untuk semua penyuluh sekali dalam satu bulan. Adapun pelatihan teknis lainnya yang diikuti dari BPSDM Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan agribisnis padi, pelatihan agribisnis jagung, pelatihan agribisnis kedelai, pelatihan peningkatan kapasitas SDM THL dan pelatihan digital marketing produk pertanian.



Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tidak terlepas dari upaya agar di Kabupaten Kudus tidak terjadi defisit pangan. Dengan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian akan berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan penerapan teknologi budidaya pertanian merupakan upaya perwujudan pola ruang di kawasan peruntukan pertanian untuk mencegah defisit pangan di Kabupaten Kudus.

Indikator program dalam RPJMD tahun 2018-2023 berkaitan pertanian adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan  
Formula penghitungan indikator ini adalah (Jumlah provitas padi/target provitas padi akhir renstra x 100 + Jumlah produksi tebu/target produksi tebu akhir renstra x 100) dibagi 2. Target tahun 2021 sebesar 97,03 tercapai 102,4.
- 2) Persentase peningkatan produksi peternakan.  
Formula penghitungan indikator ini adalah Jumlah produksi hasil peternakan/target hasil peternakan akhir renstra x 100. Target tahun 2021 sebesar 90,7 tercapai 88,53.

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.129  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGG UNGJAWA B
1.	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	91,46	102,1	96,50 %	97,03	102,4	100	102,4		Distan dan Pangan
2.	Persentase peningkatan produksi peternakan	78,35	81,31	96,64 %	90,7	88,53	100	88,53		Distan dan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)								95,46		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Pertanian terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian/perkebunan karena adanya peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap petani serta adanya penyediaan sarana prasarana pertanian.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan pembinaan kepada peternak dan melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal secara rutin.

2.3.3.4 KEHUTANAN

Sesuai Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat 2 bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada didalamnya, berlokasi tak jauh dari perkotaan yang mudah diakses, dan tidak terletak ditengah hutan belantara. Ekosistemnya bisa alami dan buatan. Sesuai dengan tujuan, fungsi dan karakteristik tertentu. Salah satu kriteria untuk menjadi



taman hutan raya memiliki keindahan alam dan mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk perkembangan tumbuhan dan satwa yang ada didalamnya. Dengan adanya kewenangan ini, maka di Kabupaten Kudus perlu dilakukan pengembangan hutan kota menjadi taman hutan raya.

Berdasarkan ketentuan pengelolaan KPA Tahura dalam PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam bahwa lahan Pemerintah Kabupaten Kudus yang berada di wilayah Gunung Pati tepatnya Dukuh Ngrangit Desa Terban dapat digunakan untuk RTH rintisan Tahura dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang mencukupi sehingga dapat menjadi tempat berkembangbiak flora fauna yang ada;
2. Masih ada fauna khas yang ada yaitu burung Cucak Hijau;
3. Daerah sekitar lokasi sebagai penyangga berupa hutan produksi;
4. Dapat digunakan untuk mengembangkan flora dan fauna khas yang ada di Kabupaten Kudus.

Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.130  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGG UNGJAWA B
1.	Persentase tutupan lahan	0,08%	0,08 %	0,20%	0,32%	9,95%	0,48%	2,072		Dinas PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)							2,072		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Kehutanan terdiri dari 1 indikator berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator persentase tutupan lahan yang melampaui target karena telah dilaksanakan penanaman sebanyak 100 batang pohon di lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura), dimana 1 batang pohon diasumsikan memiliki tutupan lahan seluas 25 m2, sehingga tutupan lahan yang dihasilkan seluas 2.500 m2 dari luas Tahura yaitu 25.129 m2 (2,5 hektar) di Dukuh Ngrangit Desa Terban Kecamatan Jekulo sesuai persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 522.6/4149/21.00/2019.

### 2.3.3.5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah berupa pemberian izin pengelolaan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT) sebagaimana UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (4) yang berbunyi “Urusan Pemerintahan Bidang energi dan Sumber Daya Mineral pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”.

Pelayanan perizinan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT) difasilitasi Dinas yang mengelola perizinan. Sampai saat ini di Kabupaten Kudus belum ada yang mengajukan perizinan panas bumi disebabkan karena tidak terdapat potensi panas bumi baru yang terbarukan yang muncul di Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Kudus secara eksplisit, sumber panas bumi dari alam memang tidak ditemukan, tetapi kemungkinan adanya inovasi akan penemuan sumber energi baru yang terbarukan dimungkinkan akan terjadi.

Tabel 2.131

Target kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2021

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100%	0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	2 kali	0 kali

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Target kinerja Kabupaten Kudus pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi. Pada tahun 2021belum dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dikarenakan tidak ada permohonan perizinan panas bumi.

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.132

Capaian Kinerja Urusan ESDM

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realis asi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisa si 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANG GUNGJA WAB
1.	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaat an energi dan sumber daya mineral	100%	100%	0%	100%	20%	100%	20	▼	DPMPTS P
Rata-rata capaian kinerja (%)								20		
Predikat kinerja								Sangat Rendah		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 1 indikator berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja sangat rendah. Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral karena adanya Covid-19 sehingga kegiatan koordinasi ke tingkat Provinsi secara tatap muka tidak dilakukan, hanya melakukan koordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten Kudus. Upaya yang akan dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi terkait fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.

2.3.3.6 PERDAGANGAN

Kabupaten Kudus memiliki 27 Pasar yang terdiri dari 25 pasar tradisional dan 2 Pasar khusus. Adapun 25 Pasar tradisional tersebut dibedakan menjadi 7 pasar daerah, 16 pasar desa dan 2 pasar hewan. Pasar di Kabupaten Kudus terdiri dari 2.702 kios 8.502 los 35 ruko dan 636 pelataran. Sedangkan taman bojana dan taman menara adalah pasar khusus. Tidak hanya itu, Kabupaten Kudus juga memiliki beberapa pasar yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu sejumlah 7 pasar rakyat yang dikelola pemerintah desa antara lain pasar Menawan, Pasar Sudimoro, Pasar Djarum Desa Megawon, Pasar Jepang Desa Jepang, Pasar depan Pabrik Nojorono Desa Kaliwungu dan Pasar Ternak Desa Mijen dan Pasar Ploso. Adapun mengenai daya tampung pasar rakyat/jumlah pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.133  
Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL Tahun 2017-2021

NO.	JUMLAH PEDAGANG	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pedagang Pasar	12.779	10.769	13.800	13.883	13.803
2	Jumlah PKL	3.850	4.176	4.532	4.513	4.513

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2022

Dari tabel diatas, jumlah pedagang di pasar rakyat pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Pada tahun 2017 jumlah pedagang sebanyak 12.779 pedagang, kemudian bertambah di tahun 2018 menjadi 10.769 pedagang, tahun 2019 menjadi 13.800 pedagang, tahun 2020 menjadi 13.883 pedagang, dan menjadi 13.803 di tahun 2021. Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi retribusi tahun 2021.

Tabel 2.134  
Data Toko Swalayan Tahun 2021 Kabupaten Kudus

NO.	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Minimarket Lainnya	Mall	Total
Tahun 2020						
1	Kota	6	16	2	2	26
2	Jati	7	8	3	2	20
3	Bae	8	5	0	0	13
4	Mejobo	3	5	0	0	8
5	Dawe	4	2	0	0	6
6	Kaliwungu	8	7	0	0	15
7	Undaan	3	2	0	0	5
8	Gebog	2	3	0	0	5
9	Jekulo	5	7	0	0	12
	Jumlah	46	55	5	4	110
Tahun 2021						
1	Kota	6	16	4	2	28
2	Jati	7	8	2	3	20
3	Bae	8	5	2	-	15
4	Mejobo	3	5	-	-	8

NO.	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Minimarket Lainnya	Mall	Total
5	Dawe	4	2	-	-	6
6	Kaliwungu	8	7	-	-	15
7	Undaan	3	2	-	-	5
8	Gebog	2	3	-	-	5
9	Jekulo	5	7	-	-	12
	<b>Jumlah</b>	46	55	8	5	114

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2022

Keberadaan Mall/Swalayan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 terdapat 5 unit yaitu Hypermart, Ramayana Mall, ADA Swalayan, Superindo dan Trade Centre. Selain itu terdapat 106 Unit usaha minimarket waralaba yang tercatat yaitu Alfamart 46 unit, Indomaret 55 unit dan minimarket 8 unit lainnya. Semakin banyaknya Pasar Modern yang berkembang di Kabupaten Kudus menunjukkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat Kudus secara umum juga mengalami peningkatan, namun di lain pihak keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional mengakibatkan turunnya minat masyarakat dengan indikator isian kios/los pasar yang tutup.

Dalam rangka melindungi konsumen dalam melakukan aktivitas perdagangan maka pemerintah daerah melakukan upaya perlindungan konsumen terutama untuk barang kebutuhan pokok dan barang yang bersubsidi oleh pemerintah seperti gas, pupuk dan BBM. Upaya yang telah dilakukan antara lain pengujian tera untuk alat timbangan baik di perusahaan, SPBU dan pedagang pasar dengan jumlah alat yang sudah di tera sampai tahun 2021 sebanyak 11.151 unit dari 15.300 unit atau sekitar 72,88.

Urusan Perdagangan pada tahun 2021 termasuk pada kategori urusan yang terdampak Covid-19. Dengan adanya penyebaran virus yang mematikan ini, pada masa pandemi digerakkan *physical distancing* dimanapun berada terutama pada area publik termasuk di Pasar, area PKL, toko, warung yang merupakan akses bertemunya pedagang dan pembeli. Pengetatan jam berjualan dan tidak melayani pembelian di tempat (warung makan) diprediksi menurunkan keuntungan bahkan merugi atau gulung tikar.

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.135  
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	27%	37,83 %	41%	50%	52,94 %	70%	105,88 %	●	Dinas Perdagangan
2.	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang	78%	65%	37,03 %	90%	41,25 %	100%	45,83%	▼	Dinas Perdagangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
	bersubsidi serta pelaksanaan promosi									
3.	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	70%	75%	68,53 %	85%	72,88 %	95%	85,74%	▶	Dinas Perdagangan
4.	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,40 %	2,28%	1,83%	3,90%	2,84%	4,50%	72,82%	▶	Dinas Perdagangan
5.	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	70%	80%	80%	85%	85%	95%	95,59%	▶	Dinas Perdagangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)							81,17%		
	Predikat kinerja							Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Perdagangan terdiri dari 5 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja Tinggi. Indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ditundanya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten dan pameran dagang lokal.

Upaya yang dilaksanakan yaitu mengoptimalkan pelayanan UTTP serta pemungutan dan penyetoran retribusi, melaksanakan koordinasi untuk percepatan penyerahan pasar bitingan dan pasar jembar dari pihak investor kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga retribusi PKD dapat dipungut.

### 2.3.3.7 PERINDUSTRIAN

Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan sektor yang lain. Sektor industri ini didominasi oleh pengolahan antara lain rokok, konveksi dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan yang telah didirikan di Kabupaten Kudus yang mendukung perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) salah satunya adalah industri kerajinan, industri sepatu dan industri makanan. Perusahaan Industri tersebut yang menjadi *leading sector* (penggerak ekonomi) di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.136  
Jumlah Perusahaan Industri Tahun 2017–2021

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan / Unit Usaha				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	1.856	1.858	1.858	1.860	1.866
2	Kota	2.188	2.188	2.191	2.207	2.219
3	Jati	1.597	1.597	1.597	1.599	1.602
4	Undaan	487	487	487	489	491

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan / Unit Usaha				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Mejobo	1.829	1.830	1.830	1.831	1.833
6	Jekulo	1.082	1.085	1.085	1.087	1.089
7	Bae	1.288	1.290	1.290	1.291	1.294
8	Gebog	1.257	1.257	1.258	1.260	1.263
9	Dawe	1.415	1.415	1.415	1.420	1.427
	<b>Jumlah</b>	<b>12.999</b>	<b>13.007</b>	<b>13.011</b>	<b>13.044</b>	<b>13.084</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

Sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Kota pada tahun 2021 tercatat yang memiliki jumlah perusahaan / unit usaha yang terbesar dengan jumlah perusahaan 2.219 unit, kemudian urutan berikutnya adalah Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan seterusnya. Adapun yang memiliki jumlah perusahaan terkecil adalah Kecamatan Undaan karena memiliki karakteristik wilayah pertanian dan ditetapkan sebagai daerah swasembada pangan pendukung produksi pangan dan hanya terdapat 491 unit usaha.

Tabel 2.137

Jumlah Tenaga Kerja Pada Perusahaan Industri Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Tenaga Kerja Pada Perusahaan/Unit Usaha				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	14.772	14.778	14.778	15.531	16.834
2	Kota	138.798	138.798	138.813	139.961	139.981
3	Jati	28.248	28.248	28.248	29.377	29.350
4	Undaan	2.110	2.110	2.110	2.112	2.114
5	Mejobo	5.208	5.213	5.213	5.964	5.996
6	Jekulo	6.196	6.212	6.212	7.714	7.718
7	Bae	32.253	32.265	32.265	33.766	33.369
8	Gebog	21.983	21.983	21.988	22.740	22.743
9	Dawe	6.430	6.430	6.430	6.437	6.448
	<b>Jumlah</b>	<b>255.998</b>	<b>256.037</b>	<b>256.057</b>	<b>263.602</b>	<b>264.953</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan perkembangan perusahaan industri dan jumlah tenaga kerja pada perusahaan/industri di Kabupaten Kudus Tahun 2017–2021 yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih maju dan meningkat jumlahnya. Pada sisi jumlah tenaga kerja perusahaan terbanyak pada tahun 2021 terdapat di Kecamatan Kota yaitu sebesar 139.981 orang, urutan berikutnya Kecamatan Bae dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 33.369 orang. Kecamatan Undaan yang berkarakteristik sebagai penyangga sektor pertanian, memiliki jumlah perusahaan industri terkecil 491 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja industri paling sedikit sejumlah 2.114 orang.

Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.138  
Jumlah Nilai Produksi Pada Perusahaan Industri Tahun 2017–2021

No	Kecamatan	Nilai Produksi (Juta Rp.) Perusahaan / Industri				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	7.379.710	7.987.662	7.387.662	7.461.539	7.629.423
2	Kota	34.889.930	34.889.930	34.937.768	35.723.868	36.527.655
3	Jati	86.123.109	86.123.109	86.123.109	88.060.879	90.042.249
4	Undaan	592.193	620.305	620.305	621.856	623.410
5	Mejobo	883.447	883.930	883.930	892.769	901.700
6	Jekulo	1.088.943	1.091.962	1.091.962	1.116.531	1.127.696
7	Bae	8.539.775	8.553.035	8.553.035	8.745.478	8.832.933
8	Gebog	3.583.380	3.583.380	3.586.230	3.622.092	3.658.313
9	Dawe	1.696.601	1.696.601	1.696.601	1.700.843	1.717.851
	<b>Jumlah</b>	<b>144.777.088</b>	<b>144.829.919</b>	<b>144.880.602</b>	<b>147.945.855</b>	<b>151.061.228</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai produksi dari perusahaan industri di Kabupaten Kudus tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perindustrian berkembang dengan baik di Kabupaten Kudus karena didukung dengan berbagai program fasilitasi usaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dampak langsung dari peningkatan sektor perindustrian ini mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kudus untuk sektor industri pengolahan terutama industri pengolahan non tembakau. Selain itu, peningkatan serapan tenaga kerja sektor perindustrian juga memberikan andil dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus.

Kebutuhan ruang untuk pengembangan industri perlu dipertimbangkan agar sejalan dengan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan Kabupaten berbasis industri didukung pertanian, pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penyediaan ruang bagi kawasan peruntukan industri perlu disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang diatur dalam RTRW dalam rangka perwujudan pola ruang di kawasan peruntukan industri yang dilaksanakan seiring dengan pengembangan kawasan budidaya lainnya.

Adapun kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut.



Tabel 2.139  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,13 %	0,20 %	0,25%	0,30 %	0,30 %	0,40%	75		Disnaker, Inkop,UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja							Sedang		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Perindustrian terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sedang.


Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator persentase pertumbuhan IKM dengan mempermudah kebijakan perizinan bagi industri kecil menengah.

### 2.3.3.8 TRANSMIGRASI

Pelaksanaan urusan ini terkendala diantaranya jumlah kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.140  
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	0%	0%	0%	25%	0%	25%	0		Disnaker, Inkop,UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja							Sangat Rendah		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pandemic Covid-19 belum ada kuota pengiriman transmigran untuk Kabupaten Kudus dan masih menunggu proses kesiapan sarana tempat tinggal dan infrastruktur di lokasi transmigran.

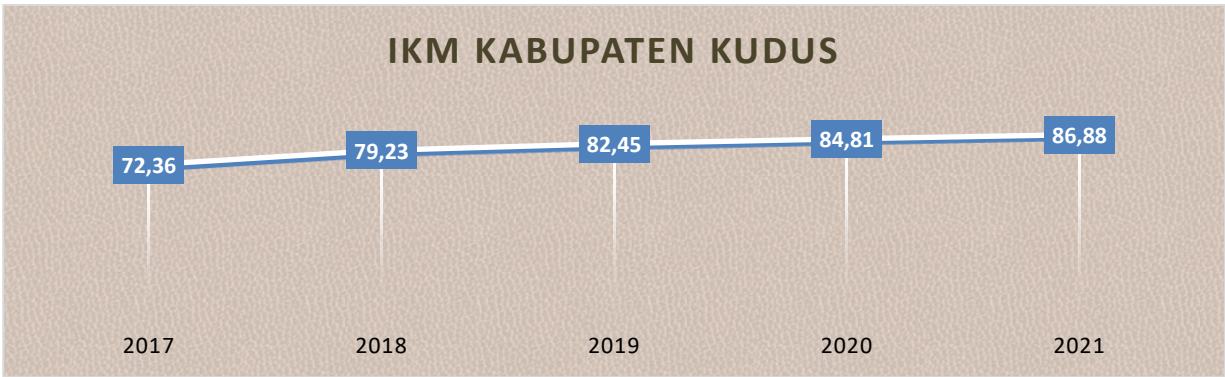
Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator persentase calon transmigran yang terfasilitasi yaitu dengan melaksanakan koordinasi dan

konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah karena masih ada masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi.

2.3.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.4.1 SEKRETARIAT DAERAH

Pengukuran kualitas pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah yang menyediakan pelayanan.



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Tahun 2022













Gambar 2.21 Nilai IKM Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Nilai IKM yang diperoleh Kabupaten Kudus di tahun 2021 sebesar 86,88 meningkat 2,07 dibanding tahun 2020 (84.81), dimana nilai tersebut meningkat dari 82.45 di tahun 2019. Berikut adalah gambaran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terbagi dalam empat bidang, yaitu Kesehatan, Investasi, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.141  
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	●	Bagian Pemerintahan
2.	Persentase fasilitasi Kerjasama	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	●	Bagian Pemerintahan
3.	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	87%	78,50 %	84%	88%	479%	90%	532%	●	Bagian Hukum
4.	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	87%	50%	90%	96%	96%	97%	99%	▶	Bagian Hukum

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
5.	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100%	100%	90%	100 %	92,5%	100 %	92,5%		Bagian Kesra
6.	Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100		Bagian Kesra
7.	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	80%	90%	88%	90%	100%	100 %	100		Bagian Organisasi
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82,45 %	84,81	83	86,88	85	102,21		Bagian Organisasi
9.	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	66,36 %	68,93	75,0 0	69,45	83,0 0	83,67		Bagian Organisasi
10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	59,35 %	67,26	79	67,52	90	75,02		Bagian Organisasi
11.	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%		Bagian Organisasi
12.	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	89,39 %	100 %	107,1 %	100 %	107,10 %		Bagian Umum
13.	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	80%	100%	100%	83%	100%	85%	117,65 %		Bagian Perekonomian
14.	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	11,69 %	31,23 %	38,23 %	7%	3%	9%	33,33%		Bagian Perekonomian
15.	Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	86%	89%	100%	89%	89,97 %	90%	99,77%		Bagian Administrasi Pembangunan
16.	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	80,79 %	100,00 %	98.85 %	88%	89,11 %	95%	93,80%		Bagian Pengadaan Barjas
	Rata-rata capaian kinerja (%)							121		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada unsur pendukung Sekretariat Daerah terdiri dari 16 indikator, sebanyak 9 indikator telah tercapai, 6 indikator akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator yang capaiannya telah melampaui target yaitu indikator persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda karena dari target 110 draft peraturan perundang-undangan terealisasi 554 draft, dan untuk perkara pemda dari target 7 perkara pemda dapat tertangani seluruhnya. Sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat karena pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi sehingga mudah diakses masyarakat setelah menerima layanan yang mengacu pada standar pelayanan dan SOP, serta tingginya kesadaran masyarakat untuk merespon pelayanan publik sebagai bentuk penilaian terhadap akuntabilitas dan transparansi Pemerintah. Dan indikator persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah karena terealisasi 217 kali dari target 190 kali yang diakumulasikan dengan pelayanan kedinasan secara umum terealisasi 100%. Untuk Indikator Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID karena Kepala Perangkat Daerah terkait dan anggota TPID melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan oleh Ketua TPID Kabupaten Kudus, sehingga realisasi indikator dapat tercapai 100%,

Sedangkan untuk indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD karena terealisasi sebesar 3% yang disebabkan karena adanya regulasi pada BUMD (BPR) yang menyebabkan turunnya setoran deviden ke Kas Daerah. Upaya yang dilaksanakan agar target indikator pada akhir periode RPJMD dapat tercapai adalah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian indikator persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan haji dan MTQ. Untuk indikator persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu melalui peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan mengoptimalkan sistem aplikasi yang telah ada. Sedangkan indikator persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan nilai kematangan kelembagaan UKBJ dan mengoptimalkan proses pengelolaan pengadaan barang/jasa.

#### **2.3.4.2 SEKRETARIAT DPRD**

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

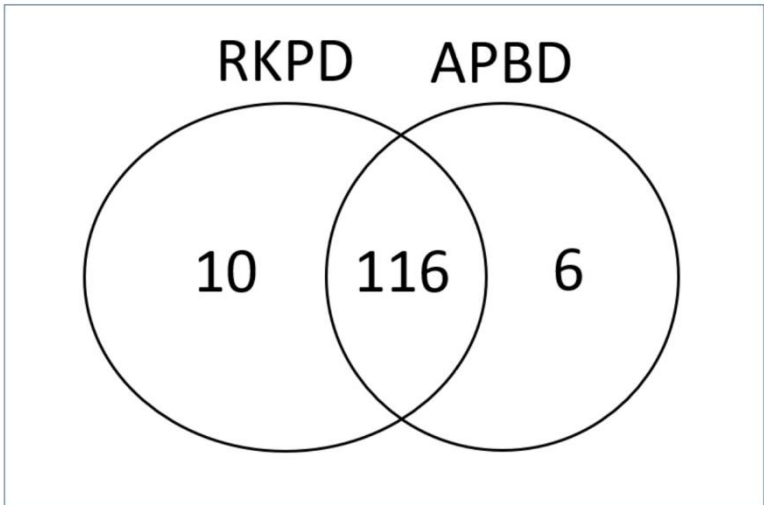
Tabel 2.142  
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	100 %	100%	100 %	92,8 5%	100%	92,85	▶	Sekretariat DPRD
2.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100 %	100%	100 %	100	100%	100	●	Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)								96,42%		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 2 indikator unsur pendukung Sekretariat DPRD, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu merealisasikan seluruh agenda kerja DPRD.

2.3.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
2.3.5.1 PERENCANAAN

Pada tahun 2021, dimana pandemi covid-19 belum berlalu, maka konsep perencanaan pembangunan Daerah dituntut untuk tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi pandemi. Mengingat sisi belanja pembangunan masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19, maka berbagai agenda pembangunan diupayakan tetap berjalan ditengah keterbatasan kemampuan anggaran. Gambaran jumlah program pada dokumen RKPD dan APBD Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana berikut:








Sumber : SIPD Tahun 2021, Bappeda Tahun 2022

**Gambar 2.22** Program Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021

Pada perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2021, jumlah program yang beririsan sejumlah 116 program. Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus

Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.143  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	98,20 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100		Bappeda
2.	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100		Bappeda
3.	Persentase keterisian data/informasi	40%	58%	58,12 %	55%	58,43 %	65%	89,89		Bappeda
4.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100		Bappeda
5.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100		Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)								97,98		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 5 indikator Unsur Penunjang Perencanaan, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan agar indikator yang akan tercapai dapat mencapai target pada akhir periode RPJMD yaitu mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah agar ketersediaan data dan informasi terpenuhi.

### 2.3.5.2 KEUANGAN

Permendagri 62/2017 mengatur bahwa kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) Pusat, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan ASN, TPP ASN, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan Guru.

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Setelah dihitung, kemampuan keuangan daerah tersebut ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan Permendagri 62/2017 tersebut, maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kudus selama periode 2017-2021 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.144  
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus 2017-2021

<b>Tahun</b>	<b>Kategori</b>
2017	Sedang
2018	Tinggi
2019	Tinggi
2020	Tinggi
2021	Tinggi

*Sumber : jdih.kuduskab.go.id (data diolah)*

Berdasarkan Tabel di atas, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kudus selama tahun 2017-2021 memperlihatkan kecenderungan stabil pada kategori tinggi. Setelah penentuan kemampuan keuangan daerah, kebijakan fiskal pada dasarnya dimulai dengan menilai di mana berbagai potensi sumber pendapatan daerah dapat direalisasikan. Nilai properti dan transaksi yang terjadi, mobilitas sosial yang menggerakkan sektor hotel dan restoran, serta bisnis lain yang menguntungkan, yang darinya pemerintah dapat mengekstraksi pendapatan menjadi basis pajak. Namun, hal penting yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk benar-benar mengumpulkan pendapatan dari basis pajak adalah pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) yang membatasi jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemda, Di luar batasan ini, kapasitas SDM dan teknis Pemda untuk mengelola, mengumpulkan, dan menegakkan pajak juga terbatas dan tidak cukup untuk sepenuhnya mengeksplorasi basis pajak yang ada.

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terdapat sumber pendapatan daerah lain yang berkontribusi kepada kemampuan keuangan daerah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan BLUD, dan transfer antar pemerintah seperti DBH, DAU, DAK, Hibah Daerah, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Bantuan Keuangan merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang kontribusinya selama ini jauh melebihi pendapatan yang bersumber dari PDRD. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini yang menggambarkan kontribusi masing-masing akun pendapatan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus selama periode tahun 2017-2021.



Tabel 2.145  
Kontribusi Masing-masing Sumber Pendapatan Daerah

URAIAN	Kontribusi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>18,46</b>	<b>16,90</b>	<b>16,45</b>	<b>19,04</b>	<b>23,44</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5,24	5,72	6,02	6,26	6,87
Hasil Retribusi Daerah	1,00	0,92	0,96	0,92	1,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,89	0,38	0,44	0,43	0,39
Lain-lain PAD yang Sah	11,32	9,88	9,03	11,43	14,98
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>66,10</b>	<b>64,20</b>	<b>62,10</b>	<b>58,70</b>	<b>57,31</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12,41	11,80	10,02	10,75	12,32
Dana Alokasi Umum	40,73	40,42	40,71	37,55	34,55
Dana Alokasi Khusus	12,97	11,97	11,36	10,41	10,43
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15,44</b>	<b>18,90</b>	<b>21,46</b>	<b>22,25</b>	<b>19,25</b>
Pendapatan Hibah	0,42	3,38	3,35	3,47	0,26
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6,79	7,38	7,38	6,60	7,69
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,61	7,19	9,24	4,43	1,11
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,62	0,95	1,49	0,43	0,20
Pendapatan Lainnya	-	-	-	7,33	6,98
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	3,01

*Sumber : BPPKAD, SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 19 April 2022*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004), struktur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Dana Perimbangan terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, DBH Pajak Provinsi dan Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemda Lainnya, dan Pendapatan Lainnya termasuk transfer Pusat yang diatur dalam UU lain seperti DID dan Dana Desa.

Sebagaimana data pada tabel di atas, realisasi kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebesar 23,44% disumbang PAD, 57,31% disumbang oleh Dana Perimbangan, dan sebesar 19,25% disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi PAD mengalami peningkatan sebesar 4,4% dan

kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurun sebesar 3%, sedangkan Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang lebih kecil. Penurunan kontribusi Dana Perimbangan pada tahun 2020 disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat pada pemotongan sebagian alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Meskipun terjadi penurunan alokasi TKDD, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap peran TKDD dalam struktur pendapatan daerah.

Analisis kontribusi sumber pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel di atas, merupakan langkah awal dalam menyusun RKPD. Berdasarkan data tersebut, sumber-sumber pendapatan yang strategis dapat teridentifikasi untuk selanjutnya disusun prioritas dan strategi optimalisasi peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pendapatan. Hal ini dilakukan karena masing-masing jenis pendapatan daerah membutuhkan pendekatan dan strategi yang berbeda. Dalam kerangka pendapatan daerah di Indonesia saat ini, upaya optimalisasi pendapatan daerah lebih banyak diarahkan pada upaya peningkatan PDRD. Menurut UU 28/2009, sebagai salah satu bentuk desentralisasi fiskal, Pemda memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi yang ditentukan. UU 28/2009 tersebut mengatur pelimpahan kewenangan pemungutan 11 (sebelas) jenis pajak kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Adapun kewenangan pemungutan retribusi diserahkan untuk 3 (tiga) jenis retribusi, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Pelayanan Penguburan / Pemakaman
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran
- Retribusi Pelayanan Pasar – Los
- Retribusi Pelayanan Pasar – Kios
- Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
- Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
- Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
- Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha
- Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Retribusi Tempat Rekreasi
- Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Rumah Potong Hewan

3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

Optimalisasi PDRD ini sejalan dengan pendapat sebagian ahli yang mendefinisikan kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) sebagai *tax capacity* karena sebagian besar kemampuan fiskal suatu negara merupakan kontribusi dari penerimaan pajak. Hal ini dapat juga berarti bahwa kemampuan fiskal adalah kemampuan suatu pemerintahan untuk mengaktualisasikan potensi pajak di suatu wilayah menjadi penerimaan nyata. Dalam konteks daerah, kemampuan keuangan daerah -meskipun memiliki kontribusi yang lebih kecil dibanding dana-dana transfer- berarti kemampuan Pemda untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PDRD dalam koridor UU 28/2009. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3, pendapatan PDRD mengalami kenaikan signifikan dari Rp123.777,328 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp174.619,111 miliar pada tahun 2021. Secara umum, terdapat kenaikan hampir di semua jenis PDRD selama periode 2017-2021, namun pada tahun 2020 terdapat penurunan dibanding tahun 2019 karena adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.146  
Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2017-2021 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total PDRD</b>	<b>123.777.328.038</b>	<b>132.522.771.841</b>	<b>145.821.035.846</b>	<b>144.735.122.736</b>	<b>174.619.111.881</b>
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>103.927.599.502</b>	<b>114.155.438.957</b>	<b>125.762.587.800</b>	<b>126.240.575.956</b>	<b>148.636.888.496</b>
Pajak Hotel	2.483.257.317	2.491.453.313	2.660.472.949	1.312.432.724	2.148.167.571
Pajak Restoran	6.577.261.823	7.956.490.339	9.643.873.017	6.523.338.974	8.915.984.416
Pajak Hiburan	519.740.175	473.746.655	553.891.786	212.089.070	134.427.552
Pajak Reklame	2.899.155.381	3.320.329.041	3.220.859.558	2.997.822.309	3.682.856.212
Pajak Penerangan Jalan	44.972.069.055	49.358.801.155	51.734.124.813	49.194.284.174	50.821.928.823
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan	178.588.238	34.000.800	36.064.000	-	-
Pajak Parkir	399.488.450	343.631.660	616.076.500	316.317.140	184.631.600
Pajak Air Tanah	1.104.657.223	1.974.330.668	2.787.144.603	3.022.060.541	3.726.091.638
Pajak Sarang Burung Walet	36.836.300	41.263.726	10.873.175	10.159.240	9.514.500
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.175.738.220	23.911.343.590	25.497.514.802	32.401.844.658	38.118.082.431
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.580.807.320	24.250.048.010	29.001.692.597	30.250.227.126	40.895.203.753
<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>19.849.728.536</b>	<b>18.367.332.884</b>	<b>20.058.448.046</b>	<b>18.494.546.780</b>	<b>25.982.223.385</b>
Retribusi Jasa Umum	6.790.829.078	6.900.163.413	7.642.000.829	7.397.294.746	8.489.623.890
Retribusi Jasa Usaha	8.774.063.649	10.171.400.370	10.167.186.573	8.211.545.690	14.630.467.097
Retribusi Perizinan Tertentu	4.284.835.809	1.295.769.101	2.249.260.644	2.885.706.344	2.862.132.398

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan RKPD 2023, selain identifikasi kemampuan keuangan daerah, analisis kontribusi, dan perkembangan PDRD perlu dipertimbangkan juga rerata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir Dalam rangka penyusunan RKPD 2022, selain identifikasi kemampuan keuangan daerah, analisis kontribusi, dan perkembangan PDRD perlu dipertimbangkan juga rerata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.147

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi			r(%)
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.090.430.364.413</b>	<b>2.016.176.986.239</b>	<b>2.163.634.437.714</b>	<b>1,88</b>
<b>1 . 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>343.824.122.868</b>	<b>383.892.971.961</b>	<b>507.167.074.775</b>	<b>21,88</b>
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800	126.240.575.956,00	148.636.888.496,00	9,06
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	20.058.448.046	18.494.546.780,00	25.982.223.385,00	16,34
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.277.166.654	8.704.409.157,00	8.371.225.490,00	(5,00)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	188.725.920.368	230.453.440.068,00	324.176.737.404,00	31,39
<b>1 . 2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.298.060.004.624</b>	<b>1.183.590.147.772</b>	<b>1.239.890.567.326</b>	<b>(2,03)</b>
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	13,24
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	(6,15)
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	(2,03)
<b>1 . 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>448.546.236.921</b>	<b>448.693.866.506</b>	<b>416.576.795.613</b>	<b>(3,56)</b>
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	70.026.924.527	69.891.134.022	5.590.390.884	(46,10)
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	5,66
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193.143.614.800	89.301.426.000	24.112.366.000	(63,38)
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	(61,19)
2 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	147.823.461.000	151.037.149.800	-
2 . 3 . 7	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	65.170.369.505,00	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan Tabel tersebut, rata-rata realisasi pendapatan daerah 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,88%. Kondisi ini berlaku untuk semua jenis PAD kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah). Untuk Dana Perimbangan, seluruh jenis Dana Perimbangan mengalami penurunan kecuali Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan kecuali Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya. Pertumbuhan negatif rata-rata realisasi pendapatan daerah periode ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa adanya penyesuaian pendapatan di hampir semua level pemerintahan pada tahun anggaran 2020. Penurunan drastis pada tahun 2020 membalikkan pertumbuhan positif yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak daerah mencapai 6,87% pada tahun 2021 yang berarti meningkat sebesar 0,61% dibanding rasio pajak daerah tahun 2020. Kenaikan pendapatan pajak daerah selain didukung adanya peningkatan pendapatan, juga karena adanya penurunan total pendapatan khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan antara lain dengan penyesuaian NJOP, pendataan obyek pajak, dan penataan administrasi pendapatan pajak daerah dengan penggunaan teknologi informasi antara lain melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah, integrasi data perizinan dan perpajakan daerah, dan pemasangan alat pemantauan transaksi pajak secara elektronik.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak pun mengalami kenaikan di hampir semua jenis pajak daerah sebagaimana pada tabel di bawah ini yang menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Kudus pada kurun waktu 2017-2021. Terdapat beberapa perbedaan terkait jumlah wajib pajak dibandingkan dengan data sebelumnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa hal antara lain perbedaan sistem, titik pengambilan, dan basis data yang belum dimutakhirkan.

Tabel 2.148  
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Kudus 2017-2022

No.	Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021
1	PBB P2	381.358	384.376	388.186	391.915	394.722
2	BPHTB	2.468	2.882	3.912	4.243	4.840
3	PPJ	214.481	239.189	247.996	253.465	278.728
4	Pajak lainnya*)	3.211	4.021	4.388	4.643	4.963

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah wajib pajak daerah pada kurun waktu 2017-2021. Dari tabel tersebut terdapat kenaikan jumlah wajib pajak PBB P2, jumlah wajib bayar BPHTB, jumlah wajib pajak PPJ, dan jumlah wajib pajak lainnya. Kenaikan jumlah penerimaan pajak daerah sejalan dengan kenaikan jumlah wajib pajak daerah. Terdapat hubungan yang berbeda khususnya pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Selain hal tersebut, barang milik daerah dapat dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang mana pemakaian kekayaan daerah tertentu di bawah penguasaan pemerintah daerah dikenakan retribusi. Kekayaan daerah tersebut yang selanjutnya disebut obyek retribusi antara lain pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian alat berat dan lain-lain pemakaian kekayaan daerah. Kekayaan daerah atau yang disebut dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

1. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan gedung, jalan dan jembatan, jaringan, monumen/bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak meliputi mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, bengkel, pertanian, kedokteran, laboratorium), hewan ternak dan tanaman, persediaan barang habis pakai, suku cadang serta surat berharga.

Saat ini pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus telah terinventarisir, namun masih ada beberapa barang milik daerah yang belum optimal dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan barang milik daerah tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dimanfaatkan melalui sewa, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, KSP dan KSPI.

Terkait belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah diantaranya disebabkan karena kurang pedulinya Perangkat Daerah terhadap aset-aset yang berada dalam penguasaannya yang tidak produktif dan kurang aktif dalam mencari informasi tentang aset-aset yang tidak dimanfaatkan. Agar pengelolaan aset menjadi optimal, maka aset tetap yang memenuhi *criteria idle* dan aset tetap yang produktif tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perangkat Daerah agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah pengelola aset melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Setiap tahun terdapat perubahan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan aset jalan, aset irigasi dan jaringan, aset fasum fasos perumahan yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan penambahan aset lainnya. Dari jumlah aset tanah tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pemanfaatan dari penambahan aset tanah tersebut, ada yang dimanfaatkan sendiri oleh Perangkat Daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat atau Pihak Ketiga dan ada aset yang tidak dimanfaatkan. Dengan adanya pemanfaatan, secara otomatis terjadi penurunan aset tanah yang tidak dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.



Tabel 2.149  
Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Tetap)

Tahun	Jalan (bidang)	Irigasi dan Jaringan (bidang)	Fasum Fasos Perumahan (bidang)	Aset tanah lainnya			Jumlah
				Jumlah	Dimanfaatkan OPD dan Masyarakat	Tidak dimanfaatkan	
2017	567	231	76	390	351	39	1264
2018	567	231	76	391	354	37	1265
2019	567	231	76	396	361	35	1270
2020	581	307	112	342	311	31	1342
2021	912	305	275	382	346	36	1874

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Selain dilakukan pemanfaatan, terhadap barang milik daerah tersebut juga dilakukan pengamanan. Beberapa langkah pengamanan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah pelaksanaan pensertipikatan tanah, pemberian batas tanah, pembuatan pagar keliling dan pemberian papan tanda kepemilikan. Pengamanan perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya permasalahan tanah dalam hal ini dihuni oleh masyarakat atau Pihak Ketiga yang tidak berhak dan tanpa dokumen/alas hak yang legal. Kegiatan pengamanan yang saat ini dilaksanakan adalah pelaksanaan pensertifikatan tanah secara menyeluruh. Diharapkan tahun 2023 semua tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus telah bersertipikat. Banyaknya tanah yang belum diajukan pensertipikatan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Selain hal tersebut terdapat beberapa tanah yang masih belum jelas batas-batas kepemilikannya. Dari kegiatan sertifikasi tanah tersebut, diketahui bahwa masih banyak tanah milik Pemerintah Kabupaten yang belum bersertifikat. Hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.150  
Data Aset Tetap Tanah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bersertifikat (Bidang)	292	292	292	425	1.104
2.	Dalam proses sertifikat (Bidang)	-	-	-	-	-
3.	Belum bersertifikat (Bidang)	912	912	916	917	770
<b>Total</b>		<b>846</b>	<b>1.043</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.874</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki 1.874 Bidang Tanah. Dari 1.874 Bidang Tanah tersebut terdiri dari 1.104 tanah telah bersertifikat dan 770 tanah belum bersertifikat. Dari 770 tanah yang belum bersertifikat sebagian besar merupakan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum (jalan kabupaten, jalan kelurahan, irigasi, fasilitas umum perumahan). Target pensertipikatan tanah pada tahun 2021 sebanyak 650 bidang dan terealisasi sebanyak 660 bidang. Sedangkan untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus merencanakan mengajukan proses pensertifikatan sebanyak 1385 bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Tabel 2.151  
Indikator Keuangan Tahun 2017 – 2021

No	Indikator program	Realisasi 2017-2021				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100	100	100	100	87,84
2	Persentase Realisasi Target PAD	100	100	102	131,62	138,07
3	Persentase Tahapan Penyusunan Penganggaran Yang Tepat Waktu	100	100	100	100	100
4	Persentase Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	100	100	100	100
5	Capaian Realisasi Pembayaran Belanja PD	90	90	80	88,95	82,53
6	Persentase PD Yang Telah Melakukan Inventarisasi Aset Dengan Tertib	98	98	98	98	99,79

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Dalam hal pemeriksaan Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Kudus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.152  
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kudus  
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Adapun Indikator Kinerja Kunci manajemen keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.153  
Indikator Kinerja Kunci Output Manajemen Keuangan Tahun 2020 - 2021

No	URAIAN	SATUAN	Nilai	
			2020	2021
1	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Rp.	1.914.626.257.581	1.872.563.437.018
2	Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	Rp.	1.911.471.464.000	2.268.883.977.950
3	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rp.	383.892.971.961	507.428.207.153,97
4	Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	Rp.	378.701.780.000	3.675.044.396.000
5.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,17	17,47
6.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,37	86,19

Sumber : LPPD Tahun 2021, 2022

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.154  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANG GUNGJA WAB
1.	Persentase realisasi PAD	100%	102%	131,62%	100%	137,5%	100%	137,5		BPPKAD
2.	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		BPPKAD
3.	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		BPPKAD
4.	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	90%	80%	88,95%	95%	84%	95%	88,42		BPPKAD
5.	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	99,57%	90%	NA	90%	NA		BPPKAD
	Rata-rata capaian kinerja (%)							106,48		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 5 indikator Unsur Penunjang Keuangan, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dan 1 indikator NA (*Not Available*) karena menunggu hasil audit BPK, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Indikator yang capaiannya melampaui target yaitu persentase realisasi PAD karena faktor pendorong pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang berjalan dengan baik. Sedangkan Upaya yang dilaksanakan agar indikator yang akan tercapai dapat mencapai target pada akhir periode RPJMD yaitu memaksimalkan penyerapan belanja sesuai dengan target.

**2.3.5.3 KEPEGAWAIAN**

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sumberdaya pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pengelolaan ASN menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan menjadi unsur penunjang pemerintahan daerah bersama dengan fungsi perencanaan pembangunan, keuangan dan pengawasan. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemeritah pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.155  
Indikator Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian





No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100%	100%	100%
2	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/ aturan perilaku	95%	95%	74%
3	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100%	100%	100%
4	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	50%	63%	75%

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian), pada tahun 2021 tercermin pada indikator kinerja kunci:
- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan dengan capaian sebesar 61,18%;
  - b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 4,09%;
  - c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian sebesar 100%.

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.156  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANG GUNGJA WAB
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standard	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%		BKPP
2.	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	0%	95%	95%	95%	74%	95%	83%		BKPP
3.	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%		BKPP
4.	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	37,50 %	50%	63%	75%	75%	100%	100%		BKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)								95,75%		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari 4 indikator unsur penunjang Kepegawaian, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang akan dilaksanakan agar indikator yang akan tercapai dapat mencapai target pada akhir periode RPJMD yaitu dengan melakukan pembinaan disiplin kepada perangkat daerah sehingga pelanggaran dapat berkurang.

### 2.3.5.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.157  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	Na	32%	35,86	42%	29,29%	46%	63,43		BKPP
2.	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	Na	9,69%	1,61	1,6%	5,89%	1,6%	368,26		BKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)								215,85		
Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Sumber : BKPP tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari 2 indikator unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator persentase ASN yang memenuhi Pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun karena adanya pelatihan dasar (Latsar) CPNS bagi 382 orang CPNS dimana kelulusan Latsar menjadi salah satu syarat pengangkatan menjadi PNS dengan perhitungan akumulasi jumlah ASN yang dididik dan dilatih selama minimal 3 hari dan atau 20 jam pelajaran.

Sedangkan agar indikator Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi dapat mencapai target akhir RPJMD, maka secara rutin akan dilaksanakan uji kompetensi sehingga persentase capaian jabatan ASN yang cocok dengan kompetensinya semakin meningkat.

### 2.3.5.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada Tahun 2021, inovasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pelajar melalui lomba KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi) Tahun 2021 berjumlah

masing-masing 12 inovasi dari Kategori Umum dan 70 inovasi dari Kategori Pelajar / Mahasiswa. Untuk mendukung pengembangan penelitian dan inovasi daerah di Kabupaten Kudus, maka perlu penguatan pengembangan jejaring penelitian daerah, untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin (pasal 15 ayat 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016).

Adapun Urusan Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.158  
Produk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021


No	Hasil Penelitian dan Pengembangan		Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	Jenis	Jumlah			
1	Penelitian Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian UMKM Kabupaten Kudus.	1 (satu ) dokumen	Dimanfaatkan untuk Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian UMKM.	Pelaksanaan penelitian bekerjasama dengan pihak ketiga / konsultan.	Belum ada JFT Peneliti
2	Dokumen Laporan IDSD Tahun 2021.	1 (satu) dokumen	Pemanfaatan untuk peningkatan daya saing Kabupaten Kudus.	Koordinasi dengan OPD, Instansi vertikal, pelibatan Perguruan Tinggi	Belum ada Satu Data
3	Dokumen Laporan Inovasi Daerah.	1 dokumen	Bahan evaluasi inovasi yang telah dihasilkan OPD, untuk disempurnakan nilai kematangan inovasinya.	Koordinasi aktif dengan BPP Kemendagri dan Bidang Inotek Bappeda Provinsi Jawa Tengah.	Belum ada JFT Perakayasa dan JFT Pengolah Data & Teknologi
4	Lomba Krenova tingkat Kabupaten	2 kategori (Umum & Pelajar)	Hasil inovasi dituangkan dalam Majalah Krenova dan disebarluaskan ke stakeholder dan perusahaan swasta terkait.	Keterlibatan aktif SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta, serta Perguruan Tinggi dan Desa untuk mengikuti Lomba Krenova.	SMA/SMK/MA menjadi kewenangan Provinsi.
5	Fasilitasi IPKD Tahun 2018-2020	3 tahun	Evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal nilainya untuk ditingkatkan.	Kolaborasi Bappeda, BPPKAD, Dinas Kominfo dan Inspektorat dalam pengumpulan	Aplikasi IPKD Kemendagri masih baru, sehingga belum maksimal dalam

No	Hasil Penelitian dan Pengembangan		Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	Jenis	Jumlah			
				dan penginputan data IPKD.	penginputannya.

Sumber : Bappeda, Tahun 2022

Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.159  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	42,85%	57,14 %	57,14%	86%	86%	100 %	86		Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)								86		
Predikat kinerja								Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan tahun 2021 terhadap target RPMD tahun 2018-2023 yang terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja Tinggi, sehingga diperlukan adanya program *improvement* yang bersifat perubahan dan *inovatif* yang pada akhir periode RPJMD akan dapat mencapai target.

Tabel 2.160  
Capaian Kinerja Daya Saing Daerah dan Inovasi Daerah

TAHUN	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks Inovasi Daerah		
	Skore	Kategori	Keterangan Range Skore	Skore	Kategori	Keterangan
2019	5,5537	Tinggi	Skore 6,01-8 Kategori Tinggi	400	Kurang Inovatif	Pengukuran oleh BPP Kemendagri yang digunakan tiap tahun berbeda dan tidak ada range skore kategori.
2020	3,2650	Tinggi	Skore 2,51-3,75 Kategori Tinggi	4.122	Sangat Inovatif	
2021	3,4510	Tinggi	Skore 2,51-3,75 Kategori Tinggi  Mendapat Juara 3 tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Aspek SDM (Sumber Daya Manusia)	42,51	Inovatif	



2.3.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.6.1 INSPEKTORAT DAERAH

Maturitas SPIP merupakan suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu telah dilakukan atau dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya untuk meningkatkan Maturitas SPIP sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023), mencapai Maturitas SPIP level 3,5.

Tabel 2.161  
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kudus

Tahun	Indeks Maturitas SPIP	Keterangan
2017	3,026	Assesmen oleh BPKP Pusat
2018	3,126	Assesmen oleh BPKP Pusat
2019	3,126	Belum dilakukan assesment karena ada perubahan metodologi assesment dari manual menjadi berbasis SIM
2020	3,126	Sistem penilaian mandiri SPIP belum dapat digunakan
2021	2,781	Assesmen berbasis SIM oleh BPKP Pusat sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kudus Tahun 2022

Pada Tahun 2021 Hasil Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memenuhi karakteristik maturitas level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,781 dengan uraian skor dari Penetapan Tujuan (1,2), Struktur dan Proses (0,69) dan Pencapaian Tujuan (0,88). Area yang memerlukan perhatian dan perbaikan pada komponen Penetapan Tujuan adalah masih terdapat perangkat daerah yang belum berorientasi pada hasil outcome, indikator kinerja belum memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup. Pada komponen struktur dan Proses, Pemerintah Kabupaten Kudus belum memiliki kebijakan/aturan terkait manajemen resiko dan belum ada kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.

Tabel 2.162  
Tabel Pembangunan Zona Integritas

No	OPD	2017	2018	2019	2020	2021
1	RSUD Dr. Lukmonohadi	WBK	Tidak dilakukan evaluasi KemenPA NRB	Telah dievaluasi KemenPANRB tapi tidak diberikan penilaian	WBK	WBK
2	Dinas Capilduk	ZI			WBK	WBK
3	Dinas PMPTSP	ZI			ZI	ZI
4	UPT Puskesmas Jekulo	ZI			ZI	ZI
5	UPT Puskesmas Rejosari	ZI			ZI	ZI
6	Persentase WBK/WBBM	2,38%	2,38%	2,38%	4,76%	4,76%
7	Indeks Pembangunan ZI	7,516	7,516	7,516	7,52	11,11

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kudus Tahun 2022

Dari tabel di atas, OPD yang telah berpredikat WBK/WBBM masih minim yaitu  $(2/42 \times 100\%) = 4,76\%$  dari target 11,90%. Indeks

Pembangunan ZI Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 terealisasi sebesar 11,111 dari target 18,63 (tercapai 59,63%). Kondisi ini masuk dalam kategori capaian RENDAH

Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sejak Tahun 2020 dalam proses QA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa tengah dan diekspose oleh BPKP RI sudah memenuhi target Nasional yaitu level 3 penuh. Untuk lebih meningkatkan peran APIP pada fungsi penjaminan mutu, pencegahan korupsi, dan konsultasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus menargetkan pencapaian level 3,5 di akhir periode RPJMD.

Tabel 2.163  
Elemen Quality Assurance

No.	Elemen	LEVEL				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peran dan layanan	3	3	3	3	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	2	2	2	3	3
3	Praktik professional	2	2	2	3	3
4	Akuntabilitas & manajemen kinerja	3	3	3	3	3
5	Budaya & hubungan organisasi	3	3	3	3	3
6	Struktur tata kelola	3	3	3	3	3
	<b>Kesimpulan</b>	<b>3 DC</b>	<b>3 DC</b>	<b>3 DC</b>	<b>3 DC</b>	<b>3 DC</b>









Sumber : Inspektorat Kabupaten Kudus Tahun 2022

Upaya – upaya Pencapaian level 3,5 dengan :

- a) Melakukan Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP, penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) untuk mengetahui kondisi APIP saat ini dan area yang memerlukan perbaikan sesuai pedoman teknis dan aplikasi *self assessment* oleh BPKP.
- b) Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan mengikuti diklat teknis serta diklat subtansi
- c) Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko dengan pedoman Standar Audit yang berlaku dalam implementasi pengawasan;
- d) Meningkatkan peran manajemen dalam pembinaan APIP melalui Manajemen Oversight;
- e) Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP;
- f) Meningkatkan kualitas evaluasi kelembagaan APIP.

Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.164  
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGU NGJAWAB
1.	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	100%	62%	93,02%	100%	100%	100%	100%		Inspektor Daerah
2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervise dan pencegahan KPK	80%	79%	80,46%	90%	79,40%	100%	79,4%		Inspektor Daerah
3.	Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektor Daerah
4.	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektor Daerah
5.	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,126	3,126	3,1	3,3	2,781	3,5	79,46%		Inspektor Daerah
6.	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektor Daerah
7.	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	2,9%	2,4%	4,76%	20,6%	23,11%	32,4%	71,33%		Inspektor Daerah
8.	Persentase realisasi progress PMPRB	79,92%	69%	69%	90%	84%	100%	84%		Inspektor Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)									89,27%	
Predikat kinerja									Tinggi	

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari 8 indikator kinerja unsur Pengawasan Inspektorat Daerah, sebanyak 4 indikator kinerja berstatus tercapai dan 4 indikator kinerja lainnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi.

**2.3.7 UNSUR KEWILAYAHAN**  
**2.3.7.1 KECAMATAN**

Kabupaten Kudus terbagi atas 9 kecamatan yaitu <sup>1)</sup> Kecamatan Kaliwungu, <sup>2)</sup> Kecamatan Kota, <sup>3)</sup> Kecamatan Jati, <sup>4)</sup> Kecamatan Undaan, <sup>5)</sup> Kecamatan Mejobo, <sup>6)</sup> Kecamatan Jekulo, <sup>7)</sup> Kecamatan Bae, <sup>8)</sup> Kecamatan Gebog, dan <sup>9)</sup> Kecamatan Dawe.

Tabel 2.165  
Kecamatan Pada Kabupaten Kudus Menurut Kewilayahan

No	Nama Kecamatan	Keterangan
1	Kaliwungu	Sebagian wilayah merupakan Kawasan Perkotaan Kudus; Fungsi utama Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan pengembangan industri dan pembangunan industri baru serta pelayanan permukiman.
2	Kota	Seluruh wilayah merupakan Kawasan Perkotaan Kudus
3	Jati	Seluruh wilayah merupakan Kawasan Perkotaan Kudus
4	Undaan	PPK Kawasan Perkotaan Undaan yang arah pengembangan PPK Undaan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan hasil pertanian.
5	Mejobo	Sebagian wilayah merupakan Kawasan Perkotaan Kudus;

No	Nama Kecamatan	Keterangan
		PPK Kawasan Perkotaan Mejobo, dimana arah pengembangan wilayahnya memprioritaskan sektor perekonomian dan pertanian
6	Jekulo	Kawasan Perkotaan Jekulo sebagai Kawasan Peruntukan Industri didukung Pertanian dan Cagar Budaya
7	Bae	Seluruh wilayah merupakan Kawasan Perkotaan Kudus
8	Gebog	Sebagian wilayah merupakan Kawasan Perkotaan Kudus; PPK Kawasan Perkotaan Gebog, yang arah pengembangan PPK Gebog memprioritaskan pengembangan ekonomi, industri pengolahan hasil tembakau dan home industri/ UMKM.
9	Dawe	PPK Kawasan Perkotaan Dawe, dimana arah pengembangan wilayahnya memprioritaskan pengembangan ekonomi agrobisnis dan pendukung aktivitas wisata dengan karakter wisata alam dan budaya.

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui fungsi kewilayahan masing-masing kecamatan. Adapun kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah perdesaan yaitu sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog, sebagian Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Undaan dan sebagian Kecamatan Dawe.

Tabel 2.166  
Kecamatan Menurut Luas Wilayah

No	Kecamatan		Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas kabupaten	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa
	Kode	Nama				
1	33.19.01	KALIWUNGU	3.419	7,64	15	Kedungdowo
2	33.19.02	KOTA KUDUS	1.141	2,55	25	Purwosari
3	33.19.03	JATI	2.732	6,11	14	Tanjungkarang
4	33.19.04	UNDAAN	7.457	16,66	16	Undaan Kidul
5	33.19.05	MEJOBO	3.737	8,35	11	Jepang
6	33.19.06	JEKULO	8.711	19,47	12	Klaling
7	33.19.07	BAE	2.406	5,38	10	Bae
8	33.19.08	GEBOG	6.038	13,49	11	Gondosari
9	33.19.09	DAWE	9.103	20,34	18	Piji
Jumlah			44.744	100	132	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perda RTRW No 1 Tahun 2022

Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.167  
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100 %	100 %	97,5 9%	100%	97,59		9 Kecamatan dan 9 Kelurahan
	Rata-rata capaian kinerja (%)							97,59		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, dari 1 indikator kinerja unsur Kewilayahan Kecamatan berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

**2.3.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**  
**2.3.8.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Penetapan kebijakan operasional Urusan Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota. Implementasi urusan ini di Kabupaten Kudus dapat digambarkan pada tabel berikut ini :




Tabel 2.168  
Potensi Konflik Sosial, Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal dan Potensi Konflik SARA


No	Aspek /	Potensi Konflik 2019	Yang Tertangani 2019	Potensi Konflik 2020	Yang Tertangani 2020	Potensi Konflik 2021	Yang Tertangani 2021
1.	Potensi Konflik Sosial	12	12	12	12	15	15
2.	Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal	1	1	1	1	1	1
3.	Potensi Konflik SARA	4	4	4	3	4	3

Sumber : Kantor Kesbangpol Tahun 2022




Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.169  
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100		Kesbang pol
2.	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85%	85,98 %	-	-	-	85,98%	99,97		Kesbang pol
3.	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100		Kesbang pol

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANG GUNGJAWAB
4.	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%	75%	100%	75%	100%	75%		Kesbang pol
	Rata-rata capaian kinerja (%)							93,74		
	Predikat kinerja							Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023, sampai Tahun 2021 dari 4 indikator Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Untuk indikator persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan indikator persentase potensi konflik SARA yang tertangani tercapai 75% disebabkan permasalahan/kasus intern umat beragama pada tahun 2020 terkait dengan pendirian Masjid Baithut Dhohirin (LDII) Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo yang belum memenuhi persyaratan pendirian masjid yaitu masyarakat sekitar belum dapat menerima, sehingga FKUB belum dapat memberikan rekomendasi.

Keterangan :  
 : Tercapai lebih dari 100%  : Akan tercapai (60 %≤99%)  : Perlu Upaya Keras (<60%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%;Sedang 66%≤75%;Rendah 51%≤65%;Sangat Rendah≤50

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 2.170

Struktur Pengeluaran Konsumsi akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus, 2017 – 2021 (ADHB) (Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>*1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	33,23	33,23	32,98	33,97	35,32
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,39	4,39	4,39	4,50	4,43
c. Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,48	13,38	13,21	13,41	13,27
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,44	8,61	8,68	8,61	8,57
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	29,78	29,50	29,70	28,83	27,95
f. Hotel dan Restoran	7,93	8,13	8,32	7,88	7,71
g. Lainnya	2,74	2,77	2,72	2,80	2,75
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : \* Sangat sementara, \*\* sangat sangat sementara

Sumber : BPS, 2022, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode tersebut cenderung meningkat setelah tahun 2019, yaitu 32,98 persen (2019), naik menjadi 33,97 persen (2020), dan meningkat lagi menjadi 35,32 persen di tahun 2021.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan agak sedikit berkurang sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat akibat pandemi covid-19. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.



Tabel 2.171  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB 2010 menurut  
Pengeluaran Kabupaten Kudus, 2017-2021 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 <sup>*</sup>	2021 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24,81	24,74	24,94	25,43	26,96
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	8,24	8,22	8,23	8,64	9,52
	b. Pakaian dan Alas Kaki	1,09	1,09	1,09	1,14	1,19
	c. Perumahan, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rata	3,34	3,31	3,30	3,41	3,58
	d. Kesehatan dan Pendidikan	2,09	2,13	2,16	2,19	2,31
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	7,39	7,30	7,41	7,33	7,54
	f. Hotel dan Restoran	1,97	2,01	2,07	2,00	2,08
	g. Lainnya	0,68	0,68	0,68	0,71	0,74
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,29	0,30	0,32	0,32	0,33
3	Pengeluaran konsumsi Pemerintah	1,95	1,91	1,89	1,86	1,94
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,29	13,02	13,32	12,77	13,79
5	Perubahan Inventori	1,45	2,21	1,46	1,15	0,97
6	Net Ekspor	59,22	57,83	58,07	58,47	56,00
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : \* Sangat sementara, \*\* sangat sangat sementara  
Sumber : BPS, 2022, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021

Tabel 2.172  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran  
Kabupaten Kudus, 2017-2021 (Persen)

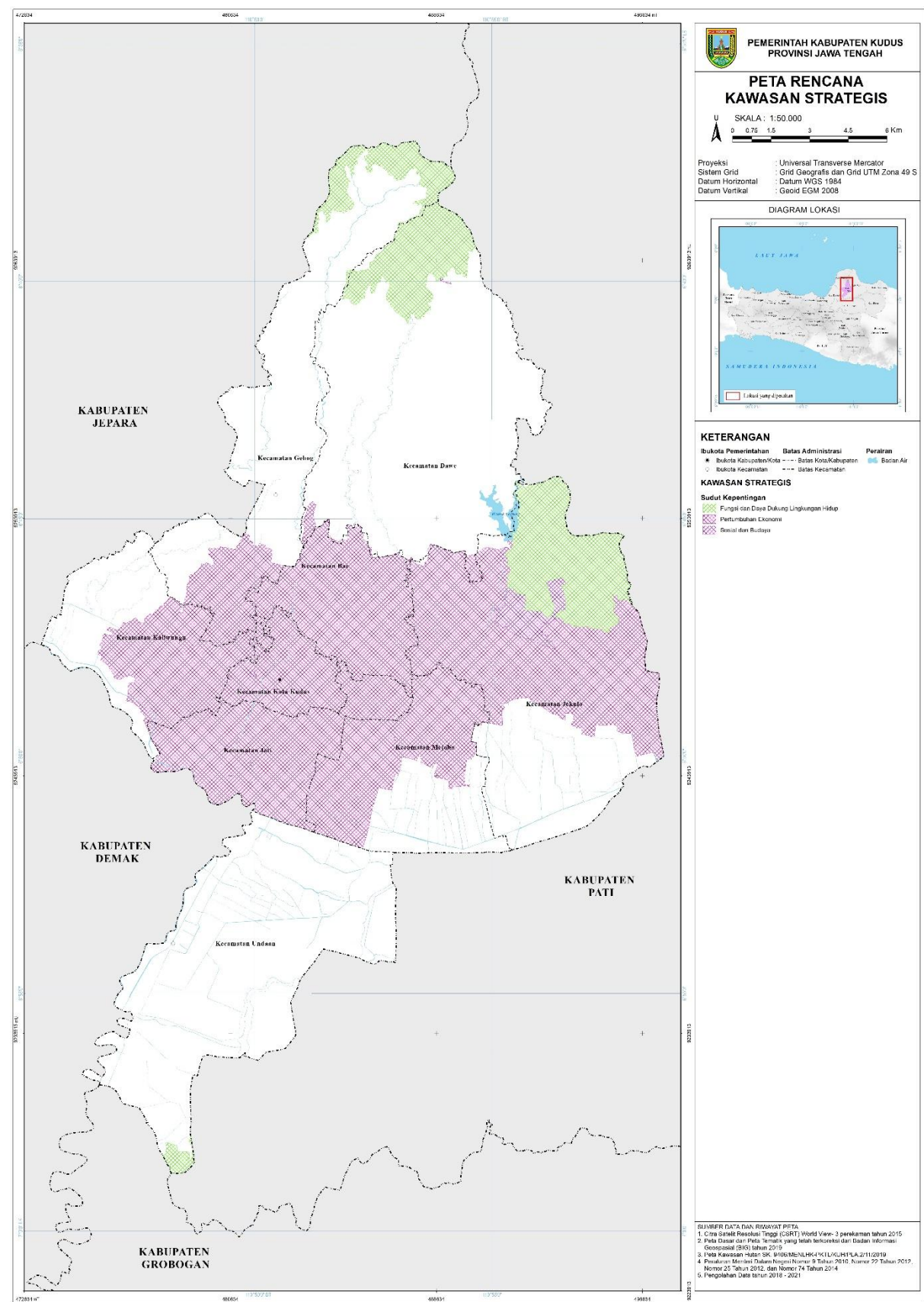
No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 <sup>*</sup>	2021 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,40	4,32	4,35	-0,70	3,42
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	3,25	2,98	3,26	1,22	4,74
	b. Pakaian dan Alas Kaki	5,28	5,22	5,14	1,35	1,94
	c. Perumahan, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rata	3,36	4,28	3,29	0,69	2,06
	d. Kesehatan dan Pendidikan	4,42	5,12	4,96	2,96	0,59
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4,88	4,58	4,92	-3,57	4,88
	f. Hotel dan Restoran	7,85	6,98	6,99	-4,47	0,36
	g. Lainnya	5,72	4,74	4,01	0,73	0,30
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,45	8,37	10,89	-2,41	2,18
3	Pengeluaran konsumsi Pemerintah	3,47	3,03	4,02	-3,63	1,46
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,71	7,90	4,36	-5,31	6,03
5	Perubahan Inventori	4,65	3,26	-0,49	41,62	-38,87
6	Net Ekspor	1,89	1,70	2,22	-5,00	-5,20
	PDRB	3,21	3,24	3,09	-3,11	-1,98

Keterangan : \* Sangat sementara, \*\* sangat sangat sementara  
Sumber : BPS, 2022, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Berdasarkan Perda no 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042, Strategi kebijakan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan, meliputi: a. mengembangkan Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan; b. mengembangkan aksesibilitas dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan; dan c. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas

kawasan perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10 % (sepuluh persen) RTH privat.



**Gambar 2.23** Peta Rencana Kawasan Strategis

- Luas Kawasan Industri

Kawasan Peruntukan Industri dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas  $\pm 2.235$  (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) hektar, berada di :

- a. Kecamatan Kota;
- b. Kecamatan Jati;
- c. Kecamatan Kaliwungu;
- d. Kecamatan Bae;
- e. Kecamatan Gebog;
- f. Kecamatan Dawe;
- g. Kecamatan Jekulo; dan
- h. Kecamatan Mejobo.

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI**

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilihat dari indikator angka kriminalitas dan unjuk rasa yang menggambarkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Kudus.

#### **2.4.3.1 ANGKA KRIMINALITAS**

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti. Tindak kriminal di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.173  
 Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal yang diselesaikan dan  
 Angka Kriminalitas Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Jumlah Tindak Kriminal</b>	<b>269</b>	<b>238</b>	<b>163</b>	<b>274</b>	<b>144</b>
1	Jumlah kasus narkoba	16	11	12	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	0	0	2	1
3	Jumlah kasus seksual	8	4	6	0	15
4	Jumlah kasus penganiayaan	13	11	8	15	4
5	Jumlah kasus pencurian	116	87	42	89	55
6	Jumlah kasus penipuan	11	25	18	20	14
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	0	2	0
8	<i>Jumlah Kasus Lain-lain</i>	<i>104</i>	<i>99</i>	<i>77</i>	<i>146</i>	<i>55</i>
II	<b>Jumlah Tindak Kriminal yang Diselesaikan</b>	<b>193</b>	<b>174</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>99</b>
1	Jumlah kasus narkoba	16	11	12	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	0	0	0	1	1
3	Jumlah kasus seksual	8	3	3	0	11
4	Jumlah kasus penganiayaan	11	8	8	8	4
5	Jumlah kasus pencurian	63	61	33	37	31
6	Jumlah kasus penipuan	4	13	10	9	7
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	0	1	0
8	<i>Jumlah Kasus Lain-lain</i>	<i>91</i>	<i>77</i>	<i>62</i>	<i>74</i>	<i>45</i>
III	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>835.318</b>	<b>850.312</b>	<b>860.055</b>	<b>865.969</b>	<b>867.205</b>
IV	<b>Angka Kriminalitas</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>

Sumber : SIPD – Polres Kudus Tahun 2022

Pada tahun 2021, terdapat perubahan data yang bersumber dari Polres Kudus, namun demikian untuk penggambaran angka kriminalitas tetap dapat dilakukan dengan merujuk data terbaru dan penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (tahun 2021 semester II). Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Kudus relatif menurun.

**2.4.3.2. UNJUK RASA**

Tabel 2.174  
Jumlah Unjuk Rasa Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Unjuk Rasa					
1	Bidang Politik	2	2	8	4	1
2	Bidang Ekonomi	2	2	2	2	1
3	Bidang lainnya	17	12	2	3	0
4	Jumlah	21	16	12	9	2

Sumber : SIPD – Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah unjuk rasa (politik, ekonomi dan lainnya). Dampak adanya unjuk rasa tersebut terhadap investasi kurang signifikan mengingat realisasi investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung relatif stabil bahkan menurun.

**2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel berikut :

Tabel 2.175  
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Tingkat pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Sekolah	178.808	178.808	207.199	215.520	225.946
Tidak/Belum Tamat SD	65.291	65.291	63.716	64.338	62.373
Tamat SD/ sederajat	255.704	255.704	245.652	236.051	229.125
Tamat SLTP/ sederajat	144.251	144.251	144.957	146.140	144.005
Tamat SLTA/ sederajat	150.853	150.853	154.220	157.367	157.921
Akademi / Sarjana	40.411	40.411	44.311	46.553	47.835
Jumlah Penduduk	835.318	835.318	860.055	865.969	867.205

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudusn pada tahun 2021 adalah pada jenjang Tamat SD/Sederajat yaitu 229.125 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi / Sarjana mengalami peningkatan 1.282 orang atau naik 2,68 % dibandingkan tahun 2020.

## 2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN LALU DAN REALISASI RPJMD

### 2.5.1. Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

#### 2.5.1.1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah data yang berasal dari Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.

#### 2.5.1.2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelompokan data dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penilaian kinerja atas indikator kinerja pembangunan daerah. Penilaian dilakukan dengan cara melihat kondisi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD.

#### 2.5.1.3. Teknik Analisis




Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan capaian target RKPD di Tahun 2021;
2. Membandingkan kondisi Realisasi pada Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD;

3. Melakukan analisa terhadap hasil capaian kinerja indikator pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Rata-rata prosentase capaian indikator pada RKPD Tahun 2021 terhadap target Akhir RPJMD akan dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana dalam Tabel berikut.

Tabel 2.176  
Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator pada Tahun 2021 $\geq$ 100% terhadap Target Akhir RPJMD.
2		Akan Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator pada Tahun 2021 dalam interval $\geq$ 60% sampai dengan < 100 % terhadap Target Akhir RPJMD.
3		Perlu Upaya Keras	Apabila realisasi capaian indikator pada Tahun 2021 dalam interval < 60% terhadap Target Akhir RPJMD.
4	NA	Not Available	Indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten.

Dalam penilaian kinerja tersebut, penentuan batas kriteria capaian sebesar 60% dikarenakan mengingat realisasi target RKPD Tahun 2021 merupakan gambaran mengenai capaian Tahun ke tiga pada RPJMD Tahun 2018-2023. Untuk kriteria status evaluasi kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

**1. Tercapai**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja suatu indikator telah memenuhi atau melebihi target akhir RPJMD hal ini menunjukkan kinerja indikator tersebut sangat baik dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau terdapat kebijakan-kebijakan yang mendorong dalam pencapaian realisasi indikator tersebut.

## **2. Akan Tercapai**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja suatu indikator mendekati target atau sesuai dengan perencanaan saat penentuan target, namun untuk mencapai target tersebut beberapa faktor dapat dipertimbangkan seperti kebijakan-kebijakan baru, kondisi realisasi saat ini, terjadinya bencana alam dan lain sebagainya sehingga target-target dapat disesuaikan.

## **3. Perlu Upaya Keras**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja suatu indikator jauh dari target yang direncanakan. Hal ini memerlukan upaya keras dalam pencapaian target indikator tersebut serta mempertimbangkan faktor kendala dalam pencapaian target tersebut. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru, kondisi realisasi saat ini, terjadinya bencana alam dan lain sebagainya sehingga target-target perlu disesuaikan.

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari capaian kinerja pembangunan daerah dikategorikan dalam peringkat kinerja, yaitu:

- Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja  $91\% \leq 100\%$
- Tinggi, untuk capaian kinerja  $76\% \leq 90\%$
- Sedang, untuk capaian kinerja  $66\% \leq 75\%$
- Rendah, untuk capaian kinerja  $51\% \leq 65\%$
- Sangat Rendah, untuk capaian kinerja  $\leq 50,00\%$ .

Selain itu digambarkan dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja.
- b) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal penilaian kinerja (cukup).
- c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.













Hasil kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat dilihat pada urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

### **2.5.2 Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama**

Capaian Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut.



Tabel 2.177  
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD sd 2021(%)	Status	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,25	74,94	75	75,89	75,16	76,48	98,27		Disdikpora
2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,58	13,22	13,23	14,44	13,24	14,9	88,86		Disdikpora
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,33	8,63	8,75	8,7	8,76	9,2	95,22		Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	%	86,84	87,59	90,63	87,54	87,00	88	98,86		Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	Angka	76,46	76,50	76,6	76,51	76,68	76,54	100,18		Dinas Kesehatan
6	Angka Kematian Ibu	Angka	65,97	86,74	101,57	59,27	150,95	52,78	-86		Dinas Kesehatan
7	Angka Kematian Bayi	Angka	8	8,20	8,26	7,3	6,75	6,9	102,17		Dinas Kesehatan
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	ribu Rp/org /thn	10.706,45	11.318	11.160	11.130,49	11.272	11.413,19	98,76		Bappeda
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	67,05	59,35	67,26	79	67,52	90	75,02		Bagian Organisasi
10	Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	68,19	66,36	68,93	75	69,45	83	83,67		Bagian Organisasi
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)		WTP	WTP	WTP	WTP	NA	WTP	NA		BPPKAD
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	1,92	2,73	3,08	2,56	2,53	2,87	88,15		Dinas Kominfo
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	82,45	86,81	83	86,88	85	102,21		Bagian Organisasi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD sd 2021(%)	Status	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Angka kriminalitas	Angka	0,02	0,01	0,015	0,014	0,011	0,013	115,38	●	Satpol PP
15	Indeks rasa aman	Angka	0,51	0,54	0,55	0,53	0,44	0,53	83,02	▶	Satpol PP
16	Indeks Toleransi	%	100	100%	91,7%	100	91,7%	100	91,70	▶	Kesbangpol
17	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,97	3,10	-3,11	3,1	-1,98	3,16	-62,66	▼	Bappeda /BPS
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	%	5,32	5,66	-5,26	5,6	4,63	5,67	81,66		Bappeda /BPS
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Rp juta	113,8	126,84	123,89	134	126,95	144,87	87,63	▶	Bappeda /BPS
19	Angka kemiskinan	%	6,98	6,68	7,31	6,21	7,60	5,9	71,19	▶	Bappeda /BPS
20	Angka pengangguran	%	3,33	3,86	5,53	3,15	3,77	2,9	70,00	▶	Disnakerinkop UKM
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	Rp. Trilyun	7,03	5,87	3,26	8,34	39,43	9,19	429,05	●	DMPTSP
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	78,61	81,29	83,20	81,72	83,60	83,73	99,84	▶	Dinas PUPR
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	60,7	63,75	64,20	65,34	62,76	67,77	92,61	▶	Dinas PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja								92,31		

Keterangan :  
 ● : Tercapai lebih dari 100%    ▶ : Akan tercapai (60 %≤99%)    ▼ : Perlu Upaya Keras (<60%)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 23 indikator. Capaian IKU terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5 indikator tercapai, 15 indikator akan tercapai, 2 indikator perlu upaya keras, dan 1 ndikator NA (*Not Available*) yaitu Indikator Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK) karena masih menunggu audit BPK.

Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerjanya telah mencapai 92,31% sehingga pada akhir periode RPJMD optimis akan mencapai capaian kinerja 100%.

### 2.5.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.178  
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD sd 2021 (%)	Status	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,25	74,94	75	75,89	75,16	76,48	98,27		Disdikpora
2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,58	13,22	13,23	14,44	13,24	14,9	88,86		Disdikpora
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,33	8,63	8,75	8,7	8,76	9,2	95,22		Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	%	86,84	87,59	90,63	87,54	87,00	88	98,86		Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	Angka	76,46	76,50	76,6	76,51	76,68	76,54	100,18		Dinas Kesehatan
6	Pertumbuhan PDRB	%	2,97	3,10	-3,11	3,1	-1,98	3,16	-62,66		Bappeda/BPS
	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau)	%	5,32	5,66	-6,67	5,6	4,63	5,67	81,66		Bappeda/BPS
7	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Rp juta	113,8	126,84	123,89	134	126,95	144,87	87,63		Bappeda/BPS

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Angka kemiskinan	%	6,98	6,68	7,31	6,21	7,60	5,9	77,63	▶	Bappeda/ BPS
9	Angka pengangguran	%	3,33	3,86	5,53	3,15	3,77	2,9	76,92	▶	Disnakeri nkop UKM

Keterangan :  
 ● : Tercapai lebih dari 100%    ▶ : Akan tercapai (60 %≤99%)    ▼ : Perlu Upaya Keras (<60%)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aspek Kesejahteraan Masyarakatpada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 9 indikator, dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator telah tercapai, 7 indikator akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras.

**2.5.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing**

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aspek Daya Saing sebagai berikut :

Tabel 2.179  
 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing

N o	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	10.706,45	11.318	11.160	11.130,49	11.272	11.413,19	98,76	▶	Bappeda / BPS
2	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	59,35	67,26	79	67,52	90	75,02	▶	Bag. Organisasi
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,73	3,08	2,56	2,53	2,87	88,15	▶	Dinas Kominfo
4	Angka kriminalitas	0,02	0,01	0,015	0,014	0,011	0,013	115,38	●	Satpol PP

N o	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021 (%)	Status	PD PENANG GUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Indeks rasa aman	0,51	0,54	0,55	0,53	0,44	0,53	83,02	▶	Satpol PP
6	Indeks Toleransi	100%	100%	91,7%	100%	91,7%	100	91,7	▶	Kesbang pol
7	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	7,03	5,87	3,26	8,34	39,43	9,19	429,05	●	DMPTSP
8	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	81,29	83,20	81,72	83,60	83,73	99,84	▶	PUPR
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,7	63,75	64,20	65,34	62,76	67,77	92,61	▶	PKPLH

Keterangan :  
 ● : Tercapai lebih dari 100%    ▶ : Akan tercapai (60 %≤99%)    ▼ : Perlu Upaya Keras (<60%)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aspek Daya Saing pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 9 indikator, dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator telah tercapai, dan 7 indikator akan tercapai.

Adapun rekapitulasi status capaian kinerja indikator dan predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap tingkat capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.180  
 Rekapitulasi Status Capaian Kinerja Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2021

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN	PERLU UPAYA KERAS		
				TERCAPAI			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	Pendididkan	15	7	8	0	0	0

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN	PERLU UPAYA		
2	Kesehatan	10	4	5	1	0	Telah selesai th. 2019 sebyk 1 indikator (Tercapai)
3	PUPR	8	4	4	0	0	0
4	Perumahan rakyat & kawasan permukiman	3	1	2	0	0	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6	5	0	1	0	0
6	Sosial	6	5	1	0	0	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	Tenaga Kerja	2	2	0	0	0	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	3	1	0	0	0
3	Pangan	3	3	0	0	0	0
4	Pertanahan	1	1	0	0	0	0
5	Lingkungan Hidup	7	2	5	0	0	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	2	0	0	0
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	2	1	0	0	0
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	0	0	0	0
9	Perhubungan	3	1	2	0	0	Telah selesai th. 2019 sebyk 1 indikator (Tercapai)
10	Komunikasi dan Informatika	4	2	2	0	0	0
11	Koperasi dan UKM	2	0	2	0	0	0

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN	PERLU UPAYA		
12	Penanaman Modal	4	2	0	2	0	0
13	Kepemudaan dan Olahraga	2	2	0	0	0	0
14	Statistik	1	1	0	0	0	0
15	Persandian	1	0	0	1	0	0
16	Kebudayaan	2	1	1	0	0	0
17	Perpustakaan	2	1	0	1	0	0
18	Kearsipan	1	1	0	0	0	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
1	Kelautan dan Perikanan	1	0	1	0	0	0
2	Pariwisata	3	1	0	2	0	0
3	Pertanian	2	1	1	0	0	0
4	Kehutanan	1	1	0	0	0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	0	1	0	0
6	Perdagangan	5	1	3	1	0	0
7	Perindustrian	1	0	1	0	0	0
8	Transmigrasi	1	0	0	1	0	0
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
1	Sekretariat Daerah	16	9	6	1	0	0
2	Sekretariat DPRD	2	1	1	0	0	0
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
1	Perencanaan	5	4	1	0	0	0
2	Keuangan	5	3	1	0	1	0
3	Kepegawaian	4	3	1	0	0	0
4	Pendidikan dan Pelatihan	2	1	1	0	0	0
5	Penelitian dan Pengembangan	1	0	1	0	0	0

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN	PERLU UPAYA		
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
1	Inspektorat Daerah	8	4	4	0	0	0
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
1	Kecamatan	1	0	1	0	0	0
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	2	2	0	0	Telah selesai th. 2019 sebyk 1 indikator (Akan Tercapai)
	<b>JUMLAH</b>	<b>159</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	
	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>53,46</b>	<b>38,36</b>	<b>7,55</b>	<b>0,63</b>	

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas sebanyak 159 indikator kinerja yang terdiri dari 85 indikator (53,46 persen) berstatus telah tercapai, 61 indikator (38,36 persen) berstatus akan tercapai, 12 indikator (7,55 persen) berstatus perlu upaya keras, dan 1 indikator (0,63 persen) *Not Available*.

Tabel 2.181  
Rekapitulasi Predikat Kinerja terhadap Tingkat Capaian RPJMD  
s.d Tahun 2021

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1	Pendididkan	V	-	-	-	-
2	Kesehatan	-	V	-	-	-
3	PUPR	V	-	-	-	-
4	Perumahan rakyat & kawasan permukiman	V	-	-	-	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V	-	-	-	-
6	Sosial	V	-	-	-	-



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1	Tenaga Kerja	V	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	V	-	-	-	-
3	Pangan	V	-	-	-	-
4	Pertanahan	V	-	-	-	-
5	Lingkungan Hidup	V	-	-	-	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	-	-	-	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	-	-	-	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V	-	-	-	-
9	Perhubungan	V	-	-	-	-
10	Komunikasi dan Informatika	V	-	-	-	-
11	Koperasi dan UKM	V	-	-	-	-
12	Penanaman Modal	V	-	-	-	-
13	Kepemudaan dan Olahraga	V	-	-	-	-
14	Statistik	V	-	-	-	-
15	Persandian	-	-	-	-	V
16	Kebudayaan	V	-	-	-	-
17	Perpustakaan	-	-	-	V	-
18	Kearsipan	V	-	-	-	-
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
1	Kelautan dan Perikanan	V	-	-	-	-
2	Pariwisata	-	-	-	V	-
3	Pertanian	V	-	-	-	-
4	Kehutanan	V	-	-	-	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	V
6	Perdagangan	-	V	-	-	-
7	Perindustrian	-	-	V	-	-
8	Transmigrasi	-	-	-	-	V

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Sekretariat Daerah	V	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	V	-	-	-	-
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Perencanaan	V	-	-	-	-
2	Keuangan	V	-	-	-	-
3	Kepegawaian	V	-	-	-	-
4	Pendidikan dan Pelatihan	V	-	-	-	-
5	Penelitian dan Pengembangan	-	V	-	-	-
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Inspektorat Daerah	-	V	-	-	-
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
1	Kecamatan	V	-	-	-	-
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	V	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Persentase</b>	<b>76,20</b>	<b>9,52</b>	<b>2,38</b>	<b>4,76</b>	<b>7,14</b>

Berdasarkan hasil rekapitulasi rata-rata capaian kinerja pada tabel di atas, dari 42 urusan dapat dikategorikan 32 urusan (76,20 persen) berpredikat kinerja sangat tinggi, 4 urusan (9,52 persen) berpredikat tinggi, 1 urusan (2,38 persen) berpredikat sedang, 2 urusan (4,76 persen) berpredikat rendah dan 3 urusan (7,14 persen) berpredikat sangat rendah.

Sedangkan rekapitulasi capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2018 - 2023 dapat disampaikan bahwa sebanyak 85 indikator (53,46 persen) berstatus telah tercapai, 59 indikator (37,11 persen) berstatus akan tercapai, 12 indikator (7,55 persen) berstatus perlu upaya keras, dan 3 indikator (1,89 persen) *Not Available*, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.182  
Rekapitulasi Capaian Indikator sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018 – 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN UMUM								
1	Pendidikan								
1.1	APK SD/MI	101,80%	101,87%	99,15%	98,67%	101,80%	110,17%	108,90%	●
1.2	APK SMP/MTs	114,75%	115,49%	115,51%	116,08%	114,75%	105,37%	91,24%	▶
1.3	APM SD/MI/Paket A	99,83%	99,83%	88,61%	86,17%	99,83%	99,29%	99,46%	▶
1.4	APM SMP/MTs/Paket B	97,97%	97,97%	86,21%	76,67%	97,97%	82,08%	83,78%	▶

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19%	103,19%	100,78%	104,05%	103,19%	103,34%	100,15%	●
1.6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27%	102,27%	120,81%	78,06%	102,27%	117,77%	115,16%	●
1.3	Persentase sekolah terakreditasi A	73,36%	74,36%	74,69%	80,42%	73,96%	73,32%	98,60%	▶
1.4	APK PAUD	89,46%	90,00%	76,01%	102,86%	89,78%	118,59%	131,77%	●
1.5	APK pendidikan kesetaraan	1,37%	1,42%	2,14%	2,20%	1,40%	1,56%	109,86%	●
1.6	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	94,01%	95,28%	95,93%	94,52%	94,77%	96,24%	101,01%	●
1.7	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	91,99%	92,09%	95,40%	92,03%	92,05%	89,74%	97,45%	▶
1.8	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	65,06%	70,06%	62,14%	57,67%	68,06%	75,00%	107,05%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.9	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	35,60%	38,00%	36,14%	24,56%	37,04%	24,16%	63,58%	▶
1.10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	95,50%	65,89%	100,00%	91,06%	87,89%	92,01%	▶
1.11	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	95,10%	90,96%	99,88%	88,45%	91,74%	96,47%	▶
2	Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Ibu	65,97	52,78	72,9	101,57	59,27	150,95	-86%	▼

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
2.2	Angka Kematian Bayi	8	6,9	8,15	8,26	7,3	6,75	102,17%	●
2.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,60%	8,09%	4,71%	18,87%	4,50%	175,81%	●
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	96,80%	89,70%	100%	94,60%	94,60%	▶
2.5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	69,60%	93,05%	100%	91,54%	91,54%	▶
2.6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	99%	99,00%	100%	96,25%	96,25%	▶
2.7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	92,70%	97,65%	94,58%	91,30%	96,10%	103,67%	●
2.8	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	67,08%	73,66%	100,00%	-	-	-	135,76%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
2.9	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	100%	95,70%	100,00%	100%	96,15	96,15%	▶
2.10	Cakupan pelayanan BLUD	100%	100%	98,50%	93,33%	100%	96,72	96,72%	▶
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	83	88	84	85	86	95	107,95%	●
3.2	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63	85	86,3	87,64	83	87,9	103,41%	●
3.3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	92,83	86,2	91,94	90,03	92,34	99,47%	▶
3.4	Persentase jumlah jembatan kabupaten	88,06	91,07	90,5	90,17	89,84	90,17	99,01%	▶

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
	dalam kondisi mantap								
3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21	66	62	63,06	64	64	96,97%	▶
3.6	Persentase penduduk berakses air minum	95,02	100	95,8	95,37	98	98	98%	▶
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,08	100	100	100	100	100	100%	●
3.8	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	100%	●
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,82%	98,30%	98,05%	96,77%	98,11%	97,07%	98,49%	▶



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
4.3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,23%	0,02%	0,12%	0,02%	0,05%	0,02%	100%	●
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Cakupan penegakan perda dan perkada	75%	85%	87%	100%	80%	100	117,65%	●
5.2	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	na	80%	98%	85%	70%	89,94	112,43%	●
5.3	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,34	1,36	1,36	1,34	1,36	101,49%	●
5.4	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	82%	86%	100%	100%	84%	100%	116,28%	●
5.5	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	15 -30 menit	7 menit	15 menit	10 menit	8 menit	13,304menit	14,29%	▼

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
5.6	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
6	Sosial								
6.1	Rasio PMKS	7,87%	7,50%	7,87%	7,84%	7,67%	9,42%	79,62%	▶
6.2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	35%	47%	37%	77,00%	42%	79,74%	169,65%	●
6.3	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,60%	5,60%	5,60%	15,70%	5,60%	24.54%	438,21%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
6.4	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	60%	65%	65%	83%	65%	71%	109,23%	●
6.5	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	na	75%	68%	82,00%	72%	82,98%	110,64%	●
6.6	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	Tenaga Kerja								
1.1	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	41%	50%	42%	45,50%	46%	53,04%	106,08%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.2	Persentase kasus yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	63,02	62,02	62,07	63	65,18	103,43%	●
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,50%	71,85%	71,57%	71,64%	71,71%	64,05%	89,14%	●
2.3	Persentase pekerja perempuan	60,07%	60,97%	60,25%	82,62%	60,61%	88,73%	145,53%	●
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
	unit layanan terpadu								
3	Pangan								
3.1	Persentase ketersediaan pangan utama	117%	100%	100%	176,59%	100%	161,12%	161,12%	●
3.2	Persentase keamanan pangan	84%	90%	86%	90%	88%	93%	103,33%	●
3.3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	70%	100%	80%	94,44%	90%	100%	100%	●
4	Pertanahan								
4.1	Persentase luas tanah bersertifikat	67,54%	74,84%	74,75%	74,80%	71,54%	79,93%	106,80%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Indeks kualitas air	46	50,85	46	47,22	48,42	47	92,43%	▶
5.2	Indeks kualitas udara	89,07	93,92	89,07	90,34	91,49	79,47	84,61%	▶
5.3	Indeks tutupan lahan	50	60,85	56	58,51	58,42	58,9	96,79%	▶
5.4	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	17%	50%	20%	27,90%	34%	47,06%	94,12%	▶
5.5	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5%	25%	9%	14,28%	5%	17,78%	355,60%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
5.6	Persentase penanganan volume sampah	73%	72%	88%	42,88%	74%	77%	106,94%	●
5.7	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,14%	8,20%	8,15%	8,10%	8,17%	8,16%	99,51%	▶
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	100%	99,74%	99,18%	100%	98,54%	98,54%	▶
6.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88%	100%	92,18%	95,60%	100%	98,14%	98,14%	▶
6.3	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7.1	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	10%	30%	10%	15%	20%	30,08%	100,26%	●
7.2	Persentase desa yang bermasalah	na	10%	50%	12%	30%	11%	90,91%	▶
7.3	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	0%	100%	25%	80%	50%	100%	100%	●
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,05	2,01	2,01	1,89	2,02	2,1	104,48%	●
8.2	Cakupan peserta KB aktif	67,92%	72,00%	70,88%	71,07%	70%	72,62%	100,86%	●
8.3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka	12,14%	14,00%	13,38%	14,35%	14%	15,40%	110%	●





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
	panjang								
9	Perhubungan								
9.1	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	33	40	34	36	37	37 km/jam	92,50%	▶
9.2	persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	75,58%	90,00%	79,84%	83,49%	83,49%	86%	85,54%	▶
9.3	Kontribusi retribusi perparkiran dan terminal terhadap PAD	0,005	0,019	0,019	-	-	-	100%	●
10	Komunikasi dan Informatika								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
10.1	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
10.2	Kebijakan internal SPBE	1,24	3,06	2,53	3,12	2,59	2,3	75,16%	▶
10.3	Tata kelola SPBE	1,29	2,43	2,14	2,43	2,29	1,9	78,19%	▶
10.4	Layanan SPBE	2,45	3,03	3,09	3,39	2,7	3,49	115,18%	●
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11.1	Persentase koperasi aktif	87,94%	89,00%	87,73%	86,33%	88,50%	85,79%	96,39%	▶
11.2	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	4,60%	6,00%	4,80%	4,85%	5,25%	5,70%	95%	▶

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
12	Penanaman Modal								
12.1	Persentase peningkatan jumlah investor	1%	10%	31,70%	320%	6%	-27,76%	-277,60%	▼
12.2	Realisasi investasi yang terlaporkan	688, 71 M	3,497 T	2,053 T	1,95T	3,171 T	0,73 T	20,88%	▼
12.3	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	15%	60%	32,44%	24,36%	50%	75%	125%	●
12.4	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	75%	80%	78%	98%	79%	614%	767,50%	●
13	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93%	96,96%	96,43%	81,00%	95,95%	100%	103,14%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	88,00%	92,00%	92,00%	91,77%	92,00%	92%	100%	●
14	Statistik								
14.1	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
15	Persandian								
15.1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	6%	24%	9%	44%	15%	12%	50,00%	▼

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
16	Kebudayaan								
16.1	Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	33%	71%	48,00%	47,00%	59%	53%	75%	▶
16.2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	27%	20%	16,00%	22,00%	18%	37,27%	186,35%	●
17	Perpustakaan								
17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6,20%	9,40%	8,31%	2,35%	8,00%	1,14%	12,13%	▼
17.2	Persentase ketersediaan bahan pustaka	68%	73,58%	70,87%	70,78%	72,65%	71,02%	96,52%	▶
18	Kearsipan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
18.1	persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	na	32,00%	8,31%	6,68%	11,63%	25,58%	111,21%	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	95	100	88,99	97,14	98	98,01	98,01%	
2	Pariwisata								
2.1	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	19,43%	14,00%	8%	-57	12%	-48%	-342,86%	
2.2	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang	1%	10%	0%	4%	6%	0%	0%	







No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
	memadai								
2.3	Persentase peningkatan promosi pariwisata	10%	15%	13%	60%	13%	80%	533%	●
3	Pertanian								
3.1	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	91,46	100	102,1	96,50%	97,03	102,4	102,40%	●
3.2	Persentase peningkatan produksi peternakan	78,35	100	81,31	96,64%	90,7	88,53	88,53%	▶
4	Kehutanan								
4.1	Persentase tutupan lahan	0,08%	0,48%	0,08%	0,20%	0,32%	9,95%	2072%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
5	Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.1	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%	0%	100%	20%	20%	▼
6	Perdagangan								
6.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	27%	70%	37,83%	41,00%	50%	52,94%	105,88%	●
6.2	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	78%	100%	65%	37,03%	90%	41,25%	45,83%	▼



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
6.3	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	70%	95%	75%	68,53%	85%	72,88%	85,74%	▶
6.4	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,40%	4,50%	2,28%	1,83%	3,90%	2,84%	72,82%	▶
6.5	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	70%	95%	80%	80,00%	85%	85%	95,59%	▶
7	Perindustrian								
7.1	Persentase pertumbuhan IKM	0,13%	0,40%	0,20%	0,25%	0,30%	0,30%	75,00%	▶
8	Transmigrasi								
8.1	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	▼

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Sekretariat Daerah								
1.1	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.2	Persentase fasilitasi kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.3	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	87%	90%	78,50%	84,00%	88%	479%	532%	●
1.4	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	87%	97%	50%	90,00%	96%	96%	99%	▶




No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.5	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	90,00%	100%	92,50%	92,50%	
1.6	Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	
1.7	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	80%	100%	90%	88,00%	90%	100%	100%	
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	82,45%	84,81	83	86,88	102,21%	
1.9	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	83	66,36%	68,93	75	69,45	83,67	
1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	90	59,35%	67,26	79	67,52	75,02	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.11	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	●
1.12	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	100%	89,39%	100%	107,10%	107,10%	●
1.13	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	80%	85%	100%	100%	83%	100%	117,65%	●
1.14	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	11,69%	35,00%	31,23%	38,23%	7%	3%	33,33%	▼
1.15	Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	86%	90%	89%	100%	89%	89,97%	99,77%	▶

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.16	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	80,79%	95,00%	100,00%	98,85%	88%	89,11%	93,80%	▶
2	Sekretariat DPRD								
2.1	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	92,85%	92,85%	▶
2.2	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	●
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Perencanaan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.1	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.2	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.3	Persentase keterisian data/informasi	40%	65%	58%	58,12%	55%	58,43%	89,89%	▶
1.4	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.5	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
	daya alam								
2	Keuangan								
2.1	Persentase realisasi PAD	100%	100%	102%	131,62%	100%	137,50%	137,50%	●
2.2	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
2.3	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
2.4	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	90%	95%	80%	88,95%	95%	84%	88,42%	
2.5	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	100%	90%	NA	NA	
3	Kepegawaian								
3.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	0%	95%	95%	95%	95%	79%	83%	






No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
3.3	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
3.4	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	37,50%	100,00%	50%	63%	75%	75%	100%	●
4	Pendidikan dan Pelatihan								
4.1	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	na	46%	32%	35,86%	42%	29,18%	63,43%	▶
4.2	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	na	2%	9,69%	1,61%	1,60%	5,89%	368,26%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
5	Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	42,85%	100,00%	57,14%	57,14%	86%	86%	86,00%	▶
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Pengawasan								
1.1	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	100%	100%	62%	93,02%	100%	100%	100%	●

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	80%	100%	79%	80,46%	90%	79,40%	79,40%	●
1.3	Persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.4	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.5	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,126	3,5	3,126	3,1	3,3	2,781	79,46%	▶
1.6	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.7	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3%	32%	2%	4,76%	20,60%	23,11%	71,33%	▶

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
1.8	Persentase realisasi progress PMPRB	79,92%	100%	69%	69%	90%	84%	84%	
	UNSUR KEWILAYAHAN								
1	Kecamatan								
1.19	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	97,59%	97,59%	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	Kesatuan Bangsa dan Politik								
5.1	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Akhir RPJMD 2018 - 2023	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD sd Tahun 2021				Prosentase capaian terhadap RPJMD sd Tahun 2021	Status
				Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		
5.2	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85%	86%	-	-	-	-	99,97%	
5.3	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.4	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%	100%	75%	100%	75%	75%	

2.5.5. RANGKUMAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2019 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 23 indikator, sebanyak 5 indikator atau 21,74 persen telah tercapai, 15 indikator atau 65,22 persen akan tercapai, 2 indikator atau 8,70 persen perlu upaya keras, dan 1 atau 4,34 persen NA (*Not Available*) yaitu Indikator Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK) karena masih menunggu audit BPK. Sedangkan Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) yang berjumlah 159 indikator, sebanyak 85 indikator (53,46 persen) berstatus telah tercapai, 61 indikator (38,36 persen) berstatus akan tercapai, 12 indikator (7,55 persen) berstatus perlu upaya keras, dan 1 indikator (0,63 persen) *Not Available*, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.183  
Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2021 Terhadap Target Akhir  
RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Jumlah Indikator	Tercapai ≥ 100% Target Akhir RPJMD		Akan Tercapai 99% ≤ 60% Target Akhir RPJMD		Perlu Upaya Keras < 60% Target Akhir RPJMD		NA	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IKU	23	5	21,74	15	65,22	2	8,70	1	4,34
IKPPD	159	85	53,46	61	38,36	12	7,55	1	0,63

Sumber : Bappeda Kab. Kudus

2.5.5.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TAHUN 2021

Adapun rincian hasil Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Buku II RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

## **2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi terdapat *gap* antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Pada RKPD tahun 2023 permasalahan daerah juga memperhatikan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan masyarakat, namun berdampak pula pada permasalahan sosial dan ekonomi.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang teridentifikasi pada masing-masing urusan, adalah sebagai berikut :

### **2.6.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1) Pendidikan**

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya mutu dan akses Pendidikan.
- b) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi sumberdaya pendidik pendidikan dasar.
- c) Masih kurangnya kompetensi pendidik pendidikan non formal.

#### **2) Kesehatan**

Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, masih ada beberapa permasalahan antara lain

- a) Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting.
- b) Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi.
- c) Masih rendahnya cakupan penemuan jumlah suspek Tuberculosis.
- d) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam upaya pemulihan layanan kesehatan akibat Pandemi Covid-19.
- e) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan.

#### **3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial, serta masih terdapatnya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

Beberapa permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

- a. Masih adanya jalan dalam kondisi tidak mantap.
- b. Adanya pendangkalan sungai/saluran.
- c. Masih kurangnya infrastruktur air minum yang layak dan aman.
- d. Masih kurangnya infrastruktur air limbah domestik yang layak.
- e. Dimensi saluran drainase belum memadai.
- f. Beberapa kerusakan jembatan yang belum tersentuh rehabilitasi/pemeliharaan.
- g. masih adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang belum memenuhi standar administratif dan teknis.
- h. Masih adanya bangunan yang peruntukannya belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena belum berijin maupun ketidaksesuaian bangunan *existing* dengan RTRW.
- i. perlunya upaya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi maupun kualitas penyelenggara jasa konstruksi.

#### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, nyaman dan berkelanjutan termasuk kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Terkendala pemenuhan persyaratan administrasi dan pendataan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan permukiman kumuh.
- b) Belum terpenuhinya kebutuhan rumah dimasa yang akan datang secara memadai.
- c) Belum optimalnya pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman.
- d) Masih adanya permukiman kumuh/ilegal.

#### 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mewujudkannya masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a) Belum terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
- b) Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba.
- c) Belum optimalnya sinergitas dengan instansi terkait dalam hal penanganan PGOT.
- d) Belum memadainya sarana prasarana penunjang pelaksanaan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.



## 6) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Bertambahnya jumlah keluarga miskin karena Pandemi Covid-19.
- b) Masih perlunya penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.

### **2.6.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### 1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Meskipun pada Tahun 2021 terjadi kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun masih ada permasalahan dalam meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, antara lain :

- a) Masih kurangnya pelatihan ketrampilan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik formal dan informal.
- b) Meningkatnya angka pengangguran akibat bencana non alam.

#### 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yang perlu perhatian antara lain:

- a) Belum terpenuhinya nilai maksimal kesetaraan perempuan dengan laki-laki.
- b) Penduduk perempuan yang memasuki usia kerja (14 – 64 tahun) memilih menjadi ibu rumah tangga (bukan angkatan kerja) bukan bekerja (angkatan kerja).
- c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### 3) Pangan

Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Masih banyaknya pangan segar yang tidak layak konsumsi

- b) Masih perlunya pendampingan dan pembinaan terhadap produsen penghasil pangan segar secara intensif.

#### 4) Pertanahan

Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Belum ada kesepakatan luasan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk pembangunan Bendungan Logung.
- b) Belum adanya kesepakatan desain peta KTP Jalan Lingkar segmen Klumpit.

#### 5) Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- a) Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Adanya potensi kerusakan lingkungan.
- c) Masih adanya potensi pencemaran lingkungan.
- d) Perlunya tolok ukur evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.
- e) Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan.
- f) Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan dan berkurangnya lahan TPA persampahan.
- g) Degradasi ruang terbuka hijau publik dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

#### 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, masih menemui beberapa permasalahan, meliputi :

- a) Belum optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan khususnya kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat dalam pengurusan dokumen pendaftaran kependudukan.
- b) Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil khususnya kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat dalam pengurusan dokumen pencatatan sipil.

#### 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam melaksanakan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Masih ditemukannya desa yang bermasalah hukum.
- b) Masih ditemukannya desa yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan.
- c) Masih banyaknya kelembagaan desa yang belum berfungsi secara optimal
- d) Kurang berkembangnya perekonomian masyarakat desa melalui BUMdesa/Bumdesa bersama
- e) Perlunya upaya pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa melalui kerjasama antar desa
- f) Perlunya penguatan infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

#### 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Kurang optimalnya penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur.

#### 9) Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut :

- a) Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan perkotaan dalam rangka meminimalisasi potensi kemacetan pada jam sibuk dan kerawanan kecelakaan.

#### 10) Komunikasi dan Informatika

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya transparansi informasi dan desiminasi informasi Pemerintah Daerah.
- b) Belum optimalnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik.

#### 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat

kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan koperasi.
- b) Persaingan perkembangan lembaga keuangan di luar Koperasi.
- c) Kewenangan yang terbatas dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi.
- d) Kurang optimalnya fasilitasi kemitraan pemasaran dan permodalan untuk UMKM.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

- a) Belum optimalnya upaya peningkatan realisasi investasi.
- b) Tidak terlaporkannya realisasi investasi bagi pelaku usaha yang modalnya di bawah 1 Milyar ke sistem pelaporan LKPM.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a) Belum optimalnya prestasi olah raga.
- b) Kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar.
- c) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda.

14) Statistik

Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen data diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain :

- a) Belum adanya satu data yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Kudus.

15) Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh

pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Dalam pengelolaan persandian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Masih adanya perangkat daerah yang belum mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian.
- b) Masih adanya perangkat daerah yang belum menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik.

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan, melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat memperkuat budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain :

- a) Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- b) Belum optimalnya pengelolaan registrasi dan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan cagar budaya.

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Promosi untuk meningkatkan minat baca kepada masyarakat masih kurang.
- b) Kurang optimalnya kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.
- c) Belum dilakukannya pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat.
- d) Pengembangan perpustakaan belum menjadi prioritas pembangunan di kecamatan, desa dan sekolah.
- e) Ketersediaan bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus.
- f) Kualitas bahan Pustaka masih kurang memadai.
- g) Koleksi buku digital dan koleksi terbitan berkala masih kurang.

18) Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain :

- a) Kualitas pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah kurang maksimal.
- b) Belum adanya sosialisasi tentang kaidah baku terhadap produk hukum/arsip bernilai sejarah pada Perangkat Daerah.

- c) Belum adanya buku panduan tentang prosedur penyusutan arsip.
- d) Belum adanya sosialisasi prosedur penyerahan arsip inaktif ke LKD yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun.
- e) LKD belum mengadakan Bimtek kearsipan untuk pengelola kearsipan pada Perangkat Daerah.
- f) Belum adanya sosialisasi arsip vital kepada Perangkat Daerah.

#### **a. Urusan Pilihan**

##### **1) Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat. Pembangunan perikanan telah dilaksanakan melalui budidaya dan pengolahan perikanan, namun masih dijumpai permasalahan, antara lain :

- a) Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan dan pengolahan ikan.
- b) Kurangnya inovasi untuk peningkatan produksi perikanan.

##### **2) Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat permasalahan antara lain :

- a) Belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata.
- b) Belum optimalnya pembangunan kelembagaan dan pemasaran pariwisata.

##### **3) Pertanian**

Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Namun pada faktanya ada kejadian yang sangat berpotensi mengganggu tingkat produktivitas ternak dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing dan domba. Permasalahan lain yang perlu penanganan lebih lanjut adalah turunnya kebutuhan konsumsi hasil peternakan serta naiknya harga pakan ternak.

##### **4) Kehutanan**

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Potensi berkurangnya tutupan lahan.

##### **5) Energi dan Sumber Daya Mineral**

Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah berupa pemberian izin

pengelolaan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT), dan sampai saat ini belum ada yang mengajukan perizinan panas bumi disebabkan karena tidak terdapat potensi panas bumi baru yang terbarukan, namun demikian dimungkinkan adanya penemuan sumber energi baru yang terbarukan, dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Belum adanya inovasi mengenai sumber energi terbarukan.

6) Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala adalah :

a) Belum optimalnya upaya pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal.

b) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi.

c) Masih rendahnya kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD.

7) Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan Perindustrian yang masih menjadi kendala adalah :

a) Pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah belum optimal.

8) Transmigrasi

Transmigrasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun masih dijumpai permasalahan sebagai berikut :

a) Fasilitasi terhadap program transmigrasi belum optimal.

b) Menurunnya minat masyarakat terhadap program dan daerah tujuan transmigrasi.

### **2.6.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

#### **1) Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yang penting dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesra.
- b. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat daerah.
- c. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan.

#### **2) Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Masih adanya agenda kerja DPRD yang belum terealisasi.

### **2.6.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1) Perencanaan**

Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana keberhasilan pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Namun demikian, masih ditemui permasalahan dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

- a) Masih rendahnya keterisian data/informasi perencanaan pembangunan.

#### **2) Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a) Masih perlunya upaya menjamin konsistensi pengelolaan keuangan daerah agar tetap akuntabel dan transparan.



- b) Belum optimalnya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan persentase PAD terhadap sumber pendanaan lainnya.
  - c) Belum terintegrasinya SIPD dan SIMDA dalam perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- 3) Kepegawaian
- Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan yang dihadapi adalah :
- a) Adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah menunjukkan masih kurangnya komitmen ASN maupun Perangkat Daerah dalam menegakkan disiplin.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
- Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a) Masih adanya jabatan Tinggi Pratama yang kurang dan terbatasnya peserta *Talent Pool*.
- 5) Penelitian dan Pengembangan
- Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan:
- a) Belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah.

#### **2.6.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

- 1) Inspektorat Daerah
- Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain:
- a) Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  - b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  - c) Kurangnya komitmen dalam pembangunan *Zona Integritas (ZI)* agar mendapatkan predikat WBK/WBBM.

#### **2.6.6. Unsur Kewilayahan**

- 1) Kecamatan
- Pembangunan kewilayahan sangat diperlukan untuk penguatan peran kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu :
- a) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa.

### **2.6.7. Unsur Pemerintahan Umum**

#### **1) Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kabupaten Kudus termasuk daerah yang terkondusif, hampir tidak ada potensi konflik sosial dan interaksi diantara masyarakat lintas agama terjalin dengan baik, namun masih ada Permasalahan perlu menjadi perhatian yaitu :

- a) Belum selesainya penanganan konflik SARA.

### **2.7. ISU STRATEGIS**

#### **2.7.1. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH**

Rencana pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023 disusun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, dengan memperhatikan dinamika isu global diantaranya masih adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat secara global. Penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.184

Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional  
dan Isu Nasional

No	Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Nasional
1	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Reformasi Sistem Kesehatan
2	Tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas Wilayah	Transformasi Digital
3	Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman	Kesenjangan Wilayah	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4	Daya saing ekonomidan kesempatan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>• Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha</li> </ul>	Reformasi Ekonomi
5	Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam</li> <li>• Kedaulatan Pangan dan Energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi Ketahanan Bencana</li> <li>• Ekonomi Hijau</li> <li>• Ketahanan Pangan</li> </ul>

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam tahun 2023 yaitu :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2021, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,16 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 8,76 dan harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 13,24. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain:

- a. Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, di samping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

- b. Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi, yaitu 6,75 per 1000 kelahiran hidup, dan 150,95 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis,

perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

## 2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 69,45, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

## 3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan. Kehidupan yang toleran

dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2021 sebesar 0,011. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

#### 4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2021 berjumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 67,06 ribu orang (7,60 persen), bertambah sebanyak 2,82 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2020 yang berjumlah 64,24 ribu orang (7,31 persen). Garis Kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan dari Rp. 429.666 pada tahun 2020 menjadi Rp.450.992 pada tahun 2021. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di pada tahun 2021 sebesar 3,77%. Berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan untuk memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

#### 5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim.

Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Menurut data BPBD Kabupaten Kudus tahun 2021, bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian di Kabupaten Kudus yaitu angin kencang (72 kali), tanah longsor (21 kali), banjir (40 kali) dan kebakaran (46 kali). Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca menyebabkan bencana alam akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholders, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

### **2.7.2. ISU PEMULIHAN DAMPAK COVID-19**

Meskipun Covid-19 tidak lagi menjadi faktor utama yang mendukung reformasi di bidang Kesehatan, namun Pemerintah Kabupaten Kudus masih tetap memperhatikan penanganan pemulihan dampak Covid-19 pada tahun 2023. Hal ini terkait dengan adanya perkembangan varian dan manifestasi gejalanya serta perubahan hidup berdampingan dengan Covid-19. Selain itu perlu dilaksanakan penyesuaian protokol kesehatan di semua sektor dan peningkatan pemenuhan vaksinasi terutama bagi kelompok rentan.

Data kasus covid-19 sampai dengan 21 Maret 2022 di Kabupaten Kudus pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan kasus aktif yang dirawat di Rumah Sakit atau isolasi mandiri sebanyak 73 orang, sembuh 17.470 orang bertambah 15 orang dari data sebelumnya, dan tidak ada yang meninggal, sehingga total meninggal 1.448 orang.

Apabila dibandingkan dengan kasus Covid-19 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 di Indonesia, maka di Kabupaten Kudus kasus aktif sebesar 0,036%, sembuh 0,311% dan meninggal 0,941%, sedangkan terhadap Provinsi Jawa Tengah, maka kasus yang positif sebesar 1,225%, sembuh 11,629% dan meninggal sebesar 13,893%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.185  
Perbandingan Kasus Covid-19 s.d 21 Maret 2022

No	Uraian	Indonesia	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus
1.	Positif	203.345	5.956	73
2.	Sembuh	5.609.945	150.218	17.470
3.	Meninggal	153.892	10.422	1.448

Sumber : *jawapos.com, new.detik.com, Dinas Kesehatan Kab. Kudus*

Sesuai dengan Surat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tanggal 13 Juli 2021 Nomor: SR.02.06/II/1862/2021 perihal Perubahan Data Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, maka sasaran vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kudus sebanyak 661.727 orang, yang terdiri dari SDM Kesehatan sebanyak 5.502 orang, Lansia sebaanyak 71.098 orang, Petugas Publik sebanyak 52.660 orang, masyarakat umum dan rentan sebanyak 452.410 orang dan remaja sebanyak 80.057 orang. Untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Kudus sampai dengan 21 Maret 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186  
Capaian Vaksinasi sd 21 Maret 2022

No	Kategori	Dosis		
		1	2	3
1.	SDM Kesehatan	6.589	6.589	2.893
2.	Lansia	49.639	37.389	7.501
3.	Petugas Publik	35.131	38.689	10.654
4.	Masyarakat Rentan dan Umum	314.568	266.320	80.674
5.	Remaja	71.888	70.384	1.066
6.	Anak-anak	75.667	68.610	0
	Total	553.482	487.981	102.788

Sumber : *Dinas Kesehatan Kab. Kudus*



Dari data di atas dapat dilihat bahwa ketercapaian vaksinasi dari sasaran yang ditetapkan untuk dosis pertama sebanyak 553.482 orang atau 83,64%, dosis ke dua sebanyak 487.981 orang atau 73,74% dan dosis ke tiga sebanyak 102.788 orang atau 15,53%, sehingga perlu dilaksanakan upaya untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan vaksinasi dari dosis pertama sampai ke tiga atau booster, sehingga diharapkan semua masyarakat dapat memperoleh vaksinasi primer demi menjaga kekebalan tubuh dan meminimalisir peluang tertular maupun perburukan gejala jika sakit khususnya pada kelompok rentan.

Dalam rangka penanganan pemulihan dampak Covid-19, maka isu strategis pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kesehatan
2. Covid-19 dapat dengan mudah menular dari satu orang ke orang lainnya. Penularan dan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis yang menyerang orang usia produktif. Penyakit ini terjadi secara perlahan dan bisa menetap dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan kondisi kesehatan penderitanya menurun secara bertahap sehingga rentan terkena infeksi termasuk infeksi Covid-19. Selain itu penderita penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan lebih sulit melawan infeksi. Kebanyakan penderita penyakit kronis sudah mengalami kerusakan organ, sehingga saat terpapar virus Covid-19 kerusakannya akan semakin parah dan berakibat gejala Covid-19 akan semakin berat. Jenis-jenis penyakit kronis yang perlu diwaspadai antara lain gangguan pernafasan kronis seperti asma; broncho pneumonia; penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, gagal jantung, stroke, hipertensi; diabetes; penyakit ginjal; kanker; termasuk penyakit autoimun.
3. Kondisi tersebut menuntut perwujudan derajat kesehatan yang lebih optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan, perilaku (life style), pelayanan kesehatan, dan keturunan. Untuk itu menjadi hal penting di sektor kesehatan adalah bagaimana meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam penanganan dan pemulihan Covid-19, tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatifnya. Terutama terkait dengan peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, penerapan protokol kesehatan, dan pemenuhan vaksinasi primer lengkap, serta didukung optimalisasi layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penyiapan upaya kontigensi apabila kasus mulai meningkat atau tinggi.

#### 4. Sosial

Dampak Covid-19 menimbulkan kerentanan lain dari aspek sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap Covid-19 secara sosial ekonomi adalah mereka masyarakat yang saat ini termasuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah (desil 1-4), dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek, dan lain-lainnya. Mereka inilah kelompok masyarakat yang rentan, rentan secara ekonomi menjadi miskin, dan rentan terpapar Covid-19. Kelompok masyarakat miskin inilah yang masuk dalam poverty trap atau jebakan kemiskinan, yang jika terjadi krisis maka mereka akan semakin tidak berdaya.

Ditambah lagi dengan kondisi tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor ekonomi, yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok rentan miskin akhirnya masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin (dari desil 5-6 menjadi desil 1-4), yaitu kelompok pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan oleh industri atau UMKM. Meskipun pada tahun 2022 ini telah ada kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun tetap perlu memberikan dukungan kepada kelompok miskin berpenghasilan rendah dan menengah, melalui serangkaian program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja serta program bantuan sosial.

#### 5. Ekonomi

Dari sisi perekonomian, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang sangat signifikan pada beberapa sektor ekonomi. Sektor-sektor perekonomian tersebut antara lain sektor koperasi, UMKM, dan IKM yang ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, dan tenaga kerja. Sektor lain yang terdampak cukup signifikan adalah sektor pariwisata. Menurunnya minat masyarakat untuk bepergian ke destinasi wisata religi yang sangat tajam berakibat pada menurunnya roda perekonomian bagi para pelaku usaha bidang pariwisata.

Pada sektor transportasi sebagai pendukung pembangunan ekonomi juga mengalami dampak cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penularan virus Covid-19 dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia berakibat pada penurunan pendapatan para pelaku usaha di bidang transportasi termasuk pelaku usaha yang berdampingan dengan sektor transportasi seperti UMKM.

Dalam mendukung pemulihan akibat Covid-19 di sektor ekonomi perlu peningkatan perekonomian diantaranya melalui optimalisasi UMKM, pengembangan sektor investasi, pariwisata dan

transportasi serta peningkatan infrastruktur. Pada sektor pariwisata yang sangat terpuruk dua tahun terakhir perlu dilaksanakan pemulihan, penguatan dan pengoptimalan kunjungan wisatawan dengan mempersiapkan destinasi sesuai standar tata kelola, infrastruktur pendukung serta penerapan protokol kesehatan.

#### 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Pandemi Covid-19 telah mengubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintahan. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi agar pelayanan publik tetap dilakukan secara optimal dan berintegritas. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan efektif melayani publik di tengah upaya menanggulangi dampak kesehatan masyarakat karena pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ada dua dimensi tata kelola birokrasi yang berubah sebagai dampak pandemi Covid-19, yakni, dimensi organisasi dan sistem kerja. Dari sisi organisasi, telah terjadi perubahan dari semula yang dilakukan secara normal menuju adaptasi kebiasaan baru atau dikenal juga dengan istilah new normal. Dari sisi sistem kerja, terdapat dua pilihan, yaitu bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau work from office (WFO) dengan menjalankan ketentuan protokol kesehatan.

Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengarusutamaan flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel. Pengadaan rapat-rapat koordinasi menggunakan teknologi digital (telemeeting atau teleconference) tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi waktu maupun biaya. Perubahan dimensi organisasi dan sistem kerja birokrasi ini didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai bagian dari budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi e-office, sistem aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian terus diterapkan. Kondisi pandemi juga semakin mendorong birokrasi bekerja dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital, seperti video dan web conference Zoom, Google Meet, media sosial, penyimpanan awan (cloud storage), virtual private network, dan aplikasi digital lainnya.

Tata kelola pemerintahan selama ini menghadapi beberapa masalah klasik, diantaranya tidak sinkronnya tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi, tingginya kompleksitas masalah publik, tuntutan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi, lemahnya kontrol kinerja birokrasi, tren korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan wewenang yang masih tinggi, kinerja dan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang masih rendah, dan era desentralisasi yang mengakibatkan tingginya tuntutan dalam pelimpahan kewenangan.

Meskipun pasca pandemi, birokrasi harus terus mengembangkan ide-ide serta kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Implementasi e-governance harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma new public governance yang juga hendak kita capai sebagai hasil reformasi birokrasi tahap akhir saat ini. Penerapan digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-project planning, system delivery, penatausahaan, e-controlling, e-reporting, hingga e-monev serta aplikasi custom lainnya harus semakin ditingkatkan. Selain itu perlu pula dilaksanakan penguatan kapasitas birokrasi dalam penguasaan aplikasi berbasis digital dan meningkatkan edukasi publik khususnya terkait dengan transformasi pelayanan manual daring (online).

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional**

Kondisi perekonomian global saat ini memasuki tahap pemulihan atas dampak pandemi global virus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 mengalami *rebound* sebesar 5.5 persen setelah mencatat pertumbuhan negatif sebesar 4,1 persen pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 status pandemi wabah virus Covid-19 belum dinyatakan berakhir, namun para pelaku ekonomi diyakini mampu beradaptasi dengan pola kehidupan normal baru yang berlaku secara global.

Pada skala nasional, Indonesia dalam perekonomian dunia akan semakin diperhitungkan posisinya bersama dengan negara – negara berkembang lainnya menuju *emerging markets* dalam ekonomi global dengan keunggulan jumlah penduduk dan pasar domestik yang sangat dinamis. Kondisi perekonomian Indonesia dalam masa tahap pemulihan wabah virus Covid-19 sampai dengan triwulan III tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan 3,51 persen secara *year to year*. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi nasional pada tahun 2021 tampaknya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -2,07 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha sudah menunjukkan trend positif seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan beberapa sektor lapangan usaha yang masih mengalami trend negatif yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah memberikan prioritas utama Pembangunan Nasional tahun 2020 dan 2021 pada langkah – langkah mitigasi penanganan wabah Covid-19 beserta dampak distorsif wabah pandemi Covid-19 di berbagai sektor baik kesehatan, dan sosial dan ekonomi. Prioritas anggaran pembangunan menitikberatkan penanggulangan wabah Covid-19 pada sektor kesehatan terutama pada pembangunan sarana dan prasarana penanganan Covid-19 serta pengembangan riset terkait penanganan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan vaksinasi secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia yang telah mencapai sebesar 86, 14 persen untuk vaksinasi tahap I dan 58,88 persen untuk vaksinasi tahap II sampai bulan Januari 2022. Untuk sektor sosial dan ekonomi prioritas pembangunan dioptimalkan pada penanganan dampak ekonomi dengan perluasan bantuan langsung kepada masyarakat yang paling terdampak wabah Covid-19. Upaya lainnya adalah dengan melakukan

rekayasa sosial di berbagai bidang baik pendidikan, sektor industri, transportasi dan pariwisata dengan melakukan pembatasan-pembatasan fisik dan mengurangi intensitas interaksi antar manusia untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah terutama untuk mendorong perekonomian nasional antara lain melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan mulai tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2022. Kebijakan dari sisi fiskal juga dilakukan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan yang diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan juga memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2021 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2021 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, dukungan UMKM dan korporasi. Perubahan alokasi beberapa komponen PEN diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE), program padat karya dan program jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk mendukung pelaksanaan PEN di Jawa Tengah digunakan untuk jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Perekonomian dunia pada tahun 2022 dan 2023 masih akan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dimana negara – negara mulai mengurangi anggaran penanganan dampak wabah Covid-19. Proyeksi kondisi perekonomian global pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih moderat sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang mengalami rebound sebesar 5,5 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa negara melakukan pengurangan dukungan anggaran penanggulangan Covid-19. Selain itu adanya kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat secara global menyebabkan terganggunya rantai pasokan persediaan bahan baku industri secara global. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 akan tumbuh positif kisaran angka 3,2 persen.

Menurut Word Economic Outlook (IMF) perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi akan tumbuh sebesar 5,6 persen dan 6 persen secara berturut – turut. Respon positif perekonomian global menjadi salah satu modal bagi pemulihan ekonomi Nasional terutama pada peningkatan produksi komoditas ekspor serta peningkatan transaksi keuangan dan investasi luar

negeri. Selain itu, keberhasilan Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menjadi kunci utama pemulihan ekonomi dalam negeri, terutama melalui pemulihan aktivitas-aktivitas kunci perekonomian dalam sektor industri, transportasi, dan pariwisata terdampak cukup dalam akibat dampak pandemik Covid-19.

### 3.1.2 Kondisi Ekonomi Jawa Tengah

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 2,44 persen dihitung secara *c to c* atau sebesar 2,56 persen jika dihitung secara *y to y*. tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung kearah positif menjadi signal pemulihan ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan pada jalur yang semestinya. Tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,70 persen, hal ini menjadi pertanda bahwa stabilitas harga – harga umum di wilayah Jawa Tengah masih cenderung stabil. Pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah masih akan dipengaruhi oleh trend perekonomian pada skala nasional dan global.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021, penyumbang pertumbuhan Jawa Tengah disumbang oleh Industri Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,62 persen, diikuti Konstruksi 12,91 persen, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 6,52 persen. Tumbuhnya tiga sektor basis ini diharapkan mampu memberikan efek berganda untuk mendorong rantai pasokan industri di Jawa Tengah. Sedangkan pertanian masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -6,12 persen diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,78 persen.

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2022, sektor perekonomian secara umum masih akan menghadapi tekanan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hasil simulasi BI, proyeksi PDRB Jateng hanya akan tumbuh di bawah 5 persen ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya *refocusing* pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah tahun 2022 meskipun terjadi kontraksi pada tahun 2020, namun diprediksikan masih terkendali pada kisaran  $3,0 \pm 1\%$  melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam rancangan RKPD Jawa Tengah Tahun 2022 menetapkan target pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,93 sampai dengan 5,2 persen pada tahun anggaran 2022 dengan target pendapatan per kapita penduduk Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah. Selain itu, untuk target persentase kemiskinan ditetapkan sebesar 11,42–10,27 persen sedangkan untuk target persentase angka pengangguran ditetapkan sebesar 5,96 – 5,88 persen.

Melihat kondisi global dan kebijakan nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dilaksanakan untuk

mendukung kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM”, dengan prioritas pada peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,51 – 9,29 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,00 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 43,32 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 3,0±1 di tahun 2023.

Tabel 3.1  
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 -5,60
2	PDRB ADHK	Milyar Rp	1.118,21
3	PDRB per kapita	Juta Rp	43,32
4	Inflasi	%	3,0 ± 1
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	59.932,02
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,36 - 4,80
7	Angka Kemiskinan	%	9,51 – 9,29
8	Rasio Gini	Angka	0,34

Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

### 3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -1,98 persen. Hal ini disebabkan karena sektor industri pengolahan terutama industri hasil tembakau yang mengalami penurunan pertumbuhan produksi bahkan sejak sebelum terjadinya pandemi Covid19. Sebagai sektor yang menyumbang 70 persen dari total PDRB daerah, penurunan pertumbuhan sektor industri hasil tembakau menjadi faktor utama atas penurunan total PDRB Kabupaten Kudus. Meski secara total PRDB Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami penurunan, namun pertumbuhan ekonomi pada sektor – sektor selain sektor industri pengolahan mengalami pemulihan pertumbuhan yang positif.

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupten Kudus masih akan bertumpu pada sektor industri pengolahan terutama pada Industri pengolahan tembakau. Pemulihan kondisi perekonomian Nasional secara umum pasca Covid19 akan memberikan stimulan yang positif dalam mendorong sektor perdagangan, konstruksi dan sektor akomodasi dan restoran dan sektor lainnya untuk menggerakkan aktivitas ekonominya kembali. Pada sektor UKM, telah sejumlah pelaku usaha sudah memulai kembali aktivitas ekonominya sehingga omzet produksinya dapat kembali naik sejak terjadinya wabah Covid-19.

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia termasuk perekonomian Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian global ke depan, diperlukan penguatan pada tiga hal yaitu pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi. Perkembangan dan proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2  
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi  
Kabupaten Kudus Tahun 2017-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		REALISASI					PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020*	2021**	2022	2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,21	3,24	3,10	-3,11	-1,98	2,5-3,3	2,5-3,16
2.	IPM	73,84	74,58	74,94	75	75,16	75,5 -76,00	75,97 -76,48
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,33	3,86	5,53	3,77	3,05-3,50	2,95-3,40
4.	Penduduk Miskin (%)	7,65	7,59	6,98	7,31	7,60	6,01–6,50	5,99–6,35

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2022

Secara umum, kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus untuk tahun 2022 dan 2023 masih akan terpengaruh oleh dampak wabah Covid-19. Meskipun beberapa sektor usaha sudah mulai tampak menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa kendala terkait dengan terhambatnya rantai pasokan industri pada sektor basis perindustrian dan pertanian perlu mendapat perhatian bersama. Selain itu, dari sisi pengeluaran, tingkat ekspor dan tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung fluktuatif mengikuti perkembangan status pandemi Covid-19 pada skala nasional dan global. Pada tahun 2022, kondisi perekonomian baik skala nasional maupun daerah diharapkan kembali pulih seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19, sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh di atas 3,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus termasuk unik, selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitar dan cenderung mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2023 diproyeksi akan naik menuju tingkat yang diharapkan dengan laju pertumbuhan di atas 3 persen, jika ada stimulan positif dari pasar ekspor industri tembakau dan produk ekspor lainnya yang diproduksi di Kabupaten Kudus, dengan disertai tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 75,16 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten

Kudus telah meningkat dari tahun 2020 sebesar 75,00. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,50–76,00, meskipun saat ini sedang menghadapi tantangan wabah Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya wabah Covid-19, kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola pendidikan selama adanya wabah Covid-19 juga terjadi, yaitu dengan pelaksanaan program belajar di rumah untuk mengurangi resiko penyebaran virus pada anak – anak. Untuk perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang. Untuk tahun 2023, target IPM Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar 76,00-76,48 dengan peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,77 persen setelah pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,53 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi atas dampak Covid-19 serta adanya adaptasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan kondisi tata kehidupan normal baru. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 diperkirakan akan turun sekitar 0,2 – 0,72 persen dari TPT tahun 2021 sebesar 3,77 persen menjadi 3,05 – 3,5 persen. Seperti halnya kondisi perekonomian daerah yang diprediksi sudah mulai pulih pada tahun 2022, maka serapan tenaga kerja pada tahun 2023 akan meningkat sehingga TPT Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali menurun menjadi 2,95 – 3,40 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 7,73% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2022 kembali meningkat dari 7,31 pada tahun 2020 menjadi 7,60 persen atau naik sebesar 0,29. Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan upaya pemulihan perekonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih belum menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktifitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan

pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2022, diharapkan wabah Covid-19 sudah mengalami tahap pemulihan dengan diikuti membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,21 – 6,70 persen. Sedangkan target penurunan kemiskinan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,99 – 6,35 persen.

#### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2023

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah sangat berpengaruh pada potensi kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus. Sebagaimana diproyeksikan perekonomian Jawa Tengah, proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus akan tercapai dengan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sektor industri hasil tembakau mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif.
2. Stabilitas lingkungan global/nasional, terutama wabah Covid-19 akan memasuki tahap pemulihan diseluruh kawasan.
3. Kembali dibukanya akses transportasi fisik baik orang maupun barang antar negara, serta pulihnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan perdagangan.
4. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-undangan.
5. Realisasi investasi dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan birokrasi.
6. Kebijakan rencana tata ruang yang memberikan peluang ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
7. Nilai ekspor komoditi daerah diperkirakan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk ekspor.
8. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.
9. Pelaksanaan Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2021 menjadi titik tolak pertumbuhan ekonomi 2022. Meskipun pada tahun 2021 diprediksi masih akan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi terutama untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata, perdagangan serta memulihkan kinerja UMKM dan industri yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan kondisi normal baru yang mengedepankan perilaku hidup sehat dan lingkungan sosial yang lebih adaptif terhadap isu-isu kesehatan masyarakat, diharapkan pada tahun 2022 bisa menjadikan momen dunia usaha untuk bangkit kembali dengan tingkat produksi yang lebih tinggi disertai kualitas yang lebih baik.

Target indikator utama pembangunan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, IPM, dan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2023 akan ditunjang dengan beberapa program prioritas Pemerintah yang terus mendukung perkuatan perekonomian masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,5–3,16 persen. Target penurunan kemiskinan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,99 – 6,35 persen, dengan asumsi bahwa pada tahun 2022, seiring dengan telah berakhirnya wabah Covid-19 serta membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,21 persen. Untuk peningkatan IPM Kabupaten Kudus, target yang ditetapkan untuk capaian pembangunan manusia pada tahun 2023 adalah 76,00 - 76,48.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah perlu mempertimbangkan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2023. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha;
2. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat, dan prioritas;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien dan akuntabel;
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Informasi tentang keuangan daerah dapat dilihat dari neraca daerah. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2019-2021

URAIAN	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Kas Daerah	160.325.914.110,00	221.287.401.134,00	381.480.222.149,00	55,21
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.380,00	2.562.378,00	750.000,00	13.573,37
Kas di Bendahara Penerimaan	81.045.774,00	13.729.352.689,00	25.536.192.340,00	8.463,12
Kas di BLUD	26.989.804.465,00	48.956.767.944,00	138.588.835.538,00	132,24
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas BOS	3.547.343.499,00	3.826.611.433,00	959.918.898,00	(33,52)
Kas Lainnya	0,00	511.979.383,00	3.492.500,00	0,00
Piutang Pajak	23.516.949.109,00	27.868.142.461,00	30.754.457.789,00	14,43
Penyisihan Piutang Pajak	(13.831.639.910,15)	(15.077.210.877,15)	(16.309.691.535,45)	8,59
Piutang Pajak Netto	9.685.309.198,85	12.790.931.583,85	14.444.766.253,55	22,50
Piutang Retribusi	5.950.540.314,03	4.664.339.713,55	9.877.015.467,45	45,07
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.794.835.180,49)	(1.788.663.228,75)	(3.055.420.224,76)	35,24
Piutang Retribusi Netto	4.155.705.133,54	2.875.676.484,80	6.821.595.242,69	53,21
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	23.224.183.199,93	15.662.811.593,00	13.844.351.627,00	(22,08)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(1.147.316.104,35)	(1.324.518.197,00)	(1.669.058.343,50)	20,73
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	22.076.867.095,58	14.338.293.396,00	12.175.293.283,50	(25,07)
Piutang Pendapatan Transfer	16.072.712.661,00	52.261.295.721,00	2.152.434.208,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	29.950.000,00	1.338.878.325,00	1.074.289.846,00	2.175,31
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(1.075.289.846,00)	(1.061.689.846,00)	
Piutang Pendapatan Lainnya Netto		263.588.479,00	12.600.000,00	
Belanja Dibayar Dimuka	1.234.126.632,11	520.489.239,96	607.992.056,67	(20,51)
Persediaan	29.692.215.796,99	40.484.081.702,26	58.233.474.601,20	40,09
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>273.891.003.746,07</b>	<b>411.849.031.567,87</b>	<b>641.017.567.070,61</b>	<b>53,01</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
Investasi Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00	(2,99)

URAIAN	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>356.803.711,00</b>	<b>335.486.211,00</b>	<b>335.486.211,00</b>	<b>(2,99)</b>
Investasi Permanen				0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.630.747.797,28	2,18
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>163.581.193.298,58</b>	<b>161.904.980.081,39</b>	<b>170.630.747.797,28</b>	<b>2,18</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>163.937.997.009,58</b>	<b>162.240.466.292,39</b>	<b>170.966.234.008,28</b>	<b>2,17</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	1.026.671.215.895,10	1.105.657.881.938,10	1.124.039.405.940,50	4,68
Peralatan dan Mesin	652.736.781.463,46	726.510.749.576,06	809.749.536.999,46	11,38
Gedung dan Bangunan	1.745.727.118.340,28	1.789.921.689.975,28	1.832.973.261.380,28	2,47
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.125.390.103.798,76	2.214.430.511.777,76	2.221.257.241.549,76	2,25
Aset Tetap Lainnya	67.603.347.742,64	75.170.154.604,64	69.604.210.544,00	1,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.196.703.502,00	5.918.065.436,00	11.033.076.962,00	34,33
Akumulasi Penyusutan	(1.670.701.005.813,46)	(1.867.192.035.491,06)	(2.051.909.377.321,46)	10,83
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.954.624.264.928,78</b>	<b>4.050.417.017.816,78</b>	<b>4.016.747.356.054,54</b>	<b>0,80</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.829.648.235,00	8.959.250.435,00	8.959.250.435,00	(8,64)
Aset Tidak Berwujud	7.959.948.549,00	8.642.237.049,00	8.857.538.049,00	5,53
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.265.405.785,40)	(7.168.341.607,20)	(7.901.125.029,00)	12,32
Aset Tak Berwujud Netto	1.694.542.763,60	1.473.895.441,80	956.413.020,00	(24,07)
Aset Lain-lain	144.180.665.434,59	74.229.921.682,00	38.651.051.422,00	(48,22)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(80.634.542.073,00)	(38.680.981.821,00)	(26.299.164.024,00)	(42,02)
Aset Lain-lain Netto	63.546.123.361,59	35.548.939.861,00	12.351.887.398,00	(54,66)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>76.078.014.360,19</b>	<b>45.989.785.737,80</b>	<b>22.275.250.853,00</b>	<b>(45,56)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.468.531.280.044,62</b>	<b>4.670.496.301.414,84</b>	<b>4.851.006.407.986,43</b>	<b>4,19</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	276.081.737,00	238.956.891,00	221.632.861,00	(10,35)
Bagian lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.582.436.022,01	1.489.896.996,88	1.336.750.788,47	(8,06)
Utang Belanja	43.835.575.525,07	37.797.518.789,00	31.922.414.727,00	(14,66)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>45.694.093.284,08</b>	<b>39.526.372.676,88</b>	<b>33.480.798.376,47</b>	<b>(14,40)</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>45.694.093.284,08</b>	<b>39.526.372.676,88</b>	<b>33.480.798.376,47</b>	<b>(14,40)</b>
<b>EKUITAS</b>				
EKUITAS	4.422.837.186.760,54	4.630.969.928.737,96	4.817.525.609.609,96	4,37
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>4.468.531.280.044,62</b>	<b>4.670.496.301.414,84</b>	<b>4.851.006.407.986,43</b>	<b>4,19</b>

Keterangan : Neraca Tahun 2021 adalah neraca Unaudit  
Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Utang.

1. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah kabupaten Kudus Tahun 2019 sebesar 5,99, Tahun 2020 sebesar 10,42 dan tahun 2021 sebesar 19,15. Nilai ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Kudus mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.

- b. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas Pemerintah Kabupaten Kudus pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai berturut-turut sebesar 4,18, 7,29 dan 16,32. Rasio Kas yang rendah pada tahun 2019 disebabkan karena ada kewajiban pembayaran honor tenaga kesehatan yang belum terverifikasi pada tahun 2018 dan baru dibayarkan di bulan Januari 2019. Nilai rasio kas sudah baik tetapi Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap menjaga agar kas yang tersedia dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek.

- c. Rasio cepat (*Quick Ratio*)

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rasio cepat pemerintah kabupaten Kudus pada Tahun 2019 sebesar 5,34, tahun 2020 sebesar 9,40 dan tahun 2021 sebesar 17,41. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan nilai yang baik. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

- d. Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset (*Working Capital to Total Assets*)

Hasil perhitungan rasio modal kerja terhadap total aset tahun 2019 juga sebesar 0,05, tahun 2020 sebesar 0,08 dan tahun 2021 sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan modal kerja Pemerintah Kabupaten Kudus cukup baik karena semakin tinggi nilai rasio modal kerja, menggambarkan kemampuan Kabupaten Kudus dalam mendanai kegiatan operasional pelayanan publik pemerintah daerah.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil perhitungan rasio solvabilitas pada Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 97,79, tahun 2020 sebesar 118,16 dan tahun 2021 sebesar 144,89. Dari nilai-nilai rasio solvabilitas dapat disimpulkan bahwa



Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang meskipun penurunannya harus diwaspadai.

3. Rasio Utang (*Leverage Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio Utang yang digunakan dalam analisis ini yaitu:
  - a. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)  
Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 rasio utang terhadap ekuitas adalah sebesar 0,01. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Kudus tidak memiliki ketergantungan terhadap pendanaan pihak ketiga.
  - b. Rasio Utang terhadap Aset Modal (*Total Debt to Capital Assets Ratio*)  
Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rasio utang terhadap aset modal sebesar 0,01. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai kemampuan cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mendukung penguatan daya saing ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Strategi kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 merupakan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk membangun basis pendapatan yang kuat menuju kemandirian fiskal daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 disusun selaras dengan RPJMD untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Namun demikian, pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadi beberapa perbedaan dikarenakan tidak semua asumsi yang digunakan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 dapat terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, analisis proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kebijakan di bidang keuangan negara, asumsi indikator makro ekonomi, dan kebijakan

intensifikasi dan ekstensifikasi. Data historis indikator ekonomi makro dan data realisasi pendapatan daerah secara bersama akan membentuk angka pengganda untuk masing-masing obyek pendapatan. Angka pengganda tersebut dikombinasikan dengan data potensi digunakan dalam penyusunan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah. Berdasarkan proyeksi tersebut, dan dengan memperhatikan kebijakan keuangan negara dan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, akan disusun target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 untuk masing-masing jenis pendapatan daerah.

Pertama, sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU 1 Tahun 2022) sebagai revisi atas UU 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan revisi atas UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa akun pendapatan daerah akan mengalami perubahan. Begitu juga terkait dengan formula alokasi yang mengalami beberapa penyesuaian sesuai dengan UU yang baru. Kedua, asumsi indikator makro ekonomi tahun 2023 sampai saat ini belum tersedia. Oleh karena itu, digunakan asumsi yang ditetapkan untuk tahun sebelumnya. Ketiga, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membangun kolaborasi dengan institusi lain terkait.

Rerata pertumbuhan pendapatan daerah periode 2019-2021 sebagaimana dalam Tabel 3.3 menunjukkan angka sebesar 1,33%. Pertumbuhan positif pendapatan daerah ini disumbang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,82%. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami perlambatan sebesar -2,72% dan -13,58%. Pertumbuhan PAD pada dasarnya terjadi karena beberapa hal, yaitu penyesuaian nilai jual obyek pajak, penurunan persentase kompensasi pajak daerah, dan upaya pemantauan transaksi perpajakan daerah melalui pemasangan perangkat pemantau elektronik pada sebagian obyek pajak hotel, restoran, dan hiburan. Namun, kenaikan tertinggi dialami akun Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 31,30%. Kenaikan ini bersifat temporer karena bersumber dari penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 yang pada pertengahan tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yang cukup banyak di Kabupaten Kudus. Meskipun PAD bertumbuh positif, kenaikan tersebut tidak bisa menutupi penurunan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer. Hal ini karena proporsi Pendapatan Transfer yang dominan dalam struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini juga menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah karena tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer antar pemerintahan. Di sisi lain, pertumbuhan negatif realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah terjadinya akibat kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 melalui pemotongan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kondisi tersebut mencerminkan risiko fiskal yang terjadi akibat ketidakpastian pendapatan transfer yang bersumber dari Pusat. Dalam hal penerimaan Pusat mengalami kenaikan, penerimaan daerah yang bersumber dari DBH akan bergerak searah dengan hal tersebut pada tahun berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Namun dalam hal penerimaan Pusat mengalami penurunan, penerimaan daerah akan terimbas pada tahun itu juga dengan beberapa mekanisme seperti pemotongan dan *refocusing*. Risiko fiskal yang lain juga dialami APBD pada jenis PAD dalam hal variabel ekonomi makro daerah mengalami kontraksi. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 merupakan bukti nyata pengaruh variabel ekonomi makro terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi risiko sebagai *countercyclical* melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi disiapkan agar dampak buruk bisa diminimalkan sehingga target pendapatan dapat dicapai.

Tabel 3.4  
Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

URAIAN	REALISASI			
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	r (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.090.430.364.413,00</b>	<b>2.016.176.986.239,00</b>	<b>2.141.479.591.237,97</b>	<b>1,33%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>343.824.122.868,00</b>	<b>383.892.971.961,00</b>	<b>506.702.739.014,97</b>	<b>21,82%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800,00	126.240.575.956,00	148.813.882.259,00	9,13%
Hasil Retribusi Daerah	20.058.448.046,00	18.494.546.780,00	25.752.831.044,97	15,72%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.277.166.654,00	8.704.409.157,00	8.371.225.490,00	-5,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.725.920.368,00	230.453.440.068,00	323.764.800.221,00	31,30%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.676.579.317.018,00</b>	<b>1.562.392.880.256,00</b>	<b>1.583.730.741.223,00</b>	<b>-2,72%</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.298.060.004.624,00</b>	<b>1.183.590.147.772,00</b>	<b>1.228.457.921.971,00</b>	<b>-2,51%</b>
Dana Bagi Hasil	209.525.165.300,00	216.676.209.702,00	254.976.092.494,00	10,54%
Dana Alokasi Umum (DAU)	851.036.584.000,00	757.097.370.000,00	747.504.503.000,00	-6,15%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	237.498.255.324,00	209.816.568.070,00	225.977.326.477,00	-1,98%
Dana Insentif Daerah	56.420.303.000,00	89.301.426.000,00	24.112.366.000,00	-7,36%
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	136.723.311.800,00	147.823.461.000,00	151.037.149.800,00	5,15%
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>185.375.697.594,00</b>	<b>141.677.845.484,00</b>	<b>180.123.303.452,00</b>	<b>1,78%</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.196.848.594,00	133.004.610.484,00	175.804.285.452,00	9,22%
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.178.849.000,00	8.673.235.000,00	4.319.018.000,00	-61,19%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>70.026.924.527,00</b>	<b>69.891.134.022,00</b>	<b>51.046.111.000,00</b>	<b>-13,58%</b>
Pendapatan Hibah	70.026.924.527,00	69.891.134.022,00	51.046.111.000,00	-13,58%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Selanjutnya, penyusunan RKPD dilakukan secara inklusif dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar pendapatan daerah dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini ditujukan agar penyusunan RKPD memenuhi asas berkeadilan yang mempertimbangkan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Proses ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.5  
Perbandingan Pengelola PAD Berdasarkan Jenis Kelamin TA 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN	
		L	P
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	1	0
2	Dinas Kesehatan	2	18
3	RSUD Dr. Loekmonohadi	8	13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	2
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	1	2
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0
7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3	2
8	Dinas Perhubungan	50	2
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	2
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	3
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30	17
12	Dinas Pertanian dan Pangan	6	1
13	Dinas Perdagangan	39	3
14	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	35	14
JUMLAH		191	79
		70,7%	25,3%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Pencapaian target PAD selama ini merupakan kontribusi semua kelompok masyarakat tanpa membedakan gender. Dari sisi pengelola PAD, perbandingan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan target pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.4 Pegawai laki-laki yang mengelola PAD adalah sebesar 70,7% hampir 2 (dua) kali lipat dibanding pegawai perempuan yang sebesar 25,3%. Dari sisi obyek PAD, pemungutan PAD dilakukan tanpa membedakan gender. Namun demikian, pemungutan PAD dilakukan dengan memberikan perhatian khusus untuk kelompok-kelompok yang secara konstruksi sosial tidak beruntung. Pemenuhan target PAD dilakukan tanpa membebani kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya antara lain melalui mekanisme pemberian pengurangan ketetapan, keringanan, penghapusan denda/sanksi administratif, dan fasilitas perpajakan lainnya sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, proyeksi pendapatan daerah TA 2023 diperkirakan sebesar Rp1.729.161.588.000. Target ini mengalami kenaikan sebesar Rp80.345.517.000,00 (4,87%) dibanding

RKPD Tahun 2022 yang sebesar Rp1.648.816.071.000. Kenaikan tersebut disumbang dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Proyeksi pendapatan daerah TA 2023 disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Perbandingan Pendapatan Daerah Dalam  
RKPD 2022 dan Proyeksi 2023

URAIAN	RKPD 2022	PROYEKSI 2023	Selisih
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.648.816.071.000</b>	<b>1.729.161.588.000</b>	<b>4,87%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>376.107.160.000</b>	<b>410.998.331.000</b>	<b>9,28%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	139.920.956.000	162.510.725.000	16,14%
Hasil Retribusi Daerah	23.268.805.000	26.196.000.000	12,58%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.477.515.000	8.028.327.000	-5,30%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.439.884.000	214.263.279.000	4,81%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.272.708.911.000</b>	<b>1.318.163.257.000</b>	<b>3,57%</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.132.196.098.000</b>	<b>1.144.806.286.000</b>	<b>1,11%</b>
Dana Bagi Hasil	233.522.007.000	246.132.195.000	5,40%
Dana Alokasi Umum	747.504.503.000	747.504.503.000	0,00%
Dana Alokasi Khusus	0	-	0,00%
Dana Insentif Daerah	0	-	0,00%
Dana Desa	151.169.588.000	151.169.588.000	0,00%
<b>Pendapatan Transfer Antar-Daerah</b>	<b>140.512.813.000</b>	<b>173.356.971.000</b>	<b>23,37%</b>
Pendapatan Bagi Hasil	140.512.813.000	173.356.971.000	23,37%
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0,00%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pendapatan Hibah	0	0	0,00%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tabel 3.6 menunjukkan hampir semua jenis PAD mengalami kenaikan kecuali pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang mengalami penurunan sebesar 5,30%. Kenaikan pada akun Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan bersumber dari penyesuaian nilai jual obyek pajak, pengurangan kompensasi pajak, dan penerapan pemantauan pelaporan pajak secara elektronik (*tapping box*). Selain itu, kondisi ekonomi yang mulai bertumbuh di tahun 2022 dan diperkirakan sudah pulih pada tahun 2023 akan menyumbang pada kenaikan pajak daerah khususnya pajak-pajak yang dipengaruhi oleh mobilitas sosial masyarakat. Hal yang sama berlaku pada kenaikan Hasil Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Asumsi pemulihan ekonomi yang berjalan lancar juga berlaku untuk kenaikan pada akun Pendapatan Transfer, khususnya DBH dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi. DAU diasumsikan tetap karena adanya perubahan formula pengalokasian yang diatur dalam UU 1/2022 dan kebijakan *hold harmless* dalam alokasi TKD beberapa tahun ke depan. Hal yang sama diasumsikan berlaku untuk Dana Desa. Adapun DAK, meskipun berdasarkan usulan daerah, namun riwayat pendapatan DAK selama ini relatif tetap. Hal ini juga dipengaruhi tidak adanya lokasi Prioritas Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. Adapun DID tidak dialokasikan karena karakteristik DID yang dinilai berdasarkan

kinerja Pemda tahun sebelumnya dan kinerja relatif Pemda-Pemda seluruh Indonesia.

Secara umum, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komponen pendapatan. Untuk kebijakan pada akun Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan. Kedua, optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pusat dan instansi vertikal. Ketiga, optimalisasi juga dilakukan dengan menjaga kelancaran arus data dan komunikasi antara pusat dan daerah.

Adapun kebijakan pada akun PAD dilaksanakan secara bijaksana melalui beberapa langkah. Pertama, kebijakan ini diwujudkan dengan perluasan cakupan penegakan pemungutan pajak daerah untuk memenuhi harapan atas rasa keadilan wajib pajak. Kedua, penetapan harga yang wajar terhadap obyek pajak. Ketiga, pemberian insentif dan apresiasi kepada wajib pajak. Keempat, penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah. Kelima, penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan penyediaan layanan publik secara berkesinambungan kepada masyarakat. Secara rinci, kebijakan optimalisasi PAD dilakukan sebagai berikut :

1. Menyusun dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU 1 Tahun 2022;
2. Menyusun kajian potensi secara bertahap untuk masing-masing jenis pendapatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan;
3. Melakukan pendataan dalam rangka pemutakhiran dan penyesuaian nilai obyek pajak berdasarkan harga yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi wajib pajak dan/atau wajib pungut guna meningkatkan kepatuhan perpajakan;
5. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;
6. Melaksanakan pengelolaan piutang pajak yang efektif;
7. Meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah;
8. Memperluas pemasangan alat pemantau transaksi elektronik yang dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas;
9. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun dengan sistem lain terkait;

10. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai;
11. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Pada awal pelaksanaan RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2018 total jumlah belanja daerah relatif sama antara target RPJMD dengan penetapan belanja pada APBD Perubahan. Akan tetapi dalam kurun waktu tahun-tahun berikutnya anggaran belanja tersebut terus mengalami penurunan. Penurunan ini berada diluar kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagai respon dari pelaksanaan kebijakan pemerintah atasan baik pusat maupun provinsi. Salah satu diantara kebijakan tersebut terdapat pada belanja pegawai, dimana belanja pegawai dalam RPJMD telah dialokasikan rencana kenaikan gaji PNS, sementara itu kebijakan pemerintah pusat tidak ada kenaikan gaji untuk PNS. Selain itu, beberapa penyalarsan belanja dalam RKPD juga perlu dilakukan karena terkait sumber dana dari pemerintah atasan maupun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah telah merubah pendekatan anggaran dengan prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme* yaitu



pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, prioritas daerah dan juga prioritas desa, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan prioritas pembangunan sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi yang ada, artinya hanya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas dan mendapatkan alokasi anggaran.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik *output* maupun *outcome*. Arah kebijakan belanja daerah disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah yang telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sesuai dengan program prioritas daerah, optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas serta pengalokasian kebutuhan belanja secara rasional, terukur dan terarah. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari visi misi dan program prioritas daerah.
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Kudus untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
3. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilakukan;
4. Sinkronisasi pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.
5. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah, belanja kesehatan sekurang-kurangnya 10 % dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan, belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 25 % dari dana transfer yang bersifat umum. Sedangkan *mandatory* untuk pelatihan ASN (sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah) dan anggaran pengawasan (APIP) sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana, baik alam maupun non alam.
7. Mengakomodir usulan pembangunan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui aplikasi e-pokir dengan tetap memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan daerah, kewenangan, prioritas pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemenuhan belanja untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Arah kebijakan belanja daerah diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, selektif, akuntabel, transparan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang;
7. dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Struktur belanja daerah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

## 2. Belanja Modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- b. Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedang yang bersifat khusus peruntukan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Sebagai acuan dalam analisa perhitungan kebutuhan keuangan daerah perlu memperhatikan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Perkembangan realisasi belanja daerah selama tahun 2019-2021 terlihat dalam tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7  
Realisasi Belanja  
Tahun 2019 – 2021

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI			Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2019	2020	2021	
2	<b>BELANJA</b>	2.061.664.156.540	1.908.431.842.103	1.869.925.560.108	(4,73)
2 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.526.213.366.275	1.388.088.154.746	1.444.819.668.467	(2,48)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	849.231.714.403	917.506.768.346	874.416.702.525	1,67
2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.043.186.872	410.909.615.400	521.660.876.485	6,10
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	180.493.535.000	49.292.065.000	46.073.389.457	(39,61)
2 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	14.444.930.000	10.379.706.000	2.668.700.000	(51,22)
2 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	278.210.578.665	221.806.162.432	148.360.651.681	(26,69)
2 . 2 . 1	Belanja Tanah	800.000.000	4.870.342.319	-	204,40
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	62.657.222.977	63.911.093.540	82.854.703.797	15,82
2 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	62.694.711.722	55.563.498.887	45.598.768.763	(14,65)
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.804.633.364	90.179.971.904	16.996.052.301	(59,44)
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.254.010.602	7.281.255.782	2.911.126.820	(29,82)
2 . 3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	28.135.310.625	2.234.715.700	3,97
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	-	28.135.310.625	2.234.715.700	3,97

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI			Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2019	2020	2021	
2 . 4	<b>TRANSFER</b>	257.240.211.600	270.402.214.300	274.510.524.260	3,32
2 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	14.490.805.900	12.944.477.850	16.257.104.000	7,46
2 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	242.749.405.700	257.457.736.450	258.253.420.260	3,18

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Pada tabel 3.7 di atas rata-rata penurunan realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 4,73%. Penurunan cukup tajam terjadi pada belanja hibah 39,61%, belanja bantuan sosial 51,22% dan belanja modal 26,69%. Kondisi ini diakibatkan karena sebagian besar belanja dialihkan ke belanja barang dan jasa dalam rangka penanganan *pandemi Covid-19*. Di samping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak maksimal dalam pelaksanaannya karena kebijakan PPKM dalam rangka memutus rantai penularan *Covid-19*.

Dalam melakukan analisa proyeksi belanja daerah perlu juga memperhitungkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari penerimaan daerah dikurangi belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Sedangkan penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan ditambah dengan SiLPA.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan antara lain, untuk pembayaran gaji dan tunjangan, telepon, air, listrik dan internet. Sedangkan belanja wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai perhitungan proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib dilakukan dengan mendasari realisasi pertumbuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat tahun-tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat selama tiga tahun sebelumnya terdapat pertumbuhan yang sangat tajam yaitu pada belanja tak terduga. Hal ini diakibatkan karena belanja tersebut digunakan untuk penanganan *Pandemi Covid-19*, terutama di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8  
 Realisasi Belanja Mengikat Wajib  
 Tahun 2019 s/d 2021

No	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan realisasi
		2019	2020	2021	
A	Belanja Mengikat	725.033.558.033	714.783.692.452	723.834.864.772	(0,1)
1	Belanja Pegawai ASN	652.126.517.972	632.583.769.841	636.211.954.856	(1,2)
2	Belanja Honor PHD	3.728.361.843	4.693.134.587	4.849.754.000	14,6
3	Belanja Honor Tenaga Kontrak	27.474.259.097	36.220.772.683	40.411.708.197	21,7
4	Belanja Telepon	484.111.918	431.009.806	376.937.634	(11,8)
5	Belanja Air	664.764.674	587.677.706	530.050.352	(10,7)
6	Belanja Listrik	38.753.592.029	38.254.690.616	37.855.547.400	(1,2)
7	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.005.199.000	1.196.418.213	2.657.385.000	70,6
8	Belanja Sewa Tanah	796.751.500	816.219.000	941.527.333	8,9
B	Belanja Wajib	657.765.735.128	716.782.466.688	751.518.658.502	6,9
1	Belanja Urusan Pendidikan	113.370.754.096	152.673.183.686	127.117.256.215	9,0
2	Belanja Urusan Kesehatan	301.450.816.432	288.001.758.077	369.864.584.477	12,0
3	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	14.490.805.900	12.944.477.850	16.257.104.000	7,5
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	227.560.916.200	233.896.955.200	234.843.420.260	1,6
5	Belanja Hibah	892.442.500	1.130.781.250	1.201.577.850	16,5
6	Belanja Tak Terduga	-	28.135.310.625	2.234.715.700	4
Jumlah		1.382.799.293.161	1.431.566.159.140	1.475.353.523.274	3,3

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Dari tabel 3.8 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit dalam kurun waktu tiga tahun terakhir meningkat cukup tinggi sebesar 70,6%. Sementara di sisi lain, untuk belanja telepon mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan realisasi tertinggi, yaitu sebesar 11,8%. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja mengikat wajib tiga tahun terakhir dan dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib tahun 2023 tergambar dalam tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9  
Proyeksi Belanja Mengikat dan Wajib  
Tahun 2023

No	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Persentase Pertumbuhan
A	Belanja Mengikat	781.635.486.358	717.460.363.526	-8,21
1	Belanja Pegawai ASN	684.501.774.309	616.810.031.000	-9,89
2	Belanja Honor PHD	4.849.754.000	4.315.767.750	-11,01
3	Belanja Honor Tenaga Kontrak	48.110.400.000	48.845.116.000	1,53
4	Belanja Telepon	383.567.100	564.251.100	47,11
5	Belanja Air	709.537.531	807.648.475	13,83
6	Belanja Listrik	37.910.313.618	39.420.407.501	3,98
7	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/ Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.700.129.800	5.282.072.700	42,75
8	Belanja Sewa Tanah	1.470.010.000	1.415.069.000	-3,74
B	Belanja Wajib	746.638.130.662	614.881.728.311	-17,65
1	Belanja Urusan Pendidikan	233.050.445.917	46.419.727.043	-80,08
2	Belanja Urusan Kesehatan	254.087.221.665	275.515.909.268	8,43
3	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	17.140.477.000	18.870.673.000	10,09
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	228.672.393.000	259.819.384.000	13,62
5	Belanja Hibah	2.356.035.000	10.256.035.000	335,31
6	Belanja Tak Terduga	11.331.558.080	4.000.000.000	-64,70
Jumlah		1.528.273.617.020	1.332.342.091.837	-12,82

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Secara keseluruhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib mengalami penurunan sebesar 12,82%. Turunnya belanja ini dikarenakan belum mengakomodir kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi. Untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 335,31%. Kenaikan ini digunakan untuk belanja pelaksanaan pemilu yang pentahapannya sudah dimulai pada tahun 2023. Sementara belanja yang lain menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing OPD.

Sedangkan belanja pada tahun 2023 diproyeksikan dalam tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10  
Proyeksi Belanja Daerah  
Tahun 2023

No	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	% Pertumbuhan
1	Belanja Operasi	1.599.828.920.350	1.456.802.022.564	-8,94
2	Belanja Modal	264.636.722.153	128.440.524.366	-51,47
3	Belanja Tak Terduga	11.331.558.080	4.000.000.000	-64,70
4	Belanja Transfer	262.980.395.000	278.690.057.000	5,97
Jumlah Belanja Daerah		2.138.777.595.583	1.867.932.603.930	-12,66

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Belanja daerah diproyeksikan turun sebesar 12,66%, dengan perincian untuk belanja operasi turun sebesar 8,94%, belanja modal turun sebesar 51,47%. belanja tak terduga turun 64,7% dan belanja transfer naik sebesar 5,97%. Turunnya proyeksi belanja di tahun 2023 antara lain disebabkan karena belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus belum teralokasikan.

Di dalam tabel 3.10 pada belanja operasi dan belanja modal terdapat belanja yang bersifat wajib dan mengikat yaitu:

- a. Belanja pegawai telah memperhitungkan rencana kenaikan gaji sebesar 5%. *accress* gaji 2,5% serta rencana pengadaan ASN sebanyak 500 orang. Untuk proyeksi tahun 2023 belanja pegawai belum mengalokasikan tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
- b. Belanja tenaga PHD dan tenaga kontrak.
- c. Belanja rutin seperti telepon, air, listrik, internet, dan sewa tanah untuk perkantoran.
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pertumbuhannya menyesuaikan dengan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Alokasi belanja hibah terbatas untuk memenuhi kebutuhan tahapan pemilihan serentak dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- f. Proyeksi belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan tahun 2023 belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus.
- g. Belanja tak terduga di tahun 2023 hanya diperuntukkan untuk bencana alam dan santunan kematian.

Terkait perencanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam RKPD Tahun 2023 bersifat indikatif, berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan memperhitungkan rata-rata alokasi pagu dalam 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya serta memperhatikan hasil pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (RKP DBHCHT) tahun sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021, Bupati menyusun RKP DBHCHT Tahun 2023 yang dibahas bersama dengan kementerian negara/lembaga terkait paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah. baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk



menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sesuai dengan Pasal 305 dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas perihal Surplus / Defisit Anggaran. dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus. APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. dimana Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan: (i) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (ii) Penyertaan Modal Daerah; (iii) Pembentukan Dana cadangan; dan/atau (iv) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Pasal 305 dari UU Nomor 23 Tahun 2014. juga telah dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit. APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (ii) Pencairan dana cadangan; (iii) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (iv) Pinjaman Daerah; dan (v) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2019-2021 ditampilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11  
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2019-2021

NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>1 . 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>169.638.236.692</b>	<b>163.857.329.764</b>	<b>288.295.764.737</b>
1 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	169.638.236.692	163.857.329.764	288.295.764.737
<b>1 . 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>4.140.000.000</b>	<b>5.541.000.000</b>
1 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000	4.140.000.000	5.541.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>162.138.236.692</b>	<b>159.717.329.764</b>	<b>282.760.614.737</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Pada tahun 2022 belanja yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya diprediksi terserap secara maksimal. Sehingga Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2022 terbatas pada SILPA yang bersumber dari dana yang tidak diatur penggunaannya. Mengenai prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12  
Pembiayaan Daerah TA 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2023

NO	URAIAN	APBD 2022	PRAKIRAAN MAJU 2023
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>171.854.637.583</b>	<b>138.771.015.930</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	171.854.637.583	138.771.015.930
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>171.854.637.583</b>	<b>138.771.015.930</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Dengan melihat proyeksi sumber dana pada tahun 2023 baik yang bersumber dari pendapatan maupun penerimaan pembiayaan serta proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai semua kebutuhan daerah. Mengenai proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Daerah	1.868.332.604.000
1	Pendapatan	1.729.161.588.000
2	Pembiayaan Netto	138.771.015.930
B	Pengeluaran	1.332.342.091.837
1	Belanja yang bersifat mengikat dan wajib	1.332.342.091.837
C	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (A-B)	535.990.512.163

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Visi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 yaitu *Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera*. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran-sasaran pokok pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 memiliki tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pendidikan.</li> <li>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan</li> <li>4. Pemberian BOS dan beasiswa</li> <li>5. Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS</li> <li>6. Peningkatan pengelolaan perpustakaan</li> <li>7. Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan</li> <li>8. Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku</li> <li>9. Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi</li> <li>10. Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular</li> <li>11. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>12. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan</li> <li>13. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</li> <li>14. Peningkatan pembinaan kepemudaan</li> <li>15. Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga</li> <li>16. Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang</li> <li>17. Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan</li> <li>18. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan</li> <li>19. Peningkatan pola konsumsi masyarakat</li> <li>20. Peningkatan perlindungan sosial</li> <li>21. Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga</li> <li>22. Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</li> <li>23. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak</li> </ol>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
2	Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan manajemen perubahan</li> <li>2. Penataan perundang-undangan</li> <li>3. Penataan dan penguatan organisasi</li> <li>4. Penataan ketatalaksanaan</li> <li>5. Peningkatan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan</li> <li>6. Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa</li> <li>7. Penataan sistem manajemen SDM aparatur</li> <li>8. Peningkatan pelayanan secretariat DPRD</li> <li>9. Fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif</li> <li>10. Penguatan pengawasan</li> <li>11. Optimalisasi pembangunan Zona Integritas</li> <li>12. Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi</li> <li>13. Penguatan akuntabilitas kinerja</li> <li>14. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>15. Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan</li> <li>16. Integrasi perencanaan dan penganggaran</li> <li>17. Optimalisasi monitoring dan evaluasi</li> <li>18. Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah</li> <li>19. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah</li> <li>20. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa</li> <li>21. Pembangunan kawasan perdesaan</li> <li>22. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa</li> <li>23. Peningkatan kedisiplinan aparatur</li> <li>24. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur</li> <li>25. Optimalisasi penerapan hasil inovasi</li> <li>26. Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan</li> <li>27. Peningkatan kualitas data statistik sektoral</li> <li>28. Peningkatan penyelenggaraan persandian</li> </ol>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				29. Penguatan kebijakan internal SPBE 30. Penguatan tata kelola SPBE 31. Penguatan layanan SPBE 32. Peningkatan diseminasi informasi
3	Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	1. Peningkatan penegakan Perda 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi 3. Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah 4. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran 5. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 6. Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama 7. Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh 8. Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat 9. Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya
4	Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan daya saing investasi daerah 3. Meningkatkan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah 4. Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.	1. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan 2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan 3. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan 4. Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah 5. Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja 6. Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru 7. Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan 8. Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah 9. Peningkatan fasilitasi transmigrasi 10. Peningkatan perlindungan konsumen 11. Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				12. Peningkatan pengelolaan pasar 13. Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis 14. Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor 15. Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana 16. Peningkatan pengelolaan pariwisata 17. Peningkatan nilai realisasi investasi 18. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu 19. Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral 20. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase 21. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum 22. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi 23. Peningkatan manajemen pertanahan 24. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman 25. Penurunan luasan kawasan kumuh 26. Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas 27. Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 28. Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH 29. Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup 30. Peningkatan pengelolaan persampahan 31. Peningkatan ruang terbuka hijau 32. Pembangunan taman hutan raya 33. Peningkatan jasa ekosistem

Untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dirumuskan ke dalam arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode (per-tahun), yang diharapkan dapat memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing</b> , dengan prioritas: 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan; 3. Penguatan ekonomi kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur; 6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	<b>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b> , dengan prioritas: 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif; 2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; 3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	<b>Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif</b> , dengan prioritas: 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian; 2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	<b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</b> , dengan prioritas: 1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi; 2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	<b>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas</b> , dengan prioritas: 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penguatan Daya Saing Daerah; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.



Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah *Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas*, maka sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
<b>Misi 1 :</b>					
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia			76-76,48
			1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Harapan lama sekolah	14,90
				2. Rata-rata lama sekolah	9,20
				3. Persentase akses dan mutu pendidikan	88,00
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	76,54
				2. Angka Kematian Ibu	52,78
			3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	3. Angka Kematian Bayi	6,9
				Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu rupiah/orang/ tahun)	11.413,19
<b>Misi 2 :</b>					
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi			90
			Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	83,00
				2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP
				3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	2,87

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
				Elektronik (SPBE)	
				4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
Misi 3 :					
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Angka Kriminalitas			0,013
			Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	1. Indeks rasa aman	0,53
				2. Indeks Toleransi	100%
Misi 4 :					
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnyapeningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi			2,5-3,16
		Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau			5,67
			1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	1. PDRB Per Kapita (juta rupiah)	144,87
				2. Angka kemiskinan	5,99-6,35
				3. Angka Pengangguran	2,95-3,40
		2. Meningkatkan daya saing investasi daerah	Nilai investasi	9,19	
		3. Meningkatkan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	
		4. Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,77	

## 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

### a. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023

Prioritas nasional tahun 2023 dalam RKP Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

### c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 dengan arah kebijakan **Peningkatan kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas**, namun perlu diketahui bahwa pada awal tahun 2020 terjadi pandemi wabah COVID-19 yang berpengaruh pada setiap sendi kehidupan di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Fokus pembangunan tahun 2023 Kabupaten Kudus diprioritaskan pada :

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, utamanya Penanggulangan kemiskinan ekstrim (PKE);  
Pandemi Covid 19 sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional dan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional di tahun 2021 mencapai 3,69% pada akhir

Desember 2021 dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai minus 2,07%. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang mulai mengalami peningkatan pasca masa pandemi Covid-19. Peningkatan yang positif ini perlu didukung oleh pembangunan yang berpihak pada peningkatan ekonomi masyarakat, guna menekan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Fokus pembangunan diarahkan untuk upaya membuka peluang usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pelatihan kerja utk peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar, perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi dan jaminan sosial kepada masyarakat pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Disertai dg dukungan ketersediaan bahan pangan pokok dan keragaman konsumsi pangan.

2. Penguatan Daya Saing Daerah;

Penguatan daya saing daerah diupayakan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk mewujudkan SDM yang memiliki daya saing serta pembangunan instruktur pendukung pengembangan wilayah terpadu yang mampu menjadi pengungkit kondisi perekonomian masyarakat. Dengan adanya revisi Perda RTRW dan penguatan pengelolaan Mall Pelayanan Publik serta komitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dengan baik, maka diharapkan daya saing Kabupaten Kudus akan meningkat dan dapat menarik minat investor baru untuk melakukan investasi di Kabupaten Kudus.

3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;

Pemberdayaan UMKM di semua sektor diarahkan untuk penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif dan kerakyatan. Pelatihan dan pendampingan pemasaran bagi produk UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Kudus harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan harus berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs), yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang didukung pemantapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) harus dilaksanakan untuk

mendukung pelayanan publik yang baik. Pengembangan dan penggunaan aplikasi secara online diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendukung transparansi, akuntabilitas serta keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana di atas.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan penyesuaian tema RKPD Tahun 2023 dan prioritas pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan pemulihannya dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi program yang dilakukan pada tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada target yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, yaitu **“Peningkatan kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas”** yang terjabarkan melalui program prioritas pembangunan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus. Secara ekonomi, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup besar terutama dalam akibat pembatasan mobilitas dan pengurangan beberapa aktivitas yang mengundang kerumunan. Kabupaten Kudus sebagai daerah yang secara ekonomi bertumpu sektor industri pengolahan serta perdagangan menjadi daerah menderita penurunan ekonomi cukup dalam pada tahun 2020. Kabupaten Kudus dengan jumlah perusahaan sebanyak 728 perusahaan seperti perusahaan rokok, perusahaan tekstil, perusahaan percetakan, perusahaan meubel serta jumlah pasar tradisional dan modern sebanyak 27 unit secara riil mengalami dampak antara lain terjadi pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 2 orang. Selain itu, terdapat 17.487 dari sektor pekerja informal seperti pedagang kaki lima, pelaku usaha kecil, dan pengemudi ojek serta pelaku usaha informal lainnya dari berbagai sektor seperti perdagangan, transportasi, pariwisata dan kesenian yang merasakan dampak ekonomi secara langsung atas dampak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Kudus pada tahun 2020 dan 2021 terpuruk pada -3,11% dan -1,98%, lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 sebesar 3,09%. Sedangkan angka kemiskinan di Kudus Tahun 2021 sebesar 7,6% memburuk dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Tahun 2020 yang mencapai 7,31%. Namun, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar 3,77%, lebih rendah dari capaian TPT pada Tahun 2020 yang mencapai 5,53%.

Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan respon cepat untuk mengatasi kondisi tersebut dengan melakukan *refocusing* pada penanganan COVID-19 yang berfokus pada Kesehatan (pemenuhan

ruang perawatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan), dampak ekonomi (pelatihan dan bantuan alat kelompok, pendidikan perkoperasian dan UKM dan pemulihan ekonomi melalui promosi wisata).

Adapun keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
1	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Pertanian dan Pangan 4. Dinas Sosial P3AP2KB
2	Penguatan daya saing daerah	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perdagangan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas PMPTSP 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
			Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas PKPLH 4. Dinas PMD
3	Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Pertanian dan Pangan 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan	1. Dinas PKPLH 2. Dinas Pertanian dan Pangan 3. Dinas PUPR

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
		dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	iklim	4. BPBD
5	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Dukcapil 5. BPPKAD 6. BKPP 7. BAPPEDA 8. Sekretariat DPRD 9. Kecamatan 10. Kantor Kesbangpol 11. Satpol PP
			Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Dukcapil 5. BPPKAD 6. BKPP 7. BAPPEDA 8. Sekretariat DPRD 9. Kecamatan 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Adapun keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5  
Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023
1	Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Penguatan daya saing daerah
3	Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha	Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
4	Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata kelola pemerintahan</li> <li>Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman</li> </ul>	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tersebut di

atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023 yang meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5-3,16%
2. PDRB per kapita sebesar Rp. 134-140 juta
3. Angka kemiskinan sebesar 5,99-6,35%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,95-3,40%
5. Laju inflasi sebesar  $3 \pm 1\%$

Dalam rangka percepatan pencapaian target – target Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan percepatan melalui inovasi – inovasi daerah yang dilaksanakan oleh masing – masing organisasi perangkat daerah dengan mendasarkan pada kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan dinamika yang berkembang.

Salah satu inovasi prioritas yang dilaksanakan adalah 9 (sembilan) Program Unggulan Kudus yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah, *Guruku Sayang Guruku Senang* dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Religius.
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru, dengan inovasi PRABUKU (Pembentukan Wirausaha Baru Kudus). Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Religius.
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen. Melalui inovasi Pemberdayaan dan Pendampingan P3A dan Gapoktan. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia. Melalui inovasi *Kudus Taste of Java*. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Cerdas.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.



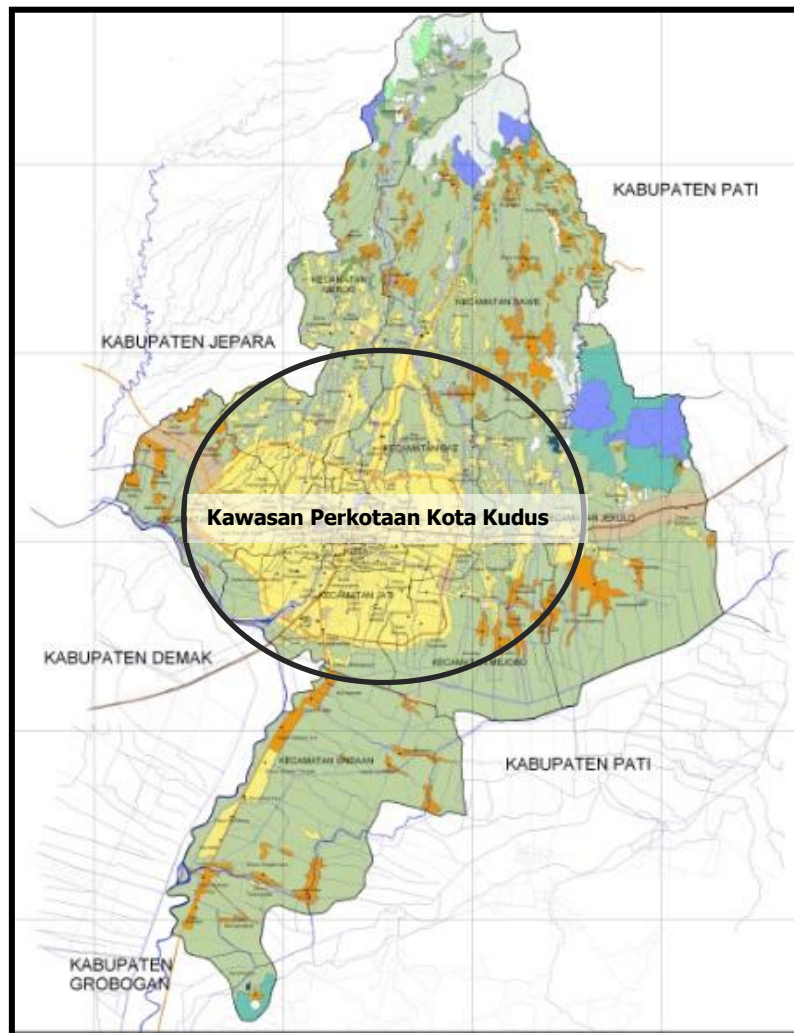
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.

#### **4.3. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KUDUS**

Kawasan Perkotaan Kota Kudus di Kabupaten Kudus merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana arah pengembangan kawasan wilayah di dalam RTRW Nasional dan Kabupaten Kudus juga termasuk dalam Kawasan Andalan Wanarakuti. Di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Strategis Wanarakuti. Sedangkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Wilayah Pengembangan (WP) Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) merupakan WP pendukung *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, difokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada *“Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”*.

Mendasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi :

- a. Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong – Kedungsapur – Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi dan pembangunan wilayah Jawa Tengah;
- b. Poros pengembangan Utara – Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmasakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela.



Gambar 4.1 Arah Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Kudus

Kawasan Perkotaan Kota Kudus meliputi 6 Kecamatan yang meliputi keseluruhan Kecamatan Kota Kudus, Jati, Bae, serta sebagian Kecamatan Gebog, Kaliwungu dan Mejobo). Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Kota Kudus yaitu mewujudkan Perkotaan Kudus berbasis industri yang didukung oleh kegiatan pariwisata dan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan Kawasan Strategis Wanarakuti yang diatur dalam RTRWP dan Kawasan Andalan Wanarakuti yang diatur dalam RTRWN. Dengan potensi sektor industri pengolahan yang sangat dominan di Kabupaten Kudus, dan sejalan dengan tujuan penataan ruang di Kabupaten Kudus untuk mewujudkan kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka upaya untuk mengembangkan industri pengolahan di Kabupaten Kudus diarahkan mulai dari UMKM sampai dengan industri besar. Fokus pengembangan UMKM dilakukan melalui fasilitasi bagi wirausaha baru dan peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran UMKM.

Berdasarkan arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur dilakukan dengan meningkatkan

konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pembangunan talud jalan, pemeliharaan jembatan, rehabilitasi dan pengembangan pasar dan tempat PKL, pengembangan Kawasan wisata dan desa wisata, pengembangan perlengkapan LLAJ dan pengembangan UMKM. Terkait rencana fasilitasi revitalisasi/ reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, upaya yang dilakukan untuk mendukungnya adalah penyusunan review RTRW disesuaikan dengan rencana jalur aktivasi rel kereta api, penyesuaian antara jalur aktivasi rel kereta api dengan rencana trase jalan tol serta exit tol dan fasilitasi dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat yang akan terkena dampak aktivasi rel kereta api.

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku maka dilakukan dengan inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati, dan Jepara) yang didukung dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pemakaian air minum yang layak dan aman dan pengembangan SPAM yang lain seperti Pamsimas diarahkan ke wilayah yang bukan merupakan wilayah rencana pengembangan SPAM Regional Dadi Muria, serta pemanfaatan air baku dari Bendungan Logung dengan melakukan perbaikan dan pembangunan Jaringan Irigasi DI. Logung, melalui kegiatan pembangunan, pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya air dan jaringan pengairan lainnya. Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana dan penanganan lahan kritis di kawasan Muria dan Patiayam melalui penanaman terutama tanaman tahunan, sehingga menambah kemampuan lahan untuk menampung air hujan, mengurangi erosi, limpasan dan tanah longsor. Selain itu perlu dilakukan pemanfaatan tanah bawah tegakan sesuai dengan tingkat kekritisannya, pengembangan desa wisata terutama wisata hutan, pelatihan masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar lahan kritis, pengelolaan DAS dilakukan dengan satu kesatuan ekosistem dari hulu sampai dengan hilir, peningkatan kesadaran masyarakat arti pentingnya kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia serta implementasi kebijakan tentang pemanfaatan air.

Pengelolaan DAS melibatkan stakeholder terkait :

- a. Masyarakat sekitar sebagai pengelola / penerima manfaat
- b. Perusahaan berupa bantuan bibit tanaman
- c. Perguruan Tinggi melalui LPM, berupa sumber daya manusia dan bantuan bibit tanaman

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan, melalui pengembangan sarana dan prasarana pasar untuk menunjang pemasaran industri pengolahan dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif untuk

mendukung pariwisata, peningkatan dan pengembangan destinasi wisata, promosi destinasi wisata melalui media sosial maupun media cetak, pelatihan UMKM pendukung wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), peningkatan industri pariwisata seperti restoran, penginapan, biro perjalanan dan pelatihan pertanian untuk mendukung industri pengolahan dan pariwisata.

Untuk mendukung pengembangan WP Wanarakuti program/kegiatan khususnya yang berada pada wilayah Kabupaten Kudus, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

1. Fasilitasi kegiatan pengendalian banjir Sungai Juana Kabupaten Pati, dan Sungai Wulan Kabupaten Kudus;
2. Konservasi DAS Muria dan DAS Kendeng.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur dan strategi yang tepat agar pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan secara optimal. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten Kudus merupakan bagian dari Kawasan Wanarakuti sebagai pendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan.

Dukungan Kabupaten Kudus dalam implementasi Perpres tersebut antara lain :

1. Pembangunan sentra IKM logam, rekayasa dan kopi
  - DED dan FS dilaksanakan tahun 2022 oleh Disnakerinkop UMKM
  - Pelatihan ketrampilan khusus IKM logam, rekayasa mesin, perbengkelan
  - Pelatihan pengolahan kopi
  - Bantuan sarana prasarana industri kopi
2. Pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS)
  - Gedung IBS dibangun tahun anggaran 2022 dengan anggaran 60 M dari dana BLUD
  - Pembangunan Gedung IBS lanjutan tahun anggaran 2023 dengan anggaran 20 M dari dana BLUD
3. Pengembangan jalan Karangbener (UMK) – Ngembalrejo
  - DED telah tersusun
  - AMDAL dan FS dilaksanakan tahun 2022
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 telah memuat rencana pengembangan jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo
  - Tahun 2023 akan dilakukan / dilanjutkan studi LARAP dan appraisal.

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Daerah, maka untuk mempercepat perwujudan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tersebut selain didukung sumber dana dari APBD juga perlu didukung dari APBN agar pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat terwujud.

Terkait penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas ekonomi makro dan kapasitas sumber daya manusia, upaya yang dilakukan kabupaten untuk mendukungnya adalah dengan melakukan pembangunan /peningkatan / rehabilitasi jalan dan jembatan, peningkatan kelengkapan jalan, pengembangan perumahan untuk RTLH, peningkatan dan pengembangan pasar, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan investasi dan pelatihan SDM di segala bidang.

Dalam rangka peningkatan pada kesiapan teknologi untuk efisiensi pasar, dukungan Kabupaten adalah melakukan pelatihan teknologi bagi UMKM terutama untuk pengembangan pemasaran, pelatihan produk UMKM seperti kualitas, kemasan, harga, pelatihan manajemen usaha dan pemanfaatan alat mesin pertanian serta pemanfaatan teknologi sederhana yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, dan pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan teknologi digital dalam peningkatan pemasaran produk – produk unggulan.

Terkait arah pengembangan wilayah berupa rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, upaya yang dilakukan antara lain melakukan penghijauan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta meningkatkan produktivitas lahan, melakukan teknik konservasi tanah, pengembangan hutan rakyat, dengan komoditas yang sesuai dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka arah pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus difokuskan untuk pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi yang meliputi Kawasan Perkotaan Kudus dan Kawasan Perkotaan Jekulo. Kawasan Perkotaan Kudus difokuskan untuk peningkatan kawasan agar dapat berfungsi untuk pusat pelayanan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di kawasan ini, maka pembangunan jalan lingkar timur mulai dari UMK sampai dengan Ngembalrejo menjadi prioritas utama. Selain itu pengembangan Kawasan Perkotaan Kudus diarahkan untuk program dan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, irigasi, air minum, sanitasi yang mendukung pengembangan pusat pelayanan, perdagangan, perumahan dan kawasan permukiman.

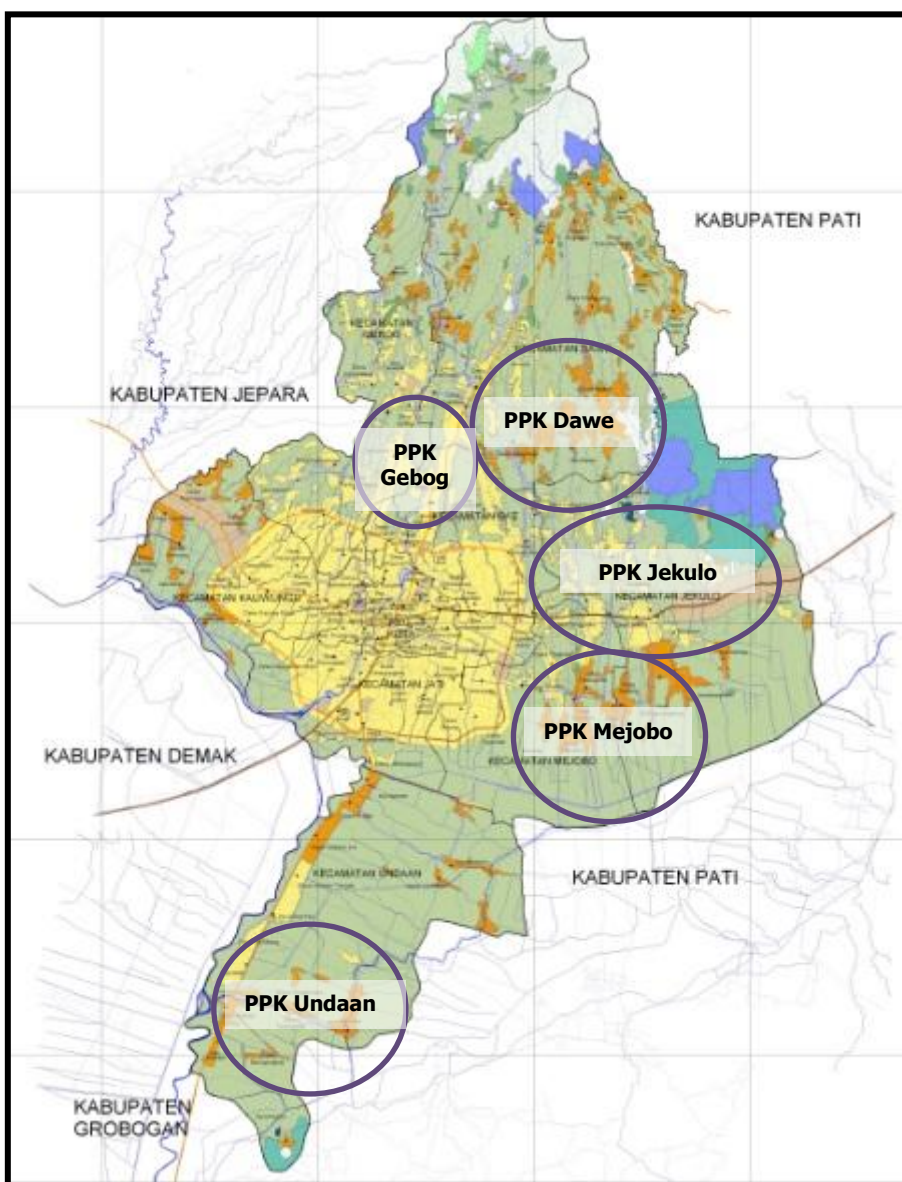
Tahun 2023 juga diarahkan untuk pengembangan Kawasan Perkotaan Jekulo, dimana tujuan penataan ruang WP adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Jekulo sebagai Kawasan Peruntukan Industri didukung Pertanian dan Cagar Budaya dengan

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. pengembangan kawasan Perkotaan Jekulo difokuskan pada pengembangan Bendungan Logung sebagai pendukung pertanian dan pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan dan pengelolaan cagar budaya di Kawasan Patiayam.

Dengan berfungsinya Bendungan Logung, maka kawasan peruntukan pertanian yang menjadi Daerah Irigasi Logung bertambah luas. Pengembangan kawasan wisata di sekitar Bendungan Logung juga merupakan bagian dalam pengembangan kawasan. Di sisi lain, keberadaan industri di Kawasan Perkotaan Jekulo merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Prioritas pembangunan sentra industri IKM logam dan rekayasa di kawasan tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan langkah strategis serta terarah agar dapat terwujud dan optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu pembangunan Kawasan Perkotaan Jekulo difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian, serta pengelolaan Kawasan Patiayam.

Selain PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Perkotaan Jekulo, arah pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus meliputi:

- PPK Kawasan Perkotaan Mejobo, dimana arah pengembangan wilayahnya memprioritaskan sektor perekonomian dan pertanian. Hal ini sesuai tujuan WP Mejobo yaitu mewujudkan kawasan perkotaan berkelanjutan sebagai pusat perekonomian dan pendukung aktivitas pertanian.
- PPK Kawasan Perkotaan Dawe, dimana arah pengembangan wilayahnya memprioritaskan pengembangan ekonomi dan merupakan jalur wisata menuju Colo yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- PPK Kawasan Perkotaan Gebog, yang arah pengembangan PPK Gebog memprioritaskan pengembangan ekonomi, industri pengolahan hasil tembakau dan home industri/ UMKM.
- PPK Kawasan Perkotaan Undaan yang arah pengembangan PPK Undaan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan hasil pertanian.



Gambar 4.2 Arah Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Kudus

#### 4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kudus yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Kudus. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 difokuskan pada bidang infrastruktur, perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

1) Bidang Infrastruktur antara lain:

- Pembangunan dan peningkatan jalan jembatan, talud, gorong-gorong, drainase, jalan usaha tani, saluran irigasi pertanian dan sarana penampungan air;
- Penyediaan sarana pendukung dan keamanan jalan (lampu lalu lintas, LPJU, rambu-rambu, dll);
- Peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan bedah rumah bagi keluarga tidak mampu;
- Renovasi gedung pemerintahan, sekolah dan puskesmas yang rusak;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (pembuatan

sumur);

2) Bidang Perlindungan Sosial antara lain :

- Pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal melalui organisasi kepemudaan, sekolah maupun ibu-ibu PKK;
- Fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat.

3) Pemberdayaan Masyarakat

- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa;
- Bantuan keuangan infrastruktur kepada pemerintah desa;
- Pelatihan, Pembinaan dan Bantuan Sarpras Sanggar Seni Budaya

Berkaitan dengan usulan masyarakat dan pokok - pokok pikiran DPRD, telah disediakan kamus usulan yang diarahkan sebagaimana prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Kudus di atas. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses disampaikan 1 minggu sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dan selanjutnya disinkronisasi menyesuaikan kemampuan keuangan. Hal ini telah diupayakan melalui proses perencanaan terintegrasi penganggaran sebagaimana amanat KPK guna pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran.

Usulan permasalahan, yang nantinya akan diselesaikan dengan program dan kegiatan pembangunan dalam pokok pokok pikiran DPRD berjumlah 1067 usulan. Berdasarkan penelaahan, tidak semua usulan tersebut dapat disetujui karena

- 1.Mempertimbangkan prioritas pembangunan
- 2.Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2023 dapat dilihat pada Buku II RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.



#### **4.5. ARAH PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BIDANG URUSAN**

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

##### **4.5.1 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **4.5.1.1 Urusan Pendidikan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : Program Pengelolaan Pendidikan Program ini terdiri dari Pengelolaan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun sebesar 114,75 % Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun sebesar 101,8 % APK SD/MI 101,80%; APK SMP/MTs 114,75%; Persentase sekolah terakreditasi A 74,36%; Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik 95,28%; Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik 70,06%; Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi 95,52%; APK PAUD 90%; APK Pendidikan Kesetaraan 1,42%; Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik 92,09%; Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik 38%;

###### **4.5.1.2 Urusan Kesehatan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### **a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini terdiri dari Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator Cakupan Ketersediaan Sarpras Kesehatan Rujukan 100%; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun 18,60%; Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%; Angka Kematian Ibu 52,78 per 100.000 KH; Angka Kematian Bayi 6,9 per 100.000 KH; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun 18,60%; Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL 100%; Cakupan pelayanan

pengendalian penyakit 100%; dan Cakupan Ketersediaan Sarpras Kesehatan Rujukan 100%.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Program ini diarahkan untuk Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.  
Indikator program ini adalah cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 92,70%.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman  
Program ini terdiri dari kegiatan untuk Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.  
Indikator program ini adalah cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 92,70%.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Program ini diarahkan untuk Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.  
Program ini diarahkan untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%.

#### 4.5.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  
Program ini diarahkan untuk Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 85%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; dan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat;

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase penduduk berakses air minum 100%.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase rumah tinggal bersanitasi 100%.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan; Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan; Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan; dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase drainase dalam kondisi baik 66,00%.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; dan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pelayanan perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan 55%.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan; Pembangunan Jalan; Rekonstruksi Jalan; Rehabilitasi Jalan; Pembangunan Jembatan; Rehabilitasi Jembatan; dan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 92,83%.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan untuk Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase ketaatan rencana tata ruang 100%.

4.5.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan untuk Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Untuk kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus diarahkan untuk Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Sedangkan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan diarahkan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,30%.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan untuk Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Untuk kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha diarahkan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase lingkungan permukiman kumuh 0,02%.

- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
Program ini diarahkan untuk Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.  
Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,30%.

#### 4.5.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Program ini diarahkan untuk Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.  
Program ini diarahkan antara lain untuk mendukung:
- Presentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas 80%.
  - Cakupan penegakan perda dan perkada 85%.
  - Rasio Linmas per Jumlah RT 1,34.
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota 100%.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  
Program ini diarahkan untuk Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.  
Program ini diarahkan antara lain untuk mendukung:
- Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten 86%.
  - Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupeten 100%.
  - Tingkat waktu tanggap (response time rate) 7 menit.
  - Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi 100%.
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.
- c. Program Penanggulangan Bencana  
Program ini diarahkan untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.  
Program ini diarahkan antara lain untuk mendukung:
- Cakupan penanggulangan bencana sesuai standard 100%.

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%.
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%.
- Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%.

#### 4.5.1.6 Urusan Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100%.

##### b. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar 65%.

##### c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial 5,6%.

##### d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Indikator program ini adalah persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial 75%.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota; Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota ; dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk mendukung persentase TMP yang dikelola 100%.

4.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.5.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro. Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan untuk Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk mendukung persentase kasus yang terselesaikan 100%.

#### 4.5.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Program ini diarahkan untuk Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.  
Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pekerja perempuan 60,79%.
- b. Program Perlindungan Perempuan  
Program ini diarahkan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.  
Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pekerja perempuan 60,79%.
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak  
Program ini diarahkan untuk Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.  
Program ini diarahkan untuk mendukung persentase pekerja perempuan 60,79%.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
Program ini diarahkan untuk Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.  
Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 100%.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak  
Program ini diarahkan untuk Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.  
Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 100%.



#### 4.5.2.3 Urusan Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kotadengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase ketersediaan pangan utama 100%.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Program ini diarahkan untuk Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase ketersediaan pangan utama 100%.

- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan untuk Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kotadengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota; dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di 9 Kecamatan.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penanganan daerah rawan pangan 100%.

- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kotadengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota di 9 Kecamatan.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase keamanan pangan 90%.

#### 4.5.2.4 Urusan Pertanahan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan untuk Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penyelesaian administrasi pertanahan 100%.

b. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan untuk Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase tanah bersertifikat 74,84%.

4.5.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung indeks kualitas lingkungan hidup 67,77%.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

Program ini diarahkan untuk mendukung indeks kualitas lingkungan hidup 67,77%.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan; dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program ini diarahkan untuk mendukung proporsi ruang terbuka hijau (RTH) 8,20%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan untuk Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan

Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penanganan volume sampah 72%.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini terdiri dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50%.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan; dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Program ini diarahkan untuk mendukung presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup 5%.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program ini diarahkan untuk mendukung presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup 5%.

- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini terdiri dari kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50%.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Sampah dengan kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penanganan volume sampah 72%.

4.5.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100%;

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 100%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini diarahkan untuk mendukung cakupan pengelolaan database kependudukan 100%.

4.5.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Penataan Desa dengan kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penyelesaian desa yang bermasalah 10%.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan untuk Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa 30%.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa; Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa untuk; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk; Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa; Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa; Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa; Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Fasilitasi Penyusunan Profil Desa di 132 desa/ kelurahan; Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa; dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Program ini diarahkan untuk mendukung penyelesaian persentase desa yang bermasalah 10%.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase peningkatan kawasan perdesaan 100%.

#### 4.5.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang 14%

b. Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Program ini diarahkan untuk mendukung Cakupan peserta KB aktif 72%.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Program ini diarahkan untuk mendukung *Total Fertility Rate* (TFR) Rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya 2,01%.

#### 4.5.2.9 Urusan Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program ini diarahkan untuk Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung indikator kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 40 km/jam dan persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan 90%.

#### 4.5.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadengan kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Media; Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk memenuhi cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media 100%

##### b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan mencapai target kebijakan internal SPBE 3,06; tata kelola SPBE 2,43; dan layanan SPBE 3,03.

#### 4.5.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase koperasi aktif 89%

##### b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku

Kepentingan dengan kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; dan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah 6%.

c. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah 6%.

4.5.2.12 Urusan Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan jumlah investor 10%.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan juga untuk mendukung Persentase peningkatan jumlah investor 10%.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan SP 70%.



d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan untuk mendukung Realisasi investasi yang dilaporkan 3,497 Trilyun.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan jumlah investor 10%.

4.5.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Program ini diarahkan untuk kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase organisasi pemuda yang aktif 95,96%.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Program ini terdiri dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

Program ini diarahkan untuk Cakupan pembinaan olahraga 92,00%.

4.5.2.14 Urusan Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini diarahkan

untuk Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor; dan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

Program ini diarahkan untuk mendukung Cakupan pelayanan data statistik sektoral 100%.

#### 4.5.2.15 Urusan Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian 24%.

#### 4.5.2.16 Urusan Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan 71%.

##### b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan untuk Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan 71%.

##### c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan untuk Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan 71%.

d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan untuk Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 20%.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu; Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman; Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum; dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 20%.

4.5.2.17 Urusan Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 9,4%

4.5.2.18 Urusan Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip 32%.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan untuk Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase Arsip terselamatkan 100%.

#### 4.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

##### 4.5.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produksi perikanan 100%.

b. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produksi perikanan 100%.

##### 4.5.3.2 Urusan Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kotadengan kegiatan Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Pembangunan Prasarana Pertanian.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan untuk Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota termasuk penyakit menular mulut dan kuku, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produksi peternakan 100%.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan untuk Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.

4.5.3.3 Urusan Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai 10%.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan untuk Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan promosi pariwisata 15%.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase peningkatan promosi pariwisata 15%.

4.5.3.4 Urusan Kehutanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota dengan kegiatan Kerja Sama

Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota dengan target untuk mendukung Persentase tutupan lahan 0,48%.

#### 4.5.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Program ini diarahkan untuk Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral 100%.

#### 4.5.3.6 Urusan Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Program ini diarahkan untuk mendukung Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 4,50%, Cakupan pengelolaan pasar rakyat 95% dan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG 10%, serta Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar rakyat 10%.

##### b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi 100%.

##### c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota untuk 2 pelaku usaha; Pameran Dagang Nasional untuk 2 pelaku usaha; dan Peningkatan Citra Produk Ekspor 1 kali.

Program ini diarahkan untuk mendukung Nilai ekspor sebesar Rp. 1.657.570.000.000,-.

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasandengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; dan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Program ini diarahkan untuk mendukung Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 95% dan Persentase fasilitasi perlindungan konsumen 20%.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

Program ini diarahkan untuk mendukung Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 70%.

4.5.3.7 Urusan Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan untukPenyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase pertumbuhan IKM 0,40%.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase pertumbuhan IKM 0,40%.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang teregistrasi di akun SIINAS dan aplikasi industri di Kudus (SAJIIKU); dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Program ini diarahkan untuk mendukung Persentase pertumbuhan IKM 0,40%.

4.5.3.8 Urusan Transmigrasi

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Program ini diarahkan untuk Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mendukung Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi 25%.

4.5.4 Unsur Pendukung

4.5.4.1 Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pada bagian pemerintahan, program ini diarahkan untuk Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan; Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selain itu juga diarahkan untuk kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri; Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Pada bagian kesra, program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial; dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Pada bagian hukum, program ini diarahkan untuk Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk



Hukum Daerah; Fasilitas Bantuan Hukum; dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Pada 9 kecamatan, program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

Program ini diarahkan untuk mencapai persentase Fasilitas Tata Pemerintahan 100%, Persentase fasilitas peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan 100%, Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda 90%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini digunakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada bagian perekonomian, program ini diarahkan untuk kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; dan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;

Sedangkan untuk kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam diarahkan untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

Pada Bagian Administrasi Pembangunan program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Program ini diarahkan untuk mencapai Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 85%, Persentase Realisasi Kegiatan Pembangunan yang Tepat Waktu 90%, Persentase pelaksanaan barang dan jasa 95%.

4.5.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan untuk Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dan Fasilitas Tugas DPRD.

Program ini diarahkan untuk mendukung persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi 100%

#### 4.5.5 Unsur Penunjang

##### 4.5.5.1 Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk mencapai Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100%; Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100%; dan Persentase keterisian data/informasi 65%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya 100%; Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam 100%.

##### 4.5.5.2 Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Penyusunan Standar Harga; Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Inventarisasi Barang Milik Daerah; Pengamanan Barang Milik Daerah; Penilaian Barang Milik

Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah 90%.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5000 OP/WP; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase Realisasi PAD 100%.

4.5.5.3 Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan untuk Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, dan Pengembangan Kompetensi ASN,

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar 100%; Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku 95%; Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan kepegawaian 100%; Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg 100%.

4.5.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini diarahkan untuk Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi 42%, Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun 1,6%.

#### 4.5.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Program ini diarahkan untuk Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah 100%.

#### 4.5.6 Unsur Pengawasan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material 100%; Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK 100%.

##### b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dan Pendampingan dan Asistensi.

Program ini diarahkan untuk mencapai target Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti 100%; Nilai rata-rata maturitas SPIP PD 3,5; Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti 100%; Persentase instansi Pemda yang berpredikat WBK/WBBM 32,40%; Persentase realisasi progres PMPRB 100%; Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK 100%.

#### 4.5.7 Unsur Kewilayahan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini digunakan oleh 9 (sembilan kecamatan) dengan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada 123 desa dan 9 kelurahan.

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100%.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini digunakan oleh 9 (sembilan kecamatan) dan 9 kelurahan dengan kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100%

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini digunakan oleh 9 (sembilan kecamatan) dan 9 kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan cakupan kegiatan koordinasi trantib umum 100%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini digunakan oleh 9 (sembilan kecamatan) dan 9 kelurahan dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program ini digunakan oleh 9 (sembilan kecamatan) dan 9 kelurahan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

dan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100%.

#### 4.5.8 Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Program ini diarahkan untuk mencapai target cakupan Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Program ini diarahkan untuk mencapai target persentase pendidikan politik masyarakat 100%.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Program ini diarahkan untuk mencapai target persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100%.

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Program ini diarahkan untuk mencapai target persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Program ini diarahkan untuk mencapai target persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%.

#### **4.6. INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kudus, senantiasa dikembangkan berbagai inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tabel di bawah ini, disampaikan Tabel Inovasi Kebijakan Pembangunan yang telah dan sedang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kudus, dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023.

Tabel 4.6  
Inovasi Kebijakan Pembangunan sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Keterkaitan Dengan Prioritas
1	PAG KAJE (Program pemberdayaan masyarakat santunan pemakaman jenazah bagi masyarakat kelurahan Mlati Kidul)	Kelurahan Mlati Kidul	Program pemberdayaan peduli santunan kematian khusus untuk membiayai pemakaman jenazah	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2	Pemberdayaan pengelolaan fasilitas berdagang melalui aplikasi LAPAK (Layanan Elektronik Pedagang Pasar Rakyat)	Dinas Perdagangan	Pelayanan berdagang dengan sistem elektronik pedagang rakyat, agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi berdagang	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3	SIMASTANI (Sistem Informasi Masyarakat Pertanian)	Dinas Pertanian dan Pangan	Tercipta sistem informasi pusat data terpadu dengan satu sumber data yang telah di tentukan sehingga dapat tersedia data dan informasi yang seragam, lengkap, actual, valid, dan dikelola dalam suatu sistem	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
4	Karya resin yang mendunia	Desa Jati Kulon	Program kerajinan tangan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kudus dan mengurangi angka pengangguran	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
5	Kampung kalkun	Desa Undaan Tengah	Sebuah program untuk meningkatkan minat warga dalam budidaya kalkun yang memiliki prospek yang masih terbuka baik di dalam negeri maupun luar negeri	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
6	UW 3D (ukir wajah 3 dimensi)	Desa Medini	Sanggar ukir yang digunakan untuk mengekspresikan jiwa seni para pemuda serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
7	Sampahku sumber sehatku	Desa Gondosari	Sebuah program untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
8	PENAK UNDAAN CERAH (Pendidikan anak unggul dan andalan cerdas terarah)	Korwil Pendidikan Kec. Undaan	Perangkat pembelajaran sekolah dasar dengan bantuan multimedia serta menambah wawasan mengenai strategi penguatan pendidikan karakter dan usaha menciptakan sekolah berwawasan lingkungan	2. Penguatan daya saing daerah



No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Keterkaitan Dengan Prioritas
9	PINTER BERSOLEK (Peningkatan pembelajaran yang inovatif, interaktif, bermakna, sopan santun, luhur budi pekerti, efektif dan kreatif)	Korwil Pendidikan Kec. Kaliwungu	Peningkatan pembelajaran yang inovatif, interaktif, bermakna, sopan santun, luhur budi pekerti, efektif dan kreatif	2. Penguatan daya saing daerah
10	INTAN JAGUR PAIKEM GEMBROT (Inovasi peningkatan kinerja Guru dalam pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif menyenangkan gembira dan berbobot melalui pemanfaatan aplikasi plickers berbasis TIK)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan profesionalisme guru dalam menciptakan desain pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan khususnya berkaitan dengan kegiatan penilaian berbasis TIK	2. Penguatan daya saing daerah
11	SIBULAN (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir Unggulan)	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian dan kesakitan bayi	2. Penguatan daya saing daerah
12	PELUK SI MERI (Pelayanan komprehensif <i>home care</i> pada pasien paska rawat inap)	RSUD Dr. Loekmono Hadi	Layanan home care perawatan komperhensif kepada pasien, memberikan kenyamanan pasien saat melakukan perawatan serta menghemat biaya perawatan	2. Penguatan daya saing daerah
13	SILANG DARAT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)	RSUD Dr. Loekmono Hadi	Terwujudnya layanan silang darat K119 yang dapat dinikmati layanannya oleh masyarakat Kudus	2. Penguatan daya saing daerah
14	JOOS (Jemput, Openmind, Organization, Sempurna) with u - lab	UPT Puskesmas Kaliwungu	Peningkatan pelayanan pemeriksaan laboratorium HbsAg terhadap ibu hamil di wilayah puskesmas kaliwungu	2. Penguatan daya saing daerah
15	PIONKU (Promosi Investasi Online Kudus)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mendapatkan kemudahan akses pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan informasi tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kudus secara Online	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
16	PASTI (Pendayagunaan Aset Tidur )	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Pendayagunaan Aset Tidur Kabupaten Kudus	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
17	Penggunaan tabung komposter untuk pengolahan sampah organik serta pembuatan MOL (mikro organisme lokal) dan POC (pupuk organik cair) dalam pengelolaan limbah dapur	Desa Loram Wetan	Pemanfaatan sampah untuk di olah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mengurangi terjadinya penimbunan sampah	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
18	Kerajinan tangan limbah batok kelapa (tempurung kelapa)	Desa Ngemplak	Pemanfaatan limbah tempurung kelapa yang di ubah menjadi berbagai macam kerajinan tangan	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Keterkaitan Dengan Prioritas
			yang memiliki nilai jual tinggi	
19	Olahan Tepung Moccaf	Desa Purworejo	Penambahan aneka jenis makanan yang lebih sehat dan berbahan dari bahan alam yaitu ketela	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
20	Gasbro	Desa Hadiwarno	Aplikasi untuk membantu pemasaran produk asli kudu di masa pandemi covid-19	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
21	Gulang mengubah tanah rawa menjadi rekreasi	Desa Gulang	Pemanfaatan lahan tidur yang berawa menjadi tempat bermain dan wisata yang inovatif	3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
22	BUSADIPAH (Buang Sampah Dibayar Sampah)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemanfaatan sampah anorganik bisa diuangkan sehingga bisa di gunakan untuk pembayaran retribusi dan uang sisa nya bisa kembali lagi ke pemilah/pemilik sampah	4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
23	Pengurangan sampah dengan pembuatan <i>eco enzyme</i> sebagai penjernih udara di masa pandemi covid-19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pengurangan sampah organik khususnya sisa buah dan sayur serta upaya penjernihan udara di masa pandemi maka dilakukan pemanfaatan pembuatan Eco Enzyme (EE)	4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
24	Bank SADIMAS (Sampah menjadi Tabungan Emas)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan turut menghidupkan bank sampah	4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
25	Gerakan tukar sampah dengan bibit tanaman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan terutama dalam pengendalian sampah plastik	4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
26	BIOLITA (Bio Gas dari Limbah Tahu)	Desa Ploso	Pemanfaatan limbah tahu yang di gunakan sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan	4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
27	Satu kelahiran satu pohon "setiap satu kelahiran baru diberikan satu pohon bibit buah"	Desa Klaling	Pemberian 1 bibit pohon untuk satu kelahiran untuk mendukung terciptanya rumah - rumah sehat yang asri	4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
28	Sistem Destaku (Sistem Layanan Permohonan dan Penetapan Desa wisata Berbasis Online)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mempermudah pelaksanaan fasilitasi ke Desa dalam mengajukan proses Permohonan Desa Wisata	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
29	Pengelolaan penataan ruang terpadu melalui SIPETARUNG (Sistem Informasi Pengelolaan Tata Ruang) di Kabupaten Kudus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)	Mewujudkan pengelolaan penataan ruang secara terpadu berbasis teknologi informasi seagai upaya peningkatan kinerja pelayanan publik bidang tata ruang	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
30	SIDEKAT (Sistem Keuangan Desa Terpadu)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)	Menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi publik pada Masyarakat, Terpasangnya infografis keuangan Desa dalam seluruh website	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Keterkaitan Dengan Prioritas
			Desa se-Kabupaten Kudus	
31	Model jejaring aduan masyarakat dengan aparat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui SIAMAT (Sistem Informasi Aduan Masyarakat) pada SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada sehingga ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dapat terwujud	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
32	SIMAUDI (Sistem Informasi Monitoring Audit)	Inspektorat Daerah	Suatu model pengelolaan audit dengan tujuan pelaksanaan audit dapat dimonitor/ dipantau pelaksanaan audit	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
33	Layanan PAK SEMMOK (pelayanan administrasi kependudukan sepenuh hati melayani masyarakat secara online di kabupaten kudus)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus dan akuntabilitas kinerja Dinas Dukcapil	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
34	i-Kudus	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinas Arpus)	Penyediaan bahan pustaka digital kepada Masyarakat, dapat membaca dengan smartphone/ pc tanpa harus datang ke perpustakaan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
35	KANCAMU (Aplikasi Berencana Bersamamu)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Mempermudah pendaftaran calon akseptor KB yang berminat pada alat kontrasepsi MKJP terutama bagi yang mempunyai HP android	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
36	TEKITA (Terlambat Kita Antar)	Kecamatan Mejobo	Memberikan kepastian waktu layanan kepada masyarakat selaku pemohon supaya tidak menunggu terlalu lama	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
37	Siaga 24 jam untuk SUKET GAMIS (Surat Keterangan Warga Miskin)	Kelurahan Wergu Kulon	Pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan warga miskin dalam 24 jam	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
38	SIAP PAK (sistem antar pelayanan) yaitu kegiatan dalam rangka mempermudah dan memperlancar dalam pelayanan masyarakat untuk pengurusan surat kematian dan santunan kematian	Desa Klaling	Pelayanan dalam mengurus surat kematian, akte kematian, serta santunan kematian masyarakat yang di laksanakan oleh perangkat desa yaitu modin	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023**

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan untuk tahun 2023. Kerangka pendanaan Kabupaten Kudus tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya penurunan keuangan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan akan pulih dan mengalami peningkatan. Pada sisi lain, proyeksi belanja daerah ditujukan untuk penuntasan program dan kegiatan yang telah dimandatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan daya saing daerah, pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan, pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kebutuhan belanja juga tetap sejalan dengan upaya-upaya peningkatan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1  
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>410.998.331.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	162.510.725.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.196.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.028.327.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.263.279.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.318.163.257.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.144.806.286.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.356.971.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.729.161.588.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.456.802.022.564</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	864.614.800.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.296.919.784
5.1.05	Belanja Hibah	55.420.152.360
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.470.150.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>128.440.524.366</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.587.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.928.527.400
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.494.770.530
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.181.716.436
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	248.510.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>278.690.057.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.870.673.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.819.384.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.867.932.603.930</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(138.771.015.930)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>138.771.015.930</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.771.015.930
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>138.771.015.930</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>138.771.015.930</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.867.932.603.930</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

## 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing uraian dimutakhirkan menyesuaikan peraturan tersebut. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

### 5.2.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 5.2.1.1 Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Pendidikan yang mencakup kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk 600 Sekolah; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk 422 satuan Pendidikan; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk honorarium guru swasta non PNS sebanyak 1.187 orang; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sebanyak 57 ruang; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 4 ruang; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 14 unit; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik untuk 422 satuan pendidikan; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 1 paket; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan Fasilitasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada 500 siswa; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa untuk 1.000 peserta didik. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama fokus pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada 51 Satuan Pendidikan; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama untuk semua 100 Sekolah; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk Honorarium Kesejahteraan Guru non ASN sebanyak 3.768 orang; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama untuk 600 peserta didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan Fasilitasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada 75 siswa; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa untuk 500 peserta didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada 51 sekolah. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diarahkan untuk Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebanyak 7 lembaga PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebanyak 11 lembaga; Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebanyak 13 lembaga; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD untuk Tunjangan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan guru PAUD sebanyak 1.330 orang; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD pada 50 lembaga. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diarahkan pada Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan untuk 30 peserta didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk 16 satuan pendidikan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan untuk 16 satuan Pendidikan.

Tabel 5.2  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD
	APK SMP/MTs		APK Pendidikan Kesetaraan
	Persentase Sekolah Terakreditasi A		APK SD/MI
	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik		APK SMP/MTs
	persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik		Persentase Sekolah Terakreditasi A
	persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi		persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi
Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	nilai rata-rata UN SMP		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi
	Nilai Rata-rata USBN SD		persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik
	jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, jumlah sekolah yang menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan, jumlah sekolah yang terfasilitasi beasiswa kurang mampu, jumlah sekolah yang terfasilitasi lomba FLS2N, LCSPN, OSN, Lomba dokter kecil, LSS, lomba Perpustakaan, lomba MAPSI (tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi), jumlah sekolah yang terfasilitasi pengembangan sekolah, dan jumlah sekolah terfasilitasi SPM Pendidikan Dasar		persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik
	jumlah SMP yang terfasilitasi PPDB Online		Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik
	jumlah sekolah yang dimerger		persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik
	jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah dokumen hasil Peningkatan</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	pendidikan dasar		<i>Mutu PTK Pendidikan Sekolah Dasar kegiatan sesuai standar</i>
	jumlah sekolah terakreditasi A	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
BOS APBD	jumlah sekolah penerima BOS APBD Kabupaten	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	jumlah ruang kelas, laboratorium, ruang guru, UKS, perpustakaan, mushola, ruang serbaguna, tempat parkir yang dibangun dan direhabilitasi	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
	jumlah sekolah yang dibangun pagar, jamban, lapangan upacara, lapangan olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat
	jumlah pengadaan mebelair dan alat peraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di SD dan SMP yang mendapat tunjangan 1 juta per bulan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	jumlah jurnal profesionalisme pendidik	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
	jumlah guru sd,smp dan pengawas berprestasi, calon kepala sekolah yang di seleksi, nilai angka kredit, mengikuti pelatihan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian
Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
	APK Pendidikan kesetaraan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
	APK PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
	APK Pendidikan kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
	pesentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
	persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikat pendidik	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah dokumen hasil Peningkatan Mutu PTK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai standar</i>
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah dibangun
Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	jumlah PAUD yang mendapatkan BOP, jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana, jumlah PAUD ter rehabilitasi, jumlah PAUD yang terfasilitasi pengembangan PAUD, jumlah PAUD terfasilitasi SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan festival gebyar PAUD dan lomba lomba, peserta yang mengikuti kegiatan Bunda PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum 2013, PAUD HI, jumlah PAUD terakreditasi, PAUD yang mengikuti lomba gugus	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian
Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	jumlah warga buta aksara yang mengikuti pembelajaran, orang yang mengikuti pendidikan kecakapan hidup	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
	jumlah lembaga PNF yang terakreditasi	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik
	jumlah penyelenggara kejar paket, lembaga peserta peringatan HAI	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
	jumlah tutor yang mengikuti pengembangan kurikulum PNF	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
	jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang melaksanakan USBN, UNBK, terfasilitasi pengembangan Pendidikan Masyarakat, dan terfasilitasi SPM Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
	jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>APK PAUD</i>
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Dibangun
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	jumlah lembaga PAUD dan PNF yang mengisi dapodik	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat sesuai standar</i>
	jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di PAUD yang mendapat tunjangan 1 juta per bulan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Jumlah pendidik PAUD yang tersertifikasi	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

#### 5.2.1.2 Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, urusan Kesehatan akan melaksanakan program sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas sebanyak 11 unit puskesmas; Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 8 unit; Pengadaan Bahan Habis Pakai sebanyak 11 jenis; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 3 unit; Pengadaan Obat, Vaksin sebanyak 3 jenis. Selanjutnya untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencakup Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk seluruh warga kudus; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 12 dokumen; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada 19 puskesmas; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV untuk 19.737 orang; Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebanyak 12 dokumen; Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebanyak 12 dokumen; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif untuk 590.928 orang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut untuk 357.000 orang. Kemudian untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi diarahkan untuk Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet sebanyak 2 unit. Serta pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota akan fokus pada Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan untuk 19 unit puskesmas; dan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan sebanyak 9 dokumen.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk 60 orang.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini meliputi kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan. Untuk kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga fokus pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak

Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sebanyak 12 dokumen. Selanjutnya kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) fokus pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) sebanyak 12 dokumen. Kemudian pada kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan fokus pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan sebanyak 12 dokumen.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini meliputi kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 12 dokumen.

Selanjutnya kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat sebanyak 12 dokumen. Kemudian kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebanyak 12 dokumen.

Tabel 5.3  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan		Angka Kematian Ibu
			Angka Kematian Bayi
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun
			Cakupan Pelayanan Pengendalian Penyakit
			Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>
Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kimia, BHP, dan BMHP	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
	Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Disediakan
	Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan kesehatan tim P3K	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase tercapainya ketersediaan sarpras pendukungnya
Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah alat kesehatan yang tersedia</i>
Kegiatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan BLUD	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%</i>
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Jumlah ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pelayanan Pencegahan	Jumlah usia produktif (15-59 th) yang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Produktif

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	mendapat pelayanan skrining kesehatan (skrining PTM) sesuai standar	Produktif	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Jumlah usia lanjut (≥60th) yang mendapat pelayann skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Jumlah penderita hipertensi (usia ≥15th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia ≥15th yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah penderita TBC (semua kasus) yang diobati dan dilaporkan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PPengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dasar	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Jumlah indikator SPM yang tercapai 100%	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkesda	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah pembangunan Rumah Sakit tipe D	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Jumlah sertifikat perijinan	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi</i>
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan menjadi nakes teladan	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan</i>
Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Jumlah sertifikat perijinan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan
		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi</i>
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan
		<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah P-IRT yang memenuhi syarat perijinan</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	<i>Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan</i>
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	<i>Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan</i>
	Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	Jumlah publikasi Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
		<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader</i>
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah desa siaga aktif mandiri</i>
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

#### 5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mencakup kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai meliputi penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 1 dokumen, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing saluran irigasi sebanyak 1 paket, dan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir sebanyak 1 paket. Sedangkan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 1 km, rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Primer sepanjang 78,74 km. Indikator program ini adalah Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 85%;
- b. Program Penyelenggaraan Jalan mencakup kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 10.56 km, Rehabilitasi Jalan sepanjang 1,94 km, Pembangunan Jembatan sepanjang 10 meter, Rehabilitasi Jembatan sepanjang 180 meter, dan pemeliharaan alat berat untuk kesiapan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat sebanyak 21 buah. Indikator program ini adalah Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 92,83%.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi kegiatan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sebanyak 3 dokumen dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat sebanyak 1 kelompok. Indikator program ini adalah Persentase penduduk berakses air minum 100%.
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah meliputi kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen dan kegiatan Operasi Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebanyak 1 unit. Indikator program ini adalah Persentase rumah tinggal bersanitasi 100%.
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase enyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 2 dokumen, kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 2 dokumen, dan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sepanjang 680.057 m dengan

target sasaran 66 persen teratasi. Indikator program ini adalah Persentase drainase dalam kondisi baik 66,00%

- f. Program Penataan Bangunan Gedung meliputi kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG sebanyak 1 dokumen, kegiatan Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, dan kegiatan penyusunan dokumen Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan 55%.
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase ketaatan rencana tata ruang 100%.
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebanyak 1 dokumen Indikator program ini adalah Rasio tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 50



Tabel 5.4

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi</i>
Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun
Optimalisasi Fungsi Jaringan Yang Telah Dibangun ( DAK )	Jumlah Jaringan Yang Telah Dibangun ( DAK )	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun
Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I	Jumlah Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi
Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II	Jumlah Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase penduduk berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum
	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi bersertipikat	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>
Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( DAK )	Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi
Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat. (Persentase drainase dalam kondisi baik)
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Drainase yang direhabilitasi
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase pelayanan perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pelayanan perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kearifan Lokal untuk Bangunan Pemerintahan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	Prosentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap		persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
			Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dibangun
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana
Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan Alat berat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
		Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Perencanaan dan pemanfaatan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	<i>dokumen rencana detail tata ruang kota (rdtrk)</i>	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
	<i>dokumen revisi rencana tata ruang</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
	<i>koordinasi tentang rencana tata ruang</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengendalian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	pemanfaatan ruang	Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

#### 5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai Berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan mencakup kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 1 unit rumah, kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus sebanyak 1 dokumen, dan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan sebanyak 1 laporan. Indikator program ini adalah Cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,30%.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) mencakup kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 2 perumahan. Indikator program ini adalah Cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,30%, Persentase Kawasan lingkungan permukiman layak huni
- c. Program Kawasan Permukiman mencakup kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh sebanyak 1 laporan dan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 21 rumah. Indikator program ini adalah Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,02%.

Tabel 5.5

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen penyiapan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan</i>
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi
		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi
		<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus</i>	<i>Presentase unit rusunawa dalam kondisi layak huni</i>
Pembinaan, pengendalian dan peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh yang tertangani	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus
	Jumlah fasilitasi peningkatan rumah tidak layak huni	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Presentase pengesahan siteplan sesuai standar pelayanan</i>
	Persentase rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/ atau direlokasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Persentase Rumah Tangga yang bersedia difasilitasi penyediaan rumah layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh
Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (DAK)	Jumlah fasilitas rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>Luas kawasan kumuh yang tertangani</i>
Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Persentase LPJU yang berfungsi baik	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah dokumen laporan Peningkatan Kualitas RTLH</i>
	Pembangunan PSU/LPJU baru	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
	Jumlah Rusunawa dalam kondisi layak huni	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan permukiman kumuh
Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman (Bangub)	Jumlah PSU milik Pemda yang dipelihara	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Jumlah perumahan yang menyerahkan PSU ke pemkab</i>
	Pembangunan PSU baru	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian



#### 5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diarahkan pada Penanganan Gangguan Trantibum serta Penegakan Perda. Indikator program ini adalah:
  - Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas 80%.
  - Cakupan penegakan perda dan perkada 85%.
  - Rasio Linmas per Jumlah RT 1,34
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota 100%.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran diarahkan pada Penilaian Sarpras Proteksi Kebakaran dan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran. Indikator program ini adala:
  - Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten 86%.
  - Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupeten 100%.
  - Tingkat waktu tanggap (response time rate) 7 menit
  - Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi 100%
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.
- c. Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Informasi Bencana dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana. Indikator program ini adalah:
  - Cakupan penanggulangan bencana sesuai standard 100%.
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%
  - Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%.

Tabel 5.6  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  
pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Presentase penurunan gangguan tibum tranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penanganan gangguan tibum tranmas
Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
Kegiatan Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah pelaksanaan operasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rasio linmas per jumlah RT	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</i>
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah tentang Trantibum	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perauran daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan Satpol PP berkualifikasi PPNS</i>
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya perlindungan masyarakat	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>
Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan penanganan kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana sesuai standar
		<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi</i>
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
		<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah desa tangguh bencana</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Darurat
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
		<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Jumlah Korban bencana yang berhasil di selamatkan dan di evakuasi</i>
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

#### 5.2.1.6 Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini fokus pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota untuk 25 Lembaga 9 Orang

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini meliputi kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melaksanakan

Penyediaan Alat Bantu kepada 39 orang; Penyediaan Permakanan sebanyak 100 orang; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga kepada 20 orang; Pemberian Layanan Kedaruratan untuk 20 orang; dan Penyediaan Sandang untuk 30 orang. Sedangkan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial melaksanakan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sebanyak 173 dokumen; dan Pemberian Layanan Kedaruratan kepada 3.450 orang

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini fokus pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2.500 orang

d. Program Penanganan Bencana

Program ini fokus pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Penyediaan Makanan bagi 1.250 orang; Penyediaan Sandang bagi 80 orang; Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sebanyak 20 orang; dan Pelayanan Dukungan Psikososial kepada 100 orang.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 1 makam.

Tabel 5.7  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Sosial pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar
	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar</i>
Pemberdayaan kelembagaan sosial	Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar		
	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh ketrampilan		
	Pendataan, pengkajian, pengelolaan data PMKS dan PSKS		
	Jumlah RTSM yang tervalidasi		
Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Rasio PMKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat jamsos	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat rehabilitasi sosial</i>
	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Persentase gelandangan dan pengemis yg mendapat jamsos	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase perlindungan dan jamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat jamsos	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Anak terlantar yang mendapat jamsos	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
	Lansia terlantar yang mendapat jamsos	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Gelandangan dan pengemis yg mendapat jamsos	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi bantuan perlindungan dan jaminan sosial	PMKS yg memperoleh pelayanan dasar	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Perlindungan dan jamsos pada saat dan setelah tanggap darurat pada korban bencana	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah anak yatim piatu dan kelayan panti sosial yang mendapat bansos</i>
	Korban bencana alam/social yg mendapat bantuan dan perlindungan sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Persentase Keluarga miskin yang



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		SOSIAL	memperoleh pelayanan dasar sosial
		<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen PMKS dan PSKS tersusun</i>
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam/sosial
		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat</i>
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang Dikelola
Pelestarian, pendayagunaan, keperintisannilai-nilai kepahlawanan	TMP yang dipelihara	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Jenis jasa pemeliharaan TMP</i>
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

## **5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **5.2.2.1 Tenaga Kerja**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja berupa kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro sebanyak 3 perusahaan. Persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja mencakup kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi untuk 2.384 orang dan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 5 LPKS. Indikator program ini adalah Persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja mencakup kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang, kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online sebanyak 100 orang, dan kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 100 orang. Indikator program ini adalah Persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.
- d. Program Hubungan Industrial mencakup kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 25 perusahaan dan 2 dokumen dan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota untuk 40 perusahaan. Indikator program ini adalah Persentase kasus yang terselesaikan 100%.

Tabel 5.8  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja
Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri	Terselenggaranya pelayanan Bursa Kerja Online (BKOL) dan penyebarluasan informasi bursa kerja	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro</i>
Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri (DBHCHT)	Terselenggaranya penyuluhan, terbangunnya jejaring kerja dan job fair	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri	Peningkatan kualitas lembaga ketrampilan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja
Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri (DBHCHT)	Peningkatan produktifitas tenaga kerja	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>
Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK	Pemeliharaan gedung workshop	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK (DBHCHT)	Pelatihan Kerja Institusional BLK dan Pelatihan Kerja Keliling (Mobile Training Unit / MTU), Pemeliharaan Peralatan Pelatihan, Rehabilitasi Gedung	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pembinaan LPKS</i>
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
		<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Persentase kasus yang terselesaikan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang terselesaikan
Fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial	Terlaksananya usulan upah minimum tahun 2021	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
Fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan	Terlaksananya efektifitas kinerja LKS Tripartit	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
		<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

#### 5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan hasil sebanyak 4 dokumen. Sedangkan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan hasil 4 dokumen.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan melaksanakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Fokus kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan adalah penyusunan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Sedangkan kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melakukan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota kepada 10 orang

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini fokus pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang menjadi fokus adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan hasil 3 dokumen. Kemudian untuk kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tersusunya 4 dokumen

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Pada Program Perlindungan Khusus Anak ini fokus pada kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bentuk 2 dokumen.

Tabel 5.9  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IDG	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD
	Tingkat partisipasi angk.kerja perempuan	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga Pemerintah tingkat Daerah Kab/ Kota yang telah dilatih PUG</i>
	Rasio KDRT	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/ Kota</i>
Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan	Jumlah pekerja permp	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia
	Jumlah pek permp.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu
	Jumlah kasus KDRT	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah</i>
	Jumlah pekerja perempuan di pemerintahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan	Jumlah pelatihan ketrampilan kepada kelompok perempuan	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah</i>



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
(DBHCHT)		<i>Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>terstandarisasi</i>
Fasilitasi dan peningkatan kualitas perlindungan anak	Jumlah organisasi anak yang dibina	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
	Fasilitasi anak korban kekerasan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pekerja perempuan
	Lomba kabupaten layak anak	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tersusun</i>
	RBRA sesuai standar	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)
		<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang terbina</i>
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani
		<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pendampingan</i>
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 5.2.2.3 Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan berupa kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan. Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan pangan utama 100%.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat mencakup kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebanyak 1 laporan, kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 42 ton, dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebanyak 225 orang, kegiatan. Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan pangan utama 100%.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan berupa kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk pada 9 kecamatan dan 6 kelompok masyarakat. Indikator program ini adalah Persentase penanganan daerah rawan pangan 100%.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan berupa kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 paket. Indikator program ini adalah Persentase keamanan pangan 90%.

Tabel 5.10  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan
	Persentase keamanan pangan (%)	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi lintas Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase Gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan</i>
	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase sampel pangan yang diuji dalam kondisi aman untuk dikonsumsi	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi</i>
	Prosentase Gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan	Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi (desa)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan utama
	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi (unit)	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi</i>
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA</i>
Peningkatan pola konsumsi dan panganekaragaman pangan	Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah</i>
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan
		<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyediaan pangan utama (beras/ gabah)</i>
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara

#### 5.2.2.4 Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Indikator program ini adalah :

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 12 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase penyelesaian administrasi pertanahan 74,8 persen.
- b. Program Penatagunaan Tanah dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase luas tanah bersertifikat 74,84%.

Tabel 5.11  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan	Persentase luas tanah bersertifikat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah		<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bangub)	Penyelesaian kasus2 tanah negara	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Prosentase Tersedianya Tanah untuk Jalan lingkaran utara timur	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan
	Prosentase tersedianya tanah untuk jalan lingkaran ruas Mijen-Klumpit	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
	Prosentase Tersedianya Tanah untuk waduk Logung ( pinjem pakai Perhutani )	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 5.2.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup mencakup kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD masing – masing 1 dokumen. Indikator program ini adalah Indeks kualitas lingkungan hidup 67,77%.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup mencakup kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota masing – masing 1 dokumen. Indikator program ini adalah Indeks kualitas lingkungan hidup 67,77%.
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 laporan. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50%.
- d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup berupa kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50%.
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mencakup kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 lembaga dan kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup 5%.
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat berupa kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 1

entitas. Indikator program ini adalah Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup 5%.

- g. Program Pengelolaan Persampahan mencakup kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 121865.69 Ton dan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 1 unit. Indikator program ini adalah Persentase penanganan volume sampah 72%.
- h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) berupa kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 5 laporan. Indikator program ini adalah Persentase penanganan volume sampah 72%.
- i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mencakup kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan seluas 1 Ha dan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 839,28 Ha. Indikator program ini adalah Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) 8,20%.



Tabel 5.12

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pengendalian dan konservasi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen pengendalian lingkungan hidup</i>
	Indeks Tutupan Lahan	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengendalian lingkungan hidup	<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen KLHS dihasilkan</i>
	Nilai pengujian kualitas air	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
	Nilai pengujian kualitas udara	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
	Jumlah pengujian kualitas air industri UMKM	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DBHCHT)	Jumlah pengujian kualitas air sekitar IHT	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen IKPLHD yang disusun</i>
	Jumlah pengujian kualitas udara sekitar IHT	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Jumlah laboratorium lingkungan hidup yang berfungsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah desa/lembaga yang difasilitasi melaksanakan usaha pencegahan dan atau pemulihan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	kerusakan lingkungan hidup		Dilaksanakan
	Luas lahan yang dikonservasi	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan volume sampah
	Jumlah dokumen inventarisasi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah dokumen pengelolaan limbah B3</i>
Pengendalian dan konservasi lingkungan hidup (DAK)	Jumlah peningkatan sarpras pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
Pengelolaan sampah dan limbah B3 (Bangub)	Jumlah peningkatan sarpras pengelolaan persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen laporan luas RTH di kabupaten Kudus</i>
Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan RTH	Proporsi RTH	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan RTH	Pemeliharaan taman kota milik pemda	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Pembinaan, Pengawasan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase persetujuan lingkungan yang diawasi</i>
Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Persentase ijin lingkungan yang diawasi	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup
Pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan</i>
	Jumlah bank sampah yang dibina	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH
	Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
	Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup
Pengembangan kapasitas lingkungan hidup (DAK)	Jumlah peningkatan kualitas dan atau pembangunan bank sampah dan sarana pendukungnya	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
Pengembangan kapasitas lingkungan hidup (Bangub)	Jumlah peningkatan kualitas dan atau pembangunan bank sampah dan sarana pendukungnya	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup (DBHCHT)	Jumlah Pembinaan dan pengawasan industri hasil tembakau dan sekitar industri hasil tembakau	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tindaklanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Ditindaklanjuti/Ditangani
Pengelolaan sampah dan limbah B3 (DAK)	Jumlah peningkatan sarpras pengelolaan persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan volume sampah
Pengelolaan sampah dan limbah B3	Jumlah penanganan sampah	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Jumlah dokumen pengelolaan sampah</i>
	Jumlah fasilitasi pengelolaan limbah B3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola di TPA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
	Jumlah pengelolaan limbah tinja		

#### 5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk.  
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk menjadi fokus program Pendaftaran Penduduk dengan melaksanakan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan hasil 90.000 dokumen kependudukan.
- b. Program Pencatatan Sipil.  
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil kepada 433.000 orang.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Kegiatan yang dilaksanakan oleh program ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 12 dokumen.

Tabel 5.13

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk	Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar</i>
Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (DAK Non Fisik)	Jumlah pengadaan bahan cetak dokumen pendaftaran penduduk (blangko dan formulir)	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar		
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian	Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar</i>
Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil (DAK Non Fisik)	Jumlah pengadaan bahan cetak dokumen pencatatan sipil (blangko dan formulir)	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Cakupan pengelolaan database kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan database kependudukan
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasi sesuai standar	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</i>
Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan/SIAK	Jumlah buku kependudukan yang tersusun sesuai dengan standar	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
(DAK Non Fisik)			Kependudukan
Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar		

#### 5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini adalah Penyelenggaraan Penataan Desa dengan melaksanakan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa sebanyak 3 unit.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa.

Program Peningkatan Kerjasama Desa melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa melalui Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 1 dokumen

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada program Administrasi Pemerintahan Desa meliputi : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 1.018 orang; Fasilitasi Penyusunan Profil Desa sebanyak 123 Desa/Dokumen; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 3 dokumen; Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebanyak 9 dokumen; Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa sebanyak 3 dokumen; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD kepada 369 orang; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 3 dokumen.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 dokumen; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 1 lembaga; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebanyak 1 dokumen; Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 9 dokumen; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan



Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 laporan; Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebanyak 1 laporan.

Tabel 5.14

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Pelaksanaan TMMD	Lokasi pelaksanaan TMMD	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang bermasalah
		<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Jumlah lokasi pelaksanaan TMMD</i>
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa
		<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa</i>
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Fasilitasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemerintahan desa dan BPD	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa
		<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan</i>
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Fasilitasi Pengembangan perekonomian Masyarakat dan infrastruktur Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MAYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi
		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi</i>
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

#### 5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengendalian Penduduk.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk diarahkan dengan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) sebanyak 1 dokumen. Sedangkan untuk kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2 dokumen.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Pada Program ini mengarah pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; dan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dilaksanakan dengan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK dalam 1 kegiatan. Sedangkan kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota melakukan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan hasil 30 laporan.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Untuk Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) hanya fokus untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan melaksanakan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) untuk 5 kelompok.

Tabel 5.15

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk
			Total Fertility Rate (TFR)
	Total fertility rate	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan Pembangunan daerah kab/ kota Program Bangga Kencana</i>
	Cakupan peserta kb aktif	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>
Pengendalian penduduk dan adv. pergerakan informasi	Jumlah wanita usia subur (15-45 Th) yang mendapatkan KIE KB	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	Profil kependudukan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif
Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah PUS yang aktif ber-KB	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah PUS yang aktif ber-KB Jumlah PUS yang aktif ber-KB MKJP</i>
	Pelayanan KB dan KR	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
	Jml PUS yg mengikut program MKJP	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan

			Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (DAK fisik)	Pembangunan Balai Penyuluh KB	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah alokon mix kontrasepsi yang tersedia di gudang alokon</i>
	Pengadaan kendaraan dinas pelayanan KB	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (DAK non fisik)	Pelayanan KB dan KR	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)
	Jml PUS yg mengikut program MKJP	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)</i>
Peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga	JumlahTribina yang terbina	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

#### 5.2.2.9 Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :  
Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ mencakup kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 145 unit, kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebanyak 4 unit, kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sebanyak 1 laporan, kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 12 unit, kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen, kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 232 unit, kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 40 km/jam dan Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan 90%.



Tabel 5.16  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas	Jumlah dokumen perencanaan dan review lalu lintas	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan review lalu lintas
	Jumlah CCTV dan jaringannya yang dipelihara	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	Jumlah penghargaan WTN yang diraih	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
	Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan barang yang mendapatkan penyuluhan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Operasional Pengelolaan UPTD Perpustakaan dan Terminal	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan perpustakaan dan terminal	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan Perpustakaan dan Terminal
	Jumlah prasarana perpustakaan dan terminal yang direhab/ditingkatkan	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (Fasilitas utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara
Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Peningkatan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan Perpustakaan dan Terminal
Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Kabupaten/Kota
	Jumlah pengadaan Perlengkapan Jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan
	Jumlah pengadaan Marka Lalu Lintas	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
	Jumlah pengadaan pagar pengaman jalan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
	Jumlah pelajar yang mengikuti penyuluhan keselamatan lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dokumen Keselamatan LLAJ
	Jumlah Pengadaan Zone Selamat Sekolah (ZoSS)	Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Jumlah Aplikasi Keselamatan LLAJ yang dibangun / dikembangkan / dipelihara	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum
Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam I (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara dan dikalibrasi	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum
	Jumlah perlengkapan lalu lintas yang dipelihara	Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah operator kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan penyuluhan		
	Jumlah sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola		

#### 5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Mendukung prioritas pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, ada 2 program yang akan dilaksanakan yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program Informasi dan Komunikasi utamanya akan mengkomunikasikan agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada sasaran-sasaran kebijakan melalui berbagai media baik cetak maupun online ditargetkan 100%. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan mitra komunikasi informasi antara lain KIP (Kelompok Informasi Masyarakat), jurnalis dan penggiat media sosial. Pelaksanaan program ini mengarah pada intensifikasi cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media, dan konsistensi pencapaian indeks SPBE dalam pelaksanaan pemerintahan ditargetkan sebesar 2,87 tahun 2023.

Tabel 5.17

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media
Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten</i>
	Jumlah Penerbitan Media Cetak	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	Jumlah Pemohonan informasi yang dilayani	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
	Jumlah Liputan Kegiatan Kepala Daerah	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik	Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
	Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan kepala OPD dengan insan media	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
	Jumlah Lembaga Penyiaran yang dioperasikan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	Jumlah Kompetisi yang di selenggarakan	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Penayangan Publikasi Media cetak, media elektronik, publikasi media sosial, publikasi media online, media luar ruang, media tradisional, media interpersonal dan publikasi pemberian ucapan selamat kepada stakeholder		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Jumlah pemeliharaan website dan aplikasi		
	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi		
Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Kebijakan Internal SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kebijakan Internal SPBE
	Tata Kelola SPBE		Tata Kelola SPBE
	Layanan SPBE		Layanan SPBE
Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan</i>
	Jenis Jaringan Komunikasi data yang dipelihara	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Jumlah OPD yang terhubung jaringan FO		
	Jumlah menara telekomunikasi dimonitoring		
Pengelolaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan sistem informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Smart City	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</i>
	Jumlah regulasi aplikasi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

#### 5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian berupa kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi untuk 30 orang. Indikator program ini adalah Persentase koperasi aktif 89%
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) mencakup kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sebanyak 64 unit usaha dan 500 orang . Indikator program ini adalah Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah 6%.
- Program Pengembangan UMKM berupa kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebanyak 30 orang. Indikator program ini adalah Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah 6%.

Tabel 5.18

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Prosentase koperasi aktif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif
	Persentase perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen laporan tahunan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>
Peningkatan dan pengembangan koperasi	Terselenggaranya Sosialisasi, Bintek dan Pameran Hari Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Kredit bagi Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)	Temu kemitraan dan promosi bagi UMKM	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>
Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)	Pelatihan kewirausahaan UMKM	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi



#### 5.2.2.12 Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mencakup kegiatan harmonisasi kebijakan penanaman modal terutama dalam pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota. Indikator program ini adalah Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal sebesar 100 persen.
- b. Program Promosi Penanaman Modal mencakup kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan target sasaran penyusunan peraturan pedoman promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan jumlah investor sebesar 10 persen.
- c. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengutamakan kegiatan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 112 perijinan serta penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Indikator program ini adalah Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan sebesar 70 persen.
- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan sinkronisasi dan koordinasi realisasi investasi penanaman modal dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indikator program ini adalah Realisasi investasi yang dilaporkan sebesar 3,497 Trilyun.
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal mendukung pada penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi elektronik terkait dengan urusan penanaman modal. Indikator program ini Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis sebesar 90 persen.

Tabel 5.19  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentasi Peningkatan Jumlah Investor	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal
Kegiatan Perencanaan Penanaman modal	Jumlah Sistem Informasi investasi yang dikelola	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal</i>
	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang mendukung program	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan Kerjasama Usaha	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah
	Jumlah kepeminatan Investasi	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah sistem peta potensi yang dikelola</i>
	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang mendukung program	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor
		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Promosi Penanaman Modal</i>
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi yang dilaporkan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi yang dilaporkan
Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi penyampaian LKPM	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang melaporkan penyampaian LKPM</i>
	Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terevaluasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Jumlah dokumen pengawasan penanaman modal pendukung program	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Prosentase Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan sesuai standart pelayanan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan SP
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan	Jumlah Perizinan Pembangunan terbit sesuai dengan SP	<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah perizinan terbit sesuai dengan SP</i>
	Jumlah laporan/dokumen fasilitasi pelayanan perizinan pembangunan pendukung program	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan	Jumlah Perizinan Lingkungan Terbit sesuai dengan SP	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Perizinan Penanaman Modal
	Jumlah laporan/dokumen fasilitasi pelayanan perizinan lingkungan pendukung program	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN JASA USAHA	Prosentase Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha yang sesuai standart Pelayanan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian	Jumlah Perizinan Perekonomian terbit sesuai dengan SP	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah sistem informasi yang dikelola</i>
	Jumlah laporan/dokumen fasilitasi pelayanan perizinan perekonomian pendukung program	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Perizinan jasa Usaha terbit sesuai dengan SP		
	Jumlah laporan/dokumen fasilitasi pelayanan perizinan jasa usaha pendukung program		

#### 5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Program ini melaksanakan kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan daya saing pemuda yang meliputi kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota akan meliputi : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera sebanyak 300 orang; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota untuk 100 orang; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor sebanyak 100 orang. Kemudian pada kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha untuk 120 orang; dan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan menghasilkan 4 dokumen.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing keolahragaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota sebanyak 5 unit. Sedangkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi

Kabupaten/Kota sebanyak 400 orang; pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga. Selanjutnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga fokus pada Pengembangan Organisasi Keolahragaan pada 62 organisasi olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Program ini melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dan fokus pada Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.

Tabel 5.20

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Kepemudaan	persentase perilaku penyimpangan pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif
	persentase penghargaan olahraga	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen laporan Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan sesuai standar</i>
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan	jumlah pemuda yang mengikuti pemuda pelopor keamanan lingkungan, pelatihan ketrampilan, kegiatan imtaq, jumlah pemuda yang terseleksi lomba, jumlah pemuda yang memiliki kompetensi paskibraka, jumlah pemuda yang terfasilitasi pengembangan sumber daya pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina, jumlah organisasi yang mengikuti kegiatan hari sumpah pemuda	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan
	dokumen pendataan organisasi pemuda	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>dokumen hasil Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan sesuai standar</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	cakupan pembinaan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	cakupan pembinaan olahraga
Pengembangan dan pemberdayaan olahraga	jumlah peserta popda kabupaten, oosn kabupaten, Kejurda, pekan seni, pembinaan olahraga	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sesuai standar</i>
	jumlah tim gerak jalan hut ri, tim gerak jalan 28 km	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
Peningkatan prestasi dan pengelolaan sarpras olahraga	jumlah dokumen pendataan olahraga	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>dokumen hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar</i>
	jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
	jumlah peserta festival olahraga tradisional	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sesuai standar</i>
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sesuai standar</i>
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan sesuai standar</i>
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya



#### 5.2.2.14 Statistik

Urusan statistik mendukung prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan dengan indikator cakupan pelayanan data statistik sektoral 100% pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, aktivitas yang dilakukan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral melalui program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tabel 5.21  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Statistik pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan pelaynan data statistik sektoral
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral	Jumlah Publikasi Data statistik	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen statistik sektoral</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

#### 5.2.2.15 Persandian

Dengan indikator persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian 24% pada tahun 2023, rencana program yang akan dilaksanakan adalah program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Koordinasi, supervisi dan pengawasan dilakukan untuk pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Tabel 5.22  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Persandian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pengelolaan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian
Pengelolaan persandian	Jumlah aparatur yang mengetahui keamanan informasi	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi</i>
	Jumlah Assesment keamanan informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Jumlah aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
	Jumlah ruang server yang terpelihara sesuai standar keamanan informasi		

#### 5.2.2.16 Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program pengembangan kebudayaan berupa kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebanyak 50 objek. Indikator program ini adalah Persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan 71%.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Indikator program ini adalah Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan 71%.
- c. Program Pembinaan Sejarah berupa kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah sebanyak 12 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan 71%.
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya mencakup kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya sebanyak 180 buah dan penetapan Cagar Budaya sebanyak 2 buah dan kegiatan Pelindungan Cagar Budaya sebanyak 37 objek. Indikator program ini adalah Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 20%.
- e. Program Pengelolaan Permuseuman berupa kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum sebanyak 10 unit. Indikator program ini adalah Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 20%.

Tabel 5.23  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan
	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu		
Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok seni/ budaya yang diaktualisasikan	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan triwulanan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>
	Jumlah kelompok seni/ budaya yang bersertifikat dan aktif	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
	Jumlah Penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni dan budaya	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
	Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya	<i>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan triwulanan pembinaan sejarah lokal</i>
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</i>
	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Peningkatan jumlah sarana prasarana pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
	Jumlah Dokumen Kajian Cagar Budaya	<i>Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan CB tk. Kab/Kota</i>
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
	Jumlah Sarana dan prasarana pemeliharaan koleksi	<i>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>
	Jumlah kunjungan (orang)	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		

#### 5.2.2.17 Perpustakaan

Urusan perpustakaan mendukung prioritas penguatan daya saing daerah dengan fokus peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai kelompok sasaran layanan perpustakaan. Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka 9,4% dan meningkatkan ketersediaan bahan Pustaka 73,58% di tahun 2023 dan di akhir tahun RPJMD, rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan aktivitas pembinaan dan pendampingan akreditasi perpustakaan sesuai standar nasional, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial bersinergi dengan komunitas / relawan literasi untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, serta penambahan koleksi bahan pustaka.



Tabel 5.24

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	PROGRAM PEMBINAAN PERPUTAKAAN	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun
	Persentasi Ketersediaan Bahan Pustaka		
Peningkatan Administrasi Perpustakaan dan Pengembangan Jaringan Informasi Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kudus/Kota</i>	<i>Jumlah masyarakat yang terlibat kegiatan pelibatan masyarakat</i>
	Pembinaan Pengembangan Perpustakaan Melalui Penataan Perpustakaan pada Perpustakaan Desa dan Sekolah	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan standart Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
	Bimtek Pengelolaan Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
	Lomba-Lomba dan Bulan Kunjung	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan</i>
	Fasilitasi Kegiatan Masyarakat	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Pengelolaan Perpustakaan Daerah	Jumlah Bahan Pustaka		
	Buku Digitasi dan Buku Cetak		
	Pengembangan Koleksi CD/ DVD Perpustakaan Daerah		
	Lembur Hari Sabtu dan Minggu		

#### 5.2.2.18 Kearsipan

Urusan kearsipan mendukung prioritas penguatan daya saing daerah dengan fokus tatakelola arsip untuk ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya dengan indikator perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip 32,00% di tahun 2023 dan akhir tahun RPJMD, rencana program yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan arsip dan perlindungan dan penyelamatan arsip dengan aktivitas akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis.

Tabel 5.25  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Pelayanan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip
Peningkatan Administrasi Kearsipan dan Pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah OPD Yang melaksanakan JRA	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip</i>
	Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan
	Pelaksanaan Pameran Arsip Daerah lokal Tingkat Jateng&DIY	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah arsip statis yang diakuisisi</i>
Pengelolaan Arsip Daerah	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
	Fumigasi dan Terminate Control		
	Alih Media Arsip Tekstual		
	Akusisi Arsip Inaktif Perangkat Daerah		
	Peningkatan Sarpras Kearsipan		
	Pemeliharaan Sarpras Arsip		

### **5.2.3 Urusan Pilihan**

#### **5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilakukan melalui kegiatan :
  - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan budidaya Perikanan dan sekolah lapang dengan target 45 orang dan bantuan hibah sarpras budidaya perikanan sebesar 1 paket. Kegiatan ini diarahkankan untuk pencapaian indicator Jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 2.210 ton dan Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 543 ton
  - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, kegiatan ini dilakukan melalui penangkaran benih ikan dengan target 125.000 ekor Program ini diarahkan untuk pencapaian Indikator Persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 100%.
- b. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dengan target 45 orang, Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok (POKDAKAN/POKLAHSAR) di 9 kecamatan dan Sosialisasi GEMARIKAN dengan target 100 orang. Kegiatan ini diarahkan untuk mencapai indikator peningkatan produksi perikanan olahan sebesar 1.877 ton. Program ini diarahkan untuk pencapaian Indikator Persentase peningkatan produksi perikanan 100%.

Tabel 5.26  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan  
pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan
Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Jumlah produksi perikanan budidaya</i>
	Jumlah produksi perikanan tangkap		<i>Jumlah produksi perikanan tangkap</i>
Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan (DAK)	Jumlah peningkatan sarpras perikanan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	<i>Jumlah produksi benih ikan</i>
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi perikanan
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan olahan	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah produksi perikanan olahan</i>
Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Perikanan	Jumlah produksi benih ikan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

#### 5.2.3.2 Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mencakup kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebanyak 11 unit dan kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebanyak 11 laporan. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai 10%.
- b. Program Pemasaran Pariwisata berupa kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri sebanyak 12 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata 14%.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif berupa kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebanyak 40 orang. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan promosi pariwisata 15%.

Tabel 5.27

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai
	Persentase peningkatan promosi pariwisata	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Triwulanan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>
	Persentase kenaikan jumlah pelaku industri Pariwisata yang dibina	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota</i>
	Jumlah destinasi pariwisata	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pariwisata
	Jumlah promosi pariwisata melalui media online/TV	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>
	Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/ event	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kenaikan jumlah pelaku industri Pariwisata yang dibina
	Jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	dibina (orang)	Tingkat Dasar	Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	Jumlah kunjungan wisata (orang)		
	Jumlah PAD sektor pariwisata		



#### 5.2.3.3 Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mencakup kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian sebanyak 1 dokumen dan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sebanyak 30 unit. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.
- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian berupa kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan seluas 106 Ha. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.
- d. Program Penyuluhan Pertanian berupa kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa sebanyak 9 unit. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 100%.
- e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mencakup kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis sebanyak 1 laporan, 1 unit USG ternak, 1 paket obat – obatan ternak, 1 paket pelatihan, kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 paket , dan kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan sebanyak 2 paket dan 3 laporan. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produksi peternakan 100%.

Tabel 5.28  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pertanian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan (%)
Peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura
	Jumlah penyediaan obat-obatan pertanian untuk pemberantasan hama penyakit tanaman pangan		Jumlah penyediaan obat-obatan pertanian untuk pemberantasan hama penyakit tanaman pangan
	Jumlah penanaman bibit unggul tanaman buah-buahan		Jumlah penanaman bibit unggul tanaman buah-buahan
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan (%)
	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman perkebunan	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman perkebunan</i>
	Jumlah penanaman bibit unggul tanaman perkebunan		Jumlah penanaman bibit unggul tanaman perkebunan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah alsintan yang siap pakai	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>
	Jumlah infrastruktur pertanian kondisi baik	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	Jumlah peningkatan sarpras penyuluhan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
	Jumlah peningkatan infrstruktur pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan
Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Pertanian	Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia</i>
		Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan produksi peternakan
Pembinaan dan pengembangan peternakan	Jumlah peningkatan populasi ternak besar	<i>Perjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah peningkatan populasi ternak besar</i>
	Jumlah peningkatan populasi ternak kecil		<i>Jumlah peningkatan populasi ternak kecil</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Jumlah peningkatan populasi ternak unggas		<i>Jumlah peningkatan populasi ternak unggas</i>
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Peningkatan usaha dan sarana prasarana peternakan	Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi	<i>Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi</i>
	Jumlah peningkatan sarpras peternakan		<i>Jumlah peningkatan sarpras peternakan</i>
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
Operasional Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart ASUH(Aman, sehat, utuh dan halal)	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart ASUH(Aman, sehat, utuh dan halal)</i>
	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan		<i>Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

#### 5.2.3.4 Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya berupa kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen untuk mencapai indikator program ini adalah Persentase tutupan lahan 0,48%.

Tabel 5.29  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Prosentase tutupan lahan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase tutupan lahan
Pengelolaan taman hutan raya	Taman hutan raya, kebun raya	<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen pengelolaan tahura</i>
		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/ Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/ Kota

#### 5.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan berupa kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen. Indikator program ini adalah Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral 100%.

Tabel 5.30

Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Cakupan Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kegiatan Fasilitas Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Jumlah koordinasi dan fasilitas pemanfaatan langsung panas bumi	<i>Penatausahaan Izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah koordinasi dan fasilitas pemanfaatan langsung panas bumi</i>
		Penyusunan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota



#### 5.2.3.6 Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.  
Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa penyediaan sarana distribusi perdagangan yaitu revitalisasi sederhana sebagian bangunan pasar yang rusak berat, dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Kegiatan lainnya yaitu pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan serta pengendaliannya. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:
  - Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 4,50 %.
  - Cakupan pengelolaan pasar rakyat 95%.
  - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG 10%.
  - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar rakyat 10%.
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar berupa pemantauan harga dan stok barang tersebut pada pasar rakyat yang laporannya terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui operasi pasar reguler dan pasar khusus yang akan berdampak pada 1 (satu) kabupaten. Kegiatan lainnya yaitu pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tingkat kabupaten melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, pengawasan pengadaannya dan pengawasan penyaluran serta penggunaannya. Semua itu dilakukan dengan operasi secara berkala dan operasi gabungan secara insidental. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:
  - Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi 100%.
- Program Pengembangan Ekspor. Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kabupaten berupa pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten serta peningkatan citra produk ekspor dalam pameran tingkat nasional dan provinsi. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:
  - Nilai ekspor sebesar Rp. 1.657.570.000.000,-.
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen. Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal

berupa tera, tera ulang dan pengawasannya sehingga diperlukan juga pengadaan dan pemeliharaan alat dan bahannya, serta pengawasan atau penyuluhan metrologi legal melalui pembinaan pelaku usahanya. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:

- Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 95%.
- Prosentase fasilitasi perlindungan konsumen 20%.
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pelaksanaan promosi produk dalam negeri tingkat kabupaten berupa 'DANDANGAN' dan peningkatan atau pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:
  - Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 70%.

Tabel 5.31

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD
	Cakupan Pengelolaan Pasar rakyat	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola</i>
Penataan pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	Jumlah Pasar yang direvitalisasi dan dibangun	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen	cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi
	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</i>
Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perdagangan	Jumlah pengawasan pendistribusian barang	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			dalam Sistem Informasi Perdagangan
	Jumlah Pemantauan Harga Bahan Pokok	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Pengawasan pengadaan dan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor
		<i>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan keikutsertaan promosi dagang</i>
	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi
Promosi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen
	Jumlah masalah sengketa konsumen yang telah difasilitasi	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan tera dan tera ulang</i>
	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Ditera Ulang
	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang - Undang UTTP	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
Pemberdayaan PKL	Jumlah PKL pada acara tradisi dandangan	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pameran produk dalam negeri</i>
Pembinaan dan penataan PKL	Jumlah Penataan di lokasi PKL	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	Jumlah PKL yang dibina	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

#### 5.2.3.7 Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri mencakup kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebanyak 13 dokumen. Indikator program ini adalah :
  - Persentase pertumbuhan IKM 0,40%.
- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator program ini adalah :
  - Persentase pertumbuhan IKM 0,40%.

Tabel 5.32

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Prosentase peningkatan IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM
Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan	Pelatihan CEFE	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyusunan dan Evaluasi RPIK</i>
Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan (DBHCHT)	Operasional Laboratorium dan pelaksanaan pameran	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri	Pemeliharaan sarana promosi IKM dan Penyusunan RPIK	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri (DBHCHT)	Magang Pengembangan Kewirausahaan IKM	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan pertumbuhan IKM
		<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota, dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pertumbuhan IKM
		<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas



#### 5.2.3.8 Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berupa kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase calon transmigran yang terfasilitasi 25%.

Tabel 5.33  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase calon transmigran yang terfasilitasi
Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi	Koordinasi, konsultasi ke Kementerian Transmigrasi, monitoring transmigran	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **5.2.4 Unsur Pendukung**

##### **5.2.4.1 Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan fungsi staf dalam konsep suatu organisasi. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten. Dalam menjalankan fungsi staf, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :
  - Indeks Kepuasan Masyarakat 85%.
  - Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah 100%
  - Nilai akuntabilitas kinerja 83
  - Indeks Reformasi Birokrasi 90
  - Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi 100%
  - Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 100%
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator program ini adalah :
  - Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan 100%.
  - Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan 97%.
  - Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda 90%
  - Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan 100%
  - Persentase fasilitasi Kerjasama 100%
  - Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan 90%
  - Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh 100%
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan. Indikator program ini :
  - Persentase pelaksanaan barang dan jasa 90%
  - Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu 90%
  - persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 84%.
  - Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD 9%

Tabel 5.34

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
BAGIAN PEMERINTAHAN			
Program Fasilitasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan
Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pemerintahan sesuai ketentuan	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan</i>
	Jumlah pemetaan batas wilayah desa/kelurahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
	Jumlah pelaksanaan penegasan batas wilayah dengan kabupaten tetangga	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan yang tersusun	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan terbit di media massa sesuai ketentuan	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama
	Jumlah dokumen pelaksanaan pilkada yang tersusun	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	Jumlah laporan SPM yang diterapkan		
	SK Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tepat waktu		
	Jumlah kerjasama daerah yang mencapai penandatanganan MoU		
	Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja yang terlayani		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
<b>BAGIAN HUKUM</b>			
Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Pemda	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum
	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Capaian kinerja terhadap pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>
Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM	Presentase tertanganinya perkara Pemda	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
	Jumlah dokumen Ranham yang dilaporkan		
Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM (DBHCHT)	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi peraturan perUUan bidang cukai		
Pengkajian dan publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Perbup yang dicetak dan dipublikasikan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelola Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
	Jumlah peserta Pembinaan JDIH		
<b>BAGIAN KESRA</b>			
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kegiatan Keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kegiatan Keagamaan
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat</i>
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Terfasilitasinya Hibah Kepada Lembaga Keagamaan, Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Terfasilitasinya Kegiatan Pengajian Selapanan dan Manaqib, Kegiatan PHBI, Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji, Hisab Rukyat dan MTQ		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Terfasilitasinya Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Terfasilitasinya Hibah Kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS) dan Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan Kelompok/Anggota Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
	Tersedianya Laporan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat		
	Terfasilitasinya Bantuan Honorarium Guru Keagamaan		
BAGIAN PEREKONOMIAN			
Program Peningkatan Perekonomian Daerah	Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPID	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi TPID
	Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	<i>Pelaksanaan kebijaksanaan Perekonomian</i>	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian</i>
Pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah Perusda Dengan Hasil audit WTP		
Pengembangan Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekuinda, TPID dan TPAKD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
BAGIAN ADBANG			
Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Prosentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu
Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana program pembangunan daerah (Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS)	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi pembangunan</i>
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan perangkat daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
	Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Bangub	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	Jumlah dokumen LKJIP/SAKIP, LPPD, LKPJ Setda	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Kegiatan OPD		
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa
<i>Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik</i>	<i>Jumlah Unit Kerja yang terfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik</i>	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa</i>
	Jumlah dokumen laporan fasilitasi pengadaan barang/jasa yang tersusun sesuai standar	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
<i>Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa</i>	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun sesuai standar		
<i>Pengelolaan Pengadaan barang/jasa</i>	<i>Jumlah fasilitasi pengadaan barang dan jasa</i>	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Jumlah dokumen laporan fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun sesuai standar		
BAGIAN UMUM			
		<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional KDH/ WKDH yang disediakan</i>
		Penyediaan gaji dan tunjangan kepaladaerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		<i>Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan rumah tanggah KDH/ WKDH</i>
		Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah paket keputusan Kepala Daerah
BAGIAN PROKOMPIM			
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase pelayanan Keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan</i>
Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
Fasilitasi Komunikasi dan Informasi Pimpinan Daerah	Jumlah Jasa Penghargaan (Plakat lambang daerah).	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	Jumlah Belanja cetak untuk kebutuhan keprotokolan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
	Jumlah Karangan bunga		
	Jumlah fasilitasi komunikasi (Rapat Pimpinan / RAPIM), Coffee morning pimpinan dan insan media.		
	Jumlah publikasi media cetak		
	Publikasi media elektronik		



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
BAGIAN ORGANISASI			
Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat
	Nilai akuntabilitas kinerja		Nilai akuntabilitas kinerja
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi
	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi
Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan	Penataan Organisasi	Persentase efektivitas kelembagaan perangkat daerah
	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ) sesuai ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penyusunan Anjab dan Evjab sesuai ketentuan yang berlaku		
Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Jumlah OPD yang telah difasilitasi pelaksanaan ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun
	Jumlah OPD yang nilai IKMnya dengan kategori baik (A)		
Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun tepat waktu	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan RB		

#### 5.2.4.2 Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meliputi kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; dan Fasilitasi Tugas DPRD. Untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 6 Dokumen; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 6 Dokumen; Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan sebanyak 1 Dokumen; dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik sebanyak 6 Dokumen. Selanjutnya kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran fokus pada Pembahasan APBD sebanyak 6 Dokumen. Kemudian kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan fokus untuk Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebanyak 24 Laporan. Dilanjutkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksanakan Pendalaman Tugas DPRD sebanyak 9 Laporan; Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebanyak 85 Dokumen; Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebanyak 34 orang; dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 7 orang. Untuk mendukung kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Kunjungan Kerja dalam Daerah sebanyak 144 Laporan; dan Pelaksanaan Reses sebanyak 3 Dokumen. Sedangkan untuk kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dilakukan Pengawasan Kode Etik anggota DPRD dengan hasil 6 Laporan. Dan terakhir kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebanyak 28 Laporan; Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah sebanyak 10 Dokumen; dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebanyak 84 Dokumen.

Tabel 5.35  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD  
pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD	Jumlah rapat yang terfasilitasi	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Jumlah layanan administrasi DPRD</i>
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
Jasa jaminan layanan kesehatan	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan
Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	Jumlah Perda yang ditetapkan	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Penyelenggaraan kajian Ranperda	Jumlah Perda yang ditetapkan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan
Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah dokumen produk hukum	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi</i>
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
		<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD</i>
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
		<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</i>
Program Penyelenggaraan Kehumasan	persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD
Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar propinsi, konsultasi dalam dan luar propinsi, workshop	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
Reses	Jumlah Perda yang ditetapkan	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
		<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan</i>
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
		<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan</i>
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

### **5.2.5 Unsur Penunjang**

#### **5.2.5.1 Perencanaan**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencakup kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 5 dok, Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah 3 dok, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah 2 dok. Indikator program ini adalah :
  - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu 100%;
  - Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan 100%;
  - Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100%;
  - Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100%;
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 5 dok dan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator program ini adalah:
  - Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud 100%
  - Indeks kualitas perencanaan bidang Praswil, Ekonomi dan SDA 100%.
  - Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya 100%
  - Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam 100%.

Tabel 5.36  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu
	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD		Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan
	Persentase keterisian data dan informasi	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>
Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah / SPPD (BanGub)	Jumlah dokumen SPPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>jumlah dokumen Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>jumlah dokumen data dan informasi pembangunan</i>

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosbud	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</i>
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah</i>
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA &amp; LH</i>
Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



#### 5.2.5.2 Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebanyak 8 dokumen, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebanyak 12, kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebanyak 1 dokumen, dan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 36 laporan. Indikator program ini adalah :
  - Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatn dan belanja daerah sesuai ketentuan 100%.
  - Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan 100%.
  - Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan 100%.
  - Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD 1 Dok.
  - Capaian realisasi pembayaran belanja PD 95%.
  - Jumlah dokumen laporan realisasi belanja perangkat daerah 12 dok.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 12 dokumen. Indikator program ini adalah Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah 90%.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berupa kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 374 Miliar. Indikator program ini adalah Persentase Realisasi PAD 100%.

Tabel 5.37

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Keuangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan
Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Anggaran Daerah</i>
	Jumlah Dokumen Anggaran yang tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	Jumlah SP2D yang sesuai standar	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah</i>
	Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	Jumlah Dokumen Perbup tentang petunjuk pelaksanaan APBD	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
			Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	Jumlah OPD yang memahami Juklak APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Jumlah Dokumen Perbup. tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD</i>
Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
	Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Kabupaten/Kota	
	Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Program pengelolaan aset daerah	persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah
Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD
	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun
	Jumlah Pensertifikatan Tanah Milih Pemerintah Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi aset dengan tertib	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah	Jumlah pemanfatan aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Dokumen Apraisal aset/barang daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
	PAD pemanfaatan aset daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Barang Milik Daerah	dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Dokumen Perjanjian pemanfaatan aset	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Program peningkatan pendapatan daerah	persentase realisasi PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD
Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Data realisasi pendapatan daerah OPD pengelola pendapatan (12 OPD)	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD
	Data potensi PAD	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	Data wajib pajak baru (WP)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
	Dokumen pemutakhiran WP	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	PAD Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah	Jumlah penyelesaian aduan keberatan pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
	Jumlah piutang pajak yang tertagih	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	Target PAD PBB	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
	PAD BPHTB	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Daerah	Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

#### 5.2.5.3 Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan hanya akan fokus kepada Program Kepegawaian Daerah. Dalam program ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN akan mencakup Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. Selanjutnya untuk kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dilaksanakan Pengelolaan Promosi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 700 dokumen; dan Pengelolaan Mutasi ASN sebanyak 25 dokumen. Kemudian pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN fokus Pembinaan Jabatan Fungsional ASN kepada 150 orang. Serta kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur meliputi Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pembinaan Disiplin ASN sebanyak 6.633 orang; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai untuk 300 orang; dan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Tabel 5.38

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Mutasi Rotasi dan Promosi, Pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan, Sistem Pendukung
Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur	Pelayanan administrasi mutasi PNS	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan dan Sistem Pendukung</i>
	Pelayanan administrasi pensiun	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	Penyelesaian SK KP PNS tepat waktu	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
	Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan kepegawaian	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>Jumlah Mutasi dan Promosi ASN</i>
	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Penyelenggaraan pembinaan disiplin aparatur	Pelaksanaan Pembinaan Disiplin	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kasus PNS	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	Pelaksanaan Senam	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Pengembangan Karier</i>
	Fasilitasi Tes Kesehatan PNS	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
	Pengadaan Ekstra Fooding	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Pengelolaan Kinerja</i>
	Pengusulan Penghargaan satya lancana karya satya bagi ASN	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Pengelolaan JKK / JKM	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
	Pengelolaan LHKPN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
	Pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
	Penanganan Izin Perceraian PNS	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
	ASN yang mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya		
	Pembuatan ID Card ASN		
	Penghargaan bagi PHD		
	Terbitnya Izin Cuti		
	Laporan/aduan kasus kepegawaian		
	Penanganan Kasus Kepegawaian		
	Jumlah OPD yang menjalankan kode etik/aturan perilaku		
	Pendampingan penyusunan SKP		
Pembangunan/pengembangan sistem informasi dan dokumentasi kepegawaian	Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg		
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Simpeg		
	Pengadaan Mesin Absensi dan Server		
	Pembuatan Daftar Gaji Induk PNS		
	Pemeliharaan Data Fisik Pegawai dan Infrastruktur Pendukung Simpeg		

#### 5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan urusan Pendidikan dan Pelatihan yaitu Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis; dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum untuk 474 orang. Sedangkan untuk kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional akan dilaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Tabel 5.39  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
<i>Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur</i>	Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi
	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP per tahun	<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	<i>Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis</i>
Pengembangan aparatur	ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Eselon II	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
	Dokumen daftar susunan pegawai dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>Persentase ASN yang lulus Pelatihan Manajerial dan Teknis</i>
	<i>Seleksi CASN</i>	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	<i>Seleksi Terbuka JPT Pratama</i>		
	<i>Penyelesaian SK JPT, SK CPNS, SK PPPK, SK Administrator, SK Pengawas dan SK Jabfung</i>		
	<i>Pelantikan Pejabat JPT, Administrator, Pengawas, Jabfung, dan Pengambilan Sumpah PNS/PPPK</i>		
	<i>ASN yang menempuh tugas belajar dan ijin belajar</i>		
	<i>ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian</i>		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
	<i>UKPPI</i>		
	<i>ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Eselon III</i>		
	<i>ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Eselon IV</i>		
	<i>ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Jabfung</i>		
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis		
	Pengiriman ASN untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional		
	Pengiriman ASN untuk mengikuti pelatihan administrator		
	Penyelenggaraan pelatihan pengawas		
	Penyelenggaraan pelatihan teknis		
	Penyelenggaraan Latsar CASN		

#### 5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 1 dok dan pengembangan inovasi dan teknologi 1 dokumen. Indikator program ini adalah :

- Persentase peningkatan hasil kelitbangan 100%.
- Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah 100%.

Tabel 5.40  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023  
sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah
Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Jumlah rekomendasi, studi kelayakan, naskah akademik, dan inovasi teknologi bidang ekbang yang digunakan untuk perumusan kebijakan</i>
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah dokumen pengembangan dan inovasi
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

### **5.2.6 Unsur Pengawasan**

#### **5.2.6.1 Inspektorat**

Inspektorat sebagai unsur pengawasan memiliki peran strategis dalam mengawal efektif dan efisiennya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kudus. Dengan mandat yang diberikan tersebut, aktivitas inti kegiatan yang dilakukan meliputi *assurance dan consulting*. Pendampingan, asistensi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, SPIP, Pencanangan Zona Integritas, WBM, WBBK dilakukan untuk mencapai target bersihnya penyimpangan atas pengelolaan keuangan dan asset yang bersifat material oleh Perangkat Daerah 100%, menindaklanjuti aduan masyarakat atas pungli, gratifikasi dan aduan lainnya 100%. Serta dalam upaya pencegahan korupsi, berkoordinasi dan disupervisi oleh KPK dilaksanakan dan ditindaklanjuti 100%.

Aktivitas dan target tersebut dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tabel 5.41  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD dengan Capaian Kinerja >90%
	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Persentase LHP Internal Tepat Waktu, Rasio Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Inspektorat Daerah yang selesai ditindaklanjuti</i>
Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi	Realisasi PKPT	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
		Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
		Monev TLHP BPK dan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Persentase Aduan masyarakat dan TP/TGR yang ditindaklanjuti</i>
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Elemen Kapabilitas Level 4
	nilai rata-rata maturitas SPIP PD	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Elemen Kapabilitas APIP Level 4</i>
	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
	Persentase realisasi progres PMPRB	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP&gt;3</i>
	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi	Realisasi PKPT	Pendampingan, Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

### **5.2.7 Unsur Kewilayahan**

#### **5.2.7.1 Kecamatan**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.  
Program ini melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan prioritas Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 15 Desa.
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.  
Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan fokus pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan melaksanakan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada 15 desa.
- c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.  
Program ini melaksanakan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan fokus kepada Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pendirian 1 posko.
- d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.  
Dalam rangka pelaksanaan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maka dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada 5 orang
- e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.  
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan meliputi : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 1 kali; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 15 dokumen; dan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa sebanyak 15 dokumen.

Tabel 5.42

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Kewilayahan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		<i>Sekretariat Daerah</i>	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	fasilitasi festival seni dan budaya	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Jumlah evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</i>
	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan		
	Fasilitasi Kegiatan Sosial		
	Pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan		
<i>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</i>		<i>Kecamatan</i>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik
Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Jumlah Pelaksanaan Rakor pelayanan administrasi kependudukan	<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah pelayanan publik yang tersedia</i>
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan</i>
	Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>
	Pelaksanaan Desa Lomba	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan ke giatankordinasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi trantib umum
Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Posko yang terpantau dan piket bencana alam	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Posko Bencana Alam</i>
	penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</i>
		Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>
	Evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	Monev dan pelaporan bidang pemerintah desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		<i>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</i>	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan
		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaksanaan Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan obyek, Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

## **5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum**

### **5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam upaya mendukung prioritas pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, urusan kesatuan bangsa dan politik akan melaksanakan program sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Melaksanakan aktivitas penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat. Indikator program ini persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Melaksanakan aktivitas antara lain: pendidikan politik kepada masyarakat, Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk tahapan Pilkada di tahun 2023, serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Indikator program ini adalah persentase pendidikan politik masyarakat 100%.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Melaksanakan aktivitas pembinaan ormas dan LSM. Indikator program ini adalah persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100%.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Melaksanakan aktivitas pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Indikator program ini adalah persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain fasilitasi penanganan konflik, serta harmonisasi Forkompinda. Adapun indikator program ini adalah persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%.

Tabel 5.43

## Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani
	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	<i>Perumusan Kebijakan Teknik dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah Peserta Yang Paham Pada Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>
	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu
Kegiatan Peningkatan Wawasan kebangsaan dan Ideologi	Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang wawasan kebangsaan dan antisipasi terhadap kegiatan kelompok radikal.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jumlah Peserta yang paham pada Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>
	Jumlah upacara hari besar nasional yang difasilitasi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Situasi Polittk di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Kegiatan Optimalisasi kewaspadaan nasional dan pendidikan politik masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang deteksi dini dan cegah dini gangguan keamanan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
	Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang pendidikan politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polittk di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Jumlah Parpol yang faham administrasi bantuan keuangan Parpol	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani
		<i>Perumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi yang paham pada pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan



PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Daerah Kabupaten/Kota	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Peningkatan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan yang faham tentang kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan dan persaudaraan bangsa Indonesia	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase potensi konflik agama yang tertangani
	Jumlah anggota Ormas/LSM yang faham tentang tugas dan fungsinya	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Peserta yang paham pada Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>
	Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik agama yang tertangani
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham pada pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:

- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83,5%.

Tabel 5.44  
Pemutakhiran Program dan Kegiatan Unsur Penunjang pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah
Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standar</i>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar</i>
BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah ASN yang kompetensinya meningkat</i>
	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar</i>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>jumlah PHD dan tenaga administrasi</i>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Jumlah PHD dan jasa tenaga administrasi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara</i>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006		PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Implementasi Program Unggulan di tahun 2023 selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.45  
Implementasi Program Unggulan Bupati Tahun 2023

No	Program Kerja	OPD	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Tunjangan 1 juta rupiah per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/ SD/SMP/ SMA/Madrasah	Dinas Dikpora	Tunjangan guru SD Tunjangan guru SMP Tunjangan guru PAUD	7.333.200.000 2.042.400.000 8.785.200.000
		Bag. Kesra	Tunjangan guru Madin, TPQ, Diakonia	43.952.400.000
2	Santunan kematian, Santunan anak yatim piatu	Dinas SosP3AP2KB	Santunan kematian Santunan anak yatim piatu	2.000.000.000 1.037.250.000
3	Pelatihan dan Pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun	Dinas Nakerinkop UKM	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	8.053.709.000
4	Bantuan per bulan khotib dan imam masjid/mushola	Bagian Kesra	Bantuan khotib dan imam	3.527.000.000
5	Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen	Dinas Pertanian dan Pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	10.000.000
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	24.999.880
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	194.000.000
6	Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha	Dinas Nakerinkop UKM	Bantuan modal usaha	2.500.000.000
7	Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia	Dinas Dikpora	Hibah Pembinaan Olahraga	1.000.000.000
		Dinas Budpar	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	68.339.000
			Program Pembinaan Sejarah	6.068.000
			Program Pengelolaan Permuseuman	562.982.000
			Program Pengembangan Kebudayaan	464.999.000
8	Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan	Dinas SosP3AP2KB	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	137.999.930

No	Program Kerja	OPD	Uraian	Anggaran (Rp)
9	Pemberdayaan buruh melalui Forum Komunikasi PUK/SP/SB, perusahaan dan pemerintah daerah	Dinas Nakerinkop UKM	Program hubungan industrial	59.357.000

Selanjutnya identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*) atas Isu Strategis Kabupaten Kudus ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.46  
Identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*) atas Isu Strategis Kabupaten Kudus

No	Isu Strategis Kabupaten	Rencana Aksi Responsif Gender
1	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	PENDIDIKAN: - Meningkatkan sarpras pendidikan - Meningkatkan mutu kurikulum pendidikan - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik KESEHATAN: - Meningkatkan kualitas prasarana sarana kesehatan - Meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedik - Perbaiki sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus
2	Tata kelola pemerintahan	- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima
3	Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman	- Sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor
4	Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha	- Fasilitasi sarana dan prasarana usaha - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan permodalan - Pelayanan perizinan yang mudah - Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran - Meningkatkan daya saing yang dikembangkan secara berkesinambungan.
5	Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	- Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana - Pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat - Memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

### **5.3. RENCANA KERJA PEMULIHAN COVID-19 TAHUN 2023**

Kebijakan pemulihan Covid-19 Tahun 2023 mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 yang sedang terjadi dan tingkat keberhasilan penanganan pemulihan Covid-19. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dimana pemulihan dampak Covid-19 di Kabupaten Kudus tahun 2023 lebih difokuskan pada percepatan pemulihan kesehatan, perekonomian dan ketahanan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat, maka berikut dijabarkan rencana kerja pemulihannya di tahun 2023.

#### **1. Percepatan pencegahan penularan Covid-19 dan penganganan kasus Kesehatan Covid-19**

Penanganan pencegahan penularan Covid-19 dilaksanakan dengan percepatan capaian vaksinasi pada seluruh tahapan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan vaksinasi booster. Selain itu, upaya preventif dan promotif dalam penanganan dan pemulihan Covid-19, tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatifnya. Terutama terkait dengan peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, penerapan protokol kesehatan, dan pemenuhan vaksinasi primer lengkap, serta didukung optimalisasi layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penyiapan upaya kontigensi apabila kasus mulai meningkat atau tinggi.

#### **2. Pemulihan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah**

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya percepatan pemulihan kondisi perekonomian daerah antara lain mendorong peningkatan pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi daerah Kabupaten Kudus seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pariwisata (religi) dengan mendorong kembali investasi untuk masuk ke Kabupaten Kudus, mendorong ekspor dan substitusi impor, serta melakukan pemberdayaan ekonomi terutama bagi pelaku UKM, dengan tetap melakukan pengendalian inflasi. Ekonomi juga akan tumbuh dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung dalam upaya meningkatkan distribusi barang dan jasa ekonomi. Strategi ini dijabarkan dalam program/kegiatan/aktivitas sebagai berikut.

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah dengan sasaran kelompok IKM/UMKM, melalui antara lain pelatihan ketarampilan kerja di Balai Latihan Kerja, fasilitasi *linkage* pelaku industri kecil dengan *offtaker* (penjamin) seperti dengan toko swalayan, pengembangan industri kreatif (pelatihan, modal, pemasaran, pendampingan/keperantaraan);

- b. Meningkatkan ketrampilan kerja dan memberikan informasi penempatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja di Balai Latihan Kerja dan penyebaran informasi/bursa kerja untuk para pencari kerja.
- c. Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan sasaran pelaku UKM melalui antara lain fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM dengan *e-commerce* dan *creative hub/co-working space*, serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;
- d. Peningkatan pariwisata daerah antara lain melalui upaya pemulihan citra pariwisata dengan mendorong promosi wisata, dan pengembangan desa wisata dengan stimulan bantuan desa wisata, fasilitasi akses modal dan pemasaran pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif;
- e. Meningkatkan kembali investasi melalui antara lain promosi investasi, fasilitasi linkage investor besar untuk bermitra dengan UKM, serta mendorong kemudahan dan pelayanan perijinan investasi bagi UKM;
- f. Melakukan pengendalian inflasi antara lain melalui operasi pasar;
- g. Meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa antara lain melalui sektor transportasi dengan lain melalui sektor transportasi dengan layanan angkutan umum massal di kawasan aglomerasi perkotaan serta penataan kembali pemanfaatan kios UKM dan perdagangan.

### 3. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain dengan : 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, rumah layak, dan akses KB; 2) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan keberantaraan pelaku usaha kecil, dan *startup* baru melalui keberantaraan akses pasar, modal, bahan baku, *digital platform*, dan pelatihan/inkubasi, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat dengan padat karya dan *job market*. Strategi tersebut diperkuat dengan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan health security dan sistem kesehatan daerah, dan sektor pendidikan sebagai bentuk adaptasi model pendidikan pasca pandemi Covid-19 dengan pengembangan sistem pembelajaran dan teknologi. Strategi ini dijabarkan dalam program/kegiatan/aktivitas sebagai berikut.



- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan perluasan sasaran pada masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 antara lain melalui :
  - 1) Pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif
  - 2) Bantuan pangan;
  - 3) Bantuan Langsung Tunai bagi buruh rokok.
- b. Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, dengan perluasan sasaran pada masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 antara lain melalui :
  - 1) Penguatan pelaku usaha UKM/IKM/usaha non formal lainnya dengan fasilitasi akses terhadap modal dan pasar, bahan baku produksi, manajemen atau pengelolaan usaha, pengembangan kapasitas dan kualitas, dan *linkage* usaha mikro/kecil dengan *off taker* (penjamin), termasuk sasaran pada kelompok perempuan rentan, warga difabel, dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
  - 2) Keperantaraan pengembangan usaha rintisan (*start up*) dengan keperantaraan akses pasar, modal, bahan baku, *digital platform*, dan pelatihan/inkubasi, termasuk kelompok sasaran pemuda dan masyarakat yang terdampak Covid-19;
  - 3) Peningkatan ketahanan masyarakat desa dengan mendorong peningkatan infrastruktur melalui pola padat karya dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan Dana Desa (DD), serta penguatan kelembagaan yang menjamin ketersediaan pangan di desa, pembentukan desa tangguh bencana termasuk bencana non alam, dan mengembangkan kampung/desa kreatif serta desa tangguh bencana;
- c. Penguatan sektor pendidikan dengan pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat. Untuk pelaksanaan pembelajaran melalui media online tetap dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Tabel 5.47  
Prioritas Dukungan Urusan, Fokus Program dan Kegiatan Pembangunan Pasca COVID-19,  
Alokasi Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Dukungan Urusan	Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19	Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19	Dukungan Pemulihan Covid-19	Alokasi Anggaran
1	Urusan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan sistem kesehatan nasional	567.900.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	34.999.890
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		2.079.938.372

No	Dukungan Urusan	Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19	Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19	Dukungan Pemulihan Covid-19	Alokasi Anggaran
		Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		49.999.795
3	Urusan Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	263.000.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		46.576.500
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

No	Dukungan Urusan	Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19	Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19	Dukungan Pemulihan Covid-19	Alokasi Anggaran
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		592.750.000
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengendalian bahan pokok dan barang penting dan pengawasan barang bersubsidi		71.421.850
		Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		273.788.295
4	Urusan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	1.150.000.000
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		700.000.000
5	Urusan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	8.063.709.400

No	Dukungan Urusan	Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19	Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19	Dukungan Pemulihan Covid-19	Alokasi Anggaran
			Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja, penyediaan Informasi Kerja, dan Perindungan Pekerja Migran Indonesia		49.901.220
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		9.883.200
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		59.357.847
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
6	Urusan Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	32.219.837.840
7	Urusan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Penguatan sistem jaring pengaman sosial	2.242.056.420

No	Dukungan Urusan	Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19	Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19	Dukungan Pemulihan Covid-19	Alokasi Anggaran
			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan sistem ketahanan bencana	240.971.500
		Program Penanganan Bencana	Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		144.687.730
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1.195.074.995
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

No	Dukungan Urusan	Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19	Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19	Dukungan Pemulihan Covid-19	Alokasi Anggaran
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penguatan ketahanan keluarga rentan kemiskinan dengan sasaran 84.000 orang buruh rokok diberikan sejumlah Rp. 300.000,- selama 2 bulan	50.701.932.900
8	Urusan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	67.184.140
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		80.174.080
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		237.327.680

<b>No</b>	<b>Dukungan Urusan</b>	<b>Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19</b>	<b>Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak Covid-19</b>	<b>Dukungan Pemulihan Covid-19</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>
9	Urusan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi	256.572.147.000



**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Keberhasilan ditunjukkan dari pencapaian target indikator pembangunan daerah sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

**6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH**

Indikator kinerja utama daerah merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang terdiri atas dua puluh tiga butir indikator yang penjabaran atas tujuan misi Kabupaten Kudus yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif, terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan, dan terwujudnya peningkatan perekonomian daerah. Target indikator tujuan utama daerah tahun 2023 merupakan penjabaran atas target lima tahunan yang tercantum pada RPMJD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023

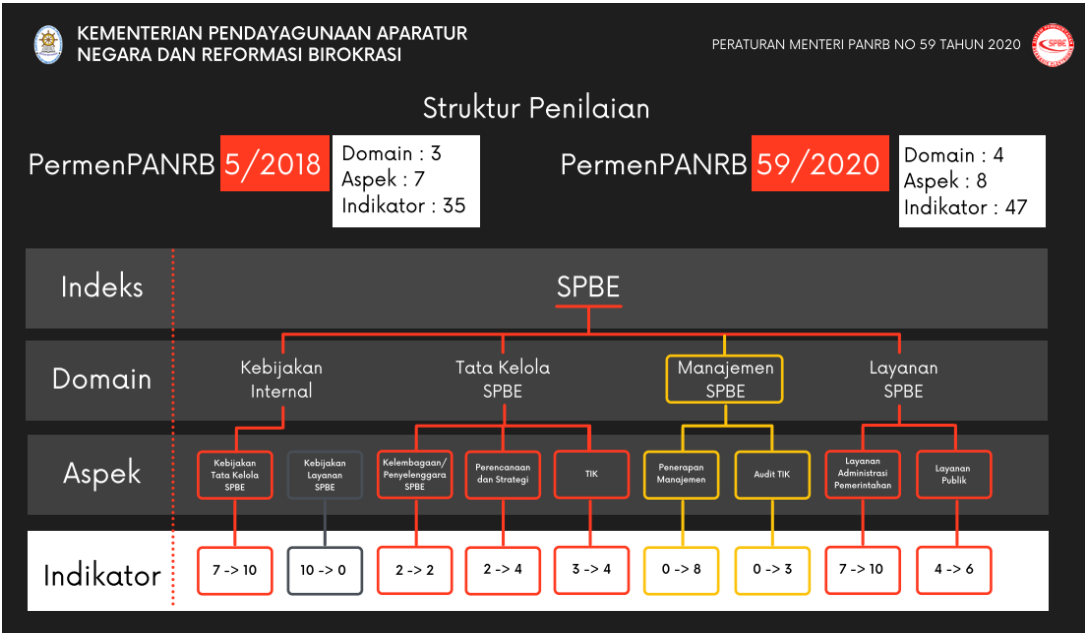
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,97-76,48
2	Harapan lama sekolah	Tahun	14,90
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,20
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	%	88,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
5	Angka Harapan Hidup	Angka	76,54
6	Angka Kematian Ibu	Angka	52,78
7	Angka Kematian Bayi	Angka	6,9
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	ribu Rp/org/thn	11.413,19
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90
10	Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	83,00
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)		WTP
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,87
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85
14	Angka kriminalitas	Angka	0,013
15	Indeks rasa aman	Angka	0,53
16	Indeks Toleransi	%	100
17	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,5-3,16
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	%	5,67
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Rp juta	144,87
19	Angka kemiskinan	%	5,99-6,35
20	Angka pengangguran	%	2,95-3,40
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	Rp. triliun	9,19
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	83,73
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,77

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Pencapaian target satu indikator kinerja utama saling mendukung pencapaian indikator lainnya sehingga upaya untuk yang integral dalam memenuhi target indikator utama secara simultan. Sehingga program/kegiatan yang mempunyai dampak berganda dalam pemenuhan target kinerja utama daerah akan menjadi program prioritas daerah.

Berkaitan dengan indikator SPBE, terdapat perubahan regulasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2018 yang dicabut digantikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020, berdampak pada perubahan struktur penilaian SPBE. Perubahan struktur penilaian SPBE sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 6.1 Struktur Penilaian SPBE

Perubahan struktur tersebut, berdampak pada penilaian di tahun 2021 dan seterusnya, sehingga diperlukan harmonisasi target IKU. Adapun besaran nilai bergantung pada pemenuhan aspek oleh masing-masing Daerah dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan SPBE.

6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memperhatikan focus dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, beberapa indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 tidak tercantum dalam Dokumen RPJMD 2018-2023. Hal ini terjadi karena :

- 1. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB untuk memastikan definisi kinerja dan indikator kinerja yg ada pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra PD, Renja dan Perjanjian Kinerja telah berorientasi hasil (outcome) serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama.
- 2. Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah di seluruh Perangkat Daerah dan Unit di Sekretariat Daerah merupakan turunan atas indikator indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten untuk menunjukkan keterkaitan kinerja dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 3. Penuangan indikator SPM secara eksplisit.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 6.2  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PENDIDIKAN					Dinas Dikpora
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dikpora)	Indeks	85	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	%	114,75	SPM
			Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	%	101,8	SPM
			APK PAUD	%	90	
			APK Pendidikan Kesetaraan	%	1,42	
			APK SD/MI	%	101,8	
			APK SMP/MTs	%	114,75	
			APK SD/MI/Paket A	%	90	
			APK SMP/MTs/Paket B	%	1,42	
			Persentase sekolah terakreditasi A	%	74,36	
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	%	95,52	
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	%	95,1	
			Persentase pendidik Pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	%	70,06	
			Persentase pendidik Pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	%	38	
			Persentase sarpras dikdas dalam kondisi baik	%	95,28	
			Persentase sarpras Pendidikan non formal dalam kondisi baik	%	92,09	
			Jumlah warganegara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	
			Rata-rata kemampuan literasi SD	nilai	2,07	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Rata-rata kemampuan literasi SMP	nilai	2,03	
			Rata-rata kemampuan numerasi SD	Nilai	1,91	
			Rata-rata kemampuan numerasi SMP	Nilai	1,99	
			Jumlah warganegara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan anak usia dini	Persen	100	
2	KESEHATAN					Dinas Kesehatan, dan RSUD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Angka	85	
			Cakupan pelayanan BLUD (RSUD)	%	100	RSUD
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	%	100	
			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan / penjangkaran kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	%	100	SPM
			Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	SPM
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	%	92,7	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	%	92,7	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	100	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan rujukan	%	100	RSUD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Dinas PUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (PUPR)	Indeks	85	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	87,9	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	%	100	
			Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	%	100	SPM

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	
			Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	SPM
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66,00	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	%	60	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	%	60	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	92,83	
			persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	%	91,07	
			Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	%	89	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (PUPR)	Indeks	85	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang	%	100	
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas PKPLH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (PKPLH)	Indeks	85	
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	98,30	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	SPM
		Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,02	
			Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	SPM
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	98,30	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					Satpol PP, BPBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Pol PP)	Indeks	83,5	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	%	80	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	100	SPM
			Cakupan penegakan perda dan perkada	%	85	
			Rasio Linmas per Jumlah RT	nilai	1,34	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	86	
			Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupeten	%	100	
			Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	7	
			Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi	%	100	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	SPM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (BPBD)	Indeks	83,5	
		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan penanggulangan bencana sesuai standar	%	100	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	SPM
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	SPM
			Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	SPM



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
6	SOSIAL					Dinas Sos P3AP2KB
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Dinsos P3AP2KB)	Indeks	85	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	%	85	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	%	5,6	
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	SPM
			Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	SPM
			Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	SPM
			Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	SPM
			Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	SPM
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	%	75	
		Program Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	%	100	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP terpelihara	%	100	
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	TENAGA KERJA					Dinas Nakerinkop UKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Dinas NakerperinkopUKM)	Indeks	85	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	%	50	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	%	50	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	%	50	
		Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang terselesaikan	%	100	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					Dinas Sos P3AP2KB
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pekerja perempuan	%	60,97	
			Indeks Pemberdayaan Gender	%	67,54	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase pekerja perempuan	%	60,97	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pekerja perempuan	%	60,97	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	%	100	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	%	100	
3	PANGAN					Distan dan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan	%	90	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
4	PERTANAHAN					Dinas PUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	%	74,84	
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas tanah bersertifikat	%	74,84	
5	LINGKUNGAN HIDUP					Dinas PKPLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	67,77	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,77	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	8,20	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase penanganan volume sampah	%	72	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	50	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	%	5	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	%	5	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	50	
		Program Pengelolaan Persampahan	persentase penanganan volume sampah	%	72	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					Dinas Dukcapil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dinas Dukcapil)	Indeks	92	
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	100	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Capaian pengelolaan database kependudukan	%	100	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					Dinas PMD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Dinas PMD)	Indeks	85	
		Program Penataan Desa	jumlah TMMD/ Karya bhakti yang dilaksanakan	desa	3	
			Persentase Desa Bermasalah	%	10	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	%	100	
			Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	%	30	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa	produk hukum/ juknis	14	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	kegiatan	7	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					Dinas Sos P3AP2KB
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	14	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif	%	72	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Total Fertility Rate (TFR Rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya	%	2,01	
9	PERHUBUNGAN					Dishub
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dishub)	Indeks	85	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	Km/jam	40	
			persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	%	90	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Dinas Kominfo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dinas Kominfo)	Indeks	84	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	%	100	
		Program Aplikasi Informatika	Tata kelola SPBE	Indeks	2,43	
			Kebijakan Internal SPBE	Indeks	3,06	
			Layanan SPBE	Indeks	3,03	
11	KOPERASI DAN UKM					Dinas NakerinkopUKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase koperasi aktif	%	89	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	%	6	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	%	6	
12	PENANAMAN MODAL					DPMPTSP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (DPMPTSP)	Indeks	85	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal	%	100	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	10	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase pelayanan perizinan yang sesuai standar pelayanan	%	70	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi yang dilaporkan	Trilyun	3,497	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	%	90	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Dinas Dikpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	96,96	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	cakupan pembinaan olahraga	%	92	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	%	100	
14	STATISTIK					Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	%	100	
15	PERSANDIAN					Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	%	24	
16	KEBUDAYAAN					Dinas Budpar, Kecamatan
		Program Penunjang Urusan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat	Indeks	85	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	daerah (Dinas Budpar)			
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	50	
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah tema dokumentasi sejarah lokal	Tema	1	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	20	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan museum tingkat Kabupaten/Kota	%	100	
17	PERPUSTAKAAN					Dinas Arpus
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Arpus)	%	85	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	9,4	
			Persentase ketersediaan bahan pustaka	%	73,58	
18	KEARSIPAN					Dinas Arpus
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	%	32,00	
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					Distan dan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	100	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	100	
2	PARIWISATA					Dinas Budpar
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	%	10	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi pariwisata	%	15	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	%	10	
3	PERTANIAN					Distan dan Pangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat daerah	Indeks	85	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	%	100	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	%	100	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	100	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	%	100	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	%	100	
4	KEHUTANAN					Dinas PKPLH
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	persentase tutupan lahan	%	0,48	
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					DPMPSTP
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	%	100	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
6	PERDAGANGAN					Dinas Perdagangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dinas Perdagangan)	Indeks	85	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	%	4,50	
			Cakupan pengelolaan pasar rakyat	%	95	
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG	%	10	
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar rakyat	%	10	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	%	100	
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	Rp	1.657.570.000.000,-	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	%	95	
			Prosentase fasilitasi perlindungan konsumen	%	20	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	70	
7	PERINDUSTRIAN					Dinas Nakerinkop UKM
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,40	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,40	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,40	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
8	TRANSMIGRASI					Dinas Nakerinkop UKM
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase calon transmigran yang terfasilitasi	%	25	
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	SEKRETARIAT DAERAH					Setda
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Pemerintahan Setda)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Kesra)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Hukum)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Perekonomian Setda)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Adbang Setda)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Barjas Setda)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Umum Setda)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Organisasi Setda)	Indeks	85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Prokompim Setda)	Indeks	85	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan (Bag. Pemerintahan Setda)	%	100	
			Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra Setda)	%	100	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda (Bag.Hukum Setda)	%	90	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	%	85	
			Persentase Realisasi Kegiatan Pembangunan yang Tepat Waktu	%	90	
			Persentase pelaksanaan barang dan jasa	%	95	
2	SEKRETARIAT DPRD					Sekretariat DPRD
		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set. DPRD)	Indeks	85	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Agenda Kerja DPRD yang terealisasi	%	100	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	PERENCANAAN					BAPPEDA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	nilai	83,5	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu	%	100	
			Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan	%	100	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan bidang Pemsosbud Indeks kualitas Perencanaan Bidang praswil, Ekonomi, SDA	%	100	
2	KEUANGAN					BPPKAD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	%	85	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Tahapan/Proses Penganggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	%	90	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	%	100	
3	KEPEGAWAIAN					BKPP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BKPP)	%	85	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	%	100	
			Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Mutasi Rotasi dan Promosi, Pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan, Sistem Pendukung	Angka	220,5	
			Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	%	95	
			Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	%	100	
			Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	%	100	
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					BKPP
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	%	1,6	
			Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi	Angka	15	
			Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	%	46	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					BAPPEDA
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan hasil kelitbangan	%	100	
			Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	%	100	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	INSPEKTORAT DAERAH					Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Inspektorat)	%	83,5	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	%	100	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	%	100	
			Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti	%	100	
			Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	
			Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	
			Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat WBK WBBM	Nilai	32,4	
			Persentase realisasi progress PMPRB	%	100	
			Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	Nilai	3,5	
F	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					Kecamatan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	%	100	9 Kecamatan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	9 Kecamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Kota)	Indeks	83,5	Kec. Kota
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Kaliwungu)	Indeks	84,3	Kec. Kaliwungu
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Jati)	Indeks	81,5	Kec Jati
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Mejobo)	Indeks	83,5	Kec. Mejobo
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Bae)	Indeks	85	Kec. Bae

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Gebog)	Indeks	83	Kec. Gebog
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Undaan)	Indeks	81	Kec. Undaan
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Jekulo)	Indeks	83	Kec. Jekulo
			Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Dawe)	Indeks	86,2	Kec. Dawe
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	9 Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	9 Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan fasilitasi urusan pemerintahan umum	%	100	9 Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib umum	%	100	8 Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	%	100	9 Kecamatan
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					KANTOR KESBANGPOL
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Kesbang)	%	85	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter kebangsaan	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	%	100	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik masyarakat	%	100	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	100	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	%	100	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 memiliki makna yang cukup penting karena merupakan tahun terakhir penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Dengan demikian keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi sebuah dokumen perencanaan yang mampu memuat program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka penuntasan sasaran dan target pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Penyusunan RKPD ini berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pelaku pembangunan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta dampak dari pandemi Covid-19 juga turut mewarnai penyusunan dokumen ini.

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 dengan memperhatikan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia. Beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang dalam RKPD 2023 ini dapat tercapai sehingga mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Untuk itu diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan



Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 yaitu **"Kudus Bangkit menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera"**.

BUPATI KUDUS,



HARTOPO